



**PEMERINTAH KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN**



Drs. H. ACHMAD FIKRY, M.AP
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

SYAMSURI ARSYAD, S.AP, MA
WAKIL BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

LPPD Tahun **2022**



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**



Jalan Pangeran Antasari No.1 Kandangan Telp. (0517) Fax. 0517-21017

KANDANGAN 71211



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan Puji Syukur ke Hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2022 dapat diselesaikan sebelum batas waktu yang ditetapkan dalam ketentuan Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 20 Ayat (3) bahwa Bupati/wali kota menyampaikan LPPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Dan Pasal 70 Ayat (4) bahwa LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur digunakan oleh Pemerintah sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

Penyampaian LPPD ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah yang diberi mandat untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Penyampaian LPPD juga merupakan upaya strategis Pemerintah Daerah untuk mewujudkan *Good and Clean Governance* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun




LPPD Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sebagai sebuah laporan, LPPD ini berupaya menggambarkan Capaian Kinerja Makro, Capaian Kinerja pemerintahan dan Capaian SPM selama Tahun 2022, serta kendala yang dihadapi serta keberhasilan yang sudah dicapai.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2022 disampaikan. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan, kekuatan, rahmat dan karuniaNya kepada kita sekalian dalam memberikan pengabdian terbaik bagi Bangsa dan Negara serta Daerah dan Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang kita cintai, aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kandangan, 08 Maret 2023

 **BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

Drs. H. ACHMAD FIKRY, M.AP



DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.1.1. Penjelasan Umum	1
A. Undang-undang Pembentukan Daerah	1
B. Data Geografis Wilayah	3
C. Data Kependudukan	5
D. Jumlah Kecamatan dan Desa/ Kelurahan.....	7
E. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah Dan Pegawai Pemerintah.....	9
F. Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.....	14
1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah.....	15
A. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah	15
B. Visi Dan Misi Kepala Daerah.....	36
1. Visi	36
2. Misi	39
3. Tujuan Dan Sasaran	45
4. Program Prioritas	61



5. Program RKPD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 yang Mendukung Prioritas Daerah.....	77
6. Program RKPD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 yang Mendukung Prioritas Provinsi.....	85
7. Program RKPD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 yang Mendukung Prioritas Nasional.....	93

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	103
2.1. Capaian Kinerja Makro	103
2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia	103
2.1.2 Angka Kemiskinan	104
2.1.3 Angka Pengangguran.....	106
2.1.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi.....	107
2.1.5 Pendapatan Perkapita	109
2.1.6 Gini Ratio.....	110
2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.....	112
2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output).....	112
2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	186
2.2.3. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.....	206
2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.....	210
2.3.1. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja	211
2.3.2. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022	215
2.3.3. Analisis Capaian Kinerja Pemerintah Daerah.....	227
2.3.4. Akuntabilitas Keuangan	368



BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS

PEMBANTUAN.....	372
3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota	374
3.1.1. Target Kinerja	374
3.1.2. Realisasi	375
3.2. Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota	377
3.2.1. Target Kinerja	377
3.2.2. Realisasi	378
3.3. Permasalahan dan Kendala.....	380
3.4. Saran dan Tindak Lanjut	380

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN

MINIMAL.....	381
4.1. Urusan Pendidikan.....	382
4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar	382
4.1.2. Target Pencapaian SPM Oleh Daerah.....	382
4.1.3. Realisasi	388
4.1.4. Anggaran	393
4.1.5. Dukungan Personil.....	403
4.1.6. Permasalahan dan Solusi	404
4.2. Urusan Kesehatan	406
4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar	406
4.2.2. Target Pencapaian SPM Oleh Daerah.....	407
4.2.3. Realisasi	419
4.2.4. Alokasi Anggaran	430
4.2.5. Dukungan Personil.....	433
4.2.6. Permasalahan dan Solusi	433
4.3. Urusan Pekerjaan Umum	435
4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar	435



4.3.2. Target Pencapaian SPM Oleh Daerah.....	436
4.3.3. Realisasi.....	437
4.3.4. Alokasi Anggaran.....	442
4.3.5. Dukungan Personil.....	449
4.3.6. Permasalahan dan Solusi.....	449
4.4. Urusan Perumahan Rakyat.....	451
4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar.....	451
4.4.2. Target Pencapaian SPM Oleh Daerah.....	451
4.4.3. Realisasi.....	452
4.4.4. Alokasi Anggaran.....	459
4.4.5. Dukungan Personil.....	460
4.4.6. Permasalahan dan Solusi.....	460
4.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	461
4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar.....	461
4.5.2. Target Pencapaian SPM Oleh Daerah.....	463
4.5.3. Realisasi.....	466
4.5.4. Alokasi Anggaran.....	470
4.5.5. Dukungan Personil.....	483
4.5.6. Permasalahan dan Solusi.....	483
4.6. Urusan Sosial.....	484
4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar.....	484
4.6.2. Target Pencapaian SPM Oleh Daerah.....	486
4.6.3. Realisasi.....	491
4.6.4. Alokasi Anggaran.....	497
4.6.5. Dukungan Personil.....	502
4.6.6. Permasalahan dan Solusi.....	502
BAB V PENUTUP.....	505



DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1 Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 2022	5
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2022	6
Tabel 1.3 Pembagian Wilayah Administrasi dan Luas Daerah Menurut Kecamatan	8
Tabel 1.4 Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah Dan Pegawai Pemerintah	9
Tabel 1.5 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022	14
Tabel 1.6 Portal Website Pemkab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2022	26
Tabel 1.7 Perwujudan Visi RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023	36
Tabel 1.8 Penjabaran Janji Politik Kepala Daerah Terpilih Pada Program Prioritas Pembangunan Daerah	53
Tabel 1.9 Program Pembangunan Daerah Yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Hulu Sungai Selatan	58
Tabel 1.10 Pagu Indikatif Program Prioritas I	63
Tabel 1.11 Nama Program Prioritas I dan Pagu Indikatif Program Tahun 2019-2023	Per 63
Tabel 1.12 Pagu Indikatif Program Prioritas II	70
Tabel 1.13 Nama Program Prioritas II dan Pagu Indikatif Program Tahun 2019-2023	Per 70
Tabel 1.14 Pagu Indikatif Program Prioritas III	73
Tabel 1.15 Nama Program Prioritas III dan Pagu Indikatif Program Tahun 2019-2023	Per 73



Tabel 1.16	Rekapitulasi Pagu Indikatif RKPD untuk Dana Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022	75
Tabel 1.17	Rekapitulasi Program RKPD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 yang Mendukung Prioritas Daerah	77
Tabel 1.17	Rekapitulasi Program RKPD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 yang Mendukung Prioritas Provinsi	85
Tabel 1.17	Rekapitulasi Program RKPD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 yang Mendukung Prioritas Nasional	93
Tabel 2.1	Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Kostan dan Berlaku dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)	108
Tabel 2.2	Capaian Kinerja Makro Tahun 2022	111
Tabel 2.2	Capaian Kinerja Keluaran (Output)	112
Tabel 2.3	Capaian Kinerja Hasil (Outcome)	136
Tabel 2.4	Capaian Kinerja Hasil (Outcome) urusan penunjang	206
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022	212
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Tahun 2022	216
Tabel 2.7	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022	220
Tabel 2.8	Dimensi IPM Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2022	230
Tabel 2.9	Perbandingan Pertumbuhan dan Kenaikan HLS Kabupaten/Kota Se Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2022	233
Tabel 2.10	Perbandingan Pertumbuhan dan Kenaikan RLS Kabupaten/Kota Se Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2022	236



Tabel 2.11	Perbandingan Pertumbuhan dan Kenaikan UHH Kabupaten/Kota Se Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2022	242
Tabel 2.12	Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Nasional Tahun 2022	255
Tabel 2.13	Perkembangan dan Tingkat Kestabilan Harga Pangan Pokok dan Strategis Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022	256
Tabel 2.14	Capaian SPM Kesehatan Tahun 2022	264
Tabel 2.15	Perbandingan Realisasi Capaian SPM Tahun 2021 dan 2022	265
Tabel 2.16	Persentase Penduduk Miskin Prov. Kalimantan Selatan Menurut Kab/Kota Tahun 2018-2022	271
Tabel 2.17	Perkembangan Tingkat Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2022	273
Tabel 2.18	Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Hulu Sungai Selatan	276
Tabel 2.19	Gini Ratio Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Kabupaten/Kota	277
Tabel 2.20	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/ Kota Di Provinsi Kalimantan Selatan 2018-2022	283
Tabel 2.21	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Hulu Sungai selatan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (%), Tahun 2018–2022	286
Tabel 2.22	PDRB Perkapita Kabupaten Kota ADHB (ribu rupiah)	287
Tabel 2.23	Luas Panen, Produksi Dan Produktivitas Padi Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017-2022	293



Tabel 2.24	Luar Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021-2022	294
Tabel 2.25	Kontribusi Jumlah Kunjungan Wisatawan Kab. Hulu Sungai Selatan Terhadap Kunjungan Wisatawan di Provinsi Kalimantan Selatan	308
Tabel 2.26	Hasil Survey Kondisi Jalamn Kanbupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022	314
Tabel 2.27	Kondisi Jaringan Irigasi Kabupaten Tahun 2022	316
Tabel 2.28	Akses Terhadap Sarana Air Bersih Kabupaten/ Kota di Kalsel Tahun 2022	319
Tabel 2.29	Rekapitulasi Tingkat Perkembangan Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022	329
Tabel 2.30	Perkembangan Kategori Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2022	329
Tabel 2.31	Penghargaan Anegerah Parahita Ekapraya (APE) dan Kabuapten/Kota Layak Anak	337
Tabel 2.32	Capaian Predikat AKIP Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 s.d 2022	348
Tabel 2.33	Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran Tahun 2022	368
Tabel 3.1	Target Kinerja Tugas Pembantuan Pusat yang Diterima	375
Tabel 3.2	Realisasi Pelaksanaan program dan kegiatan Tugas Pembantuan	376
Tabel 3.3	Target Kinerja Penerimaan Tugas Pembantuan dari Provinsi Kalimantan Selatan	377
Tabel 3.4	Realisasi Penerimaan Tugas Pembantuan Dari Provinsi Kalimantan Selatan	378
Tabel 4.1	Target dan Indikator Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	385



Tabel 4.2	Pencapaian Pemenuhan SPM pada Pendidikan Anak Usia Dini Oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022	388
Tabel 4.3	Alokasi Anggaran SPM Bidang Pendidikan	393
Tabel 4.4	Personil Urusan Pendidikan dan Kebudayaan	403
Tabel 4.5	Jenis Layanan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	407
Tabel 4.6	Mutu Layanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	408
Tabel 4.7	Target Capaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2022	412
Tabel 4.8	Capaian SPM Bidang Kesehatan di Kab.HSS Tahun 2022	419
Tabel 4.9	Alokasi Anggaran SPM Bidang Kesehatan Tahun 2022	430
Tabel 4.10	Personil menurut kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan golongan	433
Tabel 4.11	Target SPM Bidang Pekerjaan Umum	437
Tabel 4.12	Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Sehari-hari Tahun 2022	438
Tabel 4.13	Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Penyediaan Pelayanan Air Limbah Domestik Tahun 2022	440
Tabel 4.14	Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022	441
Tabel 4.15	Alokasi Anggaran Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022	443
Tabel 4.16	Personil menurut kualifikasi Pendidikan, pangkat dan golongan	449
Tabel 4.17	Target SPM Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022	452
Tabel 4.18	Realisasi Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat	452



Tabel 4.19	Realisasi Capaian Program Pengembangan Perumahan.	457
Tabel 4.20	Personil menurut kualifikasi Pendidikan, pangkat dan golongan	460
Tabel 4.21	Target SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	463
Tabel 4.22	Realisasi Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	466
Tabel 4.23	Realisasi Capaian Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	471
Tabel 4.24	Personil Menurut Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Tahun 2022	483
Tabel 4.25	Personil Badan Penanggulangan Bencana Kab.HSS Tahun 2022	483
Tabel 4.26	Data PMKS/PPKS Hasil Validasi dan Verifikasi Tahun 2022	486
Tabel 4.27	Target Capaian SPM Urusan Sosial Tahun 2022	487
Tabel 4.28	Realisasi capaian urusan Sosial	492
Tabel 4.29	Realisasi Anggaran SPM Urusan Sosial Tahun 2022	498
Tabel 4.30	Personil menurut kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan golongan	502



DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1 Peta Kabupaten Hulu Sungai Selatan.....	4
Gambar 1.2 Perkembangan Jumlah Penduduk Kab. HSS 2017 - 2020	7
Gambar 1.3 Logicframe Perencanaan Misi 1.....	40
Gambar 1.4 Logicframe Perencanaan Misi 2.....	41
Gambar 1.5 Logicframe Perencanaan Misi 3.....	42
Gambar 1.6 Logicframe Perencanaan Misi 4.....	43
Gambar 1.7 Logicframe Perencanaan Misi 5.....	44
Gambar 1.8 Pondasi dan Pilar Misi Dalam Pencapaian Visi.....	45
Gambar 1.9 Desain Logical Framework Pencapaian Misi-1	46
Gambar 1.10 Desain Logical Framework Pencapaian Misi-2.....	47
Gambar 1.11 Desain Logical Framework Pencapaian Misi-3.....	48
Gambar 1.12 Desain Logical Framework Pencapaian Misi-4.....	49
Gambar 1.13 Desain Logical Framework Pencapaian Misi-5.....	50
Gambar 1.14 Ilustrasi Transformasi Agenda Politik Kepala Daerah	52
Gambar 1.15 Arsitektur Pemetaan Strategi Dalam Kebijakan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan	57



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai daerah otonom menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar maupun urusan pilihan serta tugas-tugas pembantuan yang diberikan. Berkaitan dengan penyelenggaraan urusan-urusan tersebut, dalam rangka transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka kepala daerah wajib untuk menyampaikan laporan berkenaan penyelenggaraan urusan-urusan tersebut baik kepada pemerintah pusat berupa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), kepada DPRD berupa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) maupun kepada masyarakat berupa Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD). Kewajiban ini dituangkan pada Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

1.1.1 PENJELASAN UMUM

A. UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH

Pada bulan April 1950 DR. Murdjani diangkat sebagai Gubernur Kalimantan. Kemudian karena Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah belum dapat sepenuhnya dilaksanakan, maka untuk sementara melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Juni 1950 Nomor C 7/15 wilayah Kalimantan dibagi menjadi



6 (enam) Kabupaten Administratif dan 3 (tiga) Swapraja. Salah satu diantaranya adalah Afdeling Van Hoeloe Soengai dibentuk menjadi Kabupaten Hulu Sungai dengan ibukotanya Kandangan.

Pembagian wilayah administratif tersebut tidak memuaskan rakyat karena yang diinginkan adalah terbentuknya Kabupaten Otonom sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Untuk itu sebagai langkah darurat Gubernur Kalimantan mengeluarkan Keputusan tanggal 14 Agustus 1950 Nomor 186/OPB/92/14 yang menetapkan peraturan sementara tentang pembagian daerah-daerah otonom Kabupaten dan daerah-daerah otonom setingkat Kabupaten. Kabupaten Hulu Sungai yang semula hanya bersifat Administratif menjadi Kabupaten Otonom. Keadaan ini terus berlangsung meskipun tanggal 17 Agustus 1950 terjadi perubahan ketatanegaraan dari Negara RIS menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah dibentuk dengan melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Nomor 186/OPB/92/ tanggal 14 Agustus 1950 tentang Pembagian Daerah-Daerah Otonom Kabupaten dan Daerah-Daerah Otonom Setingkat Kabupaten Di Provinsi Kalimantan. Berdasarkan keputusan ini Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang pada awalnya (berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Juni 1950 Nomor C 17/15) hanya bersifat Daerah Administratif ditetapkan menjadi sebuah Kabupaten Otonom. Keputusan ini kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820).



Secara *de facto* Kabupaten Hulu Sungai Selatan terbentuk pada tanggal 2 Desember 1950, yakni tanggal dimana dilantiknya Pejabat Bupati Kepala Daerah Pertama serta dibentuknya DPRDS. Penetapan tanggal ini kemudian diperingati sebagai Hari Jadi Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dikukuhkan dengan Ketetapan DPRD Tingkat II Hulu Sungai Selatan tanggal 26 Maret 1987 Nomor 06 KPTS/DPRD-HSS/1987 tentang Persetujuan Ketetapan Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

Tanggal 2 Desember 2022 merupakan Hari Jadi Ke-72 Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan tahun ke 4 (empat) kepemimpinan pasangan Drs. H. Achmad Fikry, M.AP dan Syamsuri Arsyad, S.AP., MA yang menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Terpilih periode 2018-2023 berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor :131.63-5862 Tahun 2018 dan Nomor : 132.63-5863 Tahun 2018 yang dilantik pada tanggal 19 September 2018.

B. DATA GEOGRAFIS WILAYAH

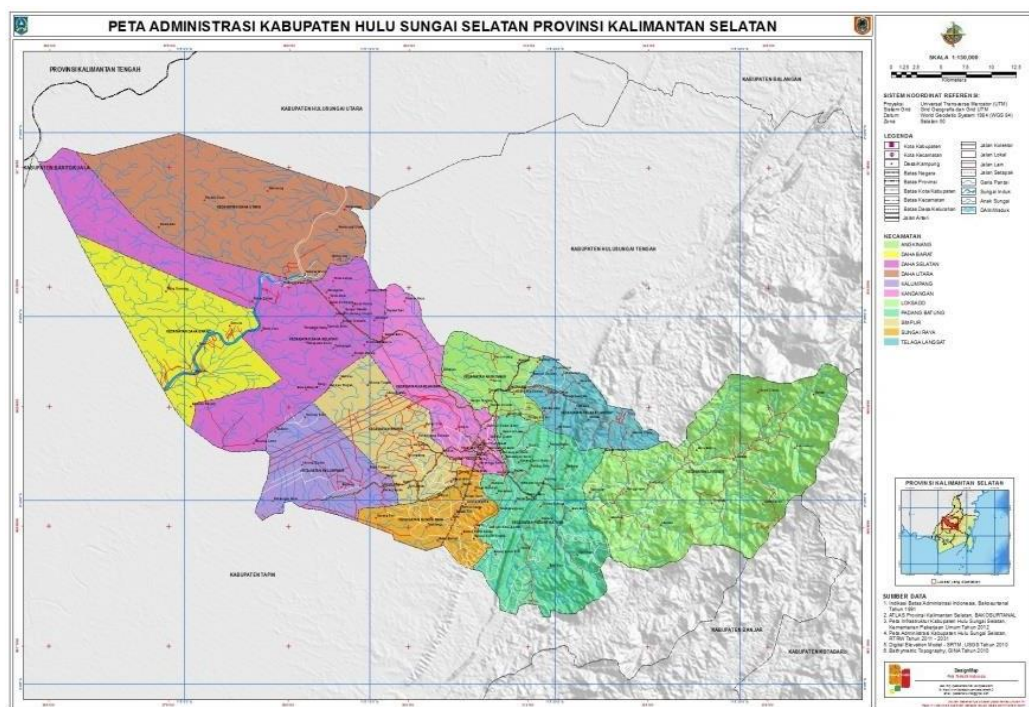
Secara geografis Kabupaten Hulu Sungai Selatan terletak di antara: -02029'58" sd -02056'10" Lintang Selatan dan 114051'19" sd 115036'19" Bujur Timur. Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan salah satu Kabupaten dari 13 (tiga belas) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang terletak kearah Utara ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan dengan jarak 135 Km. Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berbatasan di sebelah utara dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah; di sebelah selatan dengan Kabupaten Tapin; di sebelah Timur dengan Kabupaten Banjar,



Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru; sebelah Barat dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tapin.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan luas wilayah 180.494Ha memiliki 11 (sebelas) Kecamatan. yaitu Kecamatan Padang Batung, Loksado, Telaga Langsat, Angkinang, Kandangan, Sungai Raya, Simpung, Kalumpang, Daha Selatan, Daha Utara dan Daha Barat.

Gambar 1.1
Peta Kabupaten Hulu Sungai Selatan



Secara geologis daerah ini terdiri dari pegunungan yang memanjang dari arah timur ke selatan, namun dari arah barat ke utara merupakan dataran rendah alluvial yang kadang-kadang berawa-rawa. Sepanjang tahun 2022 rata-rata kelembaban udara berkisar antara 74,90 persen sampai dengan 83,40 persen. Sedangkan rata-rata suhu udara berkisar antara 27,60°C - 28,90°C. Dilihat dari jumlah hari hujan per bulan selama 2022 disetiap post,



hujan paling sering terjadi di bulan Januari, November dan Desember. Sementara hari hujan paling sedikit terjadi pada bulan Juli dan Agustus, sedangkan rata-rata suhu terendah sekitar 22,60°C pada bulan Pebruari.

Tabel 1.1

Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Kabupaten
Hulu Sungai Selatan, 2022

BULAN	SUHU UDARA			KELEMBABAN UDARA		
	Min	Max	Rata2	Min	Max	Rata2
1	2	3	4	5	6	7
Januari	22,60	32,70	27,60	58,30	98,50	78,40
Pebruari	22,90	32,70	27,80	63,30	98,00	80,60
Maret	23,40	32,90	28,20	62,00	98,50	80,30
April	23,40	33,10	28,20	60,30	98,00	79,10
Mei	24,00	33,70	28,90	58,30	98,50	78,40
Juni	23,40	33,50	28,50	57,80	100,00	78,90
Juli	23,40	33,60	28,50	54,30	99,50	76,90
Agustus	22,50	34,80	28,10	51,80	98,00	74,90
September	23,30	34,00	28,60	54,80	98,50	76,60
Oktober	23,60	33,60	28,60	59,00	98,50	78,80
November	23,80	33,70	28,70	56,00	98,00	77,00
Desember	23,70	33,00	28,30	68,80	98,00	83,40

Sumber : Kab. HSS dalam Angka, 2022

C. KEPENDUDUKAN

Jumlah Penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan Hasil Konsolidasi Data dari Kementerian Dalam Negeri Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 243.132 jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan tersebar pada 11 (sebelas) Kecamatan. Adapun jumlah penduduk pada masing-masing Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan
Tahun 2022

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin		KK	Total
		Laki-laki	Perempuan		
1.	Sungai Raya	9.332	9.485	6.909	18.817
2.	Padang Batung	11.405	11.416	8.028	22.821
3.	Telaga Langsat	5.489	5.455	3.840	10.944
4.	Angkinang	10.003	9.992	6.877	19.995
5.	Kandangan	25.726	26.071	18.110	51.797
6.	Simpur	8.019	8.217	5.850	16.236
7.	Daha Selatan	22.308	21.560	14.132	43.868
8.	Daha Utara	17.439	16.851	10.813	34.290
9.	Kalumpang	3.496	3.370	2.463	6.866
10.	Loksado	4.690	4.484	2.964	9.174
11.	Daha Barat	4.265	4.059	2.634	8.324
Total		122.172	120.960	82.620	243.132

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. HSS, 2022

Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari tahun ketahun mengalami perubahan kenaikan, pada tahun 2014 sebanyak 5.557 jiwa dan tahun 2015 kenaikan sebanyak 3.373 jiwa. Sedangkan pada tahun 2016 data jumlah penduduk 263.107 mengalami penurunan jika dibandingkan data tahun 2015 sebanyak 263.909, menurun sebanyak 802 jiwa. Untuk tahun 2017 mengalami kenaikan sebanyak 950 jiwa sehingga menjadi 264.057 jiwa. Kemudian untuk Tahun 2018 data kependudukan adalah 240.547, hal ini karena sejak tahun 2018 ada keharusan untuk melihat data kependudukan berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kementerian Dalam Negeri Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tidak lagi melihat kepada data pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dan untuk tahun 2019 jumlah penduduk sebanyak 234.936 jiwa. Jika dibandingkan dengan



angka tahun sebelumnya tahun 2018 240.547 ada penurunan sebesar 5.611. Sebenarnya data jumlah penduduk bukan menurun tetapi karena kegiatan dari Dinas Dukcapil bekerjasama dengan para Kepala Desa/ Lurah mengaktifkan laporan kematian. Tahun 2020 data jumlah penduduk sebanyak 237.794 orang, bertambah sebesar 2.858 atau 0.98 persen. Pada Tahun 2021 data jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan berjumlah 240.020 jiwa bertambah sebanyak 2.226 atau 0.93 persen. Sedangkan pada Tahun 2022 bertambah sebanyak 3.112 jiwa menjadi 243.132 jiwa penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Selengkapnya rincian mengenai perkembangan jumlah penduduk dapat dilihat pada Grafik di bawah ini.



Sumber : Dinas Dukcapil Kab. HSS, 2022.

D. JUMLAH KECAMATAN DAN DESA/ KELURAHAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Kecamatan Dan Kelurahan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri



dari 11 (sebelas) kecamatan dan 4 (empat) kelurahan, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3
Pembagian Wilayah Administrasi dan Luas Daerah
Menurut Kecamatan

Kecamatan	Jumlah		Luas (Km ²)	Persentase
	Desa	Kelurahan		
1. Padang Batung	17	-	203,93	11,30
2. Loksado	11	-	338,89	18,78
3. Telaga Langsung	11	-	58,08	3,22
4. Angkinang	11	-	58,40	3,24
5. Kandangan	14	4	106,71	5,91
6. Sungai Raya	18	-	80,96	4,49
7. Simpur	11	-	82,35	4,56
8. Kalumpang	9	-	135,07	7,48
9. Daha Selatan	16	-	322,82	17,88
10.Daha Utara	19	-	268,11	14,85
11.Daha Barat	7	-	149,62	8,29
Hulu Sungai Selatan	144	4	1.804,94	100,00

Sumber : BPS Kab. HSS, 2022

Dari sebelas kecamatan yang ada, daerah yang paling luas adalah Kecamatan Loksado dengan luas mencapai 338,89 km² atau 18,78 persen, selanjutnya Kecamatan Daha Selatan 322,82 km² (17,8%), Kecamatan Daha Utara 268,11 km² (14,85%), Kecamatan Padang Batung 203,93 km² (11,30%), sedangkan Kecamatan yang mempunyai luas terkecil adalah Kecamatan Telaga Langsung yang hanya memiliki luas 58,08 km² atau 3,22 persen luas wilayah Kab. Hulu Sungai Selatan.

**E. JUMLAH PERANGKAT DAERAH, UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH DAN PEGAWAI PEMERINTAH**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat dan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah Dan Pegawai Pemerintah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4

Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah Dan Pegawai Pemerintah

NO	DINAS / INSTANSI PEMERINTAHAN	SD	SLTP	SLTA	DI-DIII	D.IV	S.1	S.2	JLH	GOL I	GOL II	GOL III	GOL IV	JLH
1	SEKRETARIAT DAERAH	0	0	0	1	0	1	5	7	0	0	2	5	7
2	BAGIAN UMUM	1	0	21	3	0	4	0	29	1	17	10	1	29
3	BAGIAN PEMERINTAHAN	0	0	1	1	0	2	1	5	0	0	4	1	5
4	BAGIAN HUKUM	0	0	0	0	0	5	1	6	0	0	4	2	6
5	BAGIAN ORGANISASI	0	0	0	1	0	4	2	7	0	0	5	2	7
6	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	0	0	2	4	1	4	0	11	0	4	6	1	11
7	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	0	0	1	3	1	17	2	24	0	1	22	1	24
8	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	0	1	2	0	0	4	0	7	0	3	3	1	7
9	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	0	0	5	1	1	1	1	9	0	2	6	1	9



LPPD Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

NO	DINAS / INSTANSI PEMERINTAHAN	SD	SLTP	SLTA	DI-DIII	D.IV	S.1	S.2	JLH	GOL I	GOL II	GOL III	GOL IV	JLH
10	SEKRETARIAT DPRD	0	0	6	4	0	9	3	22	0	7	11	4	22
11	INSPEKTORAT	0	1	4	2	0	29	15	51	0	3	33	15	51
12	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	1	2	11	8	0	20	6	48	1	13	27	7	48
13	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0	0	10	5	1	16	4	36	0	10	24	2	36
14	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	0	5	1	0	8	1	15	0	1	10	4	15
15	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0	1	6	3	0	2	1	13	0	6	6	1	13
16	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	0	1	3	2	0	11	4	21	1	3	13	4	21
17	RSUD BRIG. JEND. H. HASAN BASRY KANDANGAN	4	5	18	241	38	170	57	533	9	132	364	28	533
18	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	3	3	49	1	0	11	2	69	5	38	23	3	69
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0	0	6	6	1	12	2	27	0	7	15	5	27
20	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0	0	2	4	1	9	5	21	0	3	14	4	21
21	DINAS PERHUBUNGAN	1	0	11	2	0	8	3	25	1	7	14	3	25
22	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0	0	10	7	0	14	3	34	0	11	18	5	34



LPPD Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

NO	DINAS / INSTANSI PEMERINTAHAN	SD	SLTP	SLTA	DI-DIII	D.IV	S.1	S.2	JLH	GOL I	GOL II	GOL III	GOL IV	JLH
23	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	0	1	7	9	3	26	3	49	0	13	33	3	49
24	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0	0	4	1	0	11	2	18	0	5	9	4	18
25	DINAS PERDAGANGAN	0	0	8	14	0	12	4	38	0	13	18	7	38
26	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	8	15	35	8	1	16	6	89	17	35	34	3	89
27	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0	1	5	4	1	8	4	23	0	2	17	4	23
28	DINAS KESEHATAN	1	0	4	18	5	14	5	47	1	4	36	6	47
29	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	0	3	1	0	11	3	18	0	2	13	3	18
30	DINAS PERIKANAN	0	0	4	3	0	12	1	20	0	4	12	4	20
31	DINAS KETAHANAN PANGAN	0	0	2	3	1	9	4	19	0	1	12	6	19
32	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	0	0	4	1	1	10	2	18	0	3	11	4	18
33	DINAS SOSIAL	0	0	11	2	0	12	2	27	0	4	19	4	27
34	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	0	0	6	1	0	13	4	24	0	6	13	5	24
35	DINAS PERTANIAN	0	1	51	7	3	95	3	160	1	39	94	26	160
36	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1	0	6	4	0	62	10	83	0	3	45	35	83
37	KECAMATAN KANDANGAN	0	2	6	1	0	7	1	17	0	5	11	1	17



LPPD Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

NO	DINAS / INSTANSI PEMERINTAHAN	SD	SLTP	SLTA	DI-DIII	D.IV	S.1	S.2	JLH	GOL I	GOL II	GOL III	GOL IV	JLH
38	KECAMATAN SIMPUR	0	0	7	2	0	3	4	16	0	4	8	4	16
39	KECAMATAN TELAGA LANGSAT	1	1	1	0	0	6	1	10	1	2	6	1	10
40	KECAMATAN SUNGAI RAYA	0	0	11	0	1	6	0	18	0	7	10	1	18
41	KECAMATAN KALUMPANG	0	0	6	2	1	6	0	15	0	2	12	1	15
42	KECAMATAN ANGKINANG	0	1	9	0	0	10	0	20	0	4	15	1	20
43	KECAMATAN PADANG BATUNG	0	0	4	2	0	9	1	16	0	3	12	1	16
44	KECAMATAN DAHA UTARA	0	0	4	2	0	6	3	15	0	5	9	1	15
45	KECAMATAN DAHA SELATAN	0	0	6	0	0	5	1	12	1	5	6	0	12
46	KECAMATAN LOKSADO	0	1	3	3	1	4	0	12	1	5	6	0	12
47	KECAMATAN DAHA BARAT	0	0	1	3	0	3	1	8	0	1	6	1	8
48	KELURAHAN KANDANGAN KOTA	0	0	4	0	0	4	0	8	0	0	8	0	8
49	KELURAHAN KANDANGAN UTARA	0	0	7	2	0	4	0	13	0	3	10	0	13
50	KELURAHAN JAMBU HILIR	0	0	2	3	0	2	0	7	0	1	6	0	7
51	KELURAHAN KANDANGAN BARAT	0	0	6	0	0	3	0	9	0	0	8	1	9
52	RSUD DAHA SEJAHTERA	0	1	4	54	5	12	9	85	1	23	60	1	85
53	PUSKESMAS ANGKINANG	0	1	8	22	1	5	3	40	0	7	32	1	40
54	INSTALASI FARMASI	0	0	1	3	0	0	1	5	0	1	3	1	5
55	PUSKESMAS BATANG KULUR	0	0	4	27	1	4	0	36	0	14	21	1	36
56	PUSKESMAS BAJAYAU	0	0	1	24	0	7	0	32	0	20	12	0	32
57	PUSKESMAS BARUH JAYA	0	0	2	16	3	2	3	26	0	5	21	0	26
58	PUSKESMAS BAMBAN	0	0	3	15	1	3	2	24	0	3	21	0	24
59	PUSKESMAS BAYANAN	0	0	1	14	1	4	2	22	0	6	16	0	22
60	PUSKESMAS GAMBAH	0	0	0	20	3	7	0	30	0	6	22	2	30



LPPD Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

NO	DINAS / INSTANSI PEMERINTAHAN	SD	SLTP	SLTA	DI-DIII	D.IV	S.1	S.2	JLH	GOL I	GOL II	GOL III	GOL IV	JLH
61	PUSKESMAS JAMBU HILIR	0	0	5	20	4	5	1	35	0	3	30	2	35
62	PUSKESMAS KALIRING	0	0	7	17	2	2	1	29	0	2	26	1	29
63	PUSKESMAS KALUMPANG	0	0	2	21	2	8	0	33	0	10	23	0	33
64	PUSKESMAS KANDANGAN	0	0	7	22	6	5	0	40	0	7	28	5	40
65	PUSKESMAS LOKSADO	0	1	0	14	3	8	0	26	0	11	15	0	26
66	PUSKESMAS MALINAU	0	0	1	12	1	2	0	16	0	8	8	0	16
67	PUSKESMAS NEGARA	0	0	4	16	4	8	2	34	0	7	25	2	34
68	PUSKESMAS PASUNGGAN	0	0	2	11	0	4	0	17	0	5	12	0	17
69	PUSKESMAS PADANG BATUNG	0	0	4	20	3	4	2	33	0	4	27	2	33
70	PUSKESMAS SIMPUR	0	0	2	29	3	15	1	50	0	19	29	2	50
71	PUSKESMAS SUNGAI PINANG	0	0	0	11	0	6	2	19	0	4	14	1	19
72	PUSKESMAS SUNGAI RAYA	0	0	3	17	3	4	0	27	0	2	24	1	27
73	PUSKESMAS TELAGA LANGSAT	0	0	3	24	0	2	0	29	0	9	20	0	29
74	PUSKESMAS WASAH	0	0	3	13	2	3	0	21	0	3	16	2	21
75	UPTD SKB	0	0	3	0	0	6	0	9	0	0	7	2	9
76	SLTP	1	3	16	27	0	302	15	364	2	11	238	113	364
77	SD	5	8	117	75	0	1400	13	1618	3	97	1087	431	1618
78	TK	0	0	9	8	0	62	0	79	0	7	46	26	79
JUMLAH		27	51	612	948	110	2640	240	4628	46	743	3016	823	4628

Sumber : BKPSDM Kab. HSS, 2022

**F. REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Target pendapatan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 1.381.523.564.269,00 atau naik sebesar Rp.105.754.232.912,00 (8,28%) dari Target Pendapatan Tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 1.275.769.331.357,00. Sedangkan realisasi pendapatan tahun 2022 sebesar Rp. 1.574.664.804.698,00 atau 113,98% dari target yang ditetapkan. Dimana Pendapatan Daerah meliputi : Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 166.648.956.469,88 atau 80,74%, Pendapatan Transfer sebesar Rp. 1.407.539.305.788,00 atau 119,78%, lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp. 476.542.441,00 atau 1891,04%.

Target belanja daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 1.595.686.712.689,00 dan realisasinya sebesar Rp. 1.406.172.817.766,05 atau 88,12%. Dimana realisasi belanja daerah meliputi : Belanja Operasi sebesar Rp. 1.011.406.759.445,50 atau 86,94%, Belanja Modal sebesar Rp. 200.986.167.284,55 atau 88,68%, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 2.515.261.000,00 atau 17,92% dan Belanja Transfer sebesar Rp. 191.264.630.036,00 atau 99,81%.

Rincian detail target dan realisasi pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.5
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022

NO	URAIAN	JUMLAH		%
		TARGET	REALISASI	
A	PENDAPATAN DAERAH	1.381.523.564.269,00	1.574.664.804.698,88	113,98
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	206.391.856.348	166.648.956.469,88	80,74
1.1	Pajak daerah	16.618.459.998	17.300.630.533,90	104,10
1.2	Retribusi daerah	9.865.558.800	6.954.800.741,00	70,50
1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	6.709.172.614	6.709.172.614,00	100,00
1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	173.198.664.936	135.684.352.580,98	78,34
2	PENDAPATAN TRANSFER	1.175.106.507.921	1.407.539.305.788,00	119,78
2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.098.096.718.921	1.287.225.546.539,00	117,22
2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	77.009.789.000	120.313.759.249,00	156,23
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	25.200.000	476.542.441,00	1891,04
3.1	Pendapatan hibah	25.200.000	476.542.441,00	1891,04



LPPD Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan	0	0,00	0,00
B	BELANJA DAERAH	1.595.686.712.689,00	1.406.172.817.766,00	88,12
1	Belanja Operasi	1.163.390.841.357,00	1.011.406.759.445,50	86,94
1.1	Belanja Pegawai	554.991.508.132,00	491.956.699.591,00	88,64
1.2	Belanja Barang	545.688.294.270,00	467.215.117.319,50	85,62
1.3	Belanja Hibah	42.133.430.655,00	33.834.437.635,00	80,30
1.4	Belanja Bantuan Sosial	20.577.608.300,00	18.400.504.900,00	89,42
2	Belanja Modal	226.635.028.763,00	200.986.167.284,55	88,68
2.1	Belanja Tanah	12.925.000.000,00	117.926.000,00	0,91
2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	47.561.437.225,00	43.016.838.873,00	97,16
2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	71.159.078.700,00	69.140.162.932,55	97,16
2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan jaringan	94.117.230.338,00	88.189.776.279,00	93,70
2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	872.282.500,00	521.463.200,00	59,78
3	Belanja Tidak Terduga	14.033.415.569,00	2.515.261.000,00	17,92
3.1	Belanja Tidak Terduga	14.033.415.569,00	2.515.261.000,00	17,92
4	Transfer	191.627.427.000,00	191.264.630.036,00	99,81
4.1	Bagi Hasil Pajak	1.528.865.000,00	1.528.865.000,00	100,00
4.2	Bagi Hasil Retribusi	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	100,00
4.3	Belanja Bantuan Keuangan	188.998.562.000,00	188.635.765.036,00	99,81
C.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	224.163.148.420,00	224.206.368.418,74	100,02
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	224.163.148.420,00	224.163.148.418,74	100,00
1.2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	43.220.000,00	100,00
D.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.000.000.000	10.000.000.000	100,00
1.1	Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000.000	10.000.000.000	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	214.163.148.420,00	214.206.368.418,74	100,02
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	380.140.060.980,57	100,00

Sumber : BPKPD Kab HSS (LRA TA 2022, Data diambil 13 januari 2023)

1.1.2. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

A. PERMASALAHAN STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.



Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dalam kerangka keterpaduan perencanaan pembangunan nasional, regional dan daerah. Oleh karena itu tahap awal dari perencanaan pembangunan daerah dimulai dengan melakukan analisis terhadap hasil pembangunan dan permasalahannya. Tujuannya adalah agar perencanaan pembangunan daerah dapat bersinergi dan memberikan kontribusi dalam pemecahan permasalahan pembangunan baik di daerah, regional maupun tingkat nasional. Perspektif selama 5 tahun ke depan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018–2023 didasarkan pada kondisi objektif saat ini dan masa lalu dan diprediksi kedepan. Prediksi dilakukan terhadap indikator - indikator pembangunan yang bersifat makro. Perspektif Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk lima tahun kedepan dijabarkan kedalam permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis.

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (gap) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Perumusan masalah pokok merupakan masalah yang bersifat makro bagi daerah, masalah pokok dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran strategis.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan sebuah “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan apa yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan tersebut dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum diperdayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum



teratasi, peluang yang belum dimanfaatkan secara optimal, serta ancaman yang belum diantisipasi.

Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Beberapa permasalahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan data dan informasi capaian pembangunan 5 (lima) tahun disajikan sebagai berikut :

1. Kesejahteraan Masyarakat

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2013 menunjukkan angka 5.68 persen dan naik menjadi 5.79 persen pada tahun 2014, meningkat pada tahun 2015 menjadi 6.05 persen. Kontribusi PDRB kategori pertambangan batubara yang besar sangat mempengaruhi besar kecilnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kondisi perekonomian yang mulai menanjak naik sejak tahun 2016 pada angka 6.05 persen dan berlanjut ke Tahun 2017 menjadi 6.13 persen, 2018 sebesar 6,14 persen dan tahun 2019 menjadi 5,32 persen yang mana ini terjadi perlambatan pertumbuhan karena pengaruh beberapa sektor yang mengalami tekanan karena adanya pengaruh global ekonomi sehingga masih tetap membutuhkan dorongan yang besar untuk terus bertumbuh pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini dibutuhkan untuk menciptakan perekonomian daerah yang kuat dan inklusif, dimana dapat memberikan pengaruh yang luas bagi seluruh masyarakat dengan mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki Hulu Sungai Selatan.

- b. Persentase penduduk miskin di Hulu Sungai Selatan masih cukup tinggi bila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan. Data menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Hulu Sungai Selatan berada pada tahun 2013 berada pada angka 6,67 persen, jauh diatas provinsi yang berada di angka 4,73 persen, meningkat menjadi 6,77 persen pada tahun 2014, pada tahun 2015 menurun menjadi 6,45 persen, penurunan



kembali terjadi pada tahun 2016 menjadi 6.29 persen, dan kembali menurun pada tahun 2017 menjadi 5.8 persen, penurunan kembali terjadi pada tahun 2018 menjadi 5,21 persen dan tahun 2019 menjadi 5,4 persen dan tahun 2020 menjadi 5,17 persen. Walau demikian, terdapat sisi positif dari upaya pemerintah bersama seluruh stakeholder untuk penanggulangan masalah kemiskinan selama beberapa tahun terakhir. Hal ini ditunjukkan dengan terjadi penurunan tingkat kemiskinan di Hulu Sungai Selatan pada periode 2014 sampai 2020.

- c. Angka kriminalitas di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2013 sebesar 395 kasus, cenderung mengalami fluktuatif pada tahun-tahun berikutnya. Angka Kriminalitas pada tahun 2015 terdapat 148 kasus, 2016 terdapat 214 kasus, 2017 terdapat 232 kasus, 2018 terdapat 254 kasus, 2019 terdapat 272 kasus dan pada 2020 terdapat 234 kasus.

Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebab banyaknya kasus kriminalitas yang belum tertangani bisa berakibat pada perkembangan psikologis masyarakat dan mengurangi rasa nyaman dan aman kehidupan masyarakat. Sedangkan masih tingginya angka kriminalitas perlu dikurangi dengan perbaikan masalah-masalah sosial ekonomi, pengurangan pengangguran, pendidikan moral maupun yang berhubungan dengan hak dan kewajiban setiap warga negara.

2. Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu indikator untuk melihat kesejahteraan masyarakat suatu wilayah karena tingkat pendidikan mencerminkan kualitas sumber daya manusia. Permasalahan bidang Pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat realisasi tahun 2020 sebesar 87,79% masih belum mencapai target yaitu sebesar 89,17%. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Sederajat sebesar 74,68% dan target sebesar 79,45%. Kesenjangan antara target dan capaian bidang pendidikan menggambarkan masih adanya penduduk usia jenjang pendidikan SMP sederajat yang belum diserap pada jenjang pendidikan tersebut.



3. Bidang Kesehatan

Sektor kesehatan merupakan salah satu hal prioritas yang sangat mempengaruhi berbagai macam hal lainnya dalam kehidupan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi pada bidang kesehatan yaitu:

Sektor kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam 2 (dua) tahun terakhir menggambarkan permasalahan kesehatan ibu dan anak menjadi masalah penting. Kematian ibu dan bayi semakin meningkat dari 2 tahun terakhir. Persalinan yang ditangani tenaga kesehatan mencapai target namun kematian ibu dan bayi masih tinggi yang mencerminkan masih rendahnya kualitas pelayanan kesehatan. Untuk itu diperlukan upaya kesehatan yang bersifat reformatif dan akseleratif yang ditujukan untuk peningkatan akses, kualitas pelayanan kesehatan dan kesehatan lingkungan terutama dalam menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan bayi (AKB), perbaikan gizi masyarakat, peningkatan umur harapan hidup, pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta pemberdayaan masyarakat.

4. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Aspek pelayanan umum dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga dapat dilihat dari sarana prasarana umum seperti jaringan jalan, irigasi. Permasalahan utama pada bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yaitu:

- a. Proporsi Panjang Jaringan Jalan untuk jalan kabupaten adalah sepanjang 859,36 Km dengan jalan beraspal sepanjang 545,04 Km, jalan kerikil sepanjang 125,58 Km, jalan tanah sepanjang 107,53 Km, jalan beton sepanjang 81,15 Km. Jalan kabupaten dalam kondisi baik sepanjang 412,45 Km, dalam kondisi sedang sepanjang 155,08 Km, dalam kondisi rusak sepanjang 157,49 Km dan kondisi rusak berat sepanjang 134,34 Km.
- b. Realisasi pencapaian SPM air minum dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik masih belum mencapai 100%, cakupan SPAM pada tahun 2018 sebesar 74,65% dan 2019 sebesar 84,66% dan 2020 sebesar 89,97%. Persentase rumah tangga layanan pengolahan air limbah domestik tahun 2020 sebesar 82,35%.



- c. Realisasi capaian kinerja dari rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten, pada tahun 2020 sebesar 80 % masih di bawah target 100%.
- d. Realisasi capaian indikator kinerja rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi pada tahun 2020 sebesar 100%.

5. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman mempunyai target pencapaian 100% untuk SPM penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota, dan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Penanganan sampah masih belum optimal, hal ini terlihat dari Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk masih sangat rendah, yaitu pada kisaran 1,17. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus karena jika tidak segera dilakukan tindakan maka penumpukan timbunan sampah akan terus terjadi sehingga dikhawatirkan akan menyebabkan gangguan lingkungan dan ekologi.

Realisasi capaian kinerja dari rasio Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah pada tahun 2020 sebesar 24,88% dan persentase taman dalam kondisi baik adalah 67,44%. dan indikator kinerja Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) pada tahun 2020 sebesar 90,14%.

6. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Jenis pelayanan dasar untuk Standar Pelayanan Minimal sub urusan Bencana mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, yaitu:

- a. Pelayanan informasi rawan bencana:
 - 1) penyusunan kajian risiko bencana
 - 2) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala kabupaten.



- 3) Komunikasi Informasi dan Edukasi rawan bencana
- b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
- 1) penyusunan rencana penanggulangan bencana
 - 2) pembuatan rencana kontingensi;
 - 3) pelatihan pencegahan dan mitigasi;
 - 4) gladi kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - 5) pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
 - 6) penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
- c. Penyelamatan dan evakuasi korban bencana
- 1) respons cepat kejadian luar biasa penyakit /wabah zoonosis prioritas;
 - 2) respons cepat darurat bencana;
 - 3) aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana;
 - 4) pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana; dan
 - 5) pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.
- d. Satuan Polisi Pamong Praja :
- 1) Pelayanan ketenteraman dan ketertiban Umum; dan
 - 2) Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Realisasi dari target SPM masih belum mencapai 100%.

7. Bidang Sosial

Permasalahan utama bidang sosial tidak terlepas dari masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Permasalahan sosial di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu meningkatnya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Capaian kurang dari 100% pada indikator Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti dikarenakan tidak lolos verifikasi dan validasi data ataupun pindah domisili. Capaian kurang dari 100% pada indikator Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti dikarenakan tidak lolos verifikasi dan validasi data, meninggal atau pindah domisili. Capaian kurang dari 100% pada indikator Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti dikarenakan



sebagian gepeng tidak mengalami perubahan perilaku setelah ditertibkan dan menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengemis lagi, atau ada yang kembali lagi setelah dipulangkan ke daerah asalnya.

8. Bidang Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja Permasalahan pada bidang tenaga kerja meliputi:

- a. Tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami peningkatan dari tahun 2017 sebesar 71,38, tahun 2018 meningkat menjadi 72,15% dan tahun 2019 meningkat lagi menjadi 71,49. Namun peningkatan ini dirasakan masih belum optimal karena indikator kinerja pada persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi tahun 2019 hanya mencapai 77,16%, indikator kinerja pada persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) pada tahun 2019 sebesar 92%, realisasi capaian indikator kinerja pada tingkat produktivitas tenaga kerja pada tahun 2019 sebesar 91,23%, realisasi indikator kinerja pada persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten tahun 2019 sebesar 93,98%. Realisasi capaian indikator kinerja pada Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama oleh Mediator Hubungan Industrial 83,33%.
- b. Meningkatnya tingkat pengangguran terbuka dari tahun 2017 sebesar 2,02% dan tahun 2018 menjadi 2,43% dan tahun 2019 menjadi 2,56% dan pada tahun 2020 menjadi 2,24%, Terdapat penurunan pada tingkat pengangguran terbuka pada penduduk usia produktif menandakan bahwa serapan tenaga kerja cukup baik. Namun dikarenakan adanya pandemi covid-19 ada kemungkinan terjadinya peningkatan status pengangguran dikarenakan besarnya tekanan yang ada pada sektor ekonomi khususnya sektor industri.

.9. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Beberapa hal yang menjadi permasalahan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yaitu:



- a. Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2015 sebesar 88,36, pada tahun 2016 sebesar 89,08, pada tahun 2017 sebesar 89,07, tahun 2018 sebesar 89,10, tahun 2019 sebesar 89,21, dan pada tahun 2020 sebesar 89,23 (Data BPS pada 08 Maret 2021).
- b. Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2014 sebesar 60,41% kemudian tahun 2015 menjadi 60,38% dan tahun 2017 menjadi 61,10%. Tahun 2018 sebesar 60,48%, tahun 2019 sebesar 54,50% dan tahun 2020 sebesar 53,82% (Data BPS pada 05 Mei 2021).
- c. Realisasi capaian indikator kinerja partisipasi angkatan kerja perempuan pada tahun 2020 sebesar 61,98 %, masih rendah jika dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja perempuan tahun 2020.
- d. Terkait status kota layak anak, Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2014 menyandang sebagai status kota layak anak Rintisan, artinya Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih harus berkomitmen menuju kota layak anak dan pada tahun 2017-2019 masih berstatus pratama selama 3 (tiga) tahun. Adanya pandemi covid-19 menyebabkan penilaian Kota Layak Anak pada tahun 2022 diundur ke tahun 2021

10. Bidang Pangan

Permasalahan bidang pangan adalah masih perlunya mengoptimalkan bahan pangan lokal yang memenuhi kebutuhan gizi penduduk setempat dengan mempertimbangkan keseimbangan gizi (nutritional balance) didukung oleh cita rasa (palatability), daya cerna (digestability), daya terima masyarakat (acceptability), kualitas dan kemampuan daya beli (affordability).

11. Bidang Pertanahan

Selain jumlah luas lahan yang bersertifikat pada tahun 2019 sebesar 76,24%, penyelesaian kasus tanah negara juga harus diselesaikan dengan baik. Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum. Realisasi capaian indikator kinerja tahun 2019 pada persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum, sebesar 23%. dan realisasi capaian indikator kinerja pada persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan



luas izin lokasi yang diterbitkan pada tahun 2019 sudah mencapai 100% namun hal ini masih perlu upaya untuk mempertahankan capaian realisasi. Capaian realisasi indikator kinerja pada indikator tersedianya tanah obyek landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee sebesar 56% rata-rata penerima menerima sebidang tanah seluas 3100 m² (31%).

12. Bidang Lingkungan Hidup

Beberapa permasalahan bidang lingkungan hidup yaitu:

- a. Kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami tren peningkatan, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang fluktuatif dari tahun 2015 yang mencapai sebesar 58.86, turun menjadi 56.02 pada tahun 2015 Pada tahun 2016 IKLH kembali turun walaupun tidak begitu signifikan sebesar 54.05 karena masih belum mampu melebihi IKLH tahun 2014, dan pada tahun 2017 naik menjadi 54.55, tahun 2019 sebesar 55,96, tahun 2019 sebesar 55,96%. Pada tahun 2020 terdapat cara perhitungan baru untuk menghitung IKLH, pada tahun 2020 IKLH Kabupaten Hulu Sungai Selatan mencapai 67,04.
- b. Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten pada tahun 2020 sebesar 75,13% dan realisasi capaian indikator kinerja ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten 87,50%. Dari data tersebut dapat diketahui pengelolaan sampah dan ketaatan penanggung jawab usaha terhadap izin lingkungan sudah cukup baik dan harus selalu ditingkatkan.

13. Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Permasalahan utama pada bidang ini dari realisasi capaian indikator kinerja pada persentase penduduk usia 0 - 18 tahun yang mempunyai akta kelahiran pada tahun 2020 mencapai 100% dan realisasi capaian indikator kinerja pada persentase penduduk berumur dari 17 tahun ke atas yang mempunyai KTP Elektronik 95,92%. Masih terdapat gap antara target 100% dan realisasi capaiannya.



14. Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana

Permasalahan utama yang dihadapi adalah realisasi indikator kinerja pada indikator TFR (Angka Kelahiran Total) tahun 2020 sebesar 2,51, Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) pada tahun 2020 sebesar 100%, Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) pada tahun 2020 sebesar 79,47%, Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) pada tahun 2020 sebesar 44,54%.

15. Bidang Perhubungan

Belum optimalnya penyediaan dan pelayanan transportasi publik, hal ini terlihat dari terjadinya Penurunan jumlah AKBD, angkutan perbatasan dan angkutan desa menjadi permasalahan utama di bidang perhubungan. Realisasi capaian kinerja rasio konektivitas kabupaten pada tahun 2020 untuk aspek rasio konektivitas kabupaten/kota adalah 0,41 dan V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota adalah 0,61.

16. Bidang Komunikasi dan Informatika

Permasalahan utama adalah realisasi dari target indikator kinerja pada persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo mencapai 100%, indikator kinerja untuk persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi tahun 2020 sebesar 83,33%, realisasi indikator kinerja pada persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten tahun 2020 sebesar 73,36%. dan indikator kinerja pada peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e- government tahun 2019 sebesar 100%. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa implementasi e-government sudah ada regulasi yang mengaturnya.

SPBE merupakan singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.



Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE dapat mempercepat peningkatan keterpaduan dan efisiensi dalam melaksanakan SPBE. Kebijakan ini memiliki tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik. Yakni penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK yang merupakan sebuah layanan pemerintah agar supaya dapat mendorong dan mewujudkan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif dan akuntabel. Serta adanya integrasi aplikasi sebagai penerapan tata kelola fasilitas pemerintahan yang baik dalam pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, pelayanan publik yang berkualitas dan kapasitas akuntabilitas kinerja birokrasi yang tinggi.

Dinas Kominfo Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah membangun portal dan aplikasi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah dalam rangka pelayanan publik. Di masa mendatang pelayanan SPBE oleh Diskominfo akan lebih ditingkatkan baik dalam kualitas maupun dalam kuantitasnya, hal ini untuk menjawab kebutuhan Daerah maupun Perangkat Daerah.

Tabel 1.6
Portal Website Pemkab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2022

No.	Portal	Alamat Website	Nama SKPD
1	Portal Web Pemkab HSS	www.hulusungaiselatankab.go.id	Diskominfo
2	Web Bappelitbangda	bappelitbangda.hulusungaiselatankab.go.id	Bappelitbangda
3	Web BPKPD	bakeuda.hulusungaiselatankab.go.id	BPKPD
4	Web Inspektorat	inspektorat.hulusungaiselatankab.go.id	Inspektorat
5	Web Sekre DPRD	setwan.hulusungaiselatankab.go.id	Setwan
6	Web Diskominfo	diskominfo.hulusungaiselatankab.go.id	Diskominfo
7	Web BKPSDM	bkpsdm.hulusungaiselatankab.go.id	BKPSDM
8	Web RSUD Hasan Basry	rsudhasanbsary.hulusungaiselatankab.go.id	RSUD Hasan Basry



9	Web Dinkes	dinkes.hulusungaiselatankab.go.id	Dinkes
10	Web Dinas PUTR	putr.hulusungaiselatankab.go.id	Dinas PUTR
11	Web Dinas PMPTSP	dpmpstsp.hulusungaiselatankab.go.id	Dinas PMPTSP
12	Web Dinas PPKBPPPA	dppkbpppa.hulusungaiselatankab.go.id	Dinas PPKBPPPA
13	Web Dinas Pendidikan	disdik.hulusungaiselatankab.go.id	Dinas Pendidikan
14	Web PPID	ppid.hulusungaiselatankab.go.id	Diskominfo
15	Web BPBD	bpbd.hulusungaiselatankab.go.id	BPBD
16	Web JDIH	jdih.hulusungaiselatankab.go.id	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
17	Web Dissos	dissos.hulusungaiselatankab.go.id	Dinas Sosial
18	Web Disdukcatpil	disdukcatpil.hulusungaiselatankab.go.id	Disdukcatpil
19	Web Dinas Perikanan	diskan.hulusungaiselatankab.go.id	Dinas Perikanan
20	Web Dinas PMD	pmd.hulusungaiselatankab.go.id	Dinas PMD
21	Web DisnakerUKMP	disnakerkukmp.hulusungaiselatankab.go.id	DisnakerUKMP
22	Web Dispersip	dispersip.hulusungaiselatankab.go.id	Dispersip
23	Web Dinas Perdagangan	disdag.hulusungaiselatankab.go.id	Dinas Perdagangan
24	Web Kesbangpol	kesbangpol.hulusungaiselatankab.go.id	Kesbangpol

Sumber : Diskominfo Kab. Hulu Sungai Selatan, 2020 (diolah)

17. Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Permasalahan bidang KUKM adalah walaupun ada peningkatan Koperasi yang berkualitas tahun 2020 sebesar 78,39% namun masih berada di bawah target 100%, indikator kinerja koperasi sehat pada tahun 2020 sebesar 3,18% sesuai target dan indikator kinerja pada meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha masih sebesar 78,22% tahun 2020.

18. Bidang Penanaman Modal

Persentase peningkatan investasi di Kabupaten pada tahun 2020 sebesar 20,70% rendahnya capaian dikarenakan kondisi pandemi covid-19 yang menyebabkan para investor menahan diri untuk melakukan investasi dikarenakan situasi pandemi yang belum pasti di tahun 2020.



19. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri pada tahun 2020 yaitu 5,91% kemudian indikator tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan tahun 2020 sebesar 13,21%, Peningkatan prestasi olahraga atas perolehan medali pada tahun 2020 sebanyak 16 medali.

20. Bidang Persandian

Permasalahan persandian pada realisasi capaian indikator kinerja pada tingkat keamanan informasi pemerintah pada tahun 2020 sebesar 30%. Hal ini masih perlu ditingkatkan pada tahun mendatang. .

21. Bidang Kebudayaan

Realisasi indikator kinerja pada indikator kinerja terlestarikannya Cagar Budaya pada tahun 2020 sebesar 100%. Pada urusan kebudayaan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan erat kaitannya dengan kepariwisataan sebagai daya tarik wisata. Sehingga bidang ini perlu berbenah dan mengoptimalkan capaian indikatornya.

22. Bidang Perpustakaan

Permasalahan utama dari urusan ini terdapat pada realisasi capaian indikator kinerja nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat pada tahun 2020 sebesar 53,6%, dan realisasi capaian indikator kinerja pada persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dikelola dan dilestarikan sudah mencapai 100% sehingga tetap diperlukan kinerja untuk lebih memantapkan capaiannya.

23. Bidang Kearsipan

Permasalahan utama pada kearsipan yaitu pada indikator tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps 40 dan 59 UU 43/2009) pada tahun 2020 sebanyak 75 arsip.

24. Bidang Kelautan dan Perikanan



Permasalahan utama di bidang kelautan dan perikanan, antara lain menurunnya produktivitas kolam, produksi budidaya minapadi (budidaya ikan di sawah) dan produktivitas minapadi. Hal ini terjadi karena budidaya minapadi sangat tergantung pada ketersediaan lahan dan air dari usaha utama bercocok tanam padi. Kondisi ini mengakibatkan budidaya minapadi agak sulit untuk berkembang. Sementara dari realisasi indikator kinerja jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) kabupaten pada tahun 2020 sebanyak 15.707,16 Ton. Untuk ke depannya akan lebih ditingkatkan lagi.

25. Bidang Pariwisata

Permasalahan utama bidang pariwisata adalah kontribusi sektor pariwisata hingga saat ini belum khusus menjadi kategori lapangan usaha PDRB. Selain itu, jika dibandingkan dengan data tahun sebelumnya terjadi penurunan kunjungan wisatawan mancanegara. Hal ini karena obyek wisata alam dan obyek wisata buatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan belum dikelola secara profesional, terutama sarana dan prasarana, kualitas sumber daya pemandu wisata dan informasi kepariwisataan juga masih belum memadai sehingga belum bisa meningkatkan jumlah pengunjung dan belum dapat memberi kontribusi terhadap pendapatan daerah.

26. Bidang Pertanian

Permasalahan di bidang pertanian antara lain:

- a. Luas areal padi dari tahun 2012 sampai 2020 memiliki perkembangan yang fluktuatif. Hal ini disebabkan anomali iklim sehingga banyak areal pertanian yang tidak dapat ditanami karena tingginya genangan air. Dengan demikian, apabila ingin mempertahankan dan meningkatkan luas areal padi maka perlu diupayakan adanya tata air yang bagus terhadap lahan pertanian.
- b. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2016 sebesar 4,83%, tahun 2017 sebesar 1,67%, tahun 2018 sebesar 4,33% dan tahun 2019 sebesar 2,97% dan tahun 2020 sebesar 0,03%. Tren pertumbuhan fluktuatif dan cenderung menurun untuk tahun 2020 dikarenakan pandemi covid-19.
- c. Nilai Tukar Petani di Kabupaten Hulu Sungai Selatan masing-masing memiliki perkembangan yang cenderung menurun dari tahun ke tahun



terakhir menunjukkan peningkatan dari realisasi tahun 2014 yaitu 99,83%, menjadi 99,99% pada tahun 2015, mencapai 97,52% pada tahun 2016 dan tahun 2017 capaian sebesar 96,69% dan terus mengalami penurunan dari tahun sampai dengan 2019 menjadi 95,07% pada tahun 2020 NTP meningkat menjadi 100,98%. Namun permasalahan yang masih dihadapi oleh petani yakni mahalnya harga sarana produksi pertanian dan fluktuatifnya harga komoditas pertanian. Sehingga upaya tindak lanjut yang perlu dipertimbangkan adalah dengan memberikan subsidi atau insentif bagi petani.

27. Bidang Perdagangan

Permasalahan utama bidang perdagangan adalah belum optimalnya angka kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB. Pada awal periode tahun 2015 mencapai 4,76%, tahun 2016 sebesar 4,60%, tahun 2017 sebesar 5,25%, tahun 2018 sebesar 4,84% dan tahun 2019 sebesar 4,96% dan tahun 2020 sebesar -2,39%. Peningkatan pelayanan guna mendorong kegiatan sektor perdagangan sangat diperlukan, salah satunya adalah kegiatan pembinaan dan pelayanan legalisasi usaha perdagangan. Realisasi indikator kinerja persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) pada tahun 2020 sebesar 95,47%, indikator kinerja pada persentase kinerja realisasi pupuk sebesar 100% pada tahun 2020. Pada indikator Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku pada tahun 2020 sebesar 80,34%.

28. Bidang Perindustrian

Permasalahan utama perindustrian terletak pada indikator kinerja Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP pada tahun 2020 sebesar 100%, sementara untuk indikator kinerja Pertambahan jumlah industri Kecil di Kabupaten mencapai 100%, Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait pada tahun 2020 sebesar 0%.



Isu Strategis Pembangunan Daerah

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Permasalahan Daerah yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.

Untuk menganalisis permasalahan Daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Daerah pada tahun 2022 dirumuskan dengan melihat kembali prioritas Pembangunan dan Sasaran Pembangunan RKPD Tahun yang lalu, yaitu :

Permasalahan Pembangunan Daerah dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2022

Perspektif pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama tahun 2018-2023 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018–2023 didasarkan pada kondisi objektif saat penyusunan perencanaan pembangunan dibuat dan masa lalu dan diprediksi ke depan.

Prediksi dilakukan terhadap indikator - indikator pembangunan yang bersifat makro. Berdasarkan tema **“Memantapkan Pemulihan Ekonomi & Sosial yang Berkontribusi terhadap Pemerataan Pendapatan Masyarakat dengan Memperhatikan Lingkungan”** maka prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- 1) Pembangunan Manusia melalui Peningkatan Pelayanan Dasar;
- 2) Peningkatan Produktivitas Sosial dan Ekonomi;
- 3) Pembangunan SDA dan Lingkungan Hidup;
- 4) Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas; dan
- 5) Peningkatan Kualitas Birokrasi dan Pelayanan Publik.



Berdasarkan dengan 5 (lima) prioritas pembangunan tersebut di atas dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 di atas, maka ditetapkan target pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan mengacu pada target RKPD Provinsi Kalimantan Selatan terhadap Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.39 Target Indikator Makro Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2022

NO	Indikator Makro	Target Tahun 2022
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,02 – 71,86
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	1,75 – 1,99 %
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,5 – 5,90 %
4	Tingkat Kemiskinan	4,54 – 4,8 %
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,41 – 69,61

Sumber : Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan 2021

Analisis permasalahan pembangunan menurut pencapaian indikator kinerja makro daerah menjadi masalah pokok perencanaan pembangunan yang akan menjadi sasaran pembangunan daerah. Untuk itu perlu diketahui sasaran pembangunan adalah hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Hingga akhir tahun 2022, berbagai isu-isu dan permasalahan pembangunan terjadi baik yang skala nasional, provinsi maupun di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Isu penanganan stunting masih menjadi salah satu trending topic sepanjang tahun 2022, pada awal triwulan I tahun 2020 terjadi pandemi COVID 19 yang melanda banyak negara termasuk Indonesia. Permasalahan pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

**Tabel 2.40 Capaian dan Target Indikator Makro RKPD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2022**

No.	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2020	Target Tahun 2021
1	Indeks Pembangunan Manusia	68,85	71.08
A	Harapan Lama Sekolah	12,17 Tahun	13.08 Tahun
B	Rata-Rata Lama Sekolah	7,74 Tahun	8,33 Tahun
C	Angka Harapan Hidup	65,97 Tahun	66,54
D	Pengeluaran Perkapita	Rp.12.672.000	Rp.13.210.000
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	-1.19 %	6,23 %
3.	Indeks Gini	0,299	0,275
4.	Tingkat Kemiskinan	5,17 Persen	5,40 Persen
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,24 Persen	2,53 Persen
6.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67.04**	68.41

** Cara Perhitungan Baru

Sumber : Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 (diolah)

Dari tabel di atas dapat dianalisis bahwa pada indikator kinerja makro pembangunan daerah masih terjadi kesenjangan atau gap antara target dan capaian, kecuali untuk indikator kualitas lingkungan hidup dan indeks gini yang telah melampaui target.

Selanjutnya diperlukan suatu perumusan permasalahan pembangunan daerah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.

Dalam memahami pencapaian Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan RPJMD ke dalam pelaksanaan pembangunan



dilakukan evaluasi RPJMD yang menggunakan beberapa metode sesuai peraturan dan kaidah empiris yang berlaku.

Pengukuran pencapaian target sasaran RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan memakai metode pengukuran yang juga dipakai untuk evaluasi RPJMN (Nasional) dan Evaluasi RPJMD Prov. Kalsel. Metode ini menggambarkan perbandingan antara realisasi dan target RPJMD dengan dibantu beberapa parameter berupa interval nilai capaian, kriteria penilaian capaian dan warna kriteria capaian, untuk memudahkan interpretasi realisasi Sasaran RPJMD seperti yang tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.41 Skala Nilai Peringkat Kinerja Capaian RPJMD Tahun 2022

	Interval Nilai Capaian Kinerja (%)	Kriteria Penilaian	Warna Kriteria	Keterangan
	91% ≤ 100%	Sangat Baik/Tinggi		Biru
	76% ≤ 90%	Baik/Tinggi		Hijau
	66% ≤ 75%	Sedang		Kuning
	51% ≤ 65%	Rendah		Jingga
	≤ 50%	Sangat Rendah		Merah

Sumber : Permendagri No. 86 Tahun 2017

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut :

- 1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi. Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
- 2) Hasil Sedang. Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
- 3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah. Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi atau masih di bawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.



2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Beberapa permasalahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan data dan informasi capaian pembangunan dalam beberapa tahun sebelumnya. Dalam penerapan rencana pembangunan daerah, akan timbul permasalahan karena adanya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan target sasaran pembangunan yang direncanakan (RTRW, RPJMD atau RPJPD).

Adanya kesenjangan ini juga terjadi karena adanya perbedaan antara target pembangunan ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil daerah saat dokumen rencana sedang disusun. Permasalahan pembangunan daerah ini harus identifikasi sehingga dapat dicari solusinya, dalam rangka penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan. Permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan sumber daya (potensi daerah) yang belum dimanfaatkan secara optimal, kelemahan yang belum dapat diatasi, peluang yang belum dapat dimanfaatkan serta tantangan dari luar daerah yang tidak diantisipasi.

**B. VISI DAN MISI KEPALA DAERAH****1. VISI**

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi pembangunan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk periode RPJMD 2018-2023 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut.

“Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis untuk Mewujudkan Kesejahteraan Duniadan Akhirat”.

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional maupun global. Perumusan dan penjelasan terhadap visi yang dimaksud, menghasilkan pilar-pilar visi yang diterjemahkan pengertiannya, sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 1.7 Perwujudan Visi RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023

Pilar-Pilar Visi	Perwujudan dari Pilar Visi RPJMD
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Hulu Sungai Selatan	Peningkatan kapasitas dan kualitas suatu daerah melalui pembangunan SDM yang unggul merupakan tugas bersama dalam menciptakan bangsa yang kuat dan Negara yang makmur. Melalui SDM yang unggul, tangguh dan berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian suatu daerah, namun juga dalam mendukung



Pilar-Pilar Visi	Perwujudan dari Pilar Visi RPJMD
	<p>pembangunan nasional. Peningkatankualitas SDM terutama diupayakan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pendidikan yang berkualitas, berkarakter, bermoral dan berakhlak mulia.2. Layanan kesehatan yang terjangkau, merata, dan berkualitas
Meningkatnya Perekonomian dan Kemandirian Masyarakat Hulu Sungai Selatan	<p>Modal untuk melakukan pembangunan ekonomi adalah adanya pertumbuhan ekonomi, sehingga pembangunan ekonomi akan tercapai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Partisipasimasyarakat memiliki peran penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendapatan perkapita, sehingga melalui tercapainya pembangunan ekonomi maka akan berdampak kepada perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Basis ekonomi Hulu Sungai Selatan diletakkan pada 3 komponen utama yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pertanian dalam skala luas yang meliputi pertanian tanaman pangan, perikanan (Perikanan tangkap dan perikanan budidaya), perkebunan, peternakan, dan hortikultura,2. Pariwisata alam dan budaya dengan segala kekhasannya di Hulu Sungai Selatan,3. UMKM dan perdagangan tradisional yang menjadi mata pencaharian sebagian besar masyarakat. <p>Mandiri dan majunya suatu daerah tentu bersumber dari kemandirian dan kemajuan rakyatnya dan oleh sebab itu kemandirian masyarakat adalah gerbang utama menuju kemajuan dan kesejahteraan. Kemandirian daerah akan memacu kemampuan produktif guna memenuhi kebutuhan dasar dan mekanisme untuk tetap dapat bertahan dalam situasi kritis.</p>
Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (<i>Good</i>)	<p>Menghadirkan tata kelola yang efektif, bersih, dan melayani. Dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan birokrasi pemerintah Kabupaten Hulu</p>



Pilar-Pilar Visi	Perwujudan dari Pilar Visi RPJMD
<i>Governance</i>) dan Pemerintahan yang Bersih (<i>Clean Government</i>)	Sungai Selatan yang prima, menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayanan masyarakat yang didukung dengan kompetensi aparat yang professional dan system modern berbasis IPTEK menuju tatakelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>) dan pemerintahan yang bersih (<i>Clean Government</i>).
Masyarakat Hulu Sungai Selatan yang Semakin Sejahtera dunia & akhirat berlandaskan semangat gotong royong	<p>Terciptanya keadaan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang agamis ditandai dengan suasana kondusif dan religius yang sudah menjadi ciri dan identitas masyarakat Hulu Sungai Selatan selama ini. Oleh karenanya sangat penting untuk menjaga dan mempertahankan nilai-nilai keagamaan yang menjadi ciri masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.</p> <p>Pembangunan kabupaten diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan lahir dan batin melalui peningkatan partisipasi dan kerjasama seluruh lapisan masyarakat. Kesejahteraan yang ingin diwujudkan merupakan kesejahteraan yang berbasis pada ketahanan keluarga dan lingkungan sebagai dasar pengokohan sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya, meliputi rohani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada</p>



Pilar-Pilar Visi	Perwujudan dari Pilar Visi RPJMD
	<p>masyarakat Kabupaten Hulu Sungai selatan untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik.</p> <p>Semangat gotong royong didalamnya terkandung nilai moral yaitu adanya rasa ikhlas untuk berpartisipasi, kebersamaan dan saling membantuantar sesama karena lebih mengutamakan kepentingan bersama yang akan berdampak meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.</p>

2. MISI

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 berorientasi pada pembangunan dan peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang terdapat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam segala bidang, guna menyiapkan perekomonian Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Dalam rangka perwujudan Visi Pembangunan yang telah ditetapkan diatas, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

1. Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya.
2. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal.
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik dan sosial yang menunjang sektor perekonomian.
4. Mengoptimalkan sumber daya daerah, berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.



5. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis.

Lima butir misi diatas didasarkan kepada kebutuhan pembangunan daerah. Dalam upaya penyamaan persepsi terhadap misi tersebut serta mengurangi ambiguitas dalam memahami butir misi maka penjabaran misi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut.

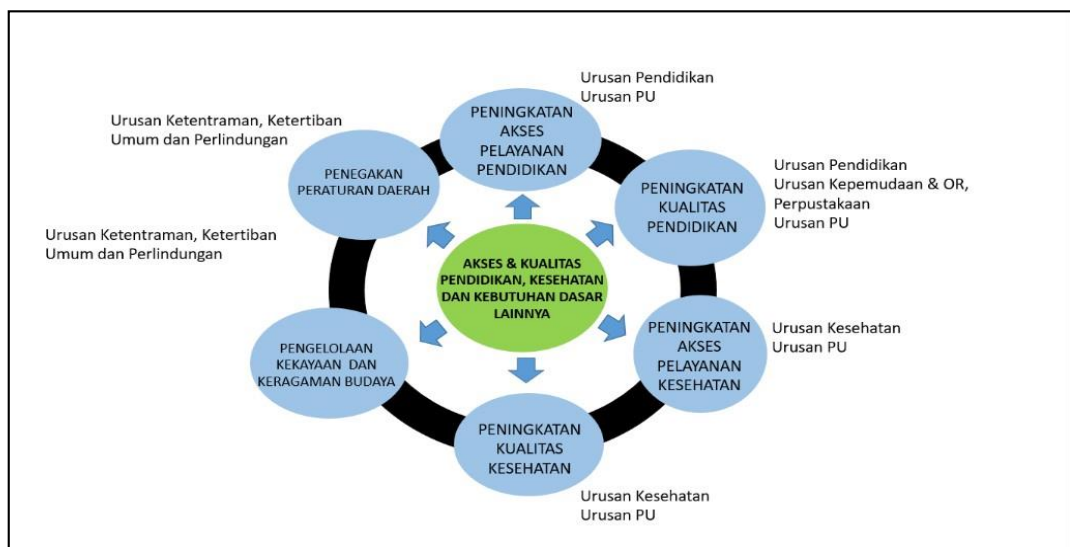
Misi 1 : Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya.

Salah satu variabel yang sangat menentukan tercapainya upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah luasnya jangkauan akses pelayanan dasar yang didukung oleh infrastruktur yang memadai. Ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar seperti pelayanan pendidikan dan kesehatan menjadi prasyarat terwujudnya pelayanan dasar yang optimal.

Dalam upaya pencapaian misi ke-1 maka dirumuskan Perencanaan Terintegratif dalam langkah pencapaian misi ke-1 sebagai berikut.

Gambar 1.3

Logicframe Perencanaan Misi 1





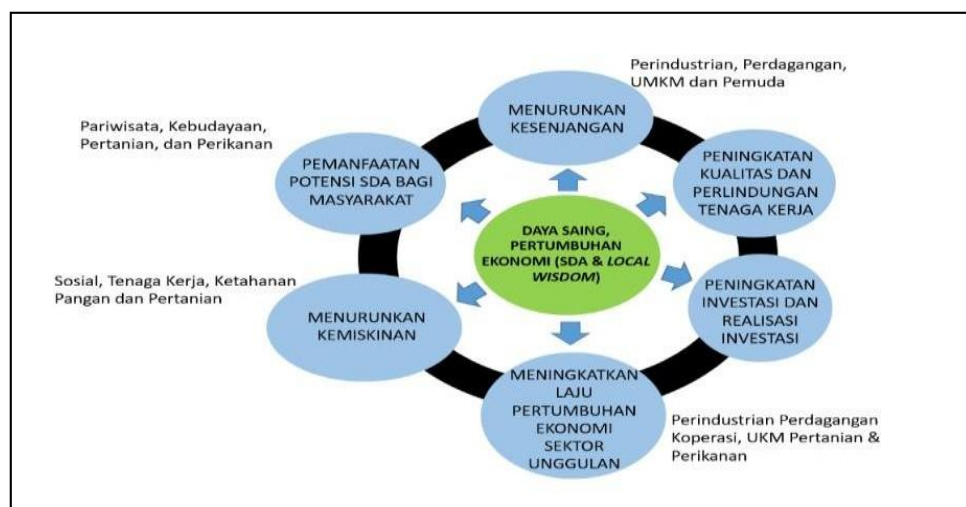
Misi 2: Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal.

Kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah di bumi Hulu Sungai Selatan baik yang tersimpan di dalam maupun dipermukaan bumi serta potensi sungai mampu menambah nilai guna ekonomi bagi kehidupan masyarakat. Nilai guna tersebut diperoleh melalui pengembangan inovasi dan teknologi serta membuka peluang investasi bagi pihak swasta baik dalam maupun luar negeri.

Dalam upaya pencapaian misi ke-2 maka dirumuskan perencanaan terintegratif dalam langkah pencapaian misi ke-2 sebagai berikut.

Gambar 1.4

Logicframe Perencanaan Misi 2



Misi 3: Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik dan sosial yang menunjang sektor perekonomian.

Pembangunan infrastruktur perannya sangat sentral dalam upaya mendukung keberhasilan pembangunan berbagai sektor di daerah sehingga berbagai sektor unggulan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat memberikan kontribusinya terhadap pertumbuhan

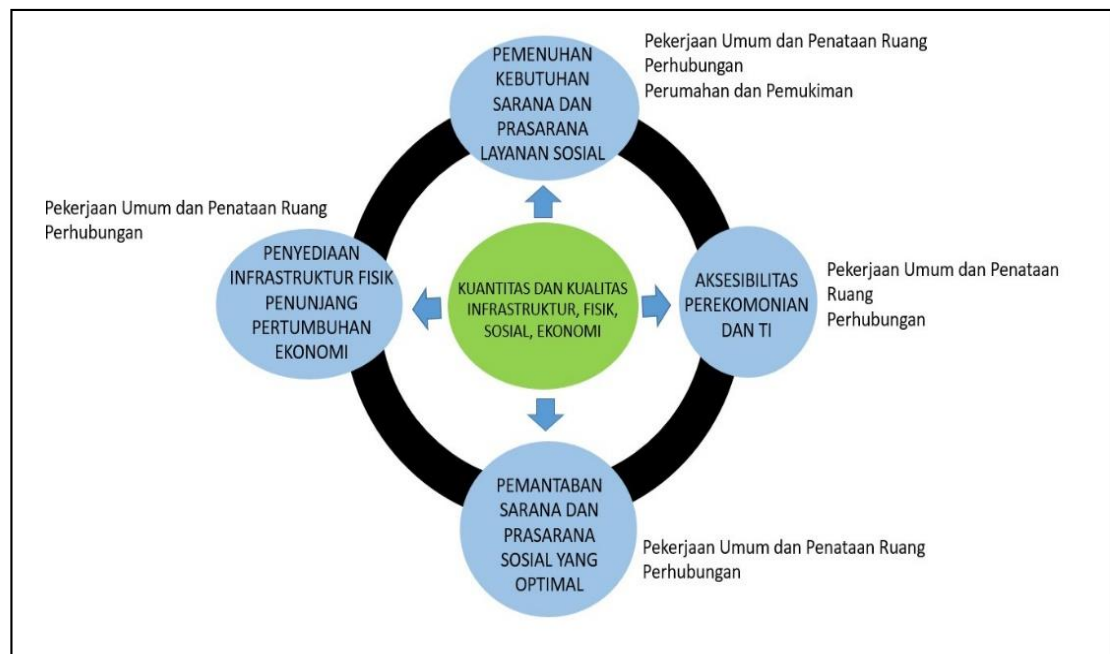


ekonomi. Ketersediaan infrastruktur juga sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat

Dalam upaya pencapaian misi ke-3 maka dirumuskan perencanaan terintegratif dalam langkah pencapaian misi ke-3 sebagai berikut.

Gambar 1.5

Logicframe Perencanaan Misi 3



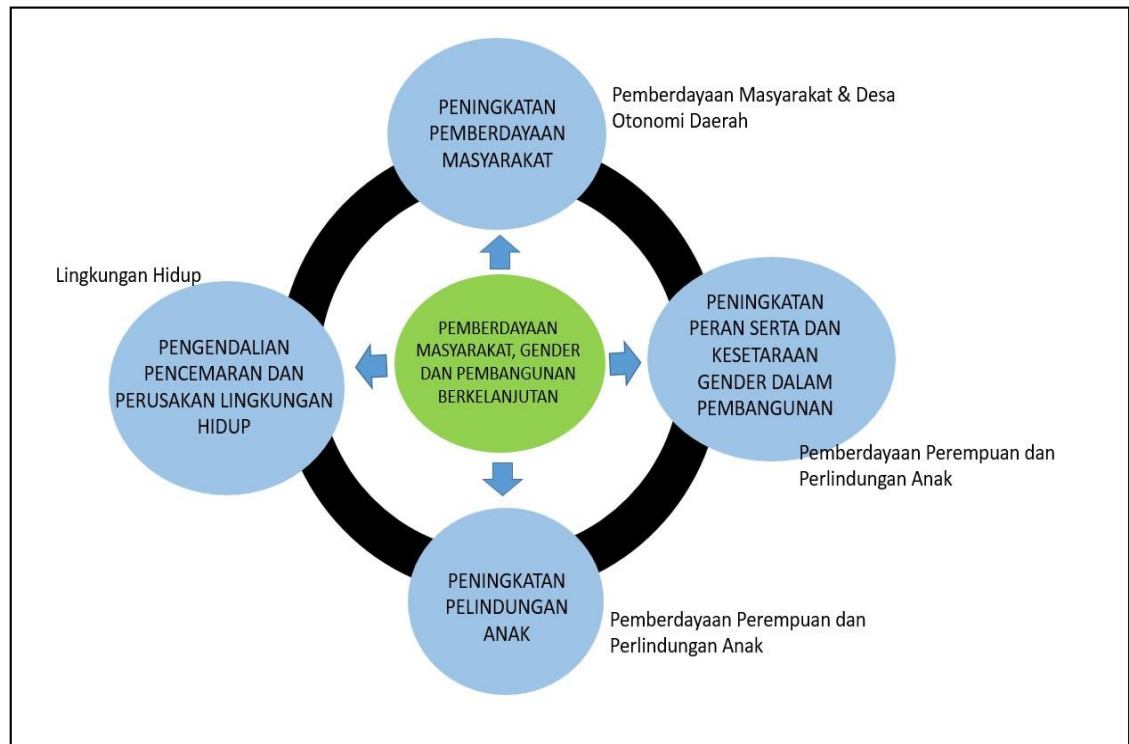
Misi 4 : Mengoptimalkan sumber daya daerah, berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pemberdayaan masyarakat turut serta berperan aktif dalam mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pemberdayaan masyarakat sangat besar pengaruhnya terutama jika diarahkan kepada pengelolaan sumberdaya strategis Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan tidak hanya berhenti di dalam proses perencanaan, akan tetapi dalam proses pelaksanaan hingga pengawasan masyarakat harus mampu bersinergi dengan pemerintah.



Dalam upaya pencapaian misi ke-4 maka dirumuskan perencanaan terintegratif dalam langkah pencapaian misi tersebut adalah sebagai berikut.

Gambar 1.6
Logicframe Perencanaan Misi 4



Misi 5 : Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis.

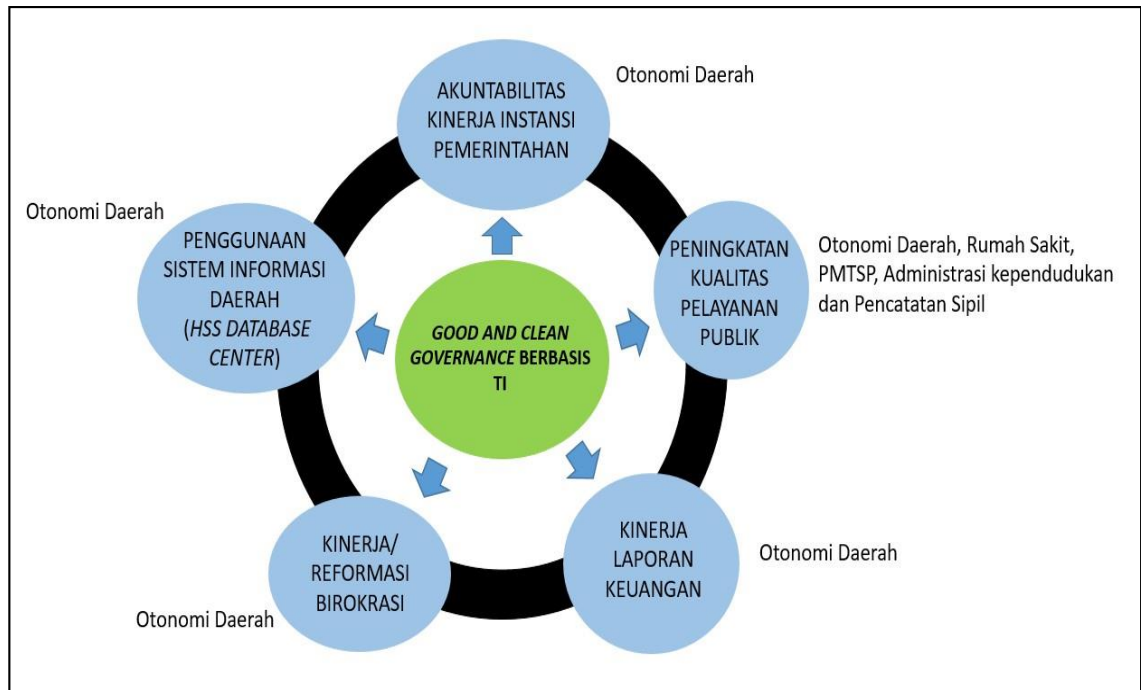
Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang semakin variatif kebutuhannya maka dibutuhkan kinerja aparatur pemerintah yang profesional termasuk penataan kelembagaannya yang efektif dan efisien, serta bentuk pemerintahan yang berlandas pada prinsip *good and clean governance*.

Dalam upaya pencapaian Misi Ke-5 maka dirumuskan Perencanaan Terintegratif dalam Langkah Pencapaian Misi Ke-5 sebagai berikut.



Gambar 1.7

Logicframe Perencanaan Misi 5



Prioritas pembangunan daerah merupakan penjabaran Visi dan Misi, yang kemudian dituangkan kedalam 9 butir prioritas pembangunan daerah berikut:

- Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui 2 prioritas wajib :
 1. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang berakhlak mulia.
 2. Peningkatan akses dan kualitas kesehatan.
- Peningkatan perekonomian melalui 3 prioritas unggulan :
 1. Revitalisasi pertanian dan perikanan.
 2. Pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal.
 3. Penguatan UMKM dan koperasi.
- Prioritas penunjang peningkatan kualitas SDM dan perekonomian:
 1. Pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
 2. Pengembangan infrastruktur pemukiman dan perumahan rakyat.
 3. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial.



4. Peningkatan kualitas birokrasi, pelayanan publik dan keagamaan.

Selanjutnya, 9 Prioritas pembangunan daerah tersebut kemudiandi intepretasikan kedalam arsitektur Visi pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai dasar pijakan berdirinya pondasi dan pilar dalam pencapaian Visi, yang dapat dijelaskan melalui arsitektur berikut.

Gambar 1.8

Pondasi dan Pilar Misi Dalam Pencapaian Visi



3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan suatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahunan, yang mengacupada pernyataan visi dan misi, tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan kondisi yang ingin dicapai, serta didasarkan pada isue-isue dan analisis stratejik yang mampu mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.



Dalam rangka pencapaian misi mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dengan sasaran pembangunan:

1. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang pendidikan;
2. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan;
3. Tercukupinya ketersediaan pangan yang beragam dan aman;
4. Meningkatnya pelayanan dasar bagi masyarakat; dan
5. Meningkatnya perlindungan sosial dan masyarakat.

Pemahaman terhadap linieritas Misi, Tujuan hingga Sasaran kemudian dapat dengan mudah dipahami melalui Desain *Logical Framework* Pencapaian Misi-1 yang disajikan sebagai berikut:

Gambar 1.9

Desain *Logical Framework* Pencapaian Misi-1





Dalam rangka pencapaian misi mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

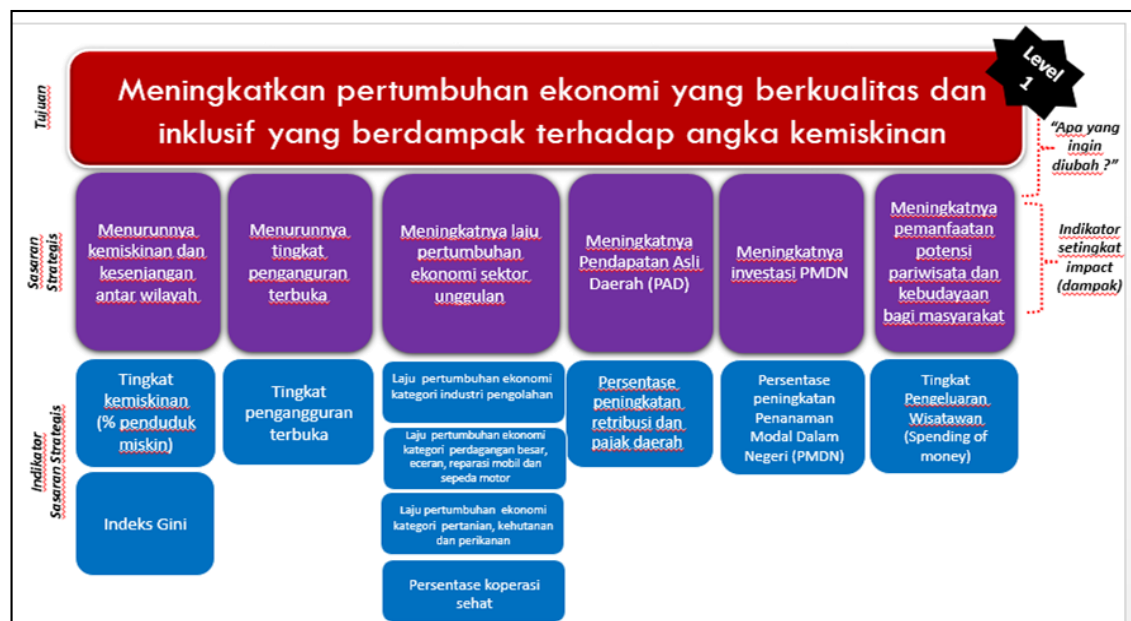
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif yang berdampak terhadap angka kemiskinan, dengan sasaran pembangunan:

1. Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah;
2. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka;
3. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan;
4. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD);
5. Meningkatnya investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN); dan
6. Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata dan kebudayaan bagi masyarakat

Pemahaman terhadap *linieritas* Misi, Tujuan hingga Sasaran kemudian dapat dengan mudah dipahami melalui Desain *Logical Framework* Pencapaian Misi-2 yang disajikan sebagai berikut:

Gambar 1.10

Desain *Logical Framework* Pencapaian Misi-2





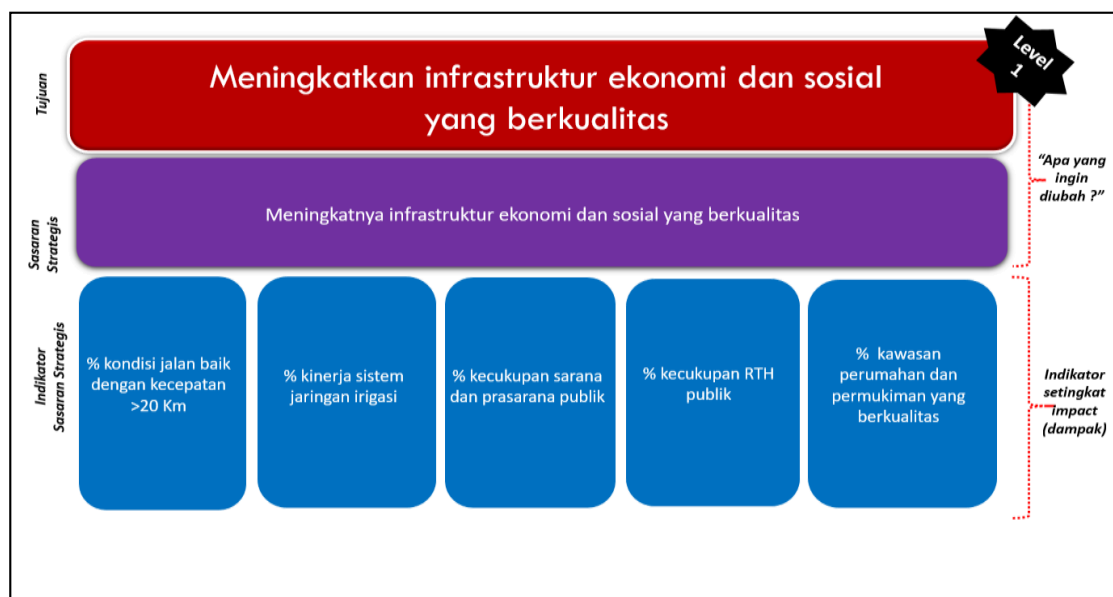
Dalam rangka pencapaian misi Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik, ekonomi, dan sosial maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Berkualitas, dengan sasaran pembangunan yaitu:

1. Meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas.

Tujuan hingga Sasaran kemudian dapat dengan mudah dipahami melalui Desain *Logical Framework* Pencapaian Misi-3 yang disajikan sebagai berikut:

Gambar 1.11
Desain *Logical Framework* Pencapaian Misi-3



Dalam rangka pencapaian misi Mengoptimalkan sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

Meningkatkan Sumber Daya Daerah dan Kualitas Lingkungan Hidup Dalam Menjamin Pembangunan Berkelanjutan, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:



1. Meningkatnya kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat;
2. Meningkatnya pemberdayaan reponsif gender dan perlindungan terhadap anak; dan
3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Pemahaman terhadap linieritas Misi, Tujuan hingga Sasaran kemudian dapat dengan mudah dipahami melalui Desain *Logical Framework* Pencapaian Misi-4 yang disajikan sebagai berikut:

Gambar 1.12

Desain *Logical Framework* Pencapaian Misi-4



Dalam rangka pencapaian misi Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Layanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi, dengan sasaran pembangunan yang meliputi:



1. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik;
2. Meningkatnya Kinerja Keuangan dan Kinerja Birokrasi;
3. Meningkatnya penggunaan Sistem Informasi Daerah; dan
4. Terlaksananya kehidupan sosial keagamaan.

Pemahaman terhadap linieritas Misi, Tujuan hingga Sasaran kemudian dapat dengan mudah dipahami melalui Desain *Logical Framework* Pencapaian Misi-5 yang disajikan sebagai berikut:

Gambar 1.13

Desain *Logical Framework* Pencapaian Misi-5





Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD menjadi tuntutan yang perlu diperhatikan. Konsistensi penjabaran Visi dan Misi kedalam Tujuan dan Sasaran menentukan efektivitas pembangunan daerah sesuai dengan amanat pembangunan yang tertuang dalam Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih.

A. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan RPJMD

Setelah arah kebijakan dibuat, langkah selanjutnya adalah merumuskan program prioritas pembangunan daerah. Tahap ini sangat penting dalam perumusan RPJMD karena hasil dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang kongkrit dalam bentuk program prioritas. Urgensi lain adalah juga karena perumusan program prioritas pembangunan daerah adalah inti dari perencanaan strategis itu sendiri, yang mampu merefleksikan tujuan strategis Kepala Daerah terpilih dalam 5 (lima) tahun. Program prioritas pembangunan daerah merupakan program yang secara khusus berhubungan dengan janji-janji kampanye Kepala Daerah terpilih. Program prioritas pada intinya merupakan substansi dasar dari janji-janji Kepala Daerah terpilih. Janji-janji tersebut kemudian didefinisikan kedalam kegiatan atau program sesuai nomenklatur yang diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, atau kedalam arah kebijakan maupun strategi. Jika janji dari Kepala Daerah terpilih bersifat sangat mikro dan berada di level output, maka akan diterjemahkan kedalam kegiatan. Namun, apabila sedikit lebih makro dan berada pada level outcome, maka didefinisikan kedalam program yang kemudian disebut program prioritas. Sedangkan jika jauh lebih makro lagi, dapat diterjemahkan ke dalam arah kebijakan maupun strategi. Pernyataan ini dapat diilustrasikan pada gambar berikut ini:



Gambar 1.14
Ilustrasi Transformasi Agenda Politik Kepala Daerah



Berdasarkan penjelasan diatas, dan ilustrasi yang digambarkan diatas maka dapat dijabarkan pendefinisian program-program prioritas pembangunan daerah melalui janji-janji kampanye Kepala Daerah terpilih. Adapun keterangan definisi tersebut dapat diamati pada tabel berikut ini :



Tabel 1.8
Penjabaran Janji Politik Kepala Daerah Terpilih Pada Program Prioritas Pembangunan Daerah

MISI 1	Beasiswa bagi pelajar dan santri berprestasi kuliah di dalam dan ke luar negeri	Hibah/Bansos
	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah untuk sekolah	Program Peningkatan Mutu PAUD
		Program Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar
		Program Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
		Bansos/ *level arah kebijakan*
	Generasi muda dan pelajar HSS bebasnarkoba	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Masyarakat
		Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
		Program Peningkatan Prestasi Dan Pemasarakatan Olahraga
	BPJS semesta untuk semua warga	Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
		level arah kebijakan
MISI 2	CINTA Berwirausaha	Program Peningkatan Kualitas Dan Perlindungan Tenaga Kerja
		Program Peningkatan Mutu Produk Industri
	Resi Gudang	Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan
		Program Peningkatan Sarana Dan Jaringan Distribusi Perdagangan
	Asuransi bagi petani dan nelayan yang berpotensi gagal panen	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Ikan
		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
		Program Penguatan Cadangan Pangan Pemda Dan Masyarakat



	Pertanian Organik	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
		Program Peningkatan Produksi Holtikultura
		Program Diversifikasi Dan Keamanan Pangan
MISI 3	Islamic Center	Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Publik
		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Dan Areal Pemakaman
		Level Arah Kebijakan
	Bantuan sarana dan prasarana untuk pesantren dan pendidikan negeri/ swasta	Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Publik
		Level Arah Kebijakan
	Feri Penyeberangan	*Level Arah Kebijakan*
	Angkutan Mini Bagi Pelajar	Program Peningkatan Akses Pendidikan Sekolah Dasar
MISI 4	Hijau Desaku	Program Lingkungan Perumahan Dan Pemukiman Sehat
		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Dan Areal Pemakaman
		Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup
		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
		APBDes
	BUMDes untuk peningkatan ekonomidesa	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi
	Perdesaan	
	APBDes	
MISI 5	Aghniya (Hartawan) untuk HSS yang lebih baik	*Level Arah Kebijakan*



Melalui arah kebijakan diperoleh instrumen berupa program-program yang saling terkait dan rasional dalam mendukung pencapaian indikator dan target sasaran yang ditetapkan. Keberhasilan capaian satu program mendukung atau memicu keberhasilan program lainnya. Arah kebijakan diatas memuat beberapa fungsi, diantaranya:

Membantu menjelaskan strategi lebih spesifik, konkrit, operasional dan fokus; Membantu mengarahkan pemilihan program yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran; dan

Membantu mengarahkan pemilihan program agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum.

Suatu program pembangunan daerah, secara teknokratis diterjemahkan dalam program prioritas yang pada dasarnya dijabarkan dari strategi yang telah dirumuskan. Berdasarkan arah kebijakan pada masing-masing perspektif dan indikator kinerja (outcome) yang dipersyaratkan maka dirumuskan berbagai jenis program terkait. Bagi suatu perspektif yang tidak ada kebijakannya maka program prioritas pada perspektif tersebut tidak perlu dibuat.

Setiap strategi mengandung berbagai program yang inherent dan spesifik untuk mencapai sasaran masing-masing. Penentuan program diupayakan merata ditiap perspektif untuk menjaga kepaduan dan daya ungkit strategi terhadap target indikator kinerja sasaran pokok. Namun demikian, tidak selalu tiap perspektif terdapat program prioritas, tergantung strategi untuk mencapai sasaran. Selanjutnya, kinerja masing-masing program dapat dipisahkan antara lagging indicators dan leading indicators. Lagging indicators adalah tolak ukur kinerja sebagai akibat atau hasil dari serangkaian tindakan lain. Adapun leading indicators adalah kinerja yang memicu tercapainya hasil. Suatu indikator di perspektif paling atas adalah



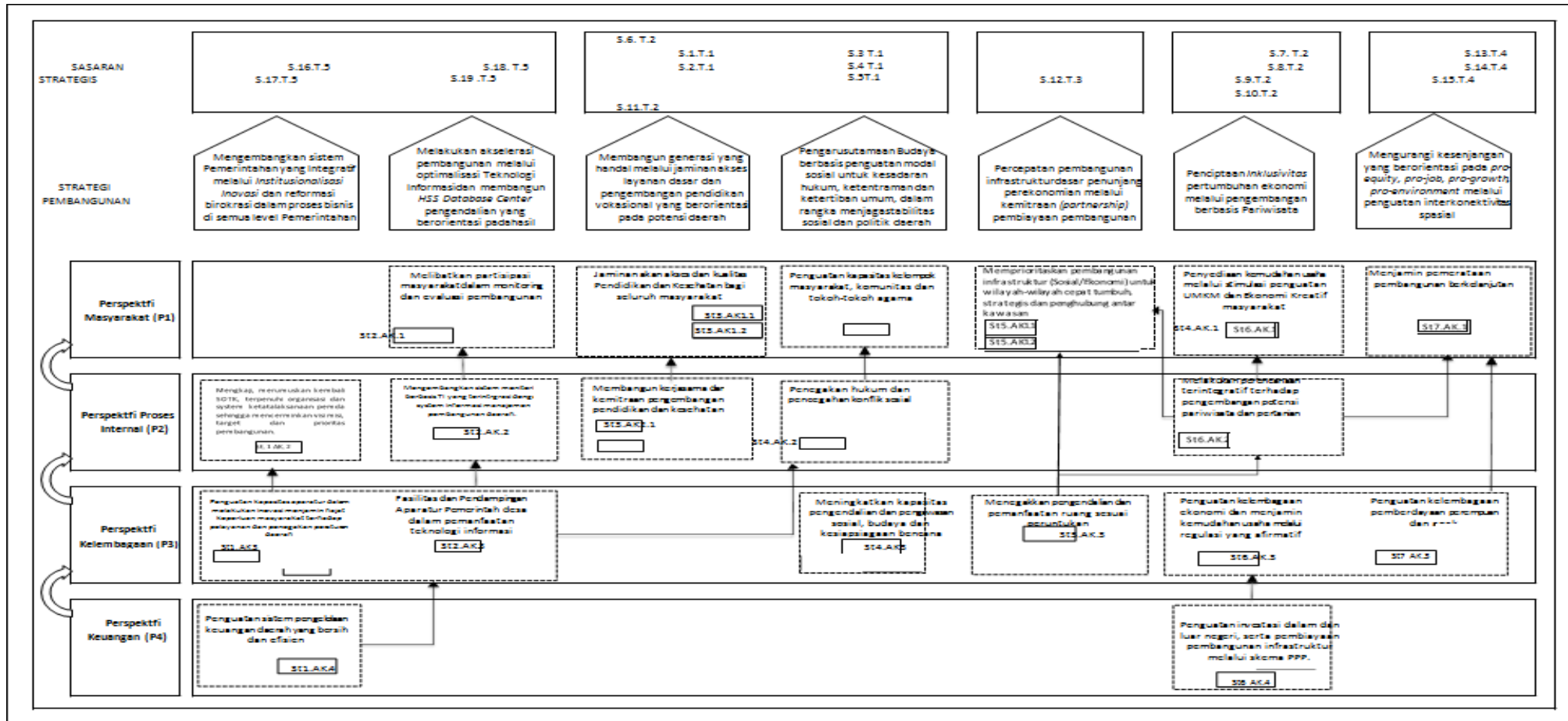
hasil (outcome measures) bagi indikator kinerja dari perspektif-perspektif yang ada dibawahnya (performance drivers).

Penetapan program dalam setiap arah kebijakan disusun dalam kerangka strategis pembangunan jangka menengah daerah, agar bahwa program yang dirumuskan merupakan salah satu elemen dalam pencapaian rencana pembangunan jangka menengah daerah dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab untuk pencapaian kinerja program oleh pelaksana (SKPD).

Dalam rangka mempermudah pemahaman terhadap alur berfikir dari masing- masing strategi yang dirumuskan kedalam arah kebijakan serta program prioritas, yang di rangkum dalam arsitektur-arsitektur pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan periode 2018-2023. Adapun arsitektur yang dimaksud adalah sebagai berikut:



Gambar 1.15 Arsitektur Pemetaan Strategi Dalam Kebijakan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan



Gambar 6. : Arsitektur Pemetaan Strategi dalam Kebijakan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan



Tabel 1.9

Program Pembangunan Daerah Yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Hulu Sungai Selatan

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA RPJMD		TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR RPJMD 2023	PD PENANGGUNG JAWAB/ PENDUK UNG				
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023						
Visi : Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat																
Misi 1 : Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya																
1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar lainnya	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		Indeks	67,80	68,41	69,41	70,25	71,08	71,86	72,57	72,57	Disdik			
		1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	1	Harapan lama sekolah	Tahun	12.05	12.07	12.70	12.89	13.08	13.29		13.52	13.52	
				2	Rata-rata lama sekolah	Tahun	7.71	7.72	8.00	8.17	8.33	8.44		8.53	8.53	
				3	Persentase PAUD formal terakreditasi A	Persen	1.25	1.25	2,50	4,37	6,87	9,37		12,50	12,50	
				4	Persentase satuan pendidikan terakreditasi A	Persen	4,76	4,76	6,59	8,79	10,99	13,19		15,02	15,02	
		2	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	5	Angka Harapan Hidup	Tahun	65,39	65,59	66,05	66,54	67,04	67,51		67,87	67,87	Dinkes
				6	Persentase wanita pernah kawin usia (15-49) tahun menurut usia kawin pertama; usia ≤ 20 tahun	Persen	75.81	74.57	73.02	72.18	71.35	70.51		69.68	69.68	Dinas PPKBPP & PA
				7	Tingkat kesehatan Rumah Sakit (RS)	Predikat	belum diukur	A	AA	AA	AA	AAA		AAA	AAA	AAA
8	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi paripurna			Persen	4.35	4.35	4.35	4.35	8.70	13.04	17.39	17.39	Dinas Kesehatan/UP T RS Daha Sejahtera/RSU D Hasan Basry			



LPPD Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA RPJMD		TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR RPJMD 2023	PD PENANGGUNG JAWAB/ PENDUK UNG		
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
	3	Tercukupinya ketersediaan pangan yang beragam dan aman	9	PPH Ketersediaan	Skor	83,19	83.77	84.61	85.46	86.31	87.17	88.04	88.04	Dinas Ketahanan Pangan
	4	Meningkatnya pelayanan dasar bagi masyarakat	10	Persentase capaian perangkat daerah dalam menerapkan SPM	Persen	52,00	54,00	57,00	61,00	67,00	72,00	75,00	75,00	Disdik/Dinkes /Dinsos/Satpol PP/BPBD Kesbangpol/Di s.PUTR/Dis.PR LH
	5	Meningkatnya perlindungan sosial dan masyarakat	11	Persentase angka PMKS yang mandiri	Persen	63,87	64.62	65,76	68,94	71,19	73,65	76,35	76,35	Dinsos
Misi 2 : Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal														
2	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif yang berdampak terhadap angka kemiskinan	2. Tingkat kemiskinan		Persen	5,80	5,21	5,14	5,06	4,80	4,54	4,28	4,28		
	6	Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah	12	Tingkat kemiskinan	Persen	5.80	5.21	5.14	5.06	4.80	4.54	4.28	4.28	Dinsos
			13	Indeks Gini	Indeks	0.336	0.317	0.318	0.312	0.308	0.299	0.284	0.284	Dis TK, Kop dan UKP
	7	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	14	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	2,02	2.43	2.07	2.04	1.96	1.99	1.86	1.86	



LPPD Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA RPJMD		TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR RPJMD 2023	PD PENANGGUNG JAWAB/ PENDUK UNG
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		3. Laju pertumbuhan ekonomi	Persen	6,12	6,14	6,23	6,28	6,33	6,38	6,43	6,43	
8	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	15 Laju pertumbuhan ekonomi kategori industri pengolahan	Persen	5,85	4,55	4,47	4,98	5,27	5,56	5,85	5,85	Dis TK, Kop dan UKP
		16 Laju pertumbuhan ekonomi kategori perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	Persen	5,28	4,84	5,38	5,50	5,61	5,72	5,83	5,83	Disdag
		17 Laju pertumbuhan ekonomi kategori pertanian, kehutanan dan perikanan	Persen	1,67	4,33	4,28	4,51	4,86	4,92	5,63	5,63	Distan/Diskan
		18 Persentase koperasi sehat	Persen	1,18	1,76	2,35	3,18	3,82	4,46	5,10	5,10	Dis TK, Kop dan UKP
9	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	19 Peningkatan retribusi dan pajak daerah	Rupiah	21,10 Milyar	22,50 Milyar	23 Milyar	24 Milyar	25 Milyar	26 Milyar	28 Milyar	28 Milyar	Bakeuda
10	Meningkatnya investasi PMDN	20 Persentase peningkatan Penanaman Modal	Persen	3,00	4,20	4,80	5,00	5,50	6,00	7,00	7,00	60 Dis PMPTSP



TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA RPJMD		TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR RPJMD 2023	PD PENANGGUNG JAWAB/ PENDUK UNG		
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		Dalam Negeri (PMDN)												
	11	Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata dan kebudayaan bagi masyarakat	21	Tingkat Pengeluaran Wisatawan (<i>Spending of money</i>)	Rupiah	3.223.750.000	3.904.175.000	4.224.480.000	5.374.026.000	6.687.744.000	7.873.326.000	9.073.800.000	9.073.800.000	Disporapar
Misi 3 : Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik dan sosial yang menunjang sektor perekonomian														
3	Meningkatkan infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas	4. Persentase infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas		Persen	67,49	71,35	49,64	51,00	50,38	51,31	50,90	50,90		
	12	Meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas	22	Persentase kondisi jalan baik dengan kecepatan ≥ 40 Km/jam	Persen	74.00	74.50	62,45	63,60	64,75	65,80	67,00	67,00	DisPUTR
			23	Persentase kinerja sistem jaringan irigasi	Persen	80.00	85.00	62,68	65,60	67,35	69,10	71,43	71,43	
			24	Persentase kecukupan sarana dan prasarana public	Persen	10	14	24	48	67	86	100	100	
			25	Persentase kecukupan RTH public	Persen	24.82	24.83	24.84	24.85	24.86	24.87	24.87	24.87	Dispera KPLH
			26	Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas	Persen	40.16	40.66	53.05	59.98	67.43	74.88	82.32	82.32	61



TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN		SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA RPJMD		TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR RPJMD 2023	PD PENANGGUNG JAWAB/ PENDUK UNG		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
Misi 4 : Mengoptimalkan sumberdaya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan															
4	Meningkatkan sumber daya daerah dan kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan	5. Indeks Desa Membangun (IDM)		Indeks	0,58	0,62	0,64	0,65	0,67	0,69	0,71	0,71			
		13	Meningkatnya kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat	27	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0,58	0,62	0,64	0,65	0,67	0,69	0,71	0,71	Dis.PMD
		6. Indeks Pembangunan Gender (IPG)		Indeks	89,07	89,96	90,27	90,58	90,81	90,91	91,27	91,27			
		14	Meningkatnya pemberdayaan responsif gender dan perlindungan terhadap anak	28	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	89,07	89,96	90,27	90,58	90,81	90,91	91,27	91,27	DPPKBPPA
				29	Persentase desa/kelurahan layak anak	Persen	0,68	0,68	2,03	3,38	4,73	6,08	7,43	7,43	
		7. Indeks kualitas lingkungan hidup		Indeks	54,55	54,94	55,08	55,27	55,44	55,6	55,77	55,77			
15	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	30	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	54,55	54,94	55,08	55,27	55,44	55,60	55,77	55,77	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup		
Misi 5 : Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis															



TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA RPJMD		TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR RPJMD 2023	PD PENANGGUNG JAWAB/ PENDUK UNG	
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
3 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	8. Indeks Reformasi Birokrasi		Indeks	62,93	63,88	68	72	78	83	88	88		
		16 Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik	31 Predikat AKIP	Predikat	BB	BB	BB	A	A	A	A	A	Sekolah SKPD
			32 Kategori nilai kinerja Unit Pelayanan Publik (UPP)	Predikat	B	B	A	A	A	A	A	A	Setda (Bag. Orpad) / Disdukcapil/ Dinkes/RSUD HEB/RSU Daba Sejahtera/Dis. PMPESP
	17 Meningkatnya kinerja keuangan dan kinerja birokrasi	33 Kualitas aspek perencanaan	Nilai	53,33	56,81	60,28	62,82	63,81	65,45	67,09	67,09	Sappelitbang da	
		34 Opini WTP BPK terhadap LKPD	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Inspektorat	
		35 Indeks profesionalisme ASN	Indeks	48,63	49,04	69,77	73,17	74,42	78,12	81,33	81,33	BKD	
	18 Meningkatnya penggunaan sistem informasi daerah	36 Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan teknologi informasi dengan baik	Persen	7,89	7,89	13,16	39,47	65,79	92,11	100	100	DisKOMINFO	
		37 Persentase pemerintah desa yang menggunakan teknologi informasi dalam pemberian layanan	Persen	0,60	0,60	8,33	15,97	23,61	31,25	38,88	38,88	DisPMD	
	19 Meningkatnya kehidupan sosial keagamaan	38 Persentase peningkatan penerimaan zakat	Persen	7	7,5	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	12,00	Koordinasi Setda Bag. Kesra dengan Baznas Kab. HSS	



5. Program Prioritas

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, bahwa hubungan urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah secara eksplisit dituangkan dalam program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah serta target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

Dalam hal suatu urusan atau program bersifat strategis, maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Yang demikian karena suatu urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena pengaruhnya yang sangat luas dan *urgent* untuk diselenggarakannya sangat tinggi. Suatu urusan menjadi strategis tergantung tujuan dan sasaran pembangunan dan bagaimana strategi pencapaiannya. Suatu urusan pemerintahan daerah dapat menjadi strategis di satu tahun atau periode dan sebaliknya, menjadi operasional di periode berikutnya.

Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategis, menjadi tanggung jawab bersama Kepala Daerah dengan Kepala Perangkat Daerah pada tingkat kebijakan. Berbeda dengan penyelenggaraan aspek strategik, program prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan agar setiap urusan (wajib) dapat diselenggarakan setiap tahun, tidak langsung dipengaruhi oleh visi dan misi kepala daerah terpilih. Artinya, suatu prioritas pada beberapa urusan untuk mendukung visi dan misi serta program kepala daerah terpilih, tidak berarti bahwa urusan lain ditinggalkan atau dilerantarkan.



Indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berisi program-program, baik untuk mencapaivisi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, serta mengakomodir program unggulan dari Kepala Daerah terpilih. Pagu indikatif sebagai wujud ancar-ancar kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang dibutuhkan untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Setelah program prioritas diketahui baik berasal dari perumusan strategis maupun dari rumusan permasalahan pembangunan daerah, dibuatlah alokasi pagu untuk setiap program. Pagu indikatif program merupakan ancar-ancar jumlah dana yang dibutuhkan untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, perhitungan pagu indikatif masing-masing program dipisahkan menjadi pagu indikatif untuk program prioritas yang berhubungan dengan program pembangunan daerah (strategik) dan pagu indikatif untuk program-program yang berhubungan dengan pemenuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dengan kerangka, sebagai berikut.

Prioritas I merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (*dedicated*) Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakannasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20%. Tabel dibawah merupakan pagu indikatif pada program prioritas I.



Tabel 1.10
Pagu Indikatif Program Prioritas I

Prioritas	Pagu Indikatif (Rp)				
	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Prioritas I	480.665.367.544	494.321.149.168	488.508.716.589	475.750.163.150	470.342.927.893

Sumber : Hasil dan Perhitungan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Program Prioritas I, sebagai berikut dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 1.11
Nama Program Prioritas I dan Pagu Indikatif Per Program Tahun 2019-2023

No	Nama Program	Pagu Indikatif
1	Program Peningkatan Akses Pendidikan Anak Usia Dini	4.794.000.000
2	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini	2.642.895.000
3	Program Peningkatan Akses Pendidikan Masyarakat	5.800.000.000
4	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Masyarakat	8.618.875.000
5	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar	39.047.873.000
6	Program Peningkatan Akses Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.800.000.000
7	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	15.386.980.000
8	Program Peningkatan Budaya Baca	1.939.250.000
9	Program Peningkatan Akses Perpustakaan	1.951.376.250
10	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	314.051.000



No	Nama Program	Pagu Indikatif
11	Program Peningkatan Kesehatan Ibu Hamil Bersalin, Nifas, Dan Anak	2.195.000.000
12	Program Peningkatan Kesehatan Keluarga	10.036.204.000
13	Program Peningkatan Akses Sarana Dan Prasarana Kesehatan	11.454.953.675
14	Program Peningkatan Mutu Sarana Dan Prasarana Kesehatan	24.702.571.325
15	Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat	151.633.072.000
16	Program Pengendalian Dan Pencegahan Penyakit	722.385.800
17	Program Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	22.613.612.500
18	Program Pembangunan/Pemeliharaan Gedung Layanan	212.025.477.000
19	Program Peningkatan Kualitas Layanan Rumah Sakit	76.793.868.565
20	Program Peningkatan Kualitas Layanan Puskesmas Dan Jaringannya	163.953.776.220
21	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan (BLUD)	435.506.547.208
22	Program Penguatan Cadangan Pangan Pemda Dan Masyarakat	814.022.500
23	Program Ketersediaan Dan Distribusi Pangan	3.345.690.000
24	Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	2.950.731.000
25	Program Peningkatan Akses Dan Mutu Air Bersih	35.454.967.500



No	Nama Program	Pagu Indikatif
26	Program Pengelolaan Air Limbah Dan Drainase	44.041.923.005
27	Program Penegakan Peraturan Daerah	430.150.000
28	Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bencana	689.400.000
29	Program Penanganan Tanggap Darurat Pasca Bencana	505.750.000
30	Program Peningkatan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	679.850.000
31	Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks)	1.996.682.500
32	Program Perlindungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	31.912.070.000
33	Program Peningkatan Kualitas Dan Perlindungan Tenaga Kerja	994.471.250
34	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	68.756.250
35	Program Peningkatan Mutu Produk Industri	944.850.000
36	Program Pengembangan Sentra Industri	9.200.000.000
37	Program Peningkatan Usaha Sektor Perdagangan	4.085.490.000
38	Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan	7.924.915.000
39	Program Peningkatan Sarana Dan Jaringan Distribusi Perdagangan	25.536.350.000
40	Program Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan	2.518.005.000



No	Nama Program	Pagu Indikatif
41	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	2.035.547.500
42	Program Peningkatan Produksi Hortikultura	1.920.877.500
43	Program Peningkatan Populasi Ternak	6.477.840.000
44	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	1.357.574.900
45	Program Peningkatan Sarana Prasarana Pertanian	311.000.000
46	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	3.834.900.000
47	Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	7.904.470.000
48	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Ikan	82.758.000
49	Program Peningkatan Kualitas Koperasi	1.114.361.000
50	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan PAD Dan Dana Perimbangan	1.947.865.000
51	Program Peningkatan Pengelolaan PBB Dan BPHTB	3.606.675.000
52	Program Peningkatan Realisasi Investasi	620.565.000
53	Program Penguatan Iklim Investasi	2.102.055.000
54	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	14.150.415.000
55	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	3.617.170.000
56	Program Pengembangan Kemitraan	4.816.595.000
57	Program Pengelolaan Kekayaan Dan Keragaman Budaya	7.927.370.000
58	Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan	37.986.571.500



No	Nama Program	Pagu Indikatif
59	Program Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	42.178.173.475
60	Program Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan	236.658.979.900
61	Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya	143.848.835.000
62	Program Pengembangan Pengelolaan Dan Konservasi Sungai, Danau Dan Lainnya	19.336.250.000
63	Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Publik	284.258.975.000
64	Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum	34.814.402.500
65	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Dan Areal Pemakaman	17.619.755.000
66	Program Penataan Dan Penguasaan Tanah	54.516.500.000
67	Program Lingkungan Perumahan Dan Permukiman Sehat	75.333.630.000
68	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan	1.006.377.500
69	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	195.825.000
70	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	192.487.500
71	Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan	50.225.000
72	Program Pemenuhan Hak Anak Dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	463.621.500
73	Program Peningkatan Pelindungan Anak	119.830.000



No	Nama Program	Pagu Indikatif
74	Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	11.017.391.000
75	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	34.123.930.000
76	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Dan Instansi Pemerintah	1.278.656.300
77	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3.114.475.000
78	Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur	79.325.000
79	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	1.970.584.250
80	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1.428.579.500
81	Program Peningkatan Pelayanan Perijinan	835.375.000
82	Program Peningkatan Sarana Prasarana Dan Peralatan Kesehatan Penunjang Medik/Non Medik	85.126.698.180
83	Prog.Peningkatan Pelayanan Kependudukan	8.589.025.000
84	Program Peningkatan Pelayanan Catatan Sipil	985.050.000
85	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	5.443.370.000
86	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	4.811.150.000
87	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	536.800.000



No	Nama Program	Pagu Indikatif
88	Program Evaluasi Pembangunan Daerah	1.314.100.000
89	Program Perencanaan Pembangunan Sektoral	1.453.550.000
90	Program Penelitian Dan Pengembangan	4.038.125.000
91	Program Perencanaan Dan Pengendalian Tata Ruang	3.895.650.000
92	Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah	1.220.190.000
93	Program Peningkatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	15.482.375.000
94	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	6.042.925.000
95	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	18.103.401.600
96	Program Pembinaan Disiplin Aparatur	585.315.000
97	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawain	3.116.972.000
98	Program Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Organisasi Dan Aparatur Daerah	737.063.750
99	Program Pemanfaatan Teknologi Informasi	12.250.350.000
100	Program Pembinaan Dan Pelayanan Pemerintahan Desa	1.104.185.000
101	Program Peningkatan Mutu dan Akses Perpustakaan	4.908.050.000
	Jumlah	2.409.588.324.344



Program Prioritas II merupakan program prioritas ditingkat Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Suatu prioritas II berhubungan dengan program/kegiatan unggulan Perangkat Daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar. Tabel dibawah merupakan pagu indikatif pada program prioritas II.

Tabel 5.6
Pagu Indikatif Program Prioritas II

Prioritas	Pagu Indikatif (Rp)				
	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Prioritas II	36.850.484.975	33.976.355.725	33.976.355.725	33.976.355.725	35.030.272.525

Sumber : Hasil dan perhitungan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Program **Prioritas II**, sebagai berikut:

Tabel 5.7
Nama Program Prioritas II dan Pagu Indikatif Per Program
Tahun 2019-2023

No	Nama Program	Pagu Indikatif
1	Program Peningkatan Akses Pendidikan Sekolah Dasar	5.026.750.000
2	Program Promosi kesehatan	581.162.500
3	Program Pembinaan Jasa Kontruksi	374.806.250
4	Program Pemeliharaan Kamtibmas dan PencegahanTindak Kriminal	383.000.000
5	Program Penanganan Kebakaran dan PerlindunganMasyarakat	3.601.959.750



No	Nama Program	Pagu Indikatif
6	Program Diversifikasi dan Keamanan Pangan	1.055.705.500
7	Program Pelayanan Informasi Data Kependudukan	1.229.890.000
8	Program Peningkatan Keluarga Sejahtera	315.043.250
9	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan	4.322.720.000
10	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau	362.979.700
11	Program Pelayanan Informasi dan Media Massa	21.746.100.000
12	Program peningkatan peran serta kepemudaan	2.398.405.000
13	Program Peningkatan Prestasi dan Per masyarakatan Olahraga	4.764.078.750
14	Program Pelayanan Statistik dan Sandi Daerah	500.725.000
15	Program Peningkatan Pengelolaan Arsip Daerah	1.657.934.000
16	Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	139.500.000
17	Program Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Ternak	311.000.000
18	Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	201.279.200
19	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemberdayaan Masyarakat	29.261.651.000
20	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksadan Aparatur Pengawasan	1.374.140.625



No	Nama Program	Pagu Indikatif
21	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1.580.500.000
22	Program Peningkatan Pelayanan Perundang - Undangandan Hubungan Masyarakat	2.279.425.000
23	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Penganggaranandan Pengawasan	96.207.800.000
24	Program Perumusan Kebijakan Penerapan Hukum danPerundang-undangan	3.455.224.800
25	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Bupati danWakil Bupati	3.975.000.000
26	Program Pelayanan Keprotokolan dan KehumasanPimpinan Daerah	11.598.712.500
27	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan PengadaanBarang/Jasa	7.492.968.000
28	Program Perumusan Kebijakan Ekonomi Pembangunan	568.125.000
29	Program Implementasi Kerjasama Pemerintahan Daerah	62.250.000,00
30	Program Pengelolaan Anggaran Keuangan Daerah	2.352.620.000
31	Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik	561.975.000
32	Program Pengelolaan Adm. dan Penatausahaan KeuanganDaerah	290.500.000
	Jumlah	170.886.441.525



Program Prioritas III merupakan program prioritas ditingkat Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Suatu prioritas III berhubungan dengan program/kegiatan unggulan Perangkat Daerah yang paling berdampak pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar. Tabel dibawah merupakan pagu indikatif pada program prioritas III:

Tabel 5.8
Pagu Indikatif Program Prioritas III

Prioritas	Pagu Indikatif (Rp)				
	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Prioritas III	105.639.289.870	99.054.147.120	99.054.147.120	99.054.147.120	99.054.147.120

Sumber : Hasil dan perhitungan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Selanjutnya Program Prioritas III, sebagai berikut:

Tabel 5.9
Nama Program Prioritas III dan Pagu Indikatif Per Program
Tahun 2019-2023

No	Nama Program	Pagu Indikatif
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	284.250.9634.45
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	108.755.971.805
3	Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	102.263.800.350
4	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran RSUD Daha Sejahtera	6.212.383.375
5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur RSUD Daha Sejahtera	372.759.375
	Jumlah	501.855.878.350



Pembangunan pada tahun 2022 dilaksanakan sebagai lanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya dan merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini, memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan dalam Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2022, maka rencana program dan kegiatan prioritas diarahkan pada upaya mewujudkan tema ***“Memantapkan Pemulihan Ekonomi & Sosial yang Berkontribusi terhadap Pemerataan Pendapatan Masyarakat dengan Memperhatikan Lingkungan.”***

Program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2022 mengacu dengan RKPD. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD pada tahun direncanakan. Sehingga perlu untuk mengetahui tingkat konsistensi antara program RPJMD dengan Program pada RKPD. Perumusan konsistensi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang juga berpedoman dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.

Pada Bab ini secara eksplisit menguraikan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Diuraikan dari program dan kegiatan yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat.



Uraian lengkap pagu indikatif yang direncanakan akan digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada tabel 5.10 berikut:

Tabel 5.10
Rekapitulasi Pagu Indikatif RKPD untuk dana Pembangunan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022

NO.	NAMA SKPD	JUMLAH PAGU
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	274.140.923.914,00
2	Dinas Kesehatan	145.744.555.455,00
3	RSUD Brigjen H. Hasan Basry	218.443.985.941,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	102.575.652.709,00
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	41.781.128.409,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	9.895.324.544,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.272.032.076,00
8	Dinas Sosial	32.416.861.919,00
9	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.103.160.696,00
10	Dinas Ketahanan Pangan	5.468.416.950,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.962.250.375,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.899.142.896,00
13	Dinas Perhubungan	5.899.397.303,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	11.512.345.000,00
15	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian	6.030.391.469,00



NO.	NAMA SKPD	JUMLAH PAGU
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.142.205.863,00
17	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	33.679.518.073,00
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6.210.295.048,00
19	Dinas Perikanan	5.854.071.839,00
20	Dinas Pertanian	22.315.445.230,00
21	Dinas Perdagangan	9.286.803.800,00
22	Sekretariat Daerah	44.261.698.730,00
23	Sekretariat DPRD	47.013.821.750,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	6.500.052.075,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	229.682.307.295,00
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	16.822.646.340,00
27	Inspektorat	10.836.696.792,00
28	Kecamatan Sungai Raya	2.246.207.506,00
29	Kecamatan Padang Batung	2.962.425.107,00
30	Kecamatan Telaga Langsat	2.595.592.333,00
31	Kecamatan Angkinang	2.830.945.678,00
32	Kecamatan Kandangan	11.912.759.292,00
33	Kecamatan Simpur	3.252.060.750,00
34	Kecamatan Daha Selatan	3.075.624.360,00



NO.	NAMA SKPD	JUMLAH PAGU
35	Kecamatan Daha Utara	2.766.017.700,00
36	Kecamatan Kalumpang	2.857.242.120,00
37	Kecamatan Loksado	2.698.471.440,00
38	Kecamatan Daha Barat	2.167.879.900,00
39	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.353.445.439,00
40	RS Daha Sejahtera	11.275.972.616,00
JUMLAH		1.365.745.776.732,00

Sumber : Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan 20212

5. Program RKPD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 yang Mendukung Prioritas Daerah

Selanjutnya kami sajikan tabel Rekapitulasi Program RKPD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 yang Mendukung Prioritas Provinsi:

Tabel 5. 11
Rekapitulasi Program RKPD Kab. Hulu Sungai Selatan
Tahun 2022 yang Mendukung Prioritas Daerah

NO	PRIORITAS DAERAH	NO	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	1	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan RSUD Hasan Basry
		3	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan



NO	PRIORITAS DAERAH	NO	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	OPD PENANGGUNG JAWAB
		4	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
		5	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas PPKBPPPA
		6	Program Perlindungan Perempuan	Dinas PPKBPPPA
		7	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Dinas PPKBPPPA
		8	Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas PPKBPPPA
		9	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas PPKBPPPA
		10	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas PPKBPPPA
		11	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Porapar
		12	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Porapar
		13	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		14	Program Pengembangan Sumber Daya	BKPSDM
2	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	1	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
		2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran



NO	PRIORITAS DAERAH	NO	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	OPD PENANGGUNG JAWAB
2	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	3	Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Dukcapil
		4	Program Pencatatan Sipil	Dinas Dukcapil
		5	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Dukcapil
		6	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas PMD
		7	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Kominfo
		8	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Kominfo
		9	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas PMPTSP
		10	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Dinas Kominfo
		11	Program Pengelolaan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		12	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Semua Kecamatan
		13	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Semua Kecamatan
		14	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Semua Kecamatan
		15	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Semua Kecamatan
		16	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Semua Kecamatan
		17	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat



NO	PRIORITAS DAERAH	NO	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	OPD PENANGGUNG JAWAB
		18	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD
		19	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
		20	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretariat Daerah
		21	Program Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
		22	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappelitbangda
		23	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappelitbangda
		24	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Bappelitbangda
		25	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPKPD
		26	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKPD
		27	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKPD
		28	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Kesbangpol
		29	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Kesbangpol
		30	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kesbangpol



NO	PRIORITAS DAERAH	NO	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	OPD PENANGGUNG JAWAB
		31	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kesbangpol
		32	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Kesbangpol
		33	Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM
		1	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
		2	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
3	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Inklusif	3	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Nakerkop, UKMP
3	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Inklusif	4	Program Hubungan Industrial	Dinas Nakerkop, UKMP
		5	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Nakerkop, UKMP
		6	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
		7	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas PMD
		8	Program Peningkatan Kerja sama Desa	Dinas PMD
		9	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP	Dinas Nakerkop, UKMP



NO	PRIORITAS DAERAH	NO	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	OPD PENANGGUNG JAWAB
		10	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Dinas Nakerkop, UKMP
		11	Program Pengembangan UMKM	Dinas Nakerkop, UKMP
		12	Program Promosi Penanaman Modal	Dinas PMPTSP
		13	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas PMPTSP
		14	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		15	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		16	Program Pengelolaan Permuseuman	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		17	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
		18	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
		19	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan
		20	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Porapar
		21	Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Porapar
		22	Program Perizinan Usaha Pertanian	Dinas Pertanian
		23	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Pertanian
		24	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
		25	Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian



NO	PRIORITAS DAERAH	NO	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	OPD PENANGGUNG JAWAB
		26	Program Pengembangan Ekspor	Dinas Perdagangan
		27	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Dinas Perdagangan
		28	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Dinas Perdagangan
		29	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Dinas Perdagangan
		30	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Nakerkop, UKMP
		31	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Dinas Nakerkop, UKMP
		1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas PUTR
		2	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas PUTR
		3	Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas PUTR
4	Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Berkualitas	4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PUTR
		5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas PUTR
		6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas PUTR
		7	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas PUTR



NO	PRIORITAS DAERAH	NO	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	OPD PENANGGUNG JAWAB
		8	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Dinas PUTR
		9	Program Pengembangan Perumahan	Dispera, KPLH
		10	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dispera, KPLH
		11	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Dispera, KPLH
		12	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan
		13	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Dispera, KPLH
		14	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
		15	Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
		16	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perdagangan
5	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	1	Program Pengelolaan Persampahan	Dispera, KPLH
		2	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dispera, KPLH
		3	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dispera, KPLH
		4	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dispera, KPLH



NO	PRIORITAS DAERAH	NO	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	OPD PENANGGUNG JAWAB
		5	Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dispera, KPLH
		6	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Dispera, KPLH
		7	Program Penanggulangan Bencana	BPBD

Sumber: Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan, 2022

6. Program RKPD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 yang Mendukung Prioritas Provinsi

Selanjutnya kami sajikan tabel Rekapitulasi Program RKPD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 yang Mendukung Prioritas Provinsi:

Tabel 5.12
Rekapitulasi Program RKPD Kab. Hulu Sungai Selatan
Tahun 2022 yang Mendukung Prioritas Provinsi

NO	PRIORITAS DAERAH	NO	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	Transformasi Struktur Ekonomi ke Sektor Industri, Pertanian, dan Pariwisata	1	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
		2	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
		3	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Nakerkop, UKMP
		4	Program Hubungan Industrial	Dinas Nakerkop, UKMP



NO	PRIORITAS DAERAH	NO	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	OPD PENANGGUNG JAWAB
		5	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Nakerkop, UKMP
		6	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
		7	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas PMD
		8	Program Peningkatan Kerja sama Desa	Dinas PMD
		9	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP	Dinas Nakerkop, UKMP
		10	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Dinas Nakerkop, UKMP
		11	Program Pengembangan UMKM	Dinas Nakerkop, UKMP
		12	Program Promosi Penanaman Modal	Dinas PMPTSP
		13	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas PMPTSP
		14	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		15	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		16	Program Pengelolaan Permuseuman	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		17	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan



NO	PRIORITAS DAERAH	NO	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	OPD PENANGGUNG JAWAB
		18	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
		19	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan
		20	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Porapar
		21	Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Porapar
		22	Program Perizinan Usaha Pertanian	Dinas Pertanian
		23	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Pertanian
		24	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
		25	Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian
		26	Program Pengembangan Ekspor	Dinas Perdagangan
		27	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Dinas Perdagangan
		28	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Dinas Perdagangan
		29	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Dinas Perdagangan
		30	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Nakerkop, UKMP
		31	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Dinas Nakerkop, UKMP



NO	PRIORITAS DAERAH	NO	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	OPD PENANGGUNG JAWAB
		32	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
		33	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
		34	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas PPKBPPPA
		35	Program Perlindungan Perempuan	Dinas PPKBPPPA
		36	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Dinas PPKBPPPA
		37	Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas PPKBPPPA
		38	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas PPKBPPPA
		39	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas PPKBPPPA
		40	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Porapar
		41	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Porapar
		42	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		43	Program Pengembangan Sumber Daya	BKPSDM
2	Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan	1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas PUTR
		2	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas PUTR



NO	PRIORITAS DAERAH	NO	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	OPD PENANGGUNG JAWAB
	Perekonomian	3	Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas PUTR
		4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PUTR
		5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas PUTR
		6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas PUTR
		7	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas PUTR
		8	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Dinas PUTR
		9	Program Pengembangan Perumahan	Dispera, KPLH
		10	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dispera, KPLH
		11	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Dispera, KPLH
		12	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan
		13	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Dispera, KPLH
		14	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan



NO	PRIORITAS DAERAH	NO	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	OPD PENANGGUNG JAWAB
		15	Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
		16	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perdagangan
3	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	1	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
		2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
		3	Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Dukcapil
		4	Program Pencatatan Sipil	Dinas Dukcapil
		5	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Dukcapil
		6	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas PMD
		7	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Kominfo
		8	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Kominfo
		9	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas PMPTSP
		10	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Dinas Kominfo
		11	Program Pengelolaan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Tata Kelola	1	Program Penyelenggaraan	Semua Kecamatan



NO	PRIORITAS DAERAH	NO	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	OPD PENANGGUNG JAWAB
4	Pemerintahan yang Baik		Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
		2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Semua Kecamatan
		3	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Semua Kecamatan
		4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Semua Kecamatan
		5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Semua Kecamatan
		6	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
		7	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD
		8	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
		9	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretariat Daerah
		10	Program Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
		11	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappelitbangda
		12	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappelitbangda



NO	PRIORITAS DAERAH	NO	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	OPD PENANGGUNG JAWAB
		13	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Bappelitbangda
		14	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPKPD
		15	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKPD
		16	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKPD
		17	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Kesbangpol
		18	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Kesbangpol
		19	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kesbangpol
		20	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kesbangpol
		21	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Kesbangpol
		22	Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM



NO	PRIORITAS DAERAH	NO	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	OPD PENANGGUNG JAWAB
5	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Untuk Memperkuat Ketahanan Bencana	1	Program Pengelolaan Persampahan	Dispera, KPLH
		2	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dispera, KPLH
		3	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dispera, KPLH
		4	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dispera, KPLH
		5	Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dispera, KPLH
		6	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Dispera, KPLH
		7	Program Penanggulangan Bencana	BPBD

Sumber : Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2021

7. Program RKPD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 yang Mendukung Prioritas Nasional

Selanjutnya kami sajikan tabel Rekapitulasi Program RKPD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 yang mendukung Prioritas Nasional:

Tabel 5.13

Rekapitulasi Program RKPD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 yang Mendukung Prioritas Nasional

NO	PRIORITAS NASIONAL	NO	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	OPD PENANGGUNG JAWAB
		1	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial



NO	PRIORITAS NASIONAL	NO	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	2	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
		3	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Nakerkop, UKMP
		4	Program Hubungan Industrial	Dinas Nakerkop, UKMP
		5	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Nakerkop, UKMP
		6	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
		7	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas PMD
		8	Program Peningkatan Kerja sama Desa	Dinas PMD
		9	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP	Dinas Nakerkop, UKMP
		10	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Dinas Nakerkop, UKMP
		11	Program Pengembangan UMKM	Dinas Nakerkop, UKMP
		12	Program Promosi Penanaman Modal	Dinas PMPTSP
		13	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas PMPTSP
		14	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan



NO	PRIORITAS NASIONAL	NO	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	OPD PENANGGUNG JAWAB
		15	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
		16	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan
		17	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Porapar
		18	Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Porapar
		19	Program Perizinan Usaha Pertanian	Dinas Pertanian
		20	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Pertanian
		21	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
		22	Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian
		23	Program Pengembangan Ekspor	Dinas Perdagangan
		24	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Dinas Perdagangan
		25	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Dinas Perdagangan
		26	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Dinas Perdagangan
		27	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Nakerkop, UKMP



NO	PRIORITAS NASIONAL	NO	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	OPD PENANGGUNG JAWAB
		28	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Dinas Nakerkop, UKMP
2	PN 3 Meningkatkan Sumber daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	1	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RSUD Hasan Basry
		4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
		5	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
		6	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas PPKBPPPA
		7	Program Perlindungan Perempuan	Dinas PPKBPPPA
		8	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Dinas PPKBPPPA
		9	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Porapar
		10	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Porapar
		11	Program Pengembangan Sumber Daya	BKPSDM



NO	PRIORITAS NASIONAL	NO	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	OPD PENANGGUNG JAWAB
		12	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
		13	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
		14	Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Dukcapil
		15	Program Pencatatan Sipil	Dinas Dukcapil
		16	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Dukcapil
		17	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas PMD
		18	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Kominfo
		19	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas PMPTSP
		20	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Dinas Kominfo
		21	Program Pengelolaan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		22	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Semua Kecamatan
		23	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Semua Kecamatan



NO	PRIORITAS NASIONAL	NO	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	OPD PENANGGUNG JAWAB
		24	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Semua Kecamatan
		25	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Semua Kecamatan
		26	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
		27	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD
		28	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
		29	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretariat Daerah
		30	Program Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
		31	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappelitbangda
		32	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappelitbangda
		33	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Bappelitbangda
		34	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPKPD
		35	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKPD



NO	PRIORITAS NASIONAL	NO	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	OPD PENANGGUNG JAWAB
		36	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKPD
		37	Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM
3	PN4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		3	Program Pengelolaan Permuseuman	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		4	Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas PPKBPPPA
		5	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas PPKBPPPA
		6	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas PPKBPPPA
		7	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		8	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Kesbangpol
		9	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kesbangpol
4	PN 5 Memperkuat Infrastruktur Untuk	1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas PUTR
		2	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas PUTR



NO	PRIORITAS NASIONAL	NO	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	OPD PENANGGUNG JAWAB
	Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	3	Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas PUTR
		4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PUTR
		5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas PUTR
		6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas PUTR
		7	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas PUTR
		8	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Dinas PUTR
		9	Program Pengembangan Perumahan	Dispera, KPLH
		10	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dispera, KPLH
		11	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Dispera, KPLH
		12	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan
		13	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Dispera, KPLH
		14	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Dinas Perhubungan



NO	PRIORITAS NASIONAL	NO	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	OPD PENANGGUNG JAWAB
			(LLAJ)	
		15	Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
		16	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perdagangan
5	PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	1	Program Pengelolaan Persampahan	Dispera, KPLH
		2	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dispera, KPLH
		3	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dispera, KPLH
		4	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dispera, KPLH
		5	Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dispera, KPLH
		6	Program Penangan Pengaduan Lingkungan Hidup	Dispera, KPLH
		7	Program Penanggulangan Bencana	BPB, Kesbangpol
6	PN 7 Memperkuat	1	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Kominfo



NO	PRIORITAS NASIONAL	NO	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	OPD PENANGGUNG JAWAB
	Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Semua Kecamatan
		3	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Kesbangpol
		4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kesbangpol
		5	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Kesbangpol

Sumber : Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2022



BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. Capaian Kinerja Makro

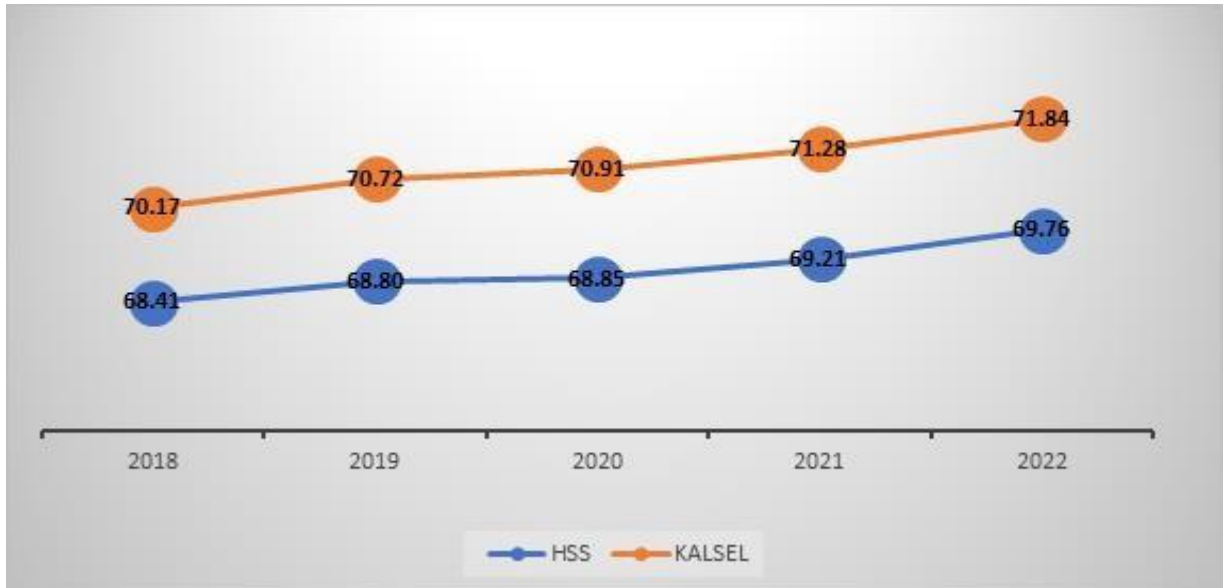
Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

2.1.1 Indek Pembangunan Manusia

Perkembangan angka IPM dari tahun ke tahun memberikan indikasi peningkatan atau penurunan kinerja pembangunan manusia pada daerah yang bersangkutan. Perkembangan IPM dapat terjadi karena adanya perubahan satu atau lebih komponen IPM. Perubahan yang dimaksud dapat berupa peningkatan maupun penurunan besaran persen dari komponen pembentuk IPM, seperti umur harapan hidup, harapan sekolah, rata-rata lama sekolah atau pengeluaran perkapita yang disesuaikan. Perubahan dari masing-masing komponen tersebut sangat ditentukan oleh berbagai faktor. Perkembangan manusia di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang signifikan. Angka IPM Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara perlahan bergerak naik mencapai 69,76 di tahun 2022 (masuk dalam kategori sedang), atau meningkat sekitar 0,55 poin dari tahun sebelumnya (69,21). Peningkatan IPM tahun 2022 ini lebih tinggi dari peningkatan IPM tahun 2021 yang meningkat hanya sebesar 0,36 poin.



Grafik Perkembangan IPM Kab. HSS dan Prov. Kal-Sel Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Kab. HSS

2.1.2 Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah kemanusiaan yang sangat kompleks yang terjadi di berbagai belahan dunia, terutama di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Berbagai upaya telah dan masih dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan. Bahkan pengentasan kemiskinan menjadi salah satu isu global yang tercantum dalam Sustainable Development Goals disingkat dengan SDGs Tujuan pertama SDGs yang berbunyi Mengakhiri kemiskinan di manapun dan dalam semua bentuk mempunyai target yaitu sebagai berikut :

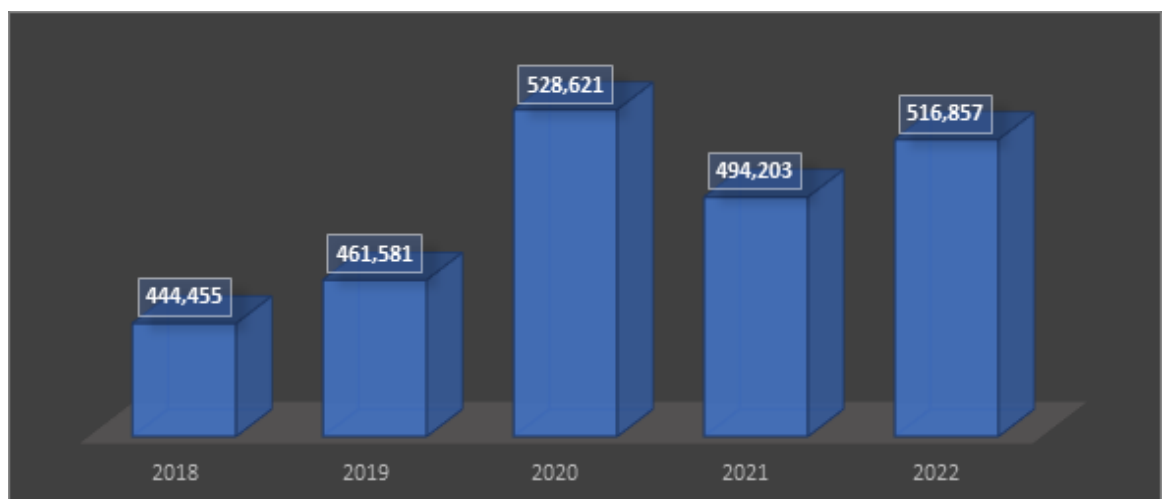
1. Menghapus kemiskinan ekstrim (penduduk di bawah garis kemiskinan) dengan daya beli kurang dari \$1,25 PPP (*Purchasing Power Parity*) atau sekitar Rp 7.800 per hari.
2. Mengurangi setidaknya separuh dari jumlah penduduk miskin (laki-laki, perempuan dan anak dari segala usia) berdasarkan definisi nasional.
3. Di tingkat nasional mengimplementasikan sistem dan ukuran perlindungan sosial yang tepat bagi semua level masyarakat. Tahun 2030 berhasil memberikan perlindungan yang substansial bagi kelompok miskin dan rentan.



4. Memastikan semua penduduk, terutama penduduk miskin dan rentan mendapat hak setara mengakses sumber ekonomi (seperti halnya hak layanan dasar), kepemilikan dan akses pada lahan. Memastikan mereka memperoleh akses teknologi.
5. Membangun yang dibutuhkan dan layanan keuangan termasuk keuangan mikro, daya tahan dan kesiapan masyarakat miskin dan kelompok rentan menghadapi perubahan iklim, krisis lingkungan, ekonomi, sosial, dan bencana.

Penghitungan penduduk miskin tidak terlepas dari garis kemiskinan yang ditetapkan. Garis kemiskinan yang digunakan sebagai batas untuk mengelompokkan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan dibawah garis kemiskinan. Pada tahun 2022, garis kemiskinan perkapita di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar Rp. 516.857,-. Hal ini berarti bahwa penduduk yang pengeluaran untuk konsumsinya perbulan kurang dari Rp. 516.857,- dapat dikatakan sebagaipenduduk miskin. Besaran garis kemiskinan tahun 2022 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami peningkatan dari tahun 2021.

Grafik Garis Kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2022 (Rp/Kap/Bulan)



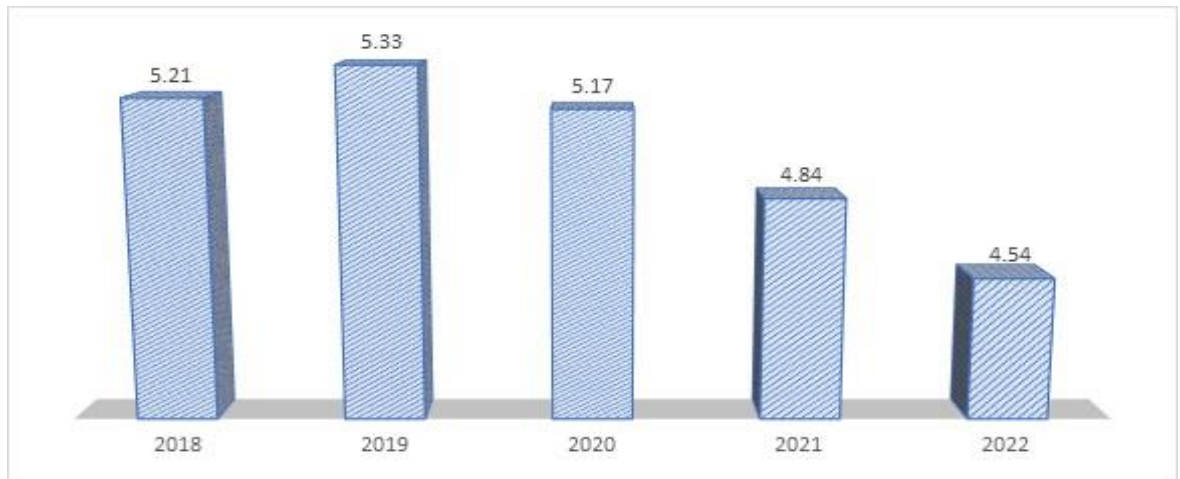
Sumber : BPS Kab. HSS

Penduduk miskin adalah penduduk yang memilikipengeluaran perkapita perbulan lebih kecil dari gariskemiskinan. Penduduk miskin Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 10,800 ribu



orang atau sekitar 4,54 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan dibandingkan tahun 2021 sebesar 11,466 ribu orang atau 4,84 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Grafik Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2022 (%)

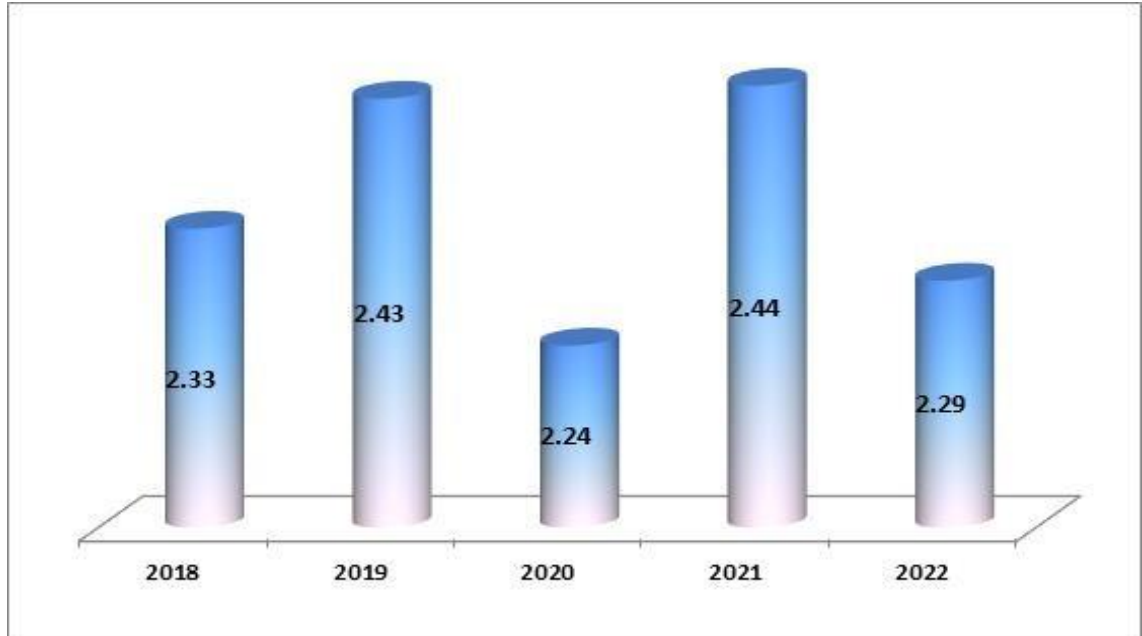


Sumber : BPS Kab. HSS

2.1.3 Angka Pengangguran

TPT (Tingkat pengangguran terbuka). Merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran dengan penduduk angkatan kerja. TPT Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2022 adalah 2,29 persen, yang artinya dari 100 orang angkatan kerja di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang termasuk kategori pengangguran ada sekitar 2 orang. Ditengah pemulihan pasca pandemi covid 19 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berhasil menurunkan angka pengangguran, hal ini ditunjukkan dengan indikator TPT yang mengalami penurunan sebesar 0,15persen dibandingkan tahun 2021 yaitu sebesar 2,44 persen, sebagaimana yang terlampir pada grafik berikut ini.

Grafik Tingkat Pengangguran Terbukadi Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Kab. HSS

2.1.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk menilai kinerja perekonomian dan merupakan salah satu sasaran dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Secara umum laju pertumbuhan ekonomi baik agregat maupun sektoral dihitung berdasarkan PDRBatas dasar harga konstan, bukan atas dasar harga berlaku. PDRB atas dasar harga berlaku belum menggambarkan kenaikan atau pertumbuhan yang riil, karena masih dipengaruhi kenaikan tingkatharga atau inflasi.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibatberbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan.



PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang diukur dari besaran PDRB baik atas dasar harga berlaku (adhb) maupun atas dasar harga konstan tahun dasar 2010 (adhk), secara agregat menunjukkan perkembangan yang terus meningkat selama periode 2018 – 2022. Pada tahun 2022, PDRB Kabupaten Hulu Sungai Selatan adhb sebesar 8,34 Triliyun rupiah, sementara adhk sebesar 5,04 Triliyun rupiah. Angka yang dicapai pada tahun 2022 ini sedikit lebih besar dibandingkan dengan angka yang dicapai pada tahun sebelumnya. Secara kuantitas, ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2022 mulai meningkat walaupun pandemi Covid 19 belum sepenuhnya berakhir.

Tabel 2.1
Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan dan Berlaku dan Pertumbuhan
Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)

Tahun	PDRB Atas Dasar Berlaku	PDRB Atas Dasar Konstan	Pertumbuhan Ekonomi
(1)	(2)	(3)	(4)
2018	6.158,26	4.470,25	6,14
2019	6.555,48	4.706,46	5,28
2020	6.564,93	4.650,23	-1,19
2021*)	7.125,71	4.844,91	4,19
2022**)	8.349,10	5.039,67	4,02

Sumber : BPS Kab. HSS

*) Angka Sementara

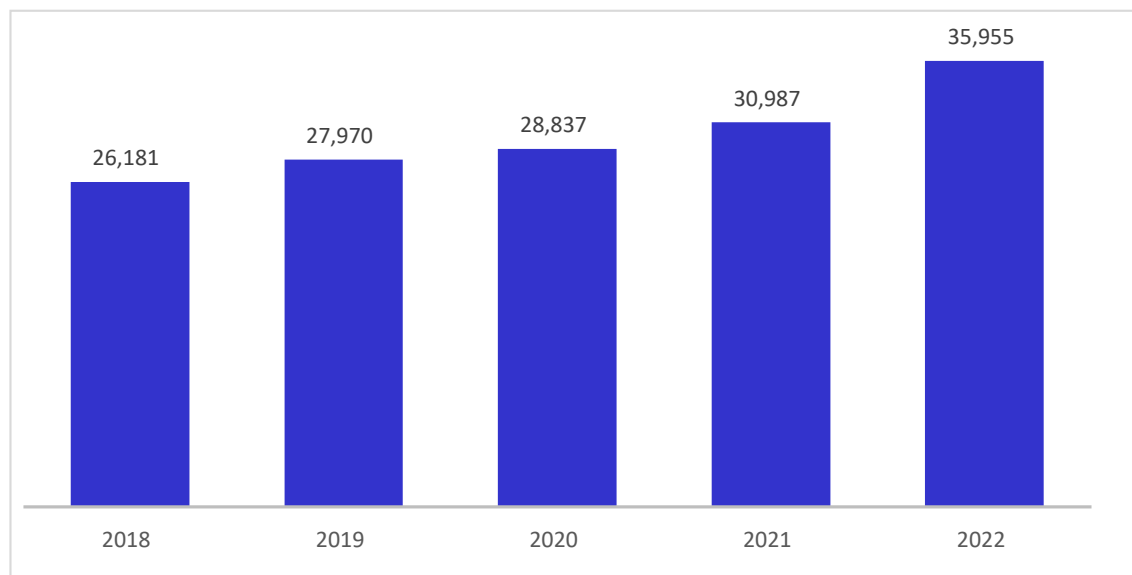
***) Angka Sangat Sementara



2.1.5 Pendapatan Perkapita

PDRB Per Kapita Kabupaten Hulu Sungai Selatan selalu mengalami kenaikan yang relatif signifikan setiap tahunnya. Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Nilai PDRB per kapita Hulu Sungai Selatan atas dasar harga berlaku sejak tahun 2018 hingga 2022 senantiasa mengalami kenaikan. PDRB perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu daerah. Grafik dibawah ini menunjukkan perkembangan PDRB perkapita Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2018– 2022.

Grafik PDRB Perkapita Kabupaten Hulu Sungai Selatan
ADHB (ribu rupiah)



Sumber : BPS Kab. HSS



2.1.6 Gini Ratio

Salah satu indikator untuk mengetahui ketimpangan distribusi pendapatan penduduk adalah gini ratio. Indeks gini adalah ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar nol (pemerataan sempurna, dimana satu orang menguasai semuanya dan yang lainnya nihil). Koefisien gini dapat diperoleh dengan menghitung rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dan kurva *Lorenz* dibagi dengan luas separuh bidang dimana kurva *Lorenz* berada.

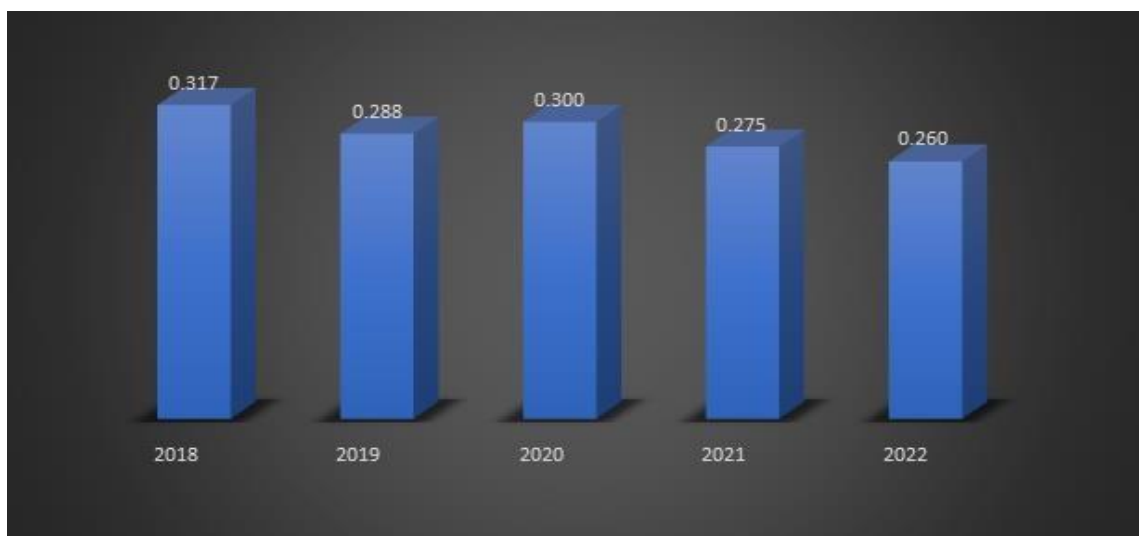
Secara umum angka Gini Ratio dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

$0 < \text{Gini Ratio} \leq 0,35$ ----- ketimpangan rendah

$0,35 < \text{Gini Ratio} \leq 0,50$ ----- ketimpangan sedang

$\text{Gini Ratio} > 0,50$ ----- ketimpangan tinggi

**Grafik Gini Ratio Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tahun 2018-2022**



Sumber : BPS Kab. HSS

Nilai dari indeks Gini berkisar antara 0 dan 1. Semakin mendekati 0 dikatakan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok pengeluaran semakin rendah, sebaliknya mendekati 1 dikatakan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok pengeluaran semakin tinggi. Jika rasio lebih dari 0,5 maka terjadi ketimpangan yang cukup tajam dan serius, dan jika rasio berkisar 0,30 – 0,49 maka distribusi pendapatan relatif merata. Olah data Susenas menunjukkan bahwa Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun



2022 gini rasionya sebesar 0,260. Besaran Indeks Gini Ratio relatif mengalami penurunan sejak tahun 2018 hingga tahun 2022. Hal ini menggambarkan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih rendah.

Capaian Kinerja makro Tahun 2022 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Makro Tahun 2022

NO	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indek Pembangunan Manusia	69,21	69,76	0,79
2	Angka Kemiskinan	4,84	4,54	(6,20)
3	Angka Pengangguran	2,44	2,29	(6,15)
4	Pertumbuhan Ekonomi	4,18	4,02	(3,83)
5	Pendapatan Perkapita	30.987	35.955	16,03
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,275	0,260	(5,45)



2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)

Capaian Kinerja Keluaran (Output) Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Keluaran (Output)

NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	246 Buah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	7087 Peserta Didik	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima Pembebasan biaya pendidikan	7087 Peserta Didik	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	887 Pendidik	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	589 Pendidik	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) Bidang Pendidikan anak usia dini, kependidikan lain ataupsikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	311 Pendidik	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IVatauS1,Sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah Untuk PAUD formal atau sertifikat Pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari Lembaga pemerintah	164 Kepala Sekolah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	249 SD & SMP	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	16.963 Peserta Didik	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	5.543 Peserta Didik	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar(Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya Pendidikan	16.963 Peserta Didik	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima embebasan biaya pendidikan	5543 Peserta Didik	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	1.721 Pendidik	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	294 Pendidik	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	1.386 Pendidik	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	486 Pendidik	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	848 Tenaga kependidikan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	96 Tenaga kependidikan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	225 Tenaga kependidikan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	178 Tenaga kependidikan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1.386 Pendidik	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	486 Pendidik	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	199 Kepala Sekolah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	33 Kepala Sekolah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	26 Tenaga Penunjang	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	50 Tenaga Penunjang	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	249 SD & SMP	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	16.963 Peserta Didik	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	5.543 Peserta Didik	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	16.963 Peserta Didik	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	5.543 Peserta Didik	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang ekolah dasar	1.721 Pendidik	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	294 Pendidik	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	1.386 Pendidik	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	486 Pendidik	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	1.721 Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	294 Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	225 Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	178 Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1.246 Pendidik	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	228 Pendidik	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	199 Kepala Sekolah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	33 Kepala Sekolah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	26 Tenaga Penunjang	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	50 Tenaga Penunjang	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	13 Satuan Pendidikan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	5.363 Peserta Didik	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	5.363 Peserta Didik	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	908 Pendidik	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	908 Pendidik	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	679 Pendidik	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	199 Kepala Sekolah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1.	14 Kepala Sekolah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
2	Kesehatan	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	5 RS	Dinas Kesehatan Kab. HSS	
		Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	2 RS	Dinas Kesehatan Kab. HSS	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	5 Logistik	Dinas Kesehatan Kab. HSS	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	250 SDM	Dinas Kesehatan Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3 Logistik	Dinas Kesehatan Kab. HSS	
		Jumlah SDM kesehatan untuk persalinan sesuai standar	250 SDM	Dinas Kesehatan Kab. HSS	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	6 Logistik	Dinas Kesehatan Kab. HSS	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal	250 SDM	Dinas Kesehatan Kab. HSS	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	7 Logistik	Dinas Kesehatan Kab. HSS	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	430 SDM	Dinas Kesehatan Kab. HSS	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	5 Logistik	Dinas Kesehatan Kab. HSS	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan anak usia dini dasar sesuai standar	1170 SDM	Dinas Kesehatan Kab. HSS	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3 Logistik	Dinas Kesehatan Kab. HSS	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	422 SDM	Dinas Kesehatan Kab. HSS	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3 Logistik	Dinas Kesehatan Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	380 SDM	Dinas Kesehatan Kab. HSS	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3 Logistik	Dinas Kesehatan Kab. HSS	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	253 SDM	Dinas Kesehatan Kab. HSS	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3 Logistik	Dinas Kesehatan Kab. HSS	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	274 SDM	Dinas Kesehatan Kab. HSS	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	4 Logistik	Dinas Kesehatan Kab. HSS	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	42 SDM	Dinas Kesehatan Kab. HSS	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	7 Logistik	Dinas Kesehatan Kab. HSS	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	255 SDM	Dinas Kesehatan Kab. HSS	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	4 Logistik	Dinas Kesehatan Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	126 SDM	Dinas Kesehatan Kab. HSS	
3	Pekerjaan Umum	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan abupaten/kota (ha)	23,021 Ha	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/ kota (m)	522.957 m	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	0	Dinas PUTR Kab. HSS	Kab. HSS Tidak mempunyai pantai
		Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi, akresi di WS wewenangan kabupaten /kota (m)	0	Dinas PUTR Kab. HSS	Kab. HSS Tidak mempunyai pantai
		Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/ rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	0	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan	0	Dinas PUTR Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		kabupaten/kota			
		Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	0	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/ kota (ha)	23,021 Ha	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Panjang sungai di Kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/ kota (m)	522.957 M	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Luas Kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS Kewenangan kabupaten/ kota (ha)	0	Dinas PUTR Kab. HSS	Kab. HSS Tidak mempunyai pantai
		Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/ kota (m)	0	Dinas PUTR Kab. HSS	Kab. HSS Tidak mempunyai pantai
		Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/ rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	Ada	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Rencana Teknis tata	Ada	Dinas PUTR Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/ kota			
		Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	0	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Persentase Panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	85 %	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	73 %	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	62 %	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota	Ada	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota	Ada	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggara SPAM	1 Kerjasama	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	10 Izin	Dinas PUTR Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	10	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	46.264 Rumah	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	77 Rumah	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	46.361 Rumah	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	231 Rumah	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	231 Rumah	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa	231 Rumah	Dinas PUTR Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		pengolahan air limbah domestik			
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	82,35 %	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	4,96 %	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	100 %	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	82,35 %	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	100 %	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Kinerja penyediaan Prasarana pengolahan lumpur tinja	150 %	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	100 %	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	0,41 %	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	-	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	571 IMB	Dinas PUTR Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	Ada	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	Ada	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	9	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	17 Bangunan	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	2677 Bangunan	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	2677 Bangunan	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota	858,360 Km	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Panjang jalan yang dibangun	0,30 Km	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Panjang jembatan yang dibangun	858,360 M	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/ fungsi)	50 Km	Dinas PUTR Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	8,02 M	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	12,94 Km	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Panjang jembatan yang direhabilitasi	48,30 M	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Panjang jalan yang dipelihara	10,3 Km	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Panjang jembatan yang dipelihara	131,6 M	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	1 Kali	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Jumlah tenaga kerja perator /teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	168 Orang	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/ teknisi analisis di wilayah kabupaten/kota	146 Orang	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Terselenggaranya Sistem informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	Ada	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk	Tidak	Dinas PUTR Kab. HSS	Surat Pernyataan



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota			
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	Tidak	Dinas PUTR Kab. HSS	Surat Pernyataan
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	Tidak	Dinas PUTR Kab. HSS	Surat Pernyataan
		Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	Tidak	Dinas PUTR Kab. HSS	Surat Pernyataan
		Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	Ada	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga	Ada	Dinas PUTR Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.			
		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	Ada	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator / teknisi/analisis di wilayah kab/kota	Ada	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	Ada	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Ada	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian	Ada	Dinas PUTR Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya			
		Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	Ada	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	Ada	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	Ada	Dinas PUTR Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	Ada	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Ada	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Jumlah pengawasan Terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usahadengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada	Dinas PUTR Kab. HSS	
4	Perumahan Rakyat	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	572	Dinas Perumahan	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
				Rakyat KP dan LH Kab. HSS	
		Jumlah rumah yang terkena bencana alam	0 Rumah	Dinas Perumahan Rakyat KP dan LH Kab. HSS	Tidak ada bencana
		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	0 RT, KK dan Jiwa	Dinas Perumahan Rakyat KP dan LH Kab. HSS	Tidak ada KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam
		Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	0 Rumah	Dinas Perumahan Rakyat KP dan LH Kab. HSS	Tidak ada bencana
		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0 Rumah	Dinas Perumahan Rakyat KP dan LH Kab. HSS	Tidak ada bencana
		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	0 Rumah	Dinas Perumahan Rakyat KP dan LH Kab. HSS	Tidak ada bencana



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0 Rumah	Dinas Perumahan Rakyat KP dan LH Kab. HSS	Tidak ada bencana
		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	0 RT, KK dan Jiwa	Dinas Perumahan Rakyat KP dan LH Kab. HSS	Tidak ada bencana
		Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	0 Ha	Dinas Perumahan Rakyat KP dan LH Kab. HSS	Belum ada lokasi Pencadangan lahan
		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0 KK	Dinas Perumahan Rakyat KP dan LH Kab. HSS	Tidak ada KK yang kena Relokasi Program Pemerintah
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0 KK	Dinas Perumahan Rakyat KP dan LH Kab. HSS	Tidak ada KK yang kena Relokasi Program Pemerintah



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0 KK	Dinas Perumahan Rakyat KP dan LH Kab. HSS	Tidak ada KK yang kena Relokasi Program Pemerintah
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0 KK	Dinas Perumahan Rakyat KP dan LH Kab. HSS	Tidak ada KK yang kena Relokasi Program Pemerintah
		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0 KK	Dinas Perumahan Rakyat KP dan LH Kab. HSS	Tidak ada KK yang kena Relokasi Program Pemerintah
		Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	0 Ha	Dinas Perumahan Rakyat KP dan LH Kab. HSS	Tidak ada KK yang kena Relokasi Program Pemerintah
		Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	171,95 Ha	Dinas Perumahan Rakyat KP dan LH Kab. HSS	
		Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	481 Rumah	Dinas Perumahan	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
				Rakyat KP dan LH Kab. HSS	
		Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	147,99 Ha	Dinas Perumahan Rakyat KP dan LH Kab. HSS	
		Jumlah rumah di kab/ kota	69.982 Buah Rumah	Dinas Perumahan Rakyat KP dan LH Kab. HSS	
		Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	481 Rumah	Dinas Perumahan Rakyat KP dan LH Kab. HSS	
		Jumlah rumah tidak layak huni	5.336 Rumah	Dinas Perumahan Rakyat KP dan LH Kab. HSS	
		Jumlah rumah yang tidak dihuni	0 Rumah	Dinas Perumahan Rakyat KP dan LH Kab. HSS	Semua Rumah dihuni
		Rasio rumah dan KK	1,18:1	Dinas Perumahan	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
				Rakyat KP dan LH Kab. HSS	
		Jumlah rumah pembangunan baru	0 Buah	Dinas Perumahan Rakyat KP dan LH Kab. HSS	
		Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	26 Perumahan	Dinas Perumahan Rakyat KP dan LH Kab. HSS	
		Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	26 Rumah	Dinas Perumahan Rakyat KP dan LH Kab. HSS	
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	26 Rumah	Dinas Perumahan Rakyat KP dan LH Kab. HSS	
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	26 Rumah	Dinas Perumahan Rakyat KP dan LH Kab. HSS	
		Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	26 Perumahan	Dinas Perumahan	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
				Rakyat KP dan LH Kab. HSS	
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	26 Rumah	Dinas Perumahan Rakyat KP dan LH Kab. HSS	
		Jumlah pengembang yang tersertifikasi	0 Pengembang	Dinas Perumahan Rakyat KP dan LH Kab. HSS	
		Jumlah pengembang yang teregistrasi	1 Pengembang	Dinas Perumahan Rakyat KP dan LH Kab. HSS	
		Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	6 Pengembang	Dinas Perumahan Rakyat KP dan LH Kab. HSS	
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	253 Pelanggaran	Satpol PP dan Damkar KabHSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	1100 Orang	Satpol PP dan Damkar Kab HSS	
		Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	14 Perda	Satpol PP dan Damkar Kab HSS	
		Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	2 Orang	Satpol PP dan Damkar Kab HSS	
		Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	Ada	Satpol PP dan Damkar Kab HSS	
		Tersedianya sarana prasarana minimal	18	Satpol PP dan Damkar Kab HSS	
		Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	0 %	BPBD Kab. HSS	Draft Dokumen KRB
		Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100,00 %	BPBD Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	0 %	BPBD Kab. HSS	Draft Dokumen RBP
		Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	100,00 %	BPBD Kab. HSS	
		Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	100 %	BPBD Kab. HSS	
		Persentase warga negara yang ikut pelatihan	100 %	BPBD Kab. HSS	
		Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	100,00%	BPBD Kab. HSS	
		Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	100,00%	BPBD Kab. HSS	
		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	100,00%	BPBD Kab. HSS	
		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100,00%	BPBD Kab. HSS	
		Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100 %	BPBD Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100 %	BPBD Kab. HSS	Pernyataan bahwa tidak ada Korban bencana
		Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten /kota	16	Satpol PP dan Damkar KabHSS	Pernyataan bahwa tidak ada penyelamatan dan evakuasi kondisi yang membahayakan manusia.
		Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Ada	Satpol PP dan Damkar KabHSS	
		Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	Ada	Satpol PP dan Damkar KabHSS	
		Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	58	Satpol PP dan Damkar KabHSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	60	Satpol PP dan Damkar Kab HSS	
		Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	6	Satpol PP dan Damkar KabHSS	
		Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	1003	Satpol PP dan Damkar KabHSS	
		Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	6	Satpol PP dan Damkar Kab HSS	
6	Sosial	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	1 Layanan	Dinas Sosial Kab. HSS	
		Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data	2.049 Orang	Dinas Sosial Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		terpadu FM dan OTM			
		Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	76 Orang	Dinas Sosial Kab. HSS	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	46 Orang	Dinas Sosial Kab. HSS	
		Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	5 Buah	Dinas Sosial Kab. HSS	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	1.468 Orang	Dinas Sosial Kab. HSS	
		Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	1 Buah	Dinas Sosial Kab. HSS	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	74 orang	Dinas Sosial Kab. HSS	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat	15 Orang	Dinas Sosial Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		bantu			
		Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter	2 alat bantu	Dinas Sosial Kab. HSS	
		Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	16 Paket	Dinas Sosial Kab. HSS	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	16 Orang	Dinas Sosial Kab. HSS	
		Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	2 Orang	Dinas Sosial Kab. HSS	
		Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	260 Orang	Dinas Sosial Kab. HSS	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	84 Orang	Dinas Sosial Kab. HSS	
		Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga	100 kali	Dinas Sosial Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		dan masyarakat			
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	1.310 Orang	Dinas Sosial Kab. HSS	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	206 Orang	Dinas Sosial Kab. HSS	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	46 Orang	Dinas Sosial Kab. HSS	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	46 Orang	Dinas Sosial Kab. HSS	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	63 Orang	Dinas Sosial Kab. HSS	
		Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	261 Orang	Dinas Sosial Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	136 Orang	Dinas Sosial Kab. HSS	
		Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	1 Tempat	Dinas Sosial Kab. HSS	
		Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	84 Paket	Dinas Sosial Kab. HSS	
		Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	350 Orang	Dinas Sosial Kab. HSS	
		Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	260 Orang	Dinas Sosial Kab. HSS	
7	Tenaga Kerja	Dokumen perencanaan Tenaga kerja kabupaten /kota.	1 Dokumen	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	100 %	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	35 Perusahaan	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	100 %	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	100 %	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Rasio jumlah instruktur Terhadap peserta pelatihan	9,02 %	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Persentase LPK yang terakreditasi	67,00 %	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Persentase LPK yang memiliki perizinan	100,00 %	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Jumlah penganggur yang dilatih	-	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	100 %	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Persentase penyerapan lulusan	11,68 %	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Lulusan bersertifikat kompetensi	30 %	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	0	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	Belum ada pelatihan CPMI/CTKI
		Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	0	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	Belum ada pelatihan CPMI/CTKI
		Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	100 %	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Data tingkat produktivitas total	0	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	147,50 %	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	143 %	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luarperusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	2619	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	85,51 %	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai eserta BPJS Ketenagakerjaan	100 %	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	0 %	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Jumlah mogok kerja	0	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	Tidak ada Mogok kerja



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah penutupan perusahaan	0	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	Tidak ada penutupan perusahaan
		Jumlah perselisihan kepentingan	0	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	Tidak ada perselisihan kepentingan
		Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	0	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	Tidak ada perselisihan antar serikat
		Jumlah perselisihan PHK	3	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	128 Pekerja	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	0	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	Tidak	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	0	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	Tidak ada perselisihan



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	368 Lowongan	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	714 Pencaker	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	4 BKK	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	10342	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	0	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	0	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota	2	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	0	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	0	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	0	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	0	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	0	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	0	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	0	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
8	Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/ kota yang telah dilatih PUG	38 Lembaga	Dinas PP, KB, PP dan PA Kab. HSS	
		Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	48 Prog/kegiatan	Dinas PP, KB, PP dan PA Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	34 Media Massa	Dinas PP, KB, PP dan PA Kab. HSS	
		Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	1 Lembaga	Dinas PP, KB, PP dan PA Kab. HSS	
		Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100,00 %	Dinas PP, KB, PP dan PA Kab. HSS	
		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	133 Lembaga	Dinas PP, KB, PP dan PA Kab. HSS	
		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	2 Lembaga	Dinas PP, KB, PP dan PA Kab. HSS	
		Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	3 Organisasi	Dinas PP, KB, PP dan PA Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	310 kader	Dinas PP, KB, PP dan PA Kab. HSS	
		Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	3 Lembaga	Dinas PP, KB, PP dan PA Kab. HSS	
		Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	3 Lembaga	Dinas PP, KB, PP dan PA Kab. HSS	
		Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	2 Kebijakan	Dinas PP, KB, PP dan PA Kab. HSS	
		Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	2 Lembaga	Dinas PP, KB, PP dan PA Kab. HSS	
		Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100 %	Dinas PP, KB, PP dan PA Kab. HSS	
9	Pangan	Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk	Ada	Dinas Ketahanan Pangan Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		penyimpanan cadangan pangan			
		Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ada	Dinas Ketahanan Pangan Kab. HSS	
		Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Tidak ada	Dinas Ketahanan Pangan Kab. HSS	
		Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Ada	Dinas Ketahanan Pangan Kab. HSS	
		Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada	Dinas Ketahanan Pangan Kab. HSS	
		Tertanganinya kerawanan pangan	Ada	Dinas Ketahanan Pangan Kab. HSS	
		Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ada	Dinas Ketahanan Pangan Kab. HSS	
		Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Ada	Dinas Ketahanan Pangan Kab. HSS	
10	Pertanahan	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/ Wali kota	75 Izin Lokasi	Dispera KP dan LH Kab. HSS	
		SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari	0	Dispera KP dan LH Kab. HSS	Kab. HSS hanya mempunyai



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek			Penetapan Objek Tanah Landreform yang berasal dari pelepasan (enclove)
		SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	0	Dispera KP dan LH Kab. HSS	Tidak ada penetapan dan pelaksanaan ganti rugi kepada bekas pemilik kelebihan maksimum /absentee
		Dokumen Izin membuka tanah	0	Dispera KP dan LH Kab. HSS	Belum ditetapkan aturan izin membuka tanah negara di Kab. HSS
		Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	100 %	Dispera KP dan LH Kab. HSS	
11	Lingkungan Hidup	Hasil perhitungan provinsi terhadap :		Dispera KP dan LH Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		a. Indeks kualitas air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) b. Indeks tutupan hutan (ITH) c. Indeks Tutupan Hutan (ITH)	a. 54,80 b. 89,26 c. 49,38		
		Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	1. 4% 2. 90.000 Ton 3. 12.184 ton/hari	Dispera KP dan LH Kab. HSS	
		Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	99,00 %	Dispera KP dan LH Kab. HSS	
		Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	0	Dispera KP dan LH Kab. HSS	Belum ada pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten, sementara di tangani oleh pelaksana di LH
		Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota	100 %	Dispera KP dan LH Kab. HSS	Baru Usulan MHA
		Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum	0	Dispera KP dan LH Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		adat terkait PPLH			
		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	0	Dispera KP dan LH Kab. HSS	
		Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani	100 %	Dispera KP dan LH Kab. HSS	
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penerbitan akta perkawinan	100 %	Disdukcatpil Kab. HSS	
		Penerbitan akta perceraian	99%	Disdukcatpil Kab. HSS	
		Penerbitan akta kematian	100 %	Disdukcatpil Kab. HSS	
		Penyajian data kependudukan	100 %	Disdukcatpil Kab. HSS	
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	0 Desa	Dinas PMD Kab. HSS	
		Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa	0 Desa	Dinas PMD Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya			
		Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	0	Dinas PMD Kab. HSS	
		Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	0	Dinas PMD Kab. HSS	
		Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	0 Desa	Dinas PMD Kab. HSS	
		Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	14 Desa	Dinas PMD Kab. HSS	
		Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	126 Lembaga	Dinas PMD Kab. HSS	
		Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan	3 Desa	Dinas PMD Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan			
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	ada	Dinas PP, KB, PP dan PA Kab. HSS	
		Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	29,6	Dinas PP, KB, PP dan PA Kab. HSS	
		Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	25,41	Dinas PP, KB, PP dan PA Kab. HSS	
		Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	33,50 %	Dinas PP, KB, PP dan PA Kab. HSS	
		Jumlah stakeholders/ pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	8 Stakeholders	Dinas PP, KB, PP dan PA Kab. HSS	
		Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	100 %	Dinas PP, KB, PP dan PA Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	5,56 %	Dinas PP, KB, PP dan PA Kab. HSS	
		Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	11 Kelompok	Dinas PP, KB, PP dan PA Kab. HSS	
		Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	31,26%	Dinas PP, KB, PP dan PA Kab. HSS	
		Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	26,49 %	Dinas PP, KB, PP dan PA Kab. HSS	
		Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	99 %	Dinas PP, KB, PP dan PA Kab. HSS	
15	Perhubungan	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	25,00 %	Dinas Perhubungan Kab. HSS	
		Terlaksananya pelayanan uji berkala	90,90 %	Dinas Perhubungan Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	40 %	Dinas Perhubungan Kab. HSS	Pernyataan Tidak ada penetapan tarif angkutan
		Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	49,12 %	Dinas Perhubungan Kab. HSS	
16	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100 %	Dinas Kominfo Kab. HSS	
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	100 %	Dinas Kominfo Kab. HSS	
		Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	ada	Dinas Kominfo Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	100 %	Dinas Kominfo Kab. HSS	
		Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	100 %	Dinas Kominfo Kab. HSS	
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	56,00 %	Dinas Kominfo Kab. HSS	
		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	100 %	Dinas Kominfo Kab. HSS	
		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan	25%	Dinas Kominfo Kab. HSS	Surat Keterangan



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik			Bahwa Dinas Kominfo mengejukan permohonan Analisis kebutuhan penggunaan sertifikat elektrinik
		Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100 %	Dinas Kominfo Kab. HSS	
		Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	81,00 %	Dinas Kominfo Kab. HSS	
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	67,00 %	Dinas Kominfo Kab. HSS	
		Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	0 %	Dinas Kominfo Kab. HSS	
		Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	67,00 %	Dinas Kominfo Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Persentase data yang dapat berbagi pakai	72,00 %	Dinas Kominfo Kab. HSS	
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	56,00 %	Dinas Kominfo Kab. HSS	
		Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	75,00%	Dinas Kominfo Kab. HSS	
		Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	ada	Dinas Kominfo Kab. HSS	
		Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	100 %	Dinas Kominfo Kab. HSS	
		Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	100 %	Dinas Kominfo Kab. HSS	
		Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan	100 %	Dinas Kominfo Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan			
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	49,00 %	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	0	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	Tidak ada kantor cabang
		Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	60 %	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	18 %	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	17 %	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	Tidak ada pelatihan karena Pandemi Covid-19
		Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	Tidak ada pelatihan karena Pandemi Covid-19
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	-		Tidak Perlu Diisi
		Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	20 %	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	0	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	0	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	60 %	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	0	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	81 %	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem	0	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		online data system (ODS)			
		Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	80 %	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	94,83 %	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	92 %	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	54 %	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan	81 %	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
18	Penanaman Modal	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Draft Perda	Dinas PMPTSP Kab. HSS	
		Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/intensif penanaman modal	Draft SOP	Dinas PMPTSP Kab. HSS	
		Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/intensif penanaman modal	-	Dinas PMPTSP Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	-	Dinas PMPTSP Kab. HSS	
		Kegiatan pameran penanaman modal	ada	Dinas PMPTSP Kab. HSS	
		Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Ada	Dinas PMPTSP Kab. HSS	
		Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	22 Konsultasi	Dinas PMPTSP Kab. HSS	
		Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	3.709 Perizinan	Dinas PMPTSP Kab. HSS	
		Laporan realisasi penanaman modal	Rp. 206.183.242.256	Dinas PMPTSP Kab. HSS	
		Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	2 Orang	Dinas PMPTSP Kab. HSS	
		Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	63 Pembinaan	Dinas PMPTSP Kab. HSS	
		Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi kabupaten /kota	3.709 Data dan Informasi	Dinas PMPTSP Kab. HSS	
19	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	165 Orang	Disporapar Kab. HSS	
		Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	53 Orang	Disporapar Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	276 Orang	Disporapar Kab. HSS	
		Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	178 Orang	Disporapar Kab. HSS	
		Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	37 Orang	Disporapar Kab. HSS	
		Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	4 event	Disporapar Kab. HSS	
20	Statistik	Tersedianya buku profil daerah	ada	Dinas Kominfo Kab. HSS	
		Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	66 Sektoral	Dinas Kominfo Kab. HSS	Pernyataan Bahwa Dinas Kominfo selama tahun 2020 belum melakukan survey statistik sektoral
		Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	341 sektoral	Dinas Kominfo Kab. HSS	
		Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	12 Rekomendasi	Dinas Kominfo Kab. HSS	
		Jumlah kompilasi statistik	14	Dinas Kominfo Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS			
		Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	100%	Dinas Kominfo Kab. HSS	
		Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	0	Dinas Kominfo Kab. HSS	
21	Persandian	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	0	Dinas Kominfo Kab. HSS	Surat pernyataan bahwa Kominfo belum memiliki alat pembatas sinyal/akses komonikasi (jammer)
		Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	96 %	Dinas Kominfo Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Persentase system elektronik /asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	96 %	Dinas Kominfo Kab. HSS	
		Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	100,00 %	Dinas Kominfo Kab. HSS	
22	Kebudayaan	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	28 Objek	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman	28 Objek	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya,dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	28 Objek	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan	0	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	Surat Pernyataan



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		kapasitas tata kelola)			
		Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	28 Objek	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	28 Objek	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Layanan perizinan membawacagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	0	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	Surat Pernyataan bahwa tidak ada cagar budaya yang diberikan izin keluar Kab. HSS
		Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	5 Cagar Budaya	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	5 Cagar Budaya	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	404	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	606	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	606	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	-	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	Tidak Perlu diisi
		Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	5	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	0	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	Surat Pernyataan belum ada Ahli Cagar Budaya
		Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	0	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	Tidak ada ahli CB yang disertifikasi
		Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	28 Orang	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	0	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	Belum ada Peningkatan Kompetensi CB dan Permesiuman
		Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	29 Buah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	14 Kali	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
23	Perpustakaan	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	9,09 %	Dispersip Kab. HSS	
		Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	23,35 %	Dispersip Kab. HSS	
		Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0,01 %	Dispersip Kab. HSS	
		Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	2,90 %	Dispersip Kab. HSS	
		Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	15 Kegiatan	Dispersip Kab. HSS	
		Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	6 Naskah	Dispersip Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	6 Naskah	Dispersip Kab. HSS	
		Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	46 Koleksi	Dispersip Kab. HSS	
24	Kearsipan	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100,00 %	Dispersip Kab. HSS	
		Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100,00 %	Dispersip Kab. HSS	
		Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	100,00 %	Dispersip Kab. HSS	
		Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	80,04 %	Dispersip Kab. HSS	
		Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	1079 arsip	Dispersip Kab. HSS	
		Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	8.323	Dispersip Kab. HSS	
		Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten /Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah	1,063 Arsip	Dispersip Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di provinsi			
		Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai NSPK	12.760 Arsip	Dispersip Kab. HSS	
		Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	105 Arsip	Dispersip Kab. HSS	
		Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten /Kota yang sesuai NSPK	6 Izin	Dispersip Kab. HSS	
25	Kelautan dan Perikanan	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	1.240 Orang	Dinas Perikanan Kab. HSS	
		Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	-	Dinas Perikanan Kab. HSS	Surat Keterangan
		Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang	1 IUP	Dinas Perikanan Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		diterbitkan			
		Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	1.996 Orang	Dinas Perikanan Kab. HSS	
		Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	1.348.500 Ekor	Dinas Perikanan Kab. HSS	
26	Pariwisata	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	662 Destinasi	Disporapar Kab. HSS	
		Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	29 Infrastruktur	Disporapar Kab. HSS	
		Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	12 Daftar Usaha	Disporapar Kab. HSS	
		Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	613 Wisman	Disporapar Kab. HSS	
		Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	5 Event	Disporapar Kab. HSS	
		Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten/kota	0	Disporapar Kab. HSS	Pandemi Covid-19



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	0	Disporapar Kab. HSS	
		Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	9,15 %	Disporapar Kab. HSS	
		Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	98,64 %	Disporapar Kab. HSS	
		Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	17 Lokasi	Disporapar Kab. HSS	
27	Pertanian	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	59 Buah	Dinas Pertanian Kab. HSS	
		Prasaran pertanian yang digunakan	34 Buah	Dinas Pertanian Kab. HSS	
		Penerbitan izin usaha pertanian	14 Izin	Dinas Pertanian Kab. HSS	
		Persentase prasarana yang digunakan	100,00 %	Dinas Pertanian Kab. HSS	
		Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota	100,00 %	Dinas Pertanian Kab. HSS	
		Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	93,33 %	Dinas Pertanian Kab. HSS	
28	Kehutanan	-	-	-	-



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
29	Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	-
30	Perdagangan	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan	a. 92,16 % b. 80,00 %	Dinas Perdagangan Kab. HSS	
		Persentase penerbitan TDG	100,00 %	Dinas Perdagangan Kab. HSS	
		Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	100,00 %	Dinas Perdagangan Kab. HSS	
		Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk : a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	a. 75 % b. 75 % c. -	Dinas Perdagangan Kab. HSS	Poin C. Surat Keterangan
		Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah	0 %	Dinas Perdagangan Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Kab/Kota			
		Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	0 %	Dinas Perdagangan Kab. HSS	
		Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	91,75%	Dinas Perdagangan Kab. HSS	
		Persentase koefisien variasi harga antar waktu	10 %	Dinas Perdagangan Kab. HSS	
		Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	3794200	Dinas Perdagangan Kab. HSS	
		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	84,62%	Dinas Perdagangan Kab. HSS	
		Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	80,28%	Dinas Perdagangan Kab. HSS	
31	Perindustrian	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri	0	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	Surat Pernyataan bahwa



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		(IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota			Penetapan IUKI dan IPKIdi Kab. HSS tidak ada
		Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkan menjadi PERDA	100,00 %	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	100,00 %	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	0 %	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	Surat Pernyataan bahwa tidak ada IPUI yang diterbitkan instansi terkait
		Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota	0 %	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	Surat Belum dilaksanakan pendataan perusahaan industri di Kab. HSS yang masuk dalam Sistem



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
					Informasi Nasional
32	Tranmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	-		
		Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	-		
		Jumlah satuan pemukiman yang dibina	-		



2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)

Capaian Kinerja Keluaran (Output) Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Capaian Kinerja Hasil (Outcome)

NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	39,99 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	101,86 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	100,20 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. HSS	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun	4,70 %	Dinas Pendidikan	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		dan Kebudayaan Kab. HSS	
2	Kesehatan	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk	199,29 %	Dinas Kesehatan Kab. HSS	
		Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	60 %	Dinas Kesehatan Kab. HSS	
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	89,57 %	Dinas Kesehatan Kab. HSS	
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	98,45 %	Dinas Kesehatan Kab. HSS	
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	97,51 %	Dinas Kesehatan Kab. HSS	
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	82,41 %	Dinas Kesehatan Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	99,24 %	Dinas Kesehatan Kab. HSS	
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	87,44 %	Dinas Kesehatan Kab. HSS	
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	82,37 %	Dinas Kesehatan Kab. HSS	
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	91,83 %	Dinas Kesehatan Kab. HSS	
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00%	Dinas Kesehatan Kab. HSS	
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan	99,13 %	Dinas Kesehatan Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		elayanan kesehatan jiwa sesuai standar			
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	99,66 %	Dinas Kesehatan Kab. HSS	
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai Standar	95,34 %	Dinas Kesehatan Kab. HSS	
3	Pekerjaan Umum	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	82,02 %	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur	0	Dinas PUTR Kab. HSS	Kab. HSS tidak mempunyai Pantai



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota			
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	72,14 %	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	94,63 %	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	85,44 %	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Rasio kepatuhan IMB kab/ Kota	100,00 %	Dinas PUTR Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	88,42 %	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	91 %	Dinas PUTR Kab. HSS	
		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100,00%	Dinas PUTR Kab. HSS	
4	Perumahan Rakyat	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten /kota	0	Dinas Perumahan Rakyat KP dan LH Kab. HSS	Tidak ada bencana di Kab. HSS
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0	Dinas Perumahan Rakyat KP dan LH Kab. HSS	Tidak ada rumah masyarakat terdampak reokasi.
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	86,07 %	Dinas Perumahan Rakyat KP dan LH Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	7,6%	Dinas Perumahan Rakyat KP dan LH Kab. HSS	
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100 %	Dinas Perumahan Rakyat KP dan LH Kab. HSS	
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100,00%	Satpol PP dan Damkar Kab HSS	
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100,00%	Satpol PP dan Damkar Kab HSS	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	208.644 Orang	BPBD Kab. HSS	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	975 Orang	BPBD Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	4 Orang	BPBD Kab. HSS	
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	Satpol PP dan Damkar Kab HSS	Tidak ada kejadian korban kebakaran yang memerlukan evakuasi
		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	4.42 Menit	Satpol PP dan Damkar Kab HSS	
6	Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	100,00%	Dinas Sosial Kab. HSS	
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan	100,00%	Dinas Sosial Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota			
7	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100,00%	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	3 %	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	0 %	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	15,38 %	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui	85,57 %	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota			
8	Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	88,3 %	Dinas PP, KB, PP dan PA Kab. HSS	
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	0,02 %	Dinas PP, KB, PP dan PA Kab. HSS	
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	5,00 %	Dinas PP, KB, PP dan PA Kab. HSS	
9	Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	477,66 %	Dinas Ketahanan Pangan Kab. HSS	
10	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi	100 %	Dispera KP dan LH Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan			
		Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	100 %	Dispera KP dan LH Kab. HSS	
		Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	100 %	Dispera KP dan LH Kab. HSS	
		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	100 %	Dispera KP dan LH Kab. HSS	
		Tersedianya tanah untuk Masyarakat	100 %	Dispera KP dan LH Kab. HSS	
		Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100 %	Dispera KP dan LH Kab. HSS	
11	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	62,97 Indeks	Dispera KP dan LH Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	77,18 %	Dispera KP dan LH Kab. HSS	
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	12,50 %	Dispera KP dan LH Kab. HSS	
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP Elektronik	97,01 %	Disdukcatpil Kab. HSS	
		Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	91,45 %	Disdukcatpil Kab. HSS	
		Kepemilikan akta kelahiran	97,83 %	Disdukcatpil Kab. HSS	
		Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	100 %	Disdukcatpil Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	0 %	Dinas PMD Kab. HSS	
		Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	59 %	Dinas PMD Kab. HSS	
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,26	Dinas PP, KB, PP dan PA Kab. HSS	
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	74,76 %	Dinas PP, KB, PP dan PA Kab. HSS	
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	7,12 %	Dinas PP, KB, PP dan PA Kab. HSS	
15	Perhubungan	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	0,47	Dinas Perhubungan Kab. HSS	
		V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	0,61	Dinas Perhubungan Kab. HSS	
16	Komunikasi dan Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang	100,00 %	Dinas Kominfo Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		disediakan oleh Dinas Kominfo			
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100 %	Dinas Kominfo Kab. HSS	1 (satu) layanan publik masih menunggu berbagi pakai yang disediakan oleh Kementerian Kominfo (Si Cantik) dan terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS)
		Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	71,49 %	Dinas Kominfo Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	78 %	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	81 %	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
18	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	89,23 %	Dinas PMPTSP Kab. HSS	
19	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	7,88 %	Disporapar Kab. HSS	
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	16,02 %	Disporapar Kab. HSS	
		Peningkatan Prestasi Olahraga	24 Medali	Disporapar Kab. HSS	
20	Statistik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan Daerah	100 %	Dinas Kominfo Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100 %	Dinas Kominfo Kab. HSS	
21	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	27,9 %	Dinas Kominfo Kab. HSS	Penyesuaian dengan indeks KAMI versi 4.1
22	Kebudayaan	Terlestariannya Cagar Budaya	100,00 %	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. HSS	
23	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	66,15	Dispersip Kab. HSS	
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	36,53	Dispersip Kab. HSS	
24	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	95,01	Dispersip Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan Rakyat	3726,00 Arsip	Dispersip Kab. HSS	
25	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota diwilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	19646.00 Ton	Dinas Perikanan Kab. HSS	
26	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per Kebangsaan	(100) %	Disporapar Kab. HSS	Pandemi Covid-19
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	9 %	Disporapar Kab. HSS	Pandemi Covid-19



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Tingkat Hunian Akomodasi	14 %	Disporapar Kab. HSS	
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Suket	Disporapar Kab. HSS	
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	2.508.001.934	Disporapar Kab. HSS	
27	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	4,73 Ton/Ha	Dinas Pertanian Kab. HSS	
		Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	100,00%	Pertanian Kab. HSS	
28	Kehutanan	-	-	-	Bukan kewenangan Kabupaten
29	Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	-	-	Bukan Kewenangan Kabupaten
30	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat	100 %	Dinas Perdagangan Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)			
		Persentase kinerja realisasi pupuk	100,00 %	Dinas Perdagangan Kab. HSS	
		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang Berlaku	84,62 %	Dinas Perdagangan Kab. HSS	
31	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	0,51 %	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	100,00%	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI)	100,00 %	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait			
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	Tidak ada perizinan yang dikeluarkan instansi terkait (terlampir Surat Pernyataan Kadis)
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	0	Disnaker UKM dan P Kab. HSS	Tidak ada perizinan yang dikeluarkan instansi terkait (terlampir Surat Pernyataan Kadis)
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	0		Belum mendapatkan User id Sistem Informasi Nasional
32	Tranmigrasi	-	-	-	Tidak ada



2.2.3. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Capaian Kinerja Hasil (Outcome) urusan dungsni penunjang Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Capaian Kinerja Hasil (Outcome) urusan penunjang

NO	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	13,867 %	BPKPD Kab. HSS	
		Rasio PAD	3,99 %	BPKPD Kab. HSS	
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Inspektorat Daerah Kab. HSS	
		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Inspektorat Daerah Kab. HSS	
		Rasio Belanja Urusan Umum Pemerintahan (dikurangi transfer expenditures)	65,25 %	BPKPD Kab. HSS	
		Opini Laporan Keuangan	1. 2019 WTP 2. 2018 WTP 3. 2017 WTP 4. 2016 WTP	Inspektorat Daerah Kab. HSS	



NO	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			5. 2015 WTP 6. 2014 WTP 7. 2013 WTP 8. 2012 WDP 9. 2011 WDP 10. 2010 WDP		
2	Pengadaan	Persentase jumlah total royek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang Ditandatangani padakuartal pertama	Tidak ada	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab. HSS	Surat Pernyataan tidak ada proyek multiyears
		Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	10,00 %	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab. HSS	
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	89,135 %	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab. HSS	
3	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dantenaga kesehatan)	69,061 %	BKPSDM Kab. HSS	
		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk	7,53 %	BKPSDM Kab. HSS	



NO	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Guru dan tenaga kesehatan)			
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	93,33 %	BKPSDM Kab. HSS	
4	Manajemen Keuangan	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	1,05 %	BPKPD KAB. HSS	
		Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	1,42 %	BPKPD KAB. HSS	
		Assets Management 1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyundaftar asset tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) 4. Apakah nilai assettercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)	1. YA 2. YA 3. YA 4. YA	BPKPD KAB. HSS	



NO	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	20,75 %	BPKPD KAB. HSS	
5	Transparansi dan Partisipasi Publik	Informasi tentang sumberdaya yang tersedia untuk pelayanan	91,04 %	Dinas Kominfo Kab. HSS	
		Akses publik terhadap Informasi keuangandaerah	100,00 %	Dinas Kominfo Kab. HSS	



2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terletak pada seberapa jauh capaian masing-masing indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan, yaitu perbandingan antara realisasi tahun berjalan versus realisasi n-1, realisasi tahun berjalan versus target di RPJMD, persentase capaian versus standar yang berlaku, termasuk dengan standar nasional yang terkait. Hasil pengukuran kinerja disajikan menurut kelompok Kinerja Utama yang bersifat makro dan capaian sasaran organisasi secara keseluruhan.

Laporan ini merupakan Laporan Ketiga Hasil Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dari Periode RPJMD 2018-2023 yang mengungkapkan capaian kinerja sasaran terhadap target yang ditetapkan pada setiap misi dalam RPJMD, disertai perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya dan penjelasan atas keberhasilan dan atau kegagalan pencapaian sasaran. Untuk keutuhan informasi, pada laporan ini juga terlampir Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Pengukuran Kinerja 2022.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi. Dalam kondisi :

1. Indikator bermakna positif, artinya: jika semakin besar realisasi berarti semakin baik kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin buruk kinerjanya, maka digunakan rumus :



$$\text{Presentase Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

2. Indikator bermakna negatif, artinya: jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya, maka digunakan rumus:

$$\text{Presentase Pencapaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

- Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome).

- Indikator Sasaran

Indikator Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan Target Kualitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran

2.3.1 Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang diperjanjikan pada Tahun 2022 sebagai berikut :



Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tahun 2022

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN		RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar lainnya	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,86
		2	Harapan lama sekolah	13,29
		3	Rata-rata lama sekolah	8,44
	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	4	Angka Harapan Hidup	67,51
	Tercukupinya ketersediaan pangan yang beragam dan aman	5	PPH Ketersediaan	87,17
	Meningkatnya pelayanan dasar bagi masyarakat	6	Persentase capaian perangkat daerah dalam menerapkan SPM	72,00
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif yang berdampak terhadap angka kemiskinan	Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah	7	Tingkat kemiskinan (persentase penduduk miskin)	4,54
		8	Indeks Gini	0,299
	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	9	Tingkat pengangguran terbuka	1,99
	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sector unggulan	10	Laju pertumbuhan ekonomi	6,38
		11	Laju pertumbuhan ekonomi kategori industri pengolahan	5,56



TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN		RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	
		12	Laju pertumbuhan ekonomi kategori perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	5,72	
		13	Laju pertumbuhan ekonomi kategori pertanian, kehutanan dan perikanan	4,51	
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif yang berdampak terhadap angka kemiskinan	Meningkatnya pendapatan Asli Daerah (PAD)	14	Peningkatan retribusi dan pajak daerah	26 milyar	
	Meningkatnya investasi PMDN	15	Persentase peningkatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	6,00	
	Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata dan kebudayaan bagi masyarakat	16	Tingkat Pengeluaran Wisatawan (Spending of money)	Rp. 7,873,326,000	
	Meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas		17	Persentase Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang berkualitas	51,31
			18	Persentase kondisi jalan baik dengan kecepatan ≥ 40 Km/jam	65,80
			19	Persentase kinerja sistem jaringan irigasi	69,10
			20	Persentase kecukupan sarana dan prasarana publik	86,00



TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN		RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
		21	Persentase kecukupan RTH publik	31,92
		22	Persentase perumahan dan Kawasan permukiman yang berkualitas	74,88
Meningkatkan sumber daya daerah dan kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat	23	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,69
	Meningkatnya pemberdayaan responsif gender dan perlindungan terhadap anak	24	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,91
		25	Persentase desa/ kelurahan layak anak	6,08
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	26	Indeks kualitas lingkungan hidup	62,58
Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik	27	Indeks Reformasi Birokrasi	83
		28	Predikat AKIP	A (80.02)
		29	Kategori nilai kinerja Unit Pelayanan Publik (UPP)	A (4,51)
	Meningkatnya kinerja- keuangan dan kinerja birokrasi	30	Opini WTP BPK terhadap LKPD	WTP
		31	Indeks profesionalisme ASN	78,12
	Meningkatnya penggunaan system informasi daerah	32	Persentase perangkat daerah yang mengimplemen tasikan teknologi informasi dengan baik	92.11



TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN		RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
		33	Persentase pemerintah desa yang menggunakan teknologi informasi dalam pemberian layanan	31.25

2.3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022

Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terletak pada seberapa jauh capaian masing-masing indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan, yaitu perbandingan antara realisasi tahun berjalan versus realisasi n-1, realisasi tahun berjalan versus target di RPJMD, persentase capaian versus standar yang berlaku, termasuk dengan standar nasional yang terkait.

Kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2022 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja tahun 2022 pada seluruh sasaran strategis. Kinerja tahun 2022 merupakan kinerja tahun keempat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2018-2023.

Hasil Pengukuran secara mandiri (*self assessment*) terhadap 5 (lima) Tujuan, 17 (tujuh belas) Sasaran Strategis dan 33 (tiga puluh delapan) Indikator Kinerja Sasaran, yang dapat dirincikan bahwa dari 17 (tujuh belas) Sasaran Strategis, 14 (empat belas) Sasaran Strategis dikategorikan dengan capaian kinerja sangat baik dengan rata-rata capaian pada interval > 90%, sedangkan 2 (dua) Sasaran Strategis dikategorikan baik dengan rata-rata capaian pada interval > 75% - 90% dan 1 (satu) Sasaran Strategis yang berkategori cukup dengan capaian pada interval 50% - 75%.

Dan dari 33 (tiga puluh tiga) Indikator Kinerja Sasaran, sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Indikator Kinerja Sasaran masuk dalam kategori sangat baik dengan capaian kinerja berada pada interval > 90%, 4 (empat) Indikator Kinerja Sasaran yang capaian kinerjanya berada pada interval $76\% \leq 90\%$ masuk



dalam kategori baiki, 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran yang berkategori cukup dengan capaian $51\% \leq 75\%$ dan 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran yang berkategori sangat rendah dengan capaian $\leq 50\%$. Capaian indikator kinerja tidak terlepas dari kontribusi dan komitmen seluruh komponen dan perangkat daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pengungkapan capaian kinerja sasaran dilakukan secara berurutan seperti urutan pada RPJMD dan RKPD, yaitu mulai dari misi, tujuan, sasaran, dan program prioritas.

Hasil capaian pengukuran terhadap 17 (tujuh belas) sasaran strategis dan 33 (tiga puluh tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2022 ini sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA	
Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar lainnya					
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,86	69,76	97,08
	2	Harapan lama sekolah	13,29	12,40	93,30
	3	Rata-rata lama sekolah	8,44	7,79	92,30
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	4	Angka Harapan Hidup	67,51	66,51	98,52
Tercukupinya ketersediaan pangan yang beragam dan aman	5	PPH Ketersediaan	87,17	87,54	100,42
Meningkatnya pelayanan dasar bagi masyarakat	6	Persentase capaian perangkat daerah dalam menerapkan SPM	72,00	97,04	134,78



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA	
Tujuan 2 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif yang berdampak terhadap angka kemiskinan					
Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah	7	Tingkat kemiskinan (persentase penduduk miskin)	4,54	4,54	100,00
	8	Indeks Gini	0,299	0,260	113,04
Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	9	Tingkat pengangguran terbuka	1,99	2,29	84,92
Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	10	Laju pertumbuhan ekonomi	6,38	4,02	63,01
	11	Laju pertumbuhan ekonomi kategori industri pengolahan	5,56	5,25	94,42
	12	Laju pertumbuhan ekonomi kategori perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	5,72	8,40	146,85
	13	Laju pertumbuhan ekonomi kategori pertanian, kehutanan dan perikanan	4,92	-0,49	-9,96
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	14	Peningkatan retribusi dan pajak daerah	26 milyar	23,89 milyar	91,88
Meningkatnya investasi PMDN	15	Persentase peningkatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	6,00	8,36	139,33
Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata dan kebudayaan bagi masyarakat	16	Tingkat Pengeluaran Wisatawan (Spending of money)	RP. 7.873.326.000	Rp. 14.705.425.000	186,78



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA	
Tujuan 3 : Meningkatkan infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas					
Meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas	17	Persentase Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang berkualitas	51,31	64,74	126,17
	18	Persentase kondisi jalan baik dengan kecepatan ≥ 40 Km/jam	65,80	69,58	105,75
	19	Persentase kinerja sistem jaringan irigasi	69,10	70,47	101,99
	20	Persentase kecukupan sarana dan prasarana publik	86,00	85,71	99,67
	21	Persentase kecukupan RTH public	31,92	31,84	99,75
	22	Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas	74,88	59,88	79,97
Tujuan 4 : Meningkatkan sumber daya daerah dan kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan					
Meningkatnya kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat	23	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,69	0,73	105,13
Meningkatnya pemberdayaan responsif gender dan perlindungan terhadap anak	24	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,91	90,05	99,05
	25	Persentase desa/ kelurahan layak anak	6,08	6,08	100
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	26	Indeks kualitas lingkungan hidup	71,00	69,40	97,75



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
Tujuan 5 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi					
Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik	27	Indeks Reformasi Birokrasi	83	70,45 (BB)	84,88
	28	Predikat AKIP	A (80,10)	A (81,50)	101,75
	29	Kategori nilai kinerja Unit Pelayanan Publik (UPP)	A (4,51)	A (4,54)	100,67
Meningkatnya kinerja keuangan dan kinerja birokrasi	30	Opini WTP BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	100
	31	Indeks profesionalisme ASN	78,12	59,75	76,48
Meningkatnya penggunaan sistem informasi daerah	32	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan teknologi informasi dengan baik	92,11	92,30	100,21
	33	Persentase pemerintah desa yang menggunakan teknologi informasi dalam pemberian layanan	31,25	31,25	100



Tabel 2.7

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022

No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2022	% Capaian Kinerja Tahun 2022
1	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. IPM = (akar pangkat 3 dari (Indeks kesehatan x Indeks pendidikan x Indeks pengeluaran)) x 100 $IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}}$	69,21	69,76	97,08
		2. Harapan Lama Sekolah	$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$ I = Indeks HLS = Harapan Lama Sekolah min = angka minimal maks = angka maksimum	12,38	12,40	93,30
		3. Rata-rata Lama Sekolah	$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$ I = Indeks RLS = Rata-Rata Lama Sekolah min = angka minimal maks = angka maksimum	7,76	7,79	92,30
2	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan	4. Angka Harapan Hidup	Rata-rata jumlah tahun kehidupan yang masih dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu. $\frac{\text{penjumlahan usia yang meninggal tahun itu}}{\text{jumlah orang yang meninggal tahun itu}} \times 100\%$	66,12	66,51	98,52
3	Tercukupinya Ketersediaan Pangan yang Beragam dan Aman	5. PPH Ketersediaan	Skor PPH Ketersediaan dihitung berdasarkan data Neraca Bahan Makanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Di dalam Neraca Bahan Makanan (NBM) disajikan angka rata-rata jumlah jenis Bahan Makanan yang tersedia untuk dikonsumsi penduduk per kapita pertahun dalam kilogram serta per kapita per hari dalam satuan gram, pada kurun waktu tertentu.	86,33	87,54	100,42



No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2022	% Capaian Kinerja Tahun 2022
4	Meningkatnya Pelayanan Dasar bagi Masyarakat	6. Persentase capaian perangkat daerah dalam menerapkan SPM	$\frac{\sum \text{Jumlah SPM yang terpenuhi}}{\sum \text{SPM perangkat daerah di Kab. HSS}} \times 100\%$	95,80	97,04	134,78
5	Menurunnya Kemiskinan dan Kesenjangan antar Wilayah	7. Tingkat Kemiskinan	Persentase penduduk miskin (persentase penduduk di bawah garis kemiskinan)	4,84	4,54	100,00
		8. Indeks Gini	$G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i (Q_i + Q_{i-1})$ <p>Dimana : Pi = Persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-i Qi = Persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i Nilai gini rasio berkisar antara 0 dan 1, jika : G < 0,3 = ketimpangan rendah 0,3 ≤ G ≤ 0,5 = ketimpangan sedang G > 0,5 = ketimpangan tinggi</p>	0,275	0,260	113,04
6	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	9. Tingkat Pengangguran Terbuka	$\frac{\sum \text{Penganggur terbuka usia angkatan kerja}}{\sum \text{Penduduk angkatan kerja}} \times 100$	2,44	2,29	84,92
7	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	10. Laju Pertumbuhan Ekonomi	<p>Menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang tertentu</p> $\frac{\text{PDRB}(t) - \text{PDRB}(t - 1)}{\text{PDRB}(t - 1)} \times 100\%$ <p>ket :t = tahun berjalan t-1 = tahun sebelumnya tahun t</p>	4,19	4,02	63,01



No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2022	% Capaian Kinerja Tahun 2022
		11. Laju pertumbuhan ekonomi kategori industri pengolahan	$\frac{\sum \text{Nilai tambah kategori industri pengolahan tahun N} - \sum \text{Nilai tambah kategori industri pengolahan tahun (N-1)}}{\sum \text{Nilai tambah kategori pengolahan tahun (N-1)}} \times 100\%$	5,93	5,25	94,42
		12. Laju pertumbuhan ekonomi kategori perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	$\frac{\sum \text{Nilai tambah kategori perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (tahun N)} - \sum \text{Nilai tambah kategori perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor Tahun (N-1)}}{\sum \text{Nilai tambah kategori perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor Tahun (N-1)}} \times 100\%$	5,40	8,40	146,85
		13. Laju pertumbuhan ekonomi kategori pertanian, kehutanan dan perikanan	$\frac{\sum \text{Nilai tambah kategori pertanian, kehutanan dan perikanan tahun N} - \sum \text{Nilai tambah kategori pertanian, kehutanan dan perikanan tahun (N-1)}}{\sum \text{Nilai tambah kategori pertanian, kehutanan dan perikanan tahun (N-1)}} \times 100\%$	-0,01	-0,49	-9,96
8	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	14. Persentase Peningkatan Retribusi dan Pajak Daerah	S Retribusi dan Pajak Daerah Thn N	20,15	23,89	91,88
9	Meningkatnya investasi PMDN	15. Persentase Peningkatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	$\frac{\sum \text{nilai PMDN Tahun N} - \sum \text{nilai PMDN Tahun (N-1)}}{\sum \text{nilai PMDN Tahun (N-1)}} \times 100\%$	10,32	8,36	139,33
10	Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Pariwisata dan Kebudayaan bagi Masyarakat	16. Tingkat Pengeluaran Wisatawan (<i>Spending of Money</i>)	Dihitung berdasarkan akumulasi jumlah pengeluaran wisatawan untuk konsumsi akhir dan transfer sosial bekerjasama dengan dinas / instansi / <i>stakeholders</i> terkait dan perhitungan akhir yang dikerjasamakan dengan Badan Pusat Statistik Kab. HSS	Rp. 5.774.448.000	Rp. 14.705.425.000	186,78



No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2022	% Capaian Kinerja Tahun 2022	
11	Meningkatnya Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Berkualitas	17. Persentase Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang berkualitas	$\frac{\text{Jumlah Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Berkualitas}}{\text{Total infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang dibutuhkan}} \times 100\%$	58,74	64,74	126,18	
		18. Persentase kondisi jalan baik dengan kecepatan ≥ 40 Km/jam	$\frac{\sum \text{Panjang jalan kondisi mantap}}{\text{total jumlah panjang jalan kabupaten}} \times 100\%$	68,37	69,58	105,75	
		19. Persentase Kinerja Sistem Jaringan Irigasi	$\frac{\sum \text{ketersediaan air irigasi (1,2 L perdet/ha) pada setiap musim tanam}}{\sum \text{ketersediaan air irigasi seluruh hektar}} \times 100\%$	68,49	70,47	101,99	
		20. Persentase Kecukupan Sarana dan Prasarana Publik	$\frac{\sum \text{Sarana dan prasarana publik yang terbangun}}{\sum \text{sarana dan prasarana publik yang dibutuhkan}} \times 100\%$	66,67	85,71	99,67	
		21. Persentase Kecukupan RTH Publik	$\frac{\sum \text{RTH publik yang terbangun}}{\sum \text{RTH publik yang dibutuhkan}} \times 100\%$	37,89	38,06	153,04	
		22. Persentase perumahan dan Kawasan Permukiman yang berkualitas	Jumlah perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas x 100%	52,29	59,88	79,97	
12	Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Kelompok Masyarakat	23. Indeks Desa Membangun (IDM)	$\text{IDM} = \frac{\sum \text{IDM se Kab.HSS}}{\sum \text{Desa se Kab.HSS}}$	$\frac{\sum \text{IDM se Kab.HSS}}{\sum \text{Desa se Kab.HSS}} : \text{Jumlah IDM}$	0,70	0,73	105,13



No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2022	% Capaian Kinerja Tahun 2022
13	Meningkatnya Pemberdayaan Responsif Gender dan Perlindungan terhadap Anak	24. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	<p>IPG :</p> <p>1) Umur panjang dan sehat:</p> <p>1. indikator angka harapan hidup perempuan</p> <p>2. indeks dimensi : indeks harapan hidup perempuan</p> <p>3. indeks sebaran merata : indeks / harapan hidup dengan sebaran merata</p> <p>2) Pengetahuan:</p> <p>1. indikator AMH perempuan, MYS perempuan</p> <p>2. Indeks dimensi : indeks pendidikan perempuan</p> <p>3. Indeks sebaran merata : indeks pendidikan dengan sebaran merata</p> <p>3) Kehidupan yang layak :</p> <p>1. Indikator perkiraan pendapatan perempuan</p> <p>2. Indeks dimensi : indeks pendapatan perempuan</p> <p>3. Indeks sebaran merata : indeks dengan pendapatan sebaran merata</p>	89,65	89,65	98,61
		25. Persentase Desa/ Kelurahan Layak Anak	$\frac{\text{Jumlah desa/kelurahan layak anak}}{\text{Jumlah desa/kelurahan yang ada}} \times 100$			
14	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	26. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	<p>IKLH dibentuk oleh komponen IKU + IKA + IKTL</p> <p>* IKU = Indeks Kualitas Udara</p> <p>* IKA = Indeks Kualitas Air</p> <p>* IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan</p>	67,57	69,23	124,51
15	Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik	27. Indeks Reformasi Birokrasi	<p>Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Komponen penilaian terdiri dari pengungkit 60% dan hasil 40%</p>	66,81 (B)	70,45 (B)	84,88



No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2022	% Capaian Kinerja Tahun 2022
		28. Predikat AKIP	Nilai akuntabilitas kinerja menunjukkan tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil. Komponen penilaian terdiri dari perencanaan kinerja 30%, pengukuran kinerja 25%, pelaporan kinerja 15%, evaluasi kinerja 10% dan capaian kinerja 20%	A (80,02)	A (81,50)	101,75
		29. Kategori Nilai Kinerja Unit Pelayanan Publik (UPP)	Berdasarkan Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pemerintah Daerah yang terdiri dari 6 aspek penilaian yaitu kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, Sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan.	A- (4,19)	A (4,54)	100,67
16	Meningkatnya Kinerja Keuangan dan Kinerja Birokrasi	30. Opini WTP BPK terhadap LKPD	Hasil Audit BPK RI yang meliputi pengelolaan keuangan, pengelolaan Barang Milik Daerah, penyajian laporan keuangan, meminimalisasi penyimpangan pelaksanaan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku, penguatan dan pengendalian internal di lingkungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.	WTP	WTP	100
		31. Indeks profesionalisme ASN	Indeks Profesionalitas ASN merupakan salah satu cara mengukur profesionalisme ASN. Pengukuran dihitung dari data-data : SAPK, E-PUPNS, Sistem Informasi Kepegawaian, Daftar Gaji dan Tunjangan ASN, sasaran kerja pegawai dan pegawai yang terkena hukuman.	55,34	59,75	76,48
17	Meningkatnya Penggunaan Sistem Informasi Daerah	32. Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan Teknologi Informasi dengan baik	$\frac{\sum \text{Perangkat daerah yang mengimplementasikan IT dengan baik}}{\sum \text{Perangkat daerah Se – Kab. HSS}} \times 100\%$	65,79	92,30	100,21



No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2022	% Capaian Kinerja Tahun 2022
		33. Persentase pemerintah desa yang menggunakan teknologi informasi dalam pemberian layanan	$\frac{\sum \text{Desa yang menggunakan aplikasi TI}}{\sum \text{Desa Se - Kab. HSS}} \times 100\%$	23,61	31,25	100



2.3.3 Analisis Capaian Kinerja Pemerintah Daerah

Berikut adalah analisis capaian kinerja pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan atas pengukuran secara mandiri (self assessment) terhadap 5 (lima) Tujuan, 17 (tujuh belas) Sasaran Strategis dan 33 (tiga puluh delapan) Indikator Kinerja Sasaran tahun 2022 sebagai berikut.

TUJUAN I	MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PELAYANAN DASAR LAINNYA
---------------------------	------------------------------------------------------------------------------

Tujuan Pertama pada Misi Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kebutuhan Dasar Lainnya yakni **“Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar lainnya.”** Untuk mencapai tujuan tersebut telah ditetapkan pada 4 (empat) Sasaran Strategis dan 6 (enam) Indikator Sasaran, yang secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar lainnya	1 Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan	1 Indeks Pembangunan Manusia	71,86	69,76	97,08
			2 Harapan lama sekolah	13,29	12,40	93,30
			3 Rata-rata lama sekolah	8,44	7,79	92,30
		2 Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan	4 Angka Harapan Hidup	67,51	66,51	98,52
		3 Tercukupinya ketersediaan pangan yang beragam dan aman	5 PPH Ketersediaan	87,17	87,54	100,42
		4 Meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat	6 Persentase capaian perangkat	72,00	97,04	134,78



NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN KINERJA
			daerah dalam menerapkan SPM			

SASARAN 1 : MENINGKATNYA AKSES DAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN.

Capaian kinerja Sasaran Strategis 1 ditunjang oleh Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN
Indeks Pembangunan Manusia	71,86	69,76	97,08
Harapan lama sekolah	13,29	12,40	93,30
Rata-rata lama sekolah	8,44	7,79	92,30
Rata-rata Capaian			94,23

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja sasaran diatas, dapat diambil rerata kesimpulan bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan adalah sangat baik dengan rata-rata capaian 94,23%.

Pada indikator kinerja sasaran Indeks Pembangunan Manusia dari target 71,86 terealisasi 69,76 yang berarti Tercapai sebesar 97,08% dengan kategori sangat baik. Sedangkan pada indikator kinerja sasaran Harapan lama sekolah dari target 13,29 terealisasi 12,40 yang berarti Tercapai sebesar 93,30% dengan kategori sangat baik dan pada indikator kinerja sasaran Rata-rata lama sekolah dari target 8,44 terealisasi 7,79 yang berarti Tercapai sebesar 92,30% dengan kategori sangat baik.

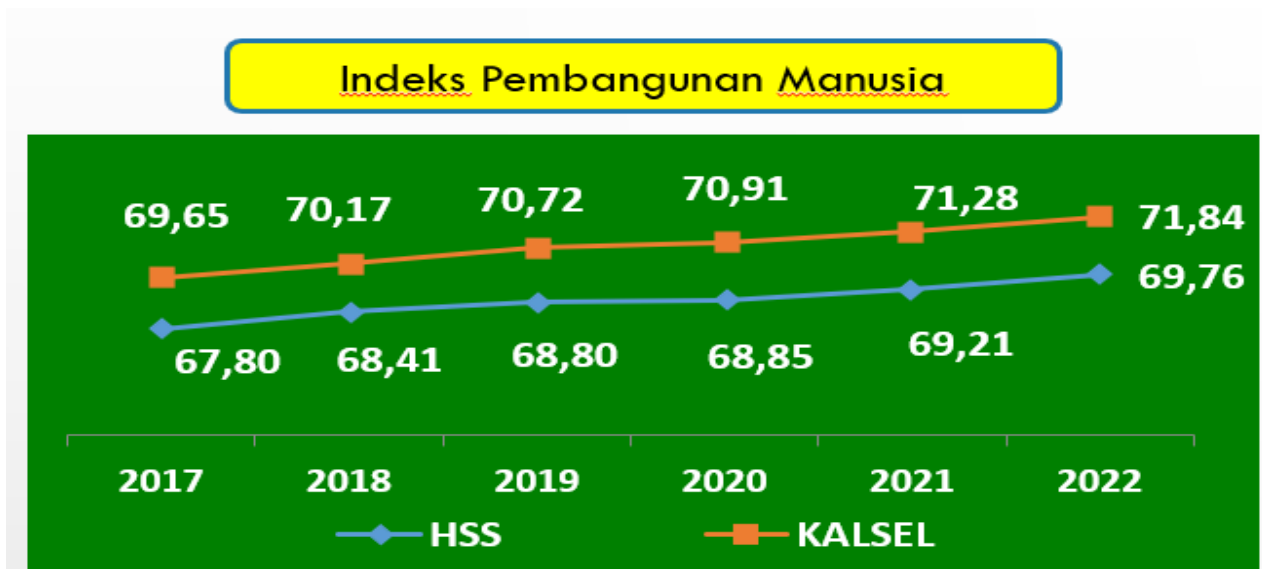


Indeks Pembangunan Manusia

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran : Indeks Pembangunan Manusia dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dan target RPJMD tahun 2023 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI					TARGET RPJMD
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Pembangunan Manusia	68,41	68,80	68,85	69,21	69,76	72,57

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang disusun dengan menggunakan pendekatan model adaptasi dari *The United Nations Development Programme* (UNDP) dalam menghitung *Human Development Index* (HDI). Indeks Pembangunan manusia di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan yang konsisten setiap tahunnya, walaupun IPM Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih lebih rendah jika dibandingkan dengan IPM Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana grafik dibawah ini



Sumber data : BPS Kab. Hulu Sungai Selatan

Apabila dibandingkan dengan kabupaten/Kota lain di Provinsi Kalimantan Selatan maka Kab.Hulu Sungai Selatan berada pada peringkat ke 8 sebagaimana pada grafik dibawah ini.



Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan

Perkembangan angka IPM dari tahun ke tahun memberikan indikasi peningkatan atau penurunan kinerja pembangunan manusia pada daerah yang bersangkutan. Perkembangan IPM dapat terjadi karena adanya perubahan satu atau lebih komponen IPM. IPM merupakan indikator komposit yang terbentuk dari 3 komponen. 1) Dimensi Kesehatan yang diukur dengan Umur Harapan Hidup (UHH). 2) Dimensi Pendidikan yang diukur dengan angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. 3) Dimensi Ekonomi yang diukur dengan angka pengeluaran perkapita.

Tabel 2.8
Dimensi IPM Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2022

Komponen Pembentuk IPM	Pemerintah	Tahun					Demensi
		2018	2019	2020	2021	2022	
Angka Harapan Hidup	Hulu Sungai Selatan	65,59	65,82	65,97	66,12	66,51	Kesehatan
	Kalimantan Selatan	68,23	68,49	68,66	68,83	69,13	
Harapan Lama Sekolah	Hulu Sungai Selatan	12,07	12,10	12,17	12,38	12,40	Pendidikan
	Kalimantan Selatan	12,50	12,52	12,68	12,81	12,82	



Komponen Pembentuk IPM	Pemerintah	Tahun					Demensi
		2018	2019	2020	2021	2022	
Rata-rata Lama Sekolah	Hulu Sungai Selatan	7,72	7,74	7,75	7,76	7,79	
	Kalimantan Selatan	8,00	8,20	8,29	8,34	8,46	
Pengeluaran Perkapita	Hulu Sungai Selatan	12.535	12.835	12.672	12.736	13.157	Ekonomi
	Kalimantan Selatan	12.062	12.253	12.032	12.143	12.469	

Sumber : BPS Kab. Hulu Sungai Selatan

Harapan Lama Sekolah

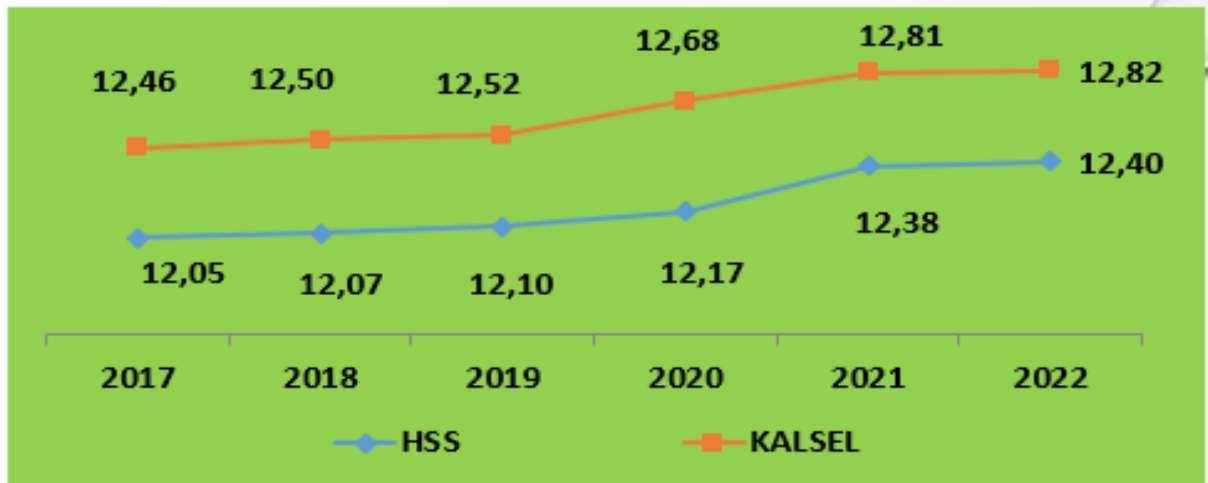
Dimensi pendidikan dalam IPM diukur dengan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS). Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Perkembangan HLS dari tahun 2018 sampai 2022, menunjukkan peningkatan sebagaimana tabel dibawah ini.

INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI					TARGET RPJMD
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Harapan lama sekolah	12,07	12,10	12,17	12,38	12,40	13,50

Perkembangan harapan lama sekolah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari tahun ke tahun menunjukkan adanya peningkatan walaupun masih dibawah angka harapan lama sekolah Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana terlihat pada grafik dibawah ini.

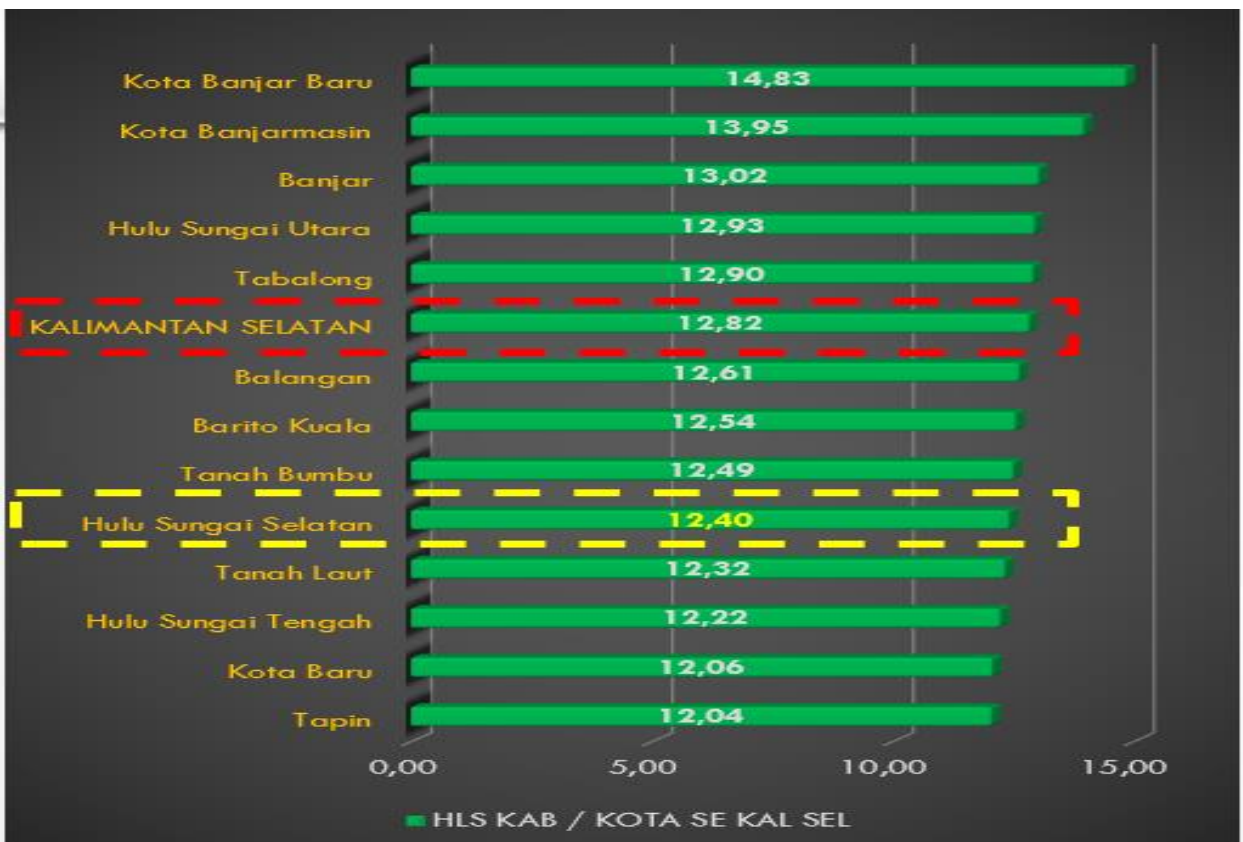


HARAPAN LAMA SEKOLAH



Sumber data : BPS Kab. Hulu Sungai Selatan

Dibandingkan kabupaten/kota lain di Kalsel, Hulu Sungai Selatan berada pada peringkat ke 9.



Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan



Secara umum pencapaian HLS Kabupaten Hulu Sungai Selatan selalu mengalami peningkatan namun masih berada di bawah angka Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tahun 2022 nilai HLS Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar 12,40 tahun, ini mengandung arti bahwa penduduk usia 7 tahun ke atas di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai harapan untuk bersekolah hingga 12,40 tahun lamanya atau bersekolah mencapai kelas tiga SLTA.

Pertumbuhan HLS Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2021-2022 sebesar 0,16 persen dengan kenaikan HLS sebesar 0,02 tahun. Pertumbuhan HLS Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2021-2022 merupakan angka pertumbuhan tertinggi ke 6 dan berada di atas pertumbuhan HLS Provinsi Kalimantan Selatan. Peningkatan ini lebih besar dibandingkan tahun 2022 namun perlu ditingkatkan lagi program di bidang pendidikan agar ke depan pertumbuhan HLS bisa lebih tinggi. Dan perlu kita ketahui bahwa angka HLS ini ada kaitannya dengan tingginya penduduk yang menikah usia dini dan putus sekolah.

Pertumbuhan HLS Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2021-2022 dibandingkan Kabupaten/Kota Se Kalimantan Selatan sebagaimana table berikut.

Tabel 2.9
Perbandingan Pertumbuhan dan Kenaikan HLS Kabupaten/Kota
Se Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2022

No	Kabupaten/ Kota	Pertumbuhan HLS	Kenaikan Angka HLS
1	Tanah Laut	0,08	0,01
2	Kotabaru	0,92	0,11
3	Banjar	2,28	0,29
4	Barito Kuala	1,13	0,14
5	Tapin	0,75	0,09
6	Hulu Sungai Selatan	0,16	0,02
7	Hulu Sungai Tengah	0,08	0,01



8	Hulu Sungai Utara	0,08	0,01
9	Tabalong	0,08	0,01
10	Tanah Bumbu	0,08	0,01
11	Balangan	1,12	0,14
12	Kota Banjarmasin	0,07	0,01
13	Kota Banjar Baru	0,07	0,01
Kalimantan Selatan		0,08	0,01

Sumber: BPS Kab.Hulu Sungai Selatan

Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari tahun ke tahun menunjukkan adanya peningkatan. Perbandingan realisasi kinerja dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dan target RPJMD tahun 2023 adalah sebagai berikut :

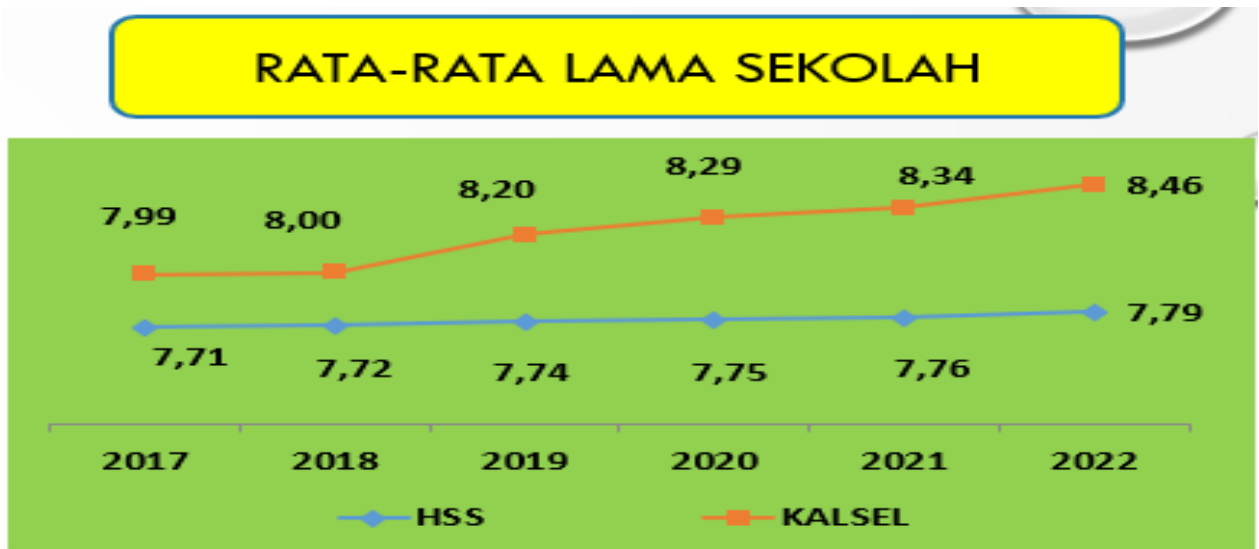
INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI					TARGET RPJMD
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rata-rata lama sekolah	7,72	7,74	7,75	7,76	7,79	8,53

Berdasarkan data diatas, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2021. Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah penduduk umur ≥ 15 tahun adalah jumlah tahun belajar penduduk umur ≥ 15 tahun yang telah selesaikan dalam Pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). RLS tahun 2022 adalah 7,79 tahun, meningkat sebesar 0,03 poin dibanding tahun 2021

Rata-rata lama sekolah (RLS) Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2022 masih berada di bawah angka Provinsi Kalimantan Selatan. Dari tahun 2018 meski perlahan tapi pasti mulai menunjukkan peningkatan namun masih belum beranjak dari kisaran angka tujuh tahun dimana tahun 2022 RLS sebesar 7,79 tahun yang artinya secara rata rata lamanya sekolah yang ditempuh oleh penduduk usia 25 tahun keatas di Kabupaten Hulu Sungai Selatan hanya sekitar tujuh tahun atau hingga kelas satu SLTP. Terkait



dengan ketenagakerjaan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan angka rata-rata lama sekolah berada pada kisaran tujuh tahun menunjukkan bahwa sebagian besar kualitas penduduk yang bekerja di Kabupaten Hulu Sungai masih rendah dilihat dari tingkat pendidikannya.



Sumber: BPS Kab.Hulu Sungai Selatan

Pertumbuhan RLS Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2021-2022 sebesar 0,39 persen dengan kenaikan RLS sebesar 0,03 tahun. Pertumbuhan RLS Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2021-2022 berada pada angka pertumbuhan 7 kabupaten/kota terendah pertumbuhan RLSnya bersama Kota Banjarbaru, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Tabalong, dan Kota Banjarbaru serta berada dibawah pertumbuhan RLS Provinsi Kalimantan Selatan. Peningkatan ini cukup kecil, sehingga diharapkan tahun yang akan datang pertumbuhan RLS bisa meningkat melebihi tahun 2021 dan beberapa tahun kedepan RLS Kabupaten Hulu Sungai Selatan bisa sejajar atau di atas RLS Provinsi Kalimantan Selatan. Angka rata-rata lama sekolah erat kaitan dengan bidang ketenagakerjaan, karena penduduk yang dicakup adalah penduduk usia 25 tahun ke atas yang sebagian besar sudah menyelesaikan pendidikan formalnya hingga jenjang sarjana. Semakin banyak penyediaan lapangan pekerjaan untuk penduduk yang minimal sudah menyelesaikan pendidikan dasar atau bahkan pendidikan sarjana, maka akan meningkatkan rata-rata lama sekolah.



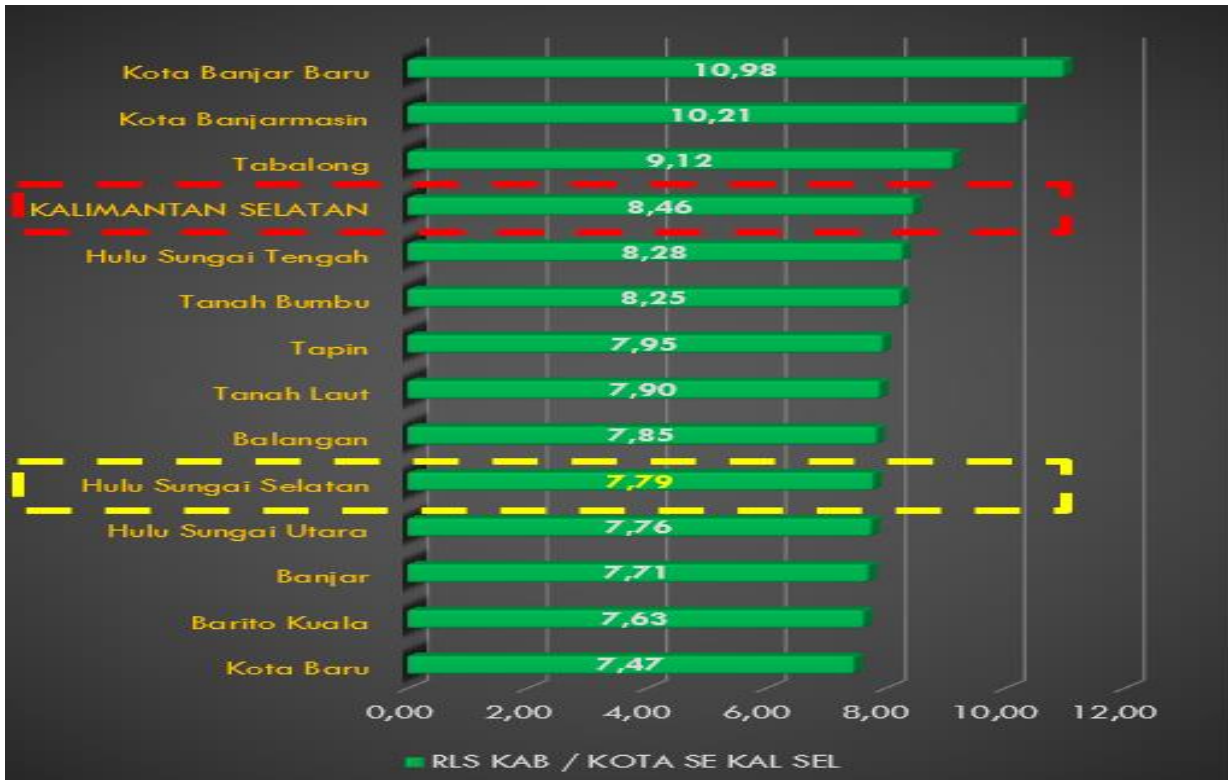
Tabel 2.10

Perbandingan Pertumbuhan dan Kenaikan RLS Kabupaten/Kota
Se Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2022

No	Kabupaten/ Kota	Pertumbuhan RLS	Kenaikan Angka RLS
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tanah Laut	0,13	0,01
2	Kotabaru	0,13	0,01
3	Banjar	2,53	0,19
4	Barito Kuala	1,06	0,08
5	Tapin	2,32	0,18
6	Hulu Sungai Selatan	0,39	0,03
7	Hulu Sungai Tengah	3,37	0,27
8	Hulu Sungai Utara	0,13	0,01
9	Tabalong	0,11	0,01
10	Tanah Bumbu	3,51	0,28
11	Balangan	2,08	0,16
12	Kota Banjarmasin	0,10	0,01
13	Kota Banjar Baru	0,18	0,02
	Kalimantan Selatan	1,44	0,12

Sumber: BPS Kab. Hulu Sungai Selatan

Dibanding kabupaten/kota lain di Kalsel, capaian ini berada di urutan ke 9 sebagaimana grafik dbawah ini.



Sumber: BPS Kab. Hulu Sungai Selatan

Angka HPS dan RLS dipengaruhi oleh angka partisipasi kasar (APK). APK adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Penjelasan berkaitan dengan Angka Partisipasi Kasar dapat dilihat pada Capaian Kinerja Sasaran 4, Meningkatnya Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat.

Upaya meningkatkan HLS dan RLS dengan meningkatkan partisipasi peserta didik, dengan memanfaatkan aplikasi SATUNIK. Aplikasi berbasis web ini merupakan manajemen terpadu data kependudukan dan pendidikan (DAPODIK dan EMIS Kemenag). Penduduk usia sekolah 7-18 tahun yang tidak bersekolah terdata *by NIK by Adress*, sehingga dapat dilacak keberadaanya.

Para penilik Di Dinas Pendidikan melakukan tracking ke rumah-rumah penduduk sesuai data yang diperoleh untuk dilakukan pendataan dan pendekatan kepada keluarga. Anak diajak untuk kembali melanjutkan pendidikan melalui program kejar paket A, B dan C. Dinas Pendidikan juga memberikan bantuan perlengkapan sekolah



Dalam pencapaian indikator sasaran strategis Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan didukung oleh program sebagai berikut :

Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1. Program Pengelolaan Pendidikan	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	2,5	1,67	66,80	62.637.310.615	59.595.839.578	95,14
	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	2,5	1,58	63,20			
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	100	104,06	104,06			
	APM SD	90	99,74	110,82			
	Rata-rata kemampuan Literasi SMP berdasarkan asesmen nasional	2,5	1,68	67,20			
	Rata-rata kemampuan Numerasi SMP berdasarkan asesmen nasional	2,5	1,58	63,20			
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	100	88,74	88,74			
	APM SMP	90	74,67	82,97			
	Persentase sekolah dasar yang terakreditasi B	50	37,33	74,66			
	Persentase Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV	52	53	101,92			
	Rasio pengawas dan penilik PAUD	5:7	1:15	24,43			
	Angka	91	103	113,19			



Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
	Partisipasi Kasar (APK) PAUD						
	Angka Partisipasi Pend. Non Formal	85	100	117,65			

SASARAN 2 : MENINGKATNYA AKSES DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN.

Capaian kinerja Sasaran Strategis 2 pada **Tujuan I : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Dasar Lainnya** ditunjang oleh Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN
Angka Harapan Hidup	67,51	66,51	98,52
Rata-rata Capaian			98,52

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja sasaran diatas, dapat diambil rerata kesimpulan bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dari target 67,51 terealisasi 66,51 adalah sangat baik/tinggi atau tercapai 98,52%.

Angka Harapan Hidup

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dan target RPJMD tahun 2023 adalah sebagai berikut :

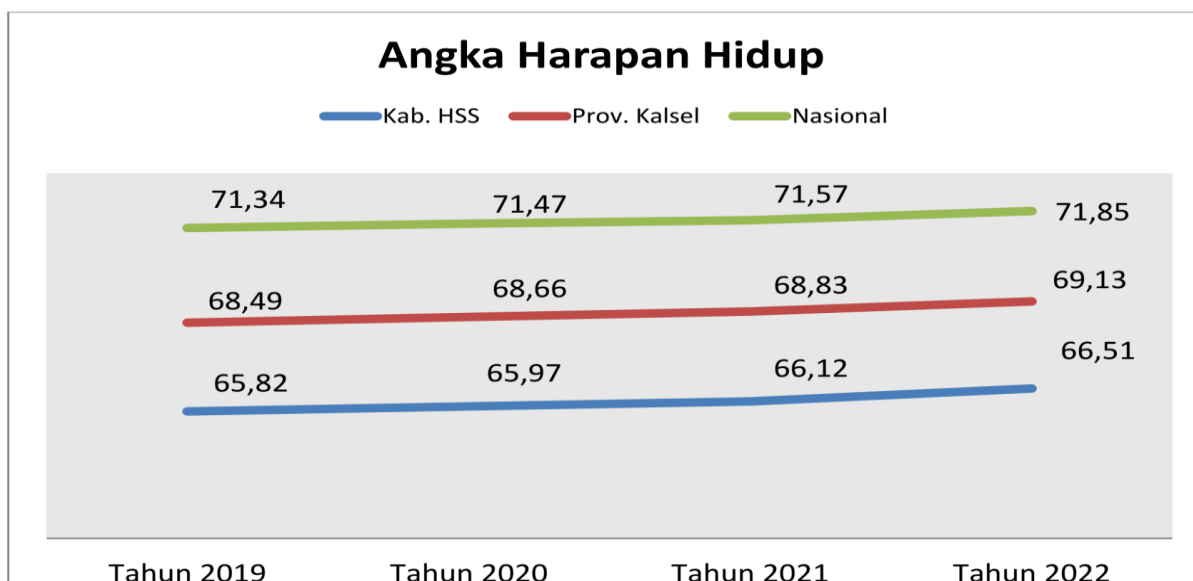
INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI					TARGET RPJMD
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Harapan Hidup	65,59	65,82	65,97	66,12	67,04	67,87

Selama kurun waktu 2018-2022, rata-rata umur harapan hidup penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih dibawah rata-rata umur



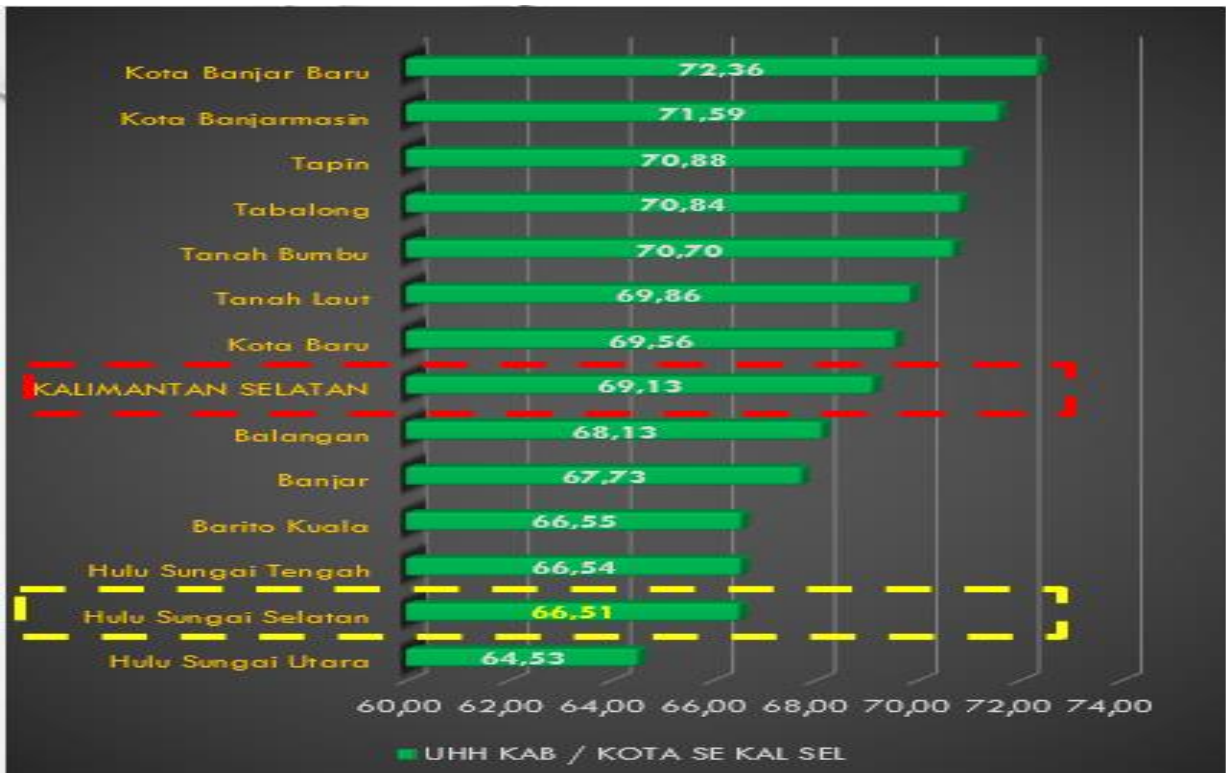
harapan hidup penduduk Kalimantan Selatan. Pada tahun 2022 ini peningkatan umur harapan hidup yaitu sebesar 0,39 tahun, peningkatan tersebut lebih besar kenaikannya dibandingkan peningkatan ditahun 2022 yaitu sebesar 0,15 tahun. Pada tahun 2022 umur harapan hidup penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tercatat 66,51 tahun yang berarti bayi yang baru lahir pada tahun 2022 diharapkan dapat mencapai umur 66,51 tahun untuk hidup atau umur yang mungkin dicapai bayi dari sejak dilahirkan pada tahun 2022 sampai meninggal dunia mencapai usia 66,51 tahun. Jadi selama kurun waktu 5 tahun (2018-2022), pada tahun 2022 umur harapan hidup penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan meningkat sekitar 0,92 tahun atau lebih panjang sekitar 7 bulan 19 hari dibanding tahun 2018.

Adapun perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Provinsi Kalimantan Selatan dan nasional dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Sumber: BPS Kab. Hulu Sungai Selatan

Berdasarkan grafik diatas, Umur Harapan Hidup masyarakat di Kab.Hulu Sungai Selatan data tahun 2019 hingga tahun 2022 terus menunjukkan peningkatan walaupun masih di bawah angka provinsi Kalsel maupun Nasional;. Apabila dibandingkan kabupaten/kota lain di Kalsel, Umur Harapan Hidup masyarakat di Kab.Hulu Sungai Selatan berada pada peringkat 12 sebagaimana terlihat pada grafik berikut ini.



Sumber: BPS Kab. Hulu Sungai Selatan

Posisi Angka Harapan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan berada pada urutan 12 dari 13 Kabupaten/Kota se- Provinsi Kalimantan Selatan, namun secara besarnya kenaikan dari tahun sebelumnya menduduki posisi nomor 2 (dua). Pertumbuhan UHH Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2021-2022 sebesar 0,59 persen dengan kenaikan UHH sebesar 0,39 tahun. Pertumbuhan UHH Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2021-2022 mengalami pertumbuhan lebih tinggi dari tahun sebelumnya dan berada pada urutan ke 2 tertinggi diantara kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan dan pertumbuhan UHHnya diatas pertumbuhan Provinsi Kalimantan. Jika dilihat laju pertumbuhan UHH tahun sebelumnya Peningkatan pertumbuhan UHH tahun 2022 lebih tinggi dengan kenaikan 0,39 tahun. Kenaikan UHH Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2022 di dukung dengan berjalannya program Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pertumbuhan dan Kenaikan UHH Kabupaten/Kota Se Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2022 dapat fdilihat pada tabel dibawah ini.



Tabel 2.11

Perbandingan Pertumbuhan dan Kenaikan UHH Kabupaten/Kota
Se Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2022

No	Kabupaten/ Kota	Pertumbuhan UHH	Kenaikan UHH
1	Tanah Laut	0,39	0,27
2	Kotabaru	0,35	0,24
3	Banjarnegara	0,47	0,32
4	Barito Kuala	0,42	0,28
5	Tapin	0,44	0,31
6	Hulu Sungai Selatan	0,59	0,39
7	Hulu Sungai Tengah	0,51	0,34
8	Hulu Sungai Utara	0,67	0,43
9	Tabalong	0,38	0,27
10	Tanah Bumbu	0,35	0,25
11	Balangan	0,41	0,28
12	Kota Banjarmasin	0,42	0,30
13	Kota Banjar Baru	0,36	0,26
Kalimantan Selatan		0,44	0,30

Sumber : BPS Kab. HSS

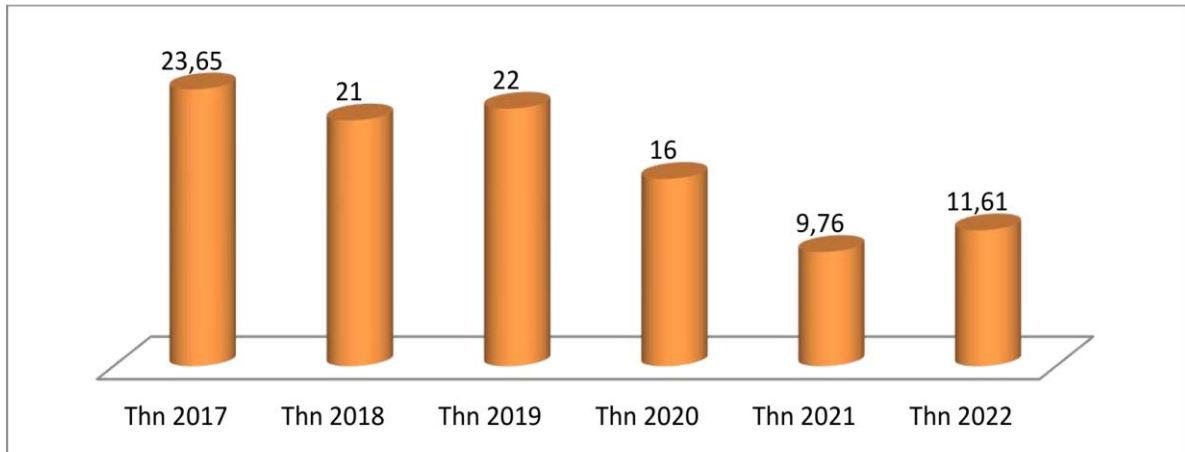
Dalam rangka peningkatan UHH pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah melakukan berbagai upaya dan inovasi untuk mengintervensi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap UHH. Sinergitas berbagai sektor yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat terus ditingkatkan dalam upaya meningkatkan derajat Kesehatan. Derajat kesehatan masyarakat diukur dengan indikator; 1) angka kesakitan (morbiditas) 2) Angka Kematian Bayi (AKB), 3) Angka Kematian Ibu (AKI) dan 4) Persentase balita stunting. Capaian ke 4 indikator tersebut tahun 2022 sebagai berikut :

Angka Kesakitan (Morbiditas)

Angka Kesakitan (Morbiditas) adalah Angka dimana terdapat keluhan Kesehatan yaitu gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, termasuk karena kecelakaan, atau hal lain yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Angka Kesakitan (Morbiditas) semakin kecil semakin baik,



semakin sedikit masyarakat yang mempunyai keluhan kesehatan berarti semakin tinggi derajat kesehatan masyarakat.. Dari tahun ke tahun trend angka kesakitan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan cenderung semakin menurun seperti terlihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Hulu Sungai Selatan

Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa Angka Kesakitan tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain masih rendahnya kesadaran masyarakat ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta menerapkan Germas yang dapat dilihat dari cakupan keluarga ber-Perilaku Hidup. Upaya-upaya yang akan terus dilakukan adalah :

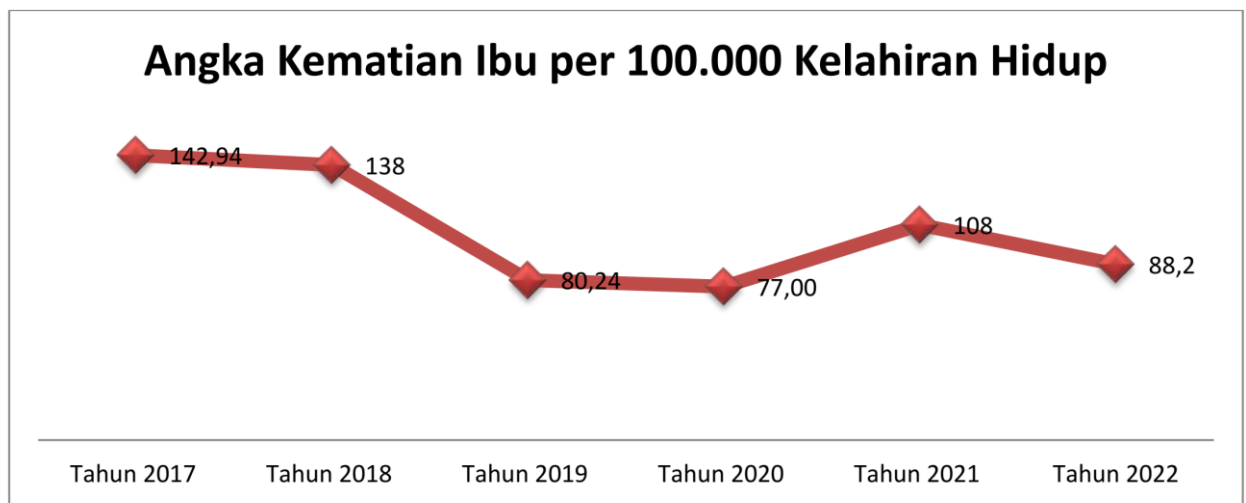
1. meningkatkan pelayanan Kesehatan kepada masyarakat terutama melalui revitalisasi dan puskesmas dengan lebih meningkatkan upaya promotif dan preventif kepada masyarakat.
2. Penyediaan sumber daya manusia kesehatan yang kompeten serta alat kesehatan/alat penunjang medik yang memadai
3. Melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) bagi seluruh Puskesmas dan Rumah Sakit yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
4. Meningkatnya cakupan keluarga ber- Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)



5. Deteksi Dini Penyakit dan Pemberian Kekebalan Terhadap Penyakit dalam upaya mencegah Kejadian Luar Biasa (KLB).

Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka kematian ibu (AKI) adalah banyaknya wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Hulu Sungai Selatan

Dari grafik diatas terlihat bahwa trend AKI jika dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami penurunan pada tahun 2022. Jika disbanding dengan target AKI ditingkat nasional, maka AKI di Kabupaten Hulu Sungai Selatan cenderung masih lebih rendah. Pada tahun 2024 target AKI nasional 183 per 100.000 KH. Demikian juga apabila dibandingkan dengan target AKI Kalimantan Selatan 112 per 100.000 KH. Sedangkan AKI Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2022 sudah mencapai 88,20 per 100.000 KH atau 3 orang kematian ibu dari 3.403 kelahiran hidup.

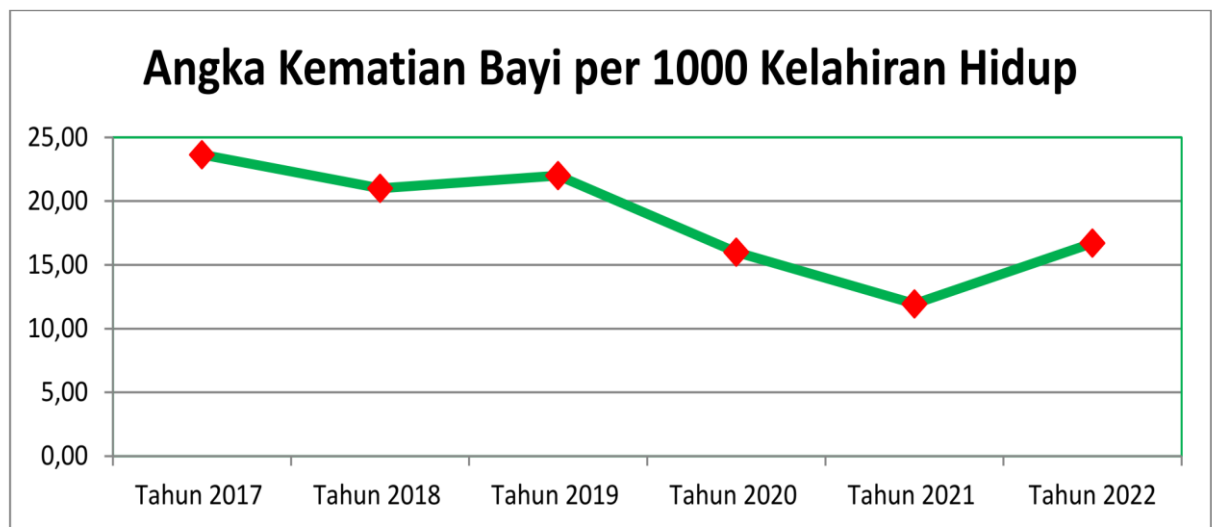
Upaya-upaya strategis dalam upaya penurunan angka kesakitan, AKI dan AKB adalah penguatan upaya promotive dan preventif dengan sasaran 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK); yakni 270 hari selama kehamilan dan 730 hari pada dua tahun pertama kehidupan, yang dikenal sebagai periode emas kehidupan. Pada periode ini prioritas intervensi kesehatan adalah



pemenuhan nutrisi seimbang, tablet tambah darah dan imunisasi untuk ibu hamil. Pemeriksaan kehamilan secara teratur dan persalinan dengan tenaga kesehatan. Pemberdayaan dukun kampung untuk merujuk dan mendampingi ibu hamil agar melakukan persalinan normal difasilitas kesehatan yang ditangani oleh bidan desa terlatih. Masih tingginya kepercayaan masyarakat terhadap dukun kampung dimanfaatkan untuk meningkatkan cakupan persalinan dengan tenaga kesehatan yang pada akhirnya bisa menurunkan AKI dan AKB.

Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kematian bayi (AKB) adalah banyaknya kematian bayi berusia di bawah satu tahun, per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Angka kematian bayi (AKB) Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat kita lihat pada grafik berikut ini.



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Hulu Sungai Selatan

Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2021 dimana di tahun 2021 sebanyak 41 orang sedangkan tahun 2022 sebanyak 57 orang. Angka Kematian Bayi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan relatif meningkat antara lain disebabkan:

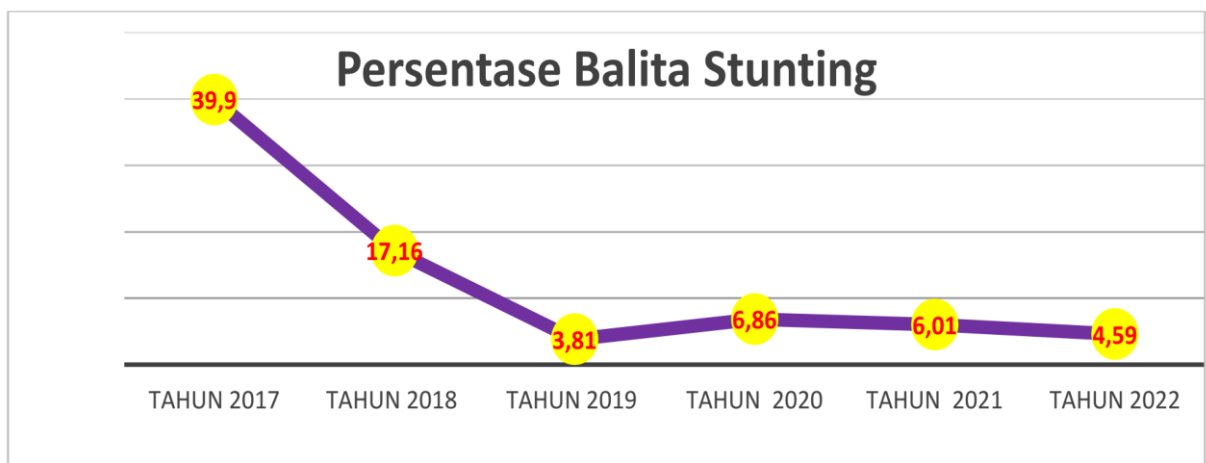
1. Masyarakat kurang mengerti pentingnya menjaga kesehatan bayi dan menyiapkannya sejak masih dalam kandungan.



2. Kunjungan neonatus lengkap belum mencapai 100% (standar SPM) dimana dibandingkan tahun sebelumnya terjadi penurunan yaitu 98,4% pada tahun 2021 menjadi 94,96% pada tahun 2022.
3. Pemberian ASI eksklusif pada bayi umur kurang dari 6 bulan masih rendah yakni sebesar 49,7%.
4. Kunjungan ibu bayi dan balita ke Posyandu masih belum sesuai yang diharapkan.
5. Cakupan imunisasi dasar lengkap baru mencapai 87,11%

Persentase Balita Stunting

Stunting pada anak dapat menjadi indikator yang bagus terkait kesejahteraan anak dan refleksi yang akurat terhadap ketidaksetaraan sosial. Secara keseluruhan, indicator tingkat kesejahteraan anak dapat digambarkan dalam pertumbuhan yang linier (linear growth). Status gizi pada anak sangat berpengaruh terhadap capaian peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Berikut tren capaian persentase balita stunting selama 6 (enam) tahun terakhir dari hasil pencatatan pada e-PPGBM

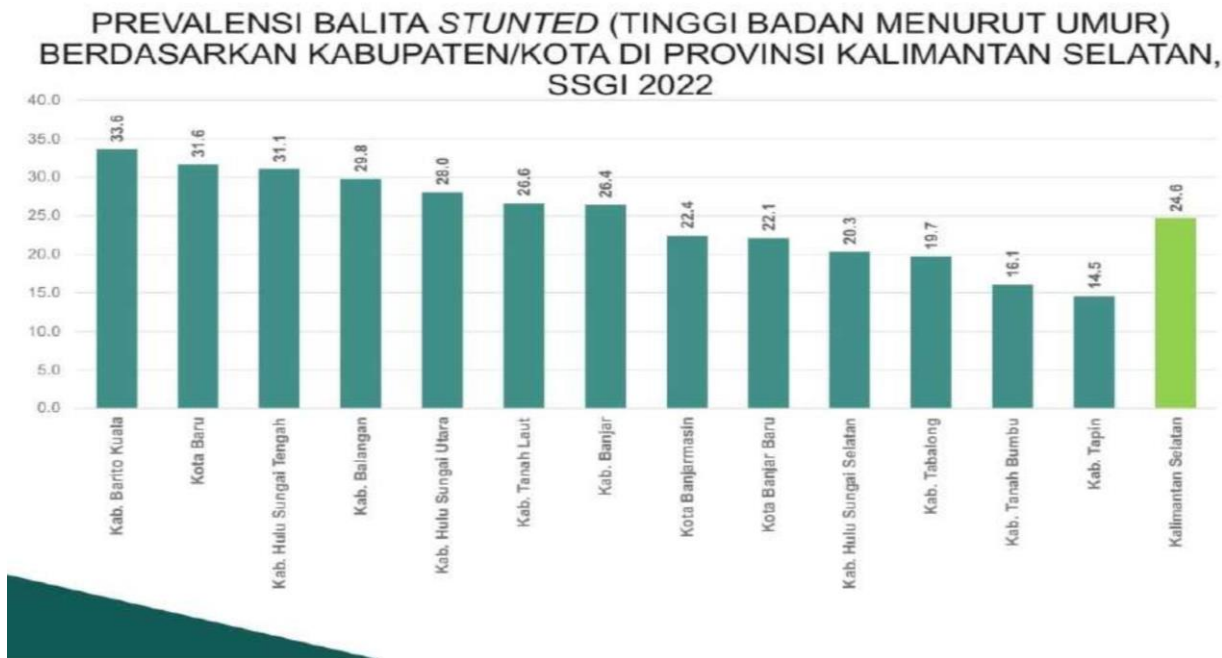


Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Hulu Sungai Selatan

Dari gambar tersebut terlihat angka balita stunting di Kabupaten Hulu Sungai Selatan semakin menurun setiap tahunnya. Berdasarkan Survei Status Gizi Tahun 2022 terlihat juga bahwa angka stunting di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menurun dibandingkan hasil survey tahun 2021.



Dibandingkan dengan kabupaten/kota se Provinsi Kalimantan Selatan terlihat bahwa Hulu Sungai Selatan menempati posisi ke-4 paling rendah dengan prevalensi Balita Stunting 20,3%. Penurunan angka stunting di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sangat signifikan dibanding tahun sebelumnya seperti terlihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Hulu Sungai Selatan

Tindak lanjut sebagai upaya menurunkan Persentase Balita stunting di Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah dengan melaksanakan intervensi spesifik dan intervensi sensitive dalam upaya percepatan penurunan stunting dengan :

1. Remaja putri mengonsumsi tablet tambah darah. Puskesmas akan lebih meningkatkan KIE ke sekolah-sekolah dan melaksanakan Gerakan Minum Tablet Tambah Darah Bersama satu minggu sekali. Pemberian TTD pada remaja putri bertujuan untuk memenuhi kebutuhan zat besi bagi para remaja putri yang akan menjadi ibu di masa yang akan datang. Dengan cukupnya asupan zat besi sejak dini, diharapkan angka kejadian anemia ibu hamil, pendarahan saat persalinan, BBLR, dan balita pendek dapat menurun.



2. Memastikan semua Ibu hamil mengonsumsi 90 tablet tambah darah selama kehamilan dalam rangka mencegah anemia.
3. Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) mendapat tambahan asupan gizi selama 90 hari bahan local melalui anggaran DPA Dinas Kesehatan maupun Dana Desa.
4. Menyelenggarakan konseling Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan meningkatkan cakupan Bayi usia kurang dari 6 bulan mendapatkan ASI eksklusif.
5. Anak usia 6-23 bulan mendapat Makanan Pendamping ASI (MP-ASI). Agar ibu balita mendapatkan pengetahuan pola konsumsi yang beragam, bergizi dan berimbang maka petugas gizi Puskesmas melaksanakan penyuluhan gizi sekaligus demo memasak di Posyandu-Posyandu.
6. Balita dipantau pertumbuhan dan perkembangannya melalui Posyandu yang ada di desa/kelurahan dan menyelenggarakan simulasi dini perkembangan anak di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-Kanak (TK).
7. Memastikan Balita gizi kurang mendapat tambahan asupan gizi selama 90 hari dengan bahan local melalui anggaran DPA Dinas Kesehatan maupun Dana Desa.
8. Balita gizi buruk mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk.
9. Mengupayakan agar Balita memperoleh imunisasi dasar lengkap baik di fasilitas pelayanan Kesehatan, Posyandu maupun sweeping ke desa-desa.
10. Meningkatkan pelayanan KB pasca salin bekerja sama dengan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB).
11. Melaksanakan KIE Kesehatan Reproduksi di sekolah-sekolah dalam upaya mengurangi kehamilan tidak diinginkan.
12. Pemeriksaan Kesehatan Catin bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan dan aparat desa serta mengembangkan inovasi SiCantik Bumilku dalam upaya pendataan Catin, penyuluhan & pemeriksaan Catin serta pemeriksaan Kesehatan ibu hamil.
13. Melaksanakan pemicuan Stop BABS dan 5 pilar STBM dalam rangka meningkatkan akses sanitasi (air bersih dan jamban keluarga).



14. Melaksanakan pendampingan bagi keluarga yang berisiko stunting dengan bekerja sama dengan lintas sector dan organisasi kemasyarakatan terkait yang tergabung dalam Tim Pendamping Keluarga berisiko stunting yang telah dibentuk pada semua desa dengan anggota tim terdiri dari Bidan di Desa, Kader Keluarga Berencana dan Tim Penggerak PKK.
15. Meningkatkan pelaksanaan Kelas Ibu Hamil pada semua desa yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, merubah sikap dan perilaku ibu agar memahami tentang kehamilan, perubahan tubuh dan keluhan selama kehamilan, perawatan kehamilan, persalinan, persalinan, perawatan nifas, KB pasca persalinan, perawatan bayi baru lahir dan gizi seimbang. Dalam rangka menerapkan upaya gizi seimbang, setiap keluarga harus mampu mengenal, mencegah, dan mengatasi masalah gizi setiap anggota keluarganya.

Selain ke 4 (empat) faktor diatas, Peningkatan angka harapan hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2022 juga didukung oleh beberapa indikator kinerja organisasi perangkat daerah, antara lain :

Tingkat kesehatan Rumah Sakit (RS)

Perkembangan Capaian kinerja Tingkat Kesehatan rumah sakit pada tahun 2022 dan target RPJMD tahun 2023 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI					TARGET RPJMD	
	2018	2019	2020	2021	2022	2022	2023
Tingkat kesehatan Rumah Sakit (RS)	NA	BB	AA (83,60)	AA (80,75)	AA (87,40)	AA (97,51)	AAA

Pada indikator kinerja sasaran Tingkat kesehatan Rumah Sakit (RS) dari target berpredikat AAA dengan nilai 97,51, terealisasi Berpredikat AA dengan nilai sebesar 87,40, yang berarti Tercapai sebesar 91,99%.

Adapun adanya indikator kinerja sasaran Tingkat kesehatan Rumah Sakit (RS) adalah untuk memenuhi ketentuan dalam Permendagri Nomor 79 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan BLUD.



Target kinerja/kesehatan rumah sakit adalah hasil penjumlahan nilai riil ke 3 aspek. Kriteria penilaian sebagai berikut:

1. Sehat
 - AAA jika total skor > 95
 - AA jika total skor \geq 80-95
 - A jika total nilai > 65-80
2. Kurang Sehat
 - BBB jika total skor > 50-65
 - BB jika total skor > 40-50
 - B jika total skor > 30-40
3. Tidak Sehat
 - CCC jika total skor > 20-30
 - CC jika total skor > 10-20
 - C jika total skor < 10

Tingkat kesehatan rumah sakit diukur berdasarkan 3 aspek penilaian yakni:

- 1) Indikator kinerja keuangan dengan bobot 20%; terdiri dari 7 indikator;
- 2) Indikator kinerja pelayanan, dengan bobot 40%; terdiri dari 26 indikator;
- 3) Indikator kinerja mutu pelayanan dan manfaat bagi masyarakat dengan bobot 40%; terdiri dari 18 indikator.

Hasil survey dan perhitungan memberikan hasil berikut :

- 1) Indikator kinerja keuangan dengan bobot 20%, mendapatkan nilai 17,18 dari total nilai 20;
- 2) Indikator kinerja pelayanan, dengan bobot 40%, mendapatkan nilai 23,39 dari total nilai 40; dan
- 3) Indikator kinerja mutu pelayanan dan manfaat bagi masyarakat dengan bobot 40%, mendapatkan nilai 36,56 dari total nilai 40.

Rata-rata nilai untuk tingkat kesehatan rumah sakit tahun 2022 adalah 87,40 dengan predikat AA. Capaian ini belum memenuhi target dan terjadi peningkatan dibandingkan capaian tahun 2021 yang mencapai nilai 87,19.

**Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi Paripurna**

Perkembangan Capaian kinerja Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi paripurna pada tahun 2022 dan target RPJMD tahun 2023 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI					TARGET RPJMD	
	2018	2019	2020	2021	2022	2022	2023
Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi paripurna	NA	4,35	0	0	11,54	13,04	17,39

Pada tahun 2022 terdapat 3 (tiga) fasilitas kesehatan yang terakreditasi paripurna dari 26 (dua puluh enam) fasilitas kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau dengan capaian 11,54%. Tiga fasilitas Kesehatan yang telah terakreditasi paripurna adalah :

1. RSUD Brigjend H. Hasan basry Kandangan
2. RSUD Daha Sejahtera dan
3. RS Ceria Kandangan

Dalam pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan didukung oleh program sebagai berikut :

Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1. Program Pemenuhan Upaya kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Kelahiran di Faskes	100	98,45	98,45	81.362.533.390	76.097.156.052	93,53
	Persentase Penurunan Komplikasi obstetri	18	23,11	71,60			
	% Cakupan Pelayanan Ibu Nifas	100	100	100			
	% Pelayanan bayi	100	86,36	105,32			
	%Cakupan desa UCI	80	95,45	119,31			
	% Imunisasi dasar lengkap pada bayi	85	94,60	111,29			



LPPD Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
	% Penurunan Balita gizi kurang	8	5	137,50			
	% BBLR	11	7,71	129,90			
	% Penyakit yang terkendali penyebarannya sesuai SPM	100	94,37	94,37			
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	% Penyakit yang terkendali penyebarannya sesuai SPM	100	94,37	94,37	9.331.261.875	6.918.111.738	74,14
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	% Penyakit yang terkendali penyebarannya sesuai SPM	100	94,37	94,37	15.184.900	13.820.500	91,01
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	% Penyakit yang terkendali penyebarannya sesuai SPM	100	94,37	94,37	360.027.400	321.869.150	89,40
5. Program Pengendalian Penduduk	Persentase kampung Keluarga Berkualitas (KB) yang telah dibentuk	29,73	100	336,36	1.255.708.800	1.231.130.536	98,04
6. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	7,97	7,12	111,94	1.959.930.275	1.933.284.350	98,64
7. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase kelompok kegiatan ketahanan keluarga yang aktif	71,43	71,43	100	1.850.355.100	1.473.362.173	79,63
8. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya	Persentase indikator mutu pelayanan yang tercapai sesuai standar	92	97,71	106,21	184.681.555.935	149.578.546.050	80,99



Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
Kesehatan Masyarakat							
9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Tingkat pemenuhan kapasitas sumber daya manusia yang sesuai standar	100	85,99	85,99	448.800.000	277.360.000	61,80

SASARAN 3 : TERCUKUPINYA KETERSEDIAAN PANGAN YANG BERAGAM DAN AMAN.

Capaian kinerja Sasaran Strategis 3 pada **Tujuan I : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Dasar Lainnya** ditunjang oleh Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN
PPH Ketersediaan	87,17	87,54	100,42
Rata-rata Capaian			100,42

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja sasaran diatas, dapat diambil rerata kesimpulan bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis Tercukupinya Ketersediaan Pangan Yang Beragam Dan Aman adalah sangat baik dengan rata-rata capaian lebih dari 100,42%.

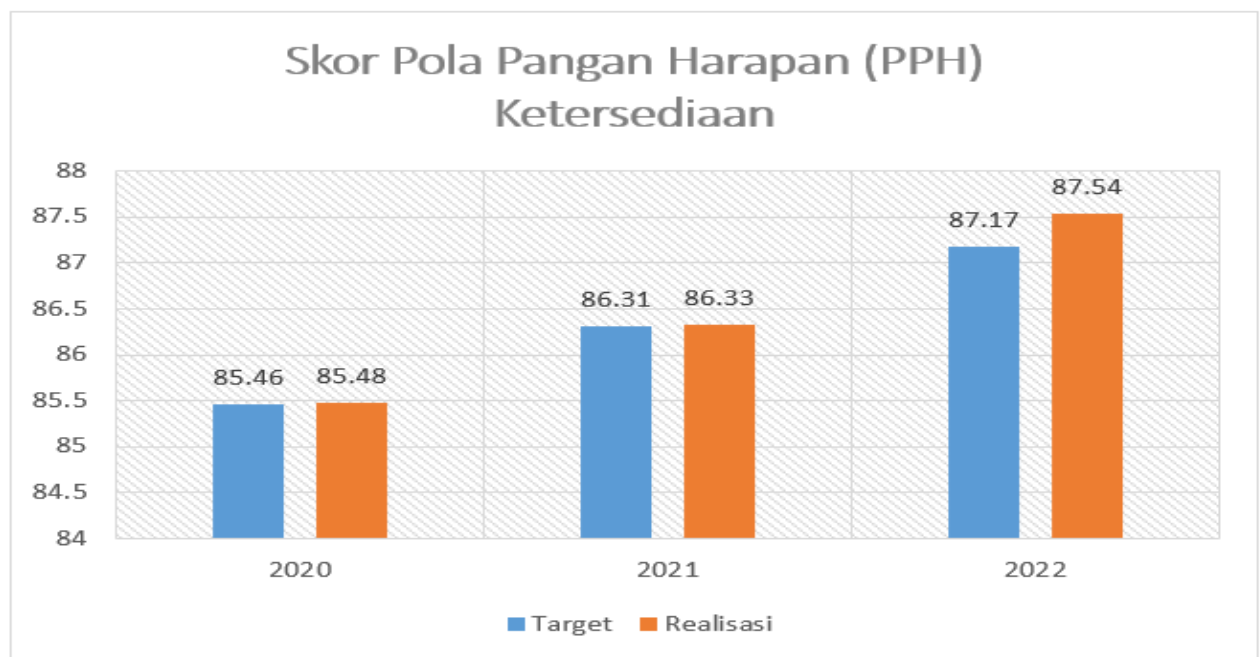
Salah satu alat ukur yang digunakan untuk menggambarkan kondisi keberagaman ketersediaan pangan suatu wilayah (makro) adalah pola pangan Harapan (PPH) Ketersediaan pangan. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.



Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dan target RPJMD tahun 2023 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI					TARGET RPJMD	
	2018	2019	2020	2021	2022	2022	2023
PPH Ketersediaan	83,19	83,95	85,48	86,33	87,54	87,17	88,04

Pola Pangan Harapan (PPH) atau *Desirable Dietary Pattern* (DDP) adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. PPH Kabupaten Hulu Sungai Selatan sejak 2020 dan 2022 secara konsisten terus meningkat .



Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Hulu Sungai Selatan

Berdasarkan grafik di atas terlihat perkembangan realisasi skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan yang dihitung menggunakan perhitungan Neraca Bahan Makanan (NBM). Tiga tahun terakhir skor PPH Ketersediaan yang diperoleh Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus mengalami peningkatan. Tahun ini (2022) skor PPH Ketersediaan ditarget sebesar 87,17 dan berhasil terealisasi sebesar 87,54. Realisasi yang diperoleh melebihi



target yang ditetapkan untuk tahun 2022. Tingkat capaian realisasi terhadap target sebesar 100.42%.

Beberapa komoditas yang berpengaruh terhadap skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.12
Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan
Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Nasional
Tahun 2022

No.	Kelompok Bahan Pangan	Energi (Kalori)	% AKE	Bobot	Skor riil	Skor PPH	Skor Maks	Ket
1.	Padi-padian	9,583	399.3	0.5	199.65	25.00	25.0	
2.	Umbi-umbian	78	3.3	0.5	1.63	1.63	2.5	
3.	Pangan Hewani	294	12.2	2.0	24.47	24.00	24.0	
4.	Minyak dan Lemak	474	19.7	0.5	9.87	5.00	5.0	
5.	Buah/biji berminyak	35	1.4	0.5	0.72	0.72	1.0	
6.	Kacang-kacangan	79	3.3	2.0	6.57	6.57	10.0	
7.	Gula	157	6.5	0.5	3.26	2.50	2.5	
8.	Sayuran dan buah	106	4.4	5.0	22.11	22.11	30.0	
9.	Lain-lain	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah	10,805	450.2		268.29	87.54	100.0	

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Hulu Sungai Selatan

Selain memastikan ketersediaan pangan yang cukup bagi masyarakat, Pemerintah Daerah juga harus memastikan harga pangan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Pergerakan inflasi tahunan Kalimantan Selatan pada bulan Desember 2022 mengalami peningkatan 6,99% atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 116,34 pada November 2022 menjadi 117,15 pada Desember 2022 sangat mempengaruhi daya beli masyarakat terhadap bahan pangan. Oleh sebab itu perlu dijaga stabilitas harga pangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.



Capaian Angka stabilitas harga pangan di tahun 2022 tercapai sebesar 13.06% dari target renstra Dinas Ketahanan Pangan maksimal fluktuasi harga 5.40% dengan data pada tabel berikut :

Tabel 2.13
Perkembangan dan Tingkat Kestabilan Harga Pangan Pokok dan Strategis Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022

Komoditas	Bulan												Harga tertinggi	Harga terendah	rata rata	CV (%)
	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES				
Telur Ayam (kg)	27,097	23,821	25,467	25,800	27,935	30,000	29,774	30,097	30,533	29,000	29,069	30,935	30,935	28,294	8.06	
Beras (kg)	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,871	16,000	16,000	16,181	16,250	16,250	15,000	3.59	
Jagung (kg)	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	4,600	28.18	
Daging Sapi (kg)	130,000	130,000	130,000	130,667	134,839	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	134,839	130,000	1.07	
Daging Ayam (kg)	38,129	38,750	35,600	36,467	36,806	40,133	34,419	34,452	37,133	38,484	38,103	37,323	40,133	34,419	4.65	
Gula Pasir (kg)	14,290	14,000	14,000	14,033	14,484	14,067	13,887	14,000	13,500	13,500	13,500	13,500	14,484	13,500	2.39	
Minyak Goreng Kemasan (Liter)	20,000	16,071	20,267	25,000	25,000	25,000	23,871	20,000	19,933	18,839	17,100	17,000	25,000	16,071	15.90	
Bawang Merah (kg)	27,903	34,536	40,900	32,800	42,677	54,400	66,774	41,170	36,700	35,968	41,966	38,452	66,774	27,903	25.13	
Bawang Putih (kg)	27,581	29,500	29,500	29,367	28,903	26,133	25,290	25,000	26,167	25,194	25,000	25,000	29,500	25,000	7.23	
Cabai Merah Besar (kg)	50,161	47,500	56,333	66,167	59,839	84,000	94,194	99,677	80,667	60,323	58,333	44,839	94,194	44,839	27.53	
Cabai Rawit (kg)	117,258	95,000	107,667	68,833	62,581	106,833	114,194	100,968	100,000	90,323	70,000	80,323	117,258	62,581	19.93	
Rata – Rata															13.06	

Sumber : Data Diolah Tahun 2022

Keterangan : Nilai CV diatas 10% artinya komoditas bahan pangan mengalami fluktuasi harga yang sangat signifikan

Berdasarkan tahun 2022, inflasi *volatile goods* masih didominasi bahan makanan, sehingga sering disebut juga sebagai *volatile foods*. (BPS, 2022). Jika harga pangan meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga pangan tersebut menyebabkan turunnya daya beli masyarakat (BPS, 2022). Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat (BI, 2022).

Inflasi merupakan suatu kejadian yang sangat mengkhawatirkan terutama pada Negara atau Daerah yang padat penduduk, dimana dengan maka akan sangat berpengaruh terhadap jumlah uang yang beredar di masyarakat. Ketika jumlah uang beredar berlebih pada masyarakat maka akan terjadi inflasi yang cukup tinggi. Hal ini akan menyebabkan harga-harga



barang dan jasa meningkat sehingga masyarakat sangat sulit dalam mencukupi kebutuhan pokoknya. Kenaikan harga BBM yang telah ditetapkan pemerintah menyebabkan efek domino terhadap kehidupan masyarakat seperti inflasi, biaya transportasi hingga lonjakan harga pangan. Tingginya harga energi dan pangan global saat ini juga diperkirakan akan terus menekan terjadinya inflasi jika tidak dilakukan penanganan. Berbagai upaya penanganan inflasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah dilakukan, antara lain :

1. Regulasi Pengendalian Inflasi Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Berdasarkan Perda tersebut di atas, telah terbit Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Cadangan Pemerintah Daerah pasal 9 huruf (b) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah kepada masyarakat karena gejolak harga dilakukan melalui mekanisme operasi pasar dengan harga jual beras yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini Administered price atau harga yang diatur adalah harga barang yang mengacu pada keputusan administratif, bukan berdasarkan permintaan atau penawaran pasar. Pada Rencana Strategi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2018-2023 target fluktuasi harga pangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2022 maksimal 5,40% dan tahun 2023 turun menjadi 5,35%

2. Mobilisasi Pangan

Upaya mobilisasi pangan dilaksanakan dalam rangka mengatur dan mengendalikan peredaran pangan, yakni kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak. Mobilisasi dalam bentuk penyaluran pangan tahun 2022 dilaksanakan karena adanya kelompok petani yang gagal tanam dan gagal panen di beberapa desa (daerah defisit), pada bulan Juli 2022 antara lain dari daerah yang mengalami gagal panen sebanyak 2.158 KK, dengan jumlah bantuan beras per KK untuk 1 bulan pertama, total beras CPP yang disalurkan 21.580 kg.



Pada bulan November 2022 penanganan rawan pangan untuk masyarakat/petani yang gagal panen dan kurang mampu serta yang berkategori rawan pangan disalurkan Cadangan Pangan Pemerintah untuk 177 KK, masing-masing selama 1 bulan @ 10 kg = 1.770 kg, total CPP yang disalurkan sebanyak 1.770 kg

3. Gelar Pangan Murah

Dalam rangka penanganan inflasi, komoditas yang dilakukan intervensi adalah komoditas pangan yang termasuk inflasi komponen bergejolak atau volatile food. Inflasi yang termasuk ke dalam kategori inflasi non inti tersebut didefinisikan sebagai inflasi dipengaruhi oleh kejutan dalam kelompok bahan makanan seperti beras, jagung, dan lombok. Hal lain yang dilaksanakan adalah operasional Toko Tani Indonesia sebagai fixed market yang mana sasarannya adalah masyarakat berpenghasilan menengah ke atas.

Gelar Pangan Murah atau stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dilaksanakan pada 33 titik lokasi yang tersebar di 11 Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kegiatan GPM melayani masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM dengan prioritas Desa pinggiran dan relatif jauh dari pasar Kecamatan dan pasar Kabupaten.

4. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah

Penguatan cadangan pangan meliputi penguatan jalinan kerja sama dengan Perum Bulog dan pembangunan dan pemeliharaan, dan pembinaan Gapoktan pengelola Lumbung Pangan Masyarakat (LPM). Keberadaan LPM bertujuan meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin melalui padat karya dan penurunan stunting di wilayah rentan rawan pangan. Outcome kegiatan ini adalah sebanyak 400 orang anggota gabungan kelompok tani dapat melaksanakan proses tunda jual pada lumbung pangan masyarakat yang mana keuntungan dari selisih harganya dapat digunakan untuk menambah pendapatan anggota, disamping itu tersedia juga gabah sebanyak 2 (dua) ton sebagai iron stock yang dapat digunakan untuk penanggulangan kerawanan pangan khususnya beras di tingkat gabungan kelompok tani.



5. Penguatan cadangan pangan di desa antara lain menyediakan Lumbung dan Infrastruktur dan sarana Pendukung

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, bahwa untuk menjaga kualitas cadangan pangan pemerintah Daerah Pada Lumbung Pangan Masyarakat dilakukan Pemeliharaan dan peremajaan gabah. Pada tahun 2022 telah terpeliharanya 10.000 Kg Gabah di Lumbung Pangan Masyarakat.

Dalam pencapaian sasaran strategis Tercukupinya Ketersediaan Pangan Yang Beragam Dan Aman didukung oleh program sebagai berikut :

Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase Cadangan Pangan Masyarakat	112	112	100	2.175.000.000	2.174.574.000	99,98
	Skor PPH Ketersediaan	87,17	87,54	100,42			
2. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	82,37	100	121,40	2.081.727.550	1.898.712.444	91,21
	Persentase rumah tangga pengkonsumsi pangan B2SA	76,06	76,06	100			
	Nilai Tukar Petani	107	107	100			
3. Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan keamanan	100	100	100	30.389.900	30.194.900	99,36

SASARAN 4 : MENINGKATNYA PELAYANAN DASAR BAGI MASYARAKAT.

Capaian kinerja Sasaran Strategis 4 pada **Tujuan I : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Dasar Lainnya** ditunjang oleh Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut :



INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN
Persentase Capaian Perangkat Daerah Dalam Menerapkan SPM	72	97,04	134,78
Rata-rata Capaian			134,78

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja sasaran diatas, dapat diambil rerata kesimpulan bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat adalah sangat baik dengan rata-rata capaian 134,78%.

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dan target RPJMD tahun 2023 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI					TARGET RPJMD
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Capaian Perangkat Daerah Dalam Menerapkan SPM	52,00	57,00	57,00	95,80	97,04	75,00

Beberapa sasaran yang mendukung pencapaian indicator kinerja sasaran Capaian Perangkat Daerah Dalam Menerapkan SPM antara lain :

Angka Partisipasi Sekolah

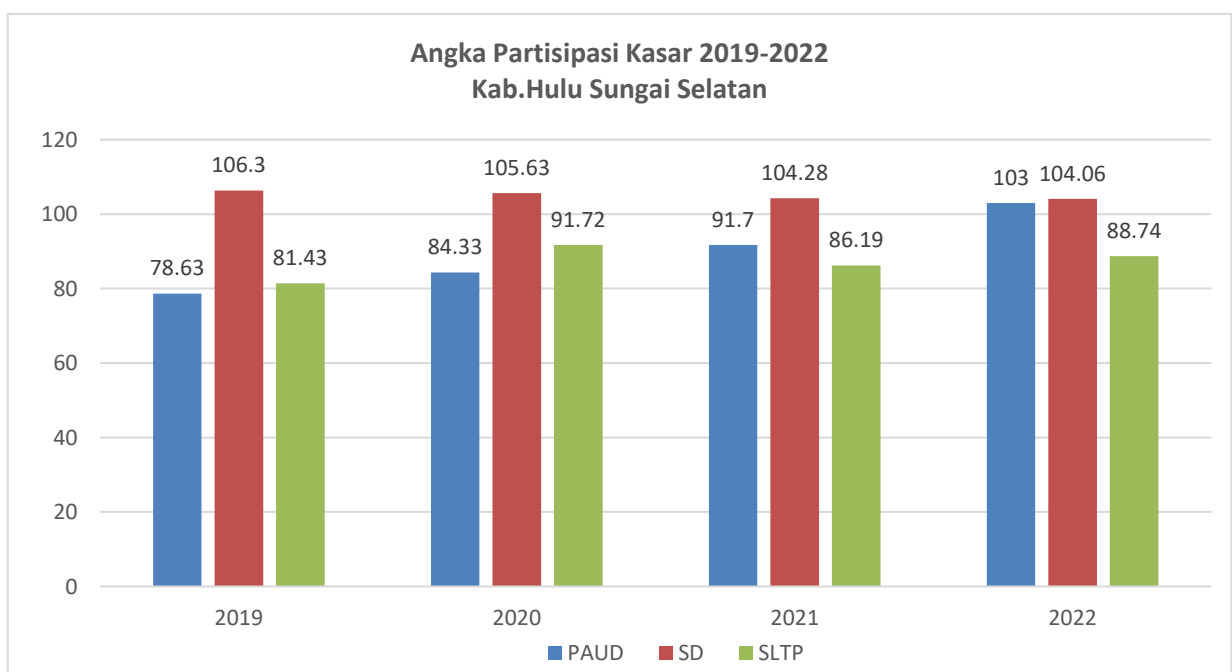
Pemerintah Daerah menjalankan strategi untuk meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah dengan melakukan tracking anak usia sekolah yang tidak bersekolah atau putus sekolah berbasis data *by name by address* melalui aplikasi SatuNIK. Dinas Pendidikan bekerjasama dengan aparat desa dan sarjana pendamping desa melacak keberadaan keluarga yang memiliki anak putus sekolah atau tidak bersekolah. Dilakukan pendekatan, fasilitasi dan motivasi kepada keluarga agar anak-anaknya tetap dapat melanjutkan pendidikan.



Persentase Angka Partisipasi Sekolah adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APS berarti makin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Pada Tahun 2022 ini realisasi Persentase Angka Partisipasi Sekolah adalah 101,76% dari target 100% dengan capaian realisasi 101,76% dimana angka ini memenuhi target yang di tentukan. Dalam upaya mencapai tujuan sasaran di atas yaitu dengan terpenuhinya layanan akses pendidikan bagi semua anak dengan indikator kinerja persentase angka partisipasi sekolah, dalam arti semua anak usia sekolah yang ada di kabupaten Hulu Sungai Selatan harus duduk di bangku sekolah baik di jenjang SD/MI, SMP/Mts maupun Paket A/B/C.

Sedangkan realisasi Angka Partisipasi Murni Pendidikan adalah sebesar 87,89% dari target $\geq 95\%$ atau tercapai sebesar 92,48%, dimana angka tersebut memang masih belum memenuhi target yang ada.

Capaian Angka Partisipasi Kasar dari tahun 2019-2022 sebagaimana terlihat pada grafik berikut ini.



Sumber : Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Hulu Sungai Selatan



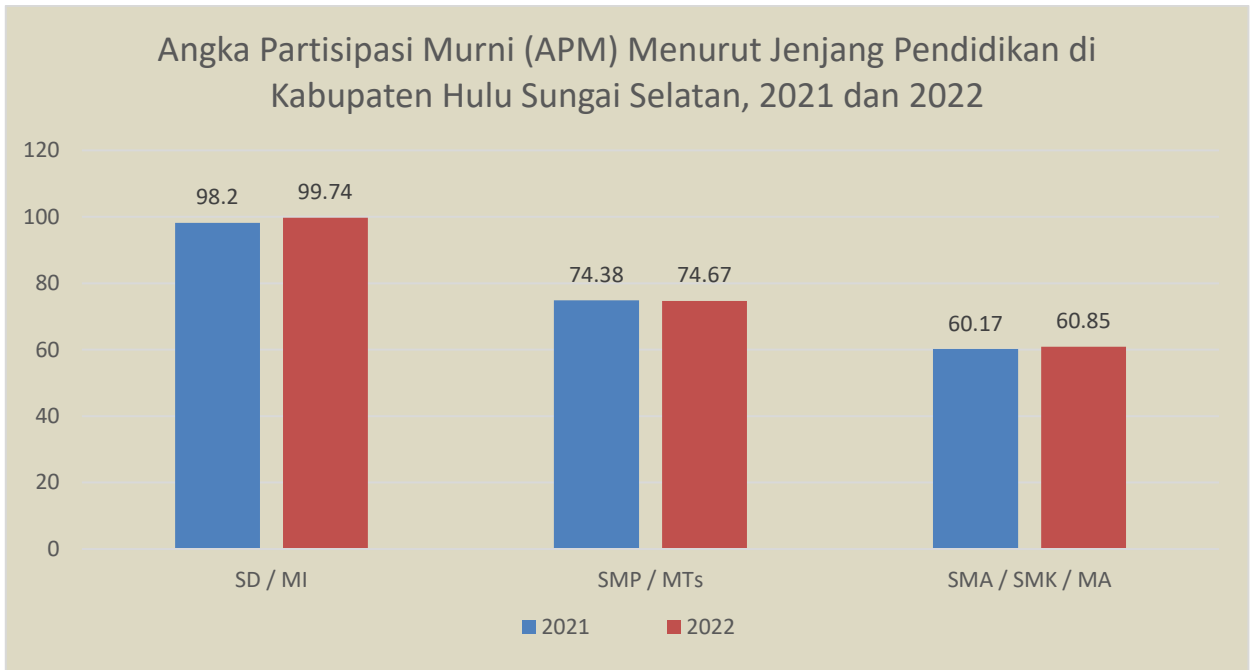
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga berupaya meningkatkan tingkat Pendidikan masyarakat melalui Program Kesetaraan Kejar Paket. Program ini bertujuan memberikan kesempatan belajar yang seluas-luasnya bagi anak-anak atau masyarakat umum yang putus sekolah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, sehingga memiliki kemampuan setara SD, SMP dan SMA. Dalam hal penyediaan prasarana pendidikan pada tahun ajaran 2022/2023, terdapat 215 unit SD, 37 unit SMP, 9 unit SMA, dan 5 unit SMK. Untuk sekolah pendidikan islam pada tahun ajaran 2022/2023 terdapat 42 unit MI, 25 unit MTs, dan 13 unit MA

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melakukan advokasi kepada pimpinan pondok-pondok pesantren tradisional yang tidak memasukkan materi pendidikan formal dalam proses pembelajarannya agar memberikan kesempatan atau fasilitasi bagi santrinya untuk mengikuti kejar paket. Harapannya para santri memiliki ijazah formal dan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Program ini juga menyoar kelompok masyarakat yang usianya telah melewati usia sekolah, namun belum menyelesaikan pendidikan formal karena berbagai kendala. Dengan program ini diharapkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat menjadi lebih baik dan mendapatkan pekerjaan yang layak.

Upaya lainnya dari Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah dengan peningkatan kuantitas, kualitas dan pemerataan distribusi tenaga pengajar. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Pendidikan. Pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan kegiatan akreditasi sekolah.

Persentase Angka Partisipasi Murni Pendidikan

Persentase Angka Partisipasi Murni Pendidikan adalah proporsi anak sekolah pada suatu kelompok tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Angka Partisipasi Murni Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 sebagai berikut :



Sumber : Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Hulu Sungai Selatan

Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa Angka Partisipasi Murni Pendidikan pada semua level Pendidikan mengalami peningkatan, walaupun angka ini memang masih belum memenuhi target yang ditetapkan. Belum tercapainya target tersebut dikarenakan beberapa hal yaitu :

1. Mutasi orang tua siswa keluar daerah
2. Tumbuhnya PAUD, tidak diiringi dengan aturan yang ketat tentang pembatasan umur seorang anak untuk mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini. Akhirnya orang tua anak memaksakan anaknya untuk mengikuti pendidikan di jenjang yang lebih tinggi (SD), walaupun usia anak belum mencapai 7 tahun karena anaknya sudah jenuh di tingkat PAUD.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan yang mana sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah terdiri atas:

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin



3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
4. Pelayanan kesehatan balita
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
6. Pelayanan Kesehatan pada usia produktif
7. Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut
8. Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi
9. Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus
10. Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat
11. Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberkulosis (TBC)
12. Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)

Berikut perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022 terkait SPM Kesehatan :

Tabel 2.14
Capaian SPM Kesehatan Tahun 2022

No	Program SPM	Target	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja
1	Setiap ibu hamil mendapatkan antenatal sesuai standar	3614	3237	89.57
2	Setiap ibu bersalin mendapatkan persalinan sesuai standar	3412	3359	98.45
3	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3407	3322	97.51
4	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	15726	12960	82.41
5	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	33566	33312	99.24
6	Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	145633	127347	87.44
7	Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	32996	27154	82.29



No	Program SPM	Target	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja
8	Setiap hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	61418	56399	91.83
9	Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4674	4674	100
10	Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	577	572	99.13
11	Setiap orang terduga TBC mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4104	4090	99.66
12	Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	4355	4152	95.34

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Hulu Sungai Selatan

Perbandingan capaian SPM tahun 2021 dengan capaian SPM tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 2.15

Perbandingan Realisasi Capaian SPM Tahun 2021 dan 2022

No	Program SPM	Realisasi Kinerja 2021	% Capaian Kinerja 2021	Realisasi Kinerja 2022	% Capaian Kinerja 2022
1	Setiap ibu hamil mendapatkan antenatal sesuai standar	3.444	95,19	3237	89.57
2	Setiap ibu bersalin mendapatkan persalinan sesuai standar	3.669	98,79	3359	98.45
3	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3.633	98,40	3322	97.51
4	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	13.735	93,72	12960	82.41
5	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	36.239	99,43	33312	99.24



No	Program SPM	Realisasi Kinerja 2021	% Capaian Kinerja 2021	Realisasi Kinerja 2022	% Capaian Kinerja 2022
6	Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	121.913	84,12	127.347	87.44
7	Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	25.408	98,89	27.154	82.29
8	Setiap hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	53.752	77,89	56.399	91.83
9	Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4.962	100	4.674	100
10	Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	561	100	572	99.13
11	Setiap orang terduga TBC mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2.998	77,11	4.090	99.66
12	Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna narkoba, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	4.128	93,22	4.152	95.34

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Hulu Sungai Selatan

Jika dibandingkan dengan target Nasional yang harus 100%, capaian Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih belum memenuhi target. Analisa penyebab capaian SPM Kabupaten Hulu Sungai Selatan belum sesuai target Nasional antara lain disebabkan oleh :

1. Perhitungan target sasaran menggunakan proyeksi data dari Pusdatin Kemenkes RI yang datanya lebih besar dibandingkan dengan sasaran riil.
2. Belum menghitung pembiayaan secara ideal
3. Masih rendahnya kapasitas SDM kesehatan
4. Sarana prasarana alat kesehatan belum lengkap (sesuai standar mutu)
5. Inovasi parsial, belum di kerjakan oleh seluruh puskesmas



6. Pengetahuan masyarakat masih kurang terhadap penyakit sehingga tidak segera berobat/memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami tanda dan gejala penyakit

Dalam pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Pelayan Dasar Bagi Masyarakat didukung oleh program sebagai berikut :

Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1. Program Pengelolaan Pendidikan	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	2,5	1,67	66,80	62.637.310.615	59.595.839.578	95,14
	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	2,5	1,58	63,20			
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	100	104,06	104,06			
	APM SD	90	99,74	110,82			
	Rata-rata kemampuan Literasi SMP berdasarkan asesmen nasional	2,5	1,68	67,20			
	Rata-rata kemampuan Numerasi SMP berdasarkan asesmen nasional	2,5	1,58	63,20			
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	100	88,74	88,74			
	APM SMP	90	74,67	82,97			
	Persentase sekolah dasar yang terakreditasi B	50	37,33	74,66			
	Persentase Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV	52	53	101,92			
	Rasio pengawas dan penilik PAUD	5:7	1:15	24,43			



LPPD Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	91	103	113,19			
	Angka Partisipasi Pend. Non Formal	85	100	117,65			
2. Program Pemenuhan Upaya kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Kelahiran di Faskes	100	98,45	98,45	81.362.533.390	76.097.156.052	93,53
	Persentase Penurunan Komplikasi obstetri	18	23,11	71,60			
	% Cakupan Pelayanan Ibu Nifas	100	100	100			
	% Pelayanan bayi	100	86,36	105,32			
	%Cakupan desa UCI	80	95,45	119,31			
	% Imunisasi dasar lengkap pada bayi	85	94,60	111,29			
	% Penurunan Balita gizi kurang	8	5	137,50			
	% BBLR	11	7,71	129,90			
	% Penyakit yang terkendali penyebarannya sesuai SPM	100	94,37	94,37			
3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rasio Rumah Tangga yang memiliki akses sarana air bersih layak	0,96	0,95	98,54	11.917.191.036	11.863.659.705	99,55
4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rasio Rumah Tangga yang memiliki akses sarana sanitasi layak	0,87	0,85	97,70	11.008.749.000	10.973.683.040	99,68



TUJUAN 2	MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS DAN INKLUSIF YANG BERDAMPAK TERHADAP ANGKA KEMISKINAN
---------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Untuk mencapai tujuan kedua yakni **“Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif yang berdampak terhadap angka kemiskinan”**, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah menetapkan 6 (enam) sasaran strategis dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja sasaran sebagai berikut;

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	% CAPAIAN KINERJA		
2	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif yang berdampak terhadap angka kemiskinan	5	Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah	7	Tingkat kemiskinan (persentase penduduk miskin)	4,54	4,54	100,00
				8	Indeks Gini	0,299	0,260	113,04
		6	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	9	Tingkat pengangguran terbuka	1,99	2,29	84,92
				7	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	10	Laju pertumbuhan ekonomi	6,38
		11	Laju pertumbuhan ekonomi kategori industri pengolahan			5,56	5,25	94,42
		12	Laju pertumbuhan ekonomi kategori perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor			5,72	8,40	146,85
		13	Laju pertumbuhan ekonomi kategori pertanian, kehutanan dan perikanan			4,92	-0,49	-9,96



NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	% CAPAIAN KINERJA		
		8	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	14	Peningkatan retribusi dan pajak daerah	26 milyar	23,89 milyar	91,88
		9	Meningkatnya investasi PMDN	15	Persentase peningkatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	6,00	8,36	139,33
		10	Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata dan kebudayaan bagi masyarakat	16	Tingkat Pengeluaran Wisatawan (Spending of money)	RP. 7.873.326.000	Rp. 14.705.425.000	186,78

SASARAN 5 : MENURUNNYA KEMISKINAN DAN KESENJANGAN ANTAR WILAYAH

Capaian kinerja Sasaran Strategis 5 pada **Tujuan II : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif yang berdampak terhadap angka kemiskinan** ditunjang oleh Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN
Tingkat kemiskinan (persentase penduduk miskin)	4,54	4,54	100
Indeks Gini	0,299	0,260	113,04
Rata-rata			106,52

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja sasaran diatas, dapat diambil rerata kesimpulan bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis Menurunnya Kemiskinan Dan Kesenjangan Antar Wilayah adalah Sangat Baik/Tinggi atau tercapai 106,52%.

Pada indikator kinerja sasaran Tingkat kemiskinan (persentase penduduk miskin) dari target 4,54, terealisasi 4,54 yang berarti Tercapai



sebesar 100% dengan kategori sangat baik/tinggi. Sedangkan pada indikator kinerja sasaran Indeks Gini dari target 0,299, terealisasi 0,260 yang berarti Tercapai sebesar 113,04% juga dengan kategori sangat baik/tinggi.

Tingkat Kemiskinan (Persentase Penduduk Miskin)

Perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dan target RPJMD tahun 2023 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI					TARGET RPJMD
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tingkat kemiskinan (persentase penduduk miskin)	5,21	5,33	5,17	4,84	4,54	4,28

Kemiskinan untuk beberapa daerah dan lingkup pemerintah menjadi sebuah hal yang memiliki pandangan negatif dalam pencapaian pembangunan suatu daerah. Kemiskinan menjadi beban sekaligus tanggung jawab yang harus diemban oleh segenap pemerintah daerah di Indonesia beserta semua aspek yang mempengaruhinya. Persoalan kemiskinan merupakan fenomena global, karenanya diperlukan peran dari berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat untuk menangani masalah kemiskinan.

Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki tren penurunan tingkat kemiskinan yang baik disetiap tahunnya. Seperti yang ditunjukkan pada data tabel dibawah ini.

Tabel 2.16
Persentase Penduduk Miskin Prov. Kalimantan Selatan
Menurut Kab/Kota Tahun 2018-2022

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Tanah Laut	4,40	4,51	4,26	4,57	3,86
Kotabaru	4,52	4,49	4,22	4,86	4,30
Banjar	2,70	2,72	2,41	3,04	2,79



Kabupaten/Kota	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Barito Kuala	4,56	4,63	4,51	5,11	4,75
Tapin	3,70	3,41	3,06	3,60	3,60
Hulu Sungai Selatan	5,21	5,33	5,17	4,84	4,54
Hulu Sungai Tengah	6,01	5,93	5,64	6,18	5,92
Hulu Sungai Utara	6,38	6,50	6,14	6,83	6,49
Tabalong	5,95	6,01	5,98	6,27	5,87
Tanah Bumbu	4,88	4,85	4,60	4,82	4,26
Balangan	5,59	5,55	5,32	6,07	5,83
Banjarmasin	4,18	4,20	4,39	4,89	4,74
Banjarbaru	4,19	4,30	4,01	4,40	4,17

Sumber : BPS Kab. Hulu Sungai Selatan

Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggunakan strategi penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga (*Family Based-Policy*), rumah tangga miskin, Strategi ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin menurut individu (sebagai anggota keluarga dalam rumah tangga miskin). Dan strategi penanggulangan kemiskinan berbasis komunitas, yang bertujuan membiasakan para rumah tangga miskin untuk berkelompok, belajar mengelola kegiatan secara bersama, memupuk rasa solidaritas sosial dan meningkatkan peran aktif kelompok rumah tangga miskin dalam satu satuan wilayah terkecil seperti Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) untuk berperan dalam meningkatkan akses bagi anggota masyarakat miskin kepada pelayanan sosial maupun sarana prasarana sosial dasar.

Pada tabel berikut dapat diketahui perkembangan tingkat kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan, dan indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.



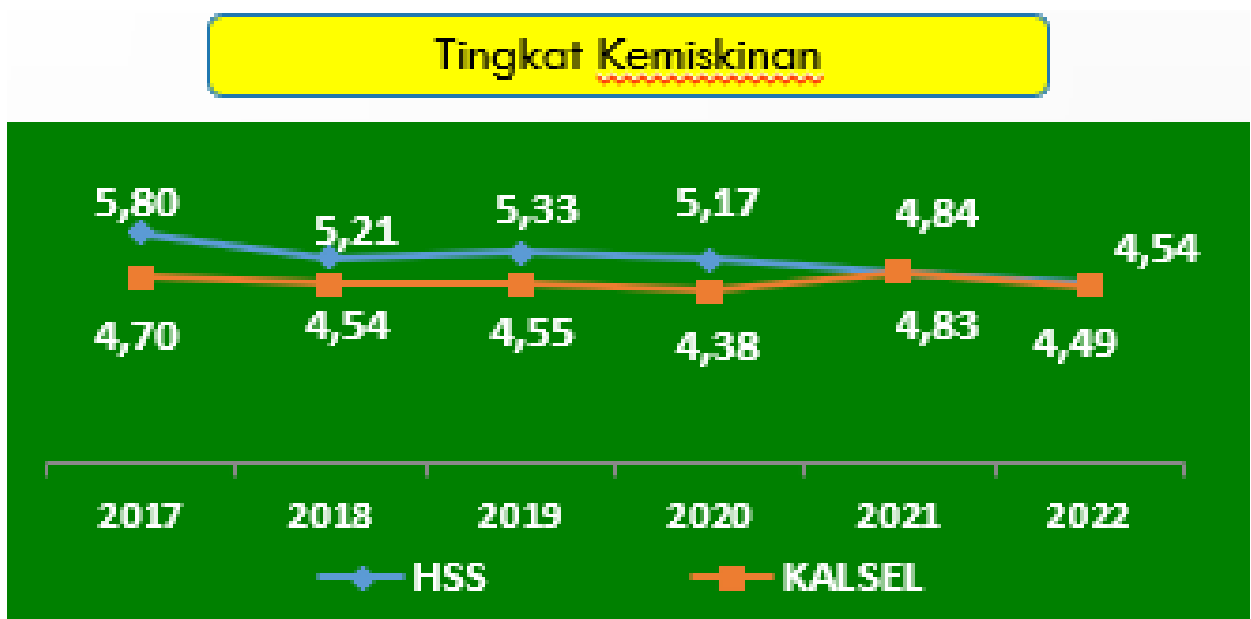
Tabel 2.17

Perkembangan Tingkat Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2022

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Tingkat Kemiskinan	Persen	5,21	5,33	5,17	4,84	4,54
2	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Persen	0,71	0,72	0,51	0,45	0,49
3	Indeks Keparahan Kemiskinan	Persen	0,18	0,15	0,09	0,06	0,09

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan

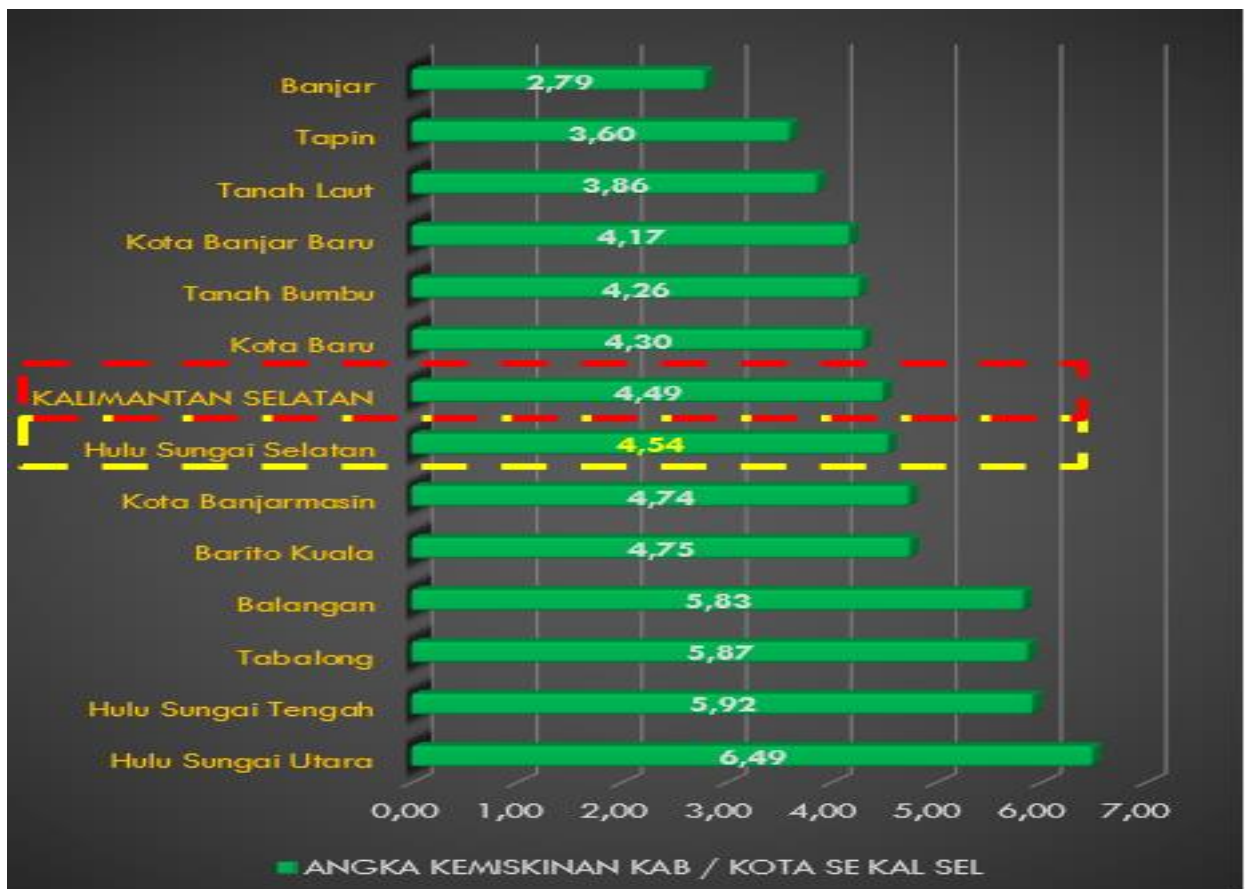
Garis kemiskinan menurut BPS di Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah penduduk dengan pengeluaran sebesar Rp.494.203 per bulan. Dinas sosial pada hari ini sangat berperan untuk menahan penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan agar tidak jatuh ke keparahan dan kedalaman kemiskinan bagi masyarakat yang rentan. Tingkat Kemiskinan dari tahun 2017 sampai 2022 mengalami penurunan. Dari 5,8 menjadi 4,54. Angka ini tidak berbeda jauh dari tingkat kemiskinan provinsi Kalsel.



Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan



Dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Kalsel, Tingkat Kemiskinan Kab.Hulu Sungai Selatan tahun 2022 berada pada urutan ke 7.



Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Penurunan tingkat kemiskinan, adalah sinergitas banyak instansi, yang berperan pada peningkatan produksi, kesempatan kerja, dan perlindungan sosial. Dinas sosial berperan untuk meningkatkan kualitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menjadi lebih mandiri. Mencegah keparahan dan kedalaman kemiskinan bagi masyarakat yang rentan, melalui pelaksanaan berbagai bantuan sosial. Penurunan tingkat kemiskinan, adalah sinergitas/ crosscutting banyak instansi, yang berperan pada peningkatan produksi, kesempatan kerja, dan perlindungan sosial.



Melalui aplikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dapat dilacak penduduk miskin di kabupaten Hulu Sungai Selatan yang ditargetkan menjadi penerima bantuan social sesuai kebutuhannya. Penduduk miskin yang masih produktif dibantu melalui program usaha ekonomi produktif. Program BPJS, pelayanan Kesehatan masyarakat, pembangunan sarana sanitasi dasar; akses air bersih dan jamban keluarga juga diberikan. Program beras sejahtera untuk menjaga terpenuhinya kebutuhan pokok serta Program rumah sejahtera berupa rehabilitasi rumah agar layak huni.

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita per hari. Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Garis Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2022 menyentuh angka Rp. 516.857 dengan persentase penduduk miskin sebesar 4,54 persen



Tabel 2.18

Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kabupaten	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
Hulu Sungai Selatan	12.224 jiwa	12.636 jiwa	12.385 jiwa	11.466 jiwa	10,804 jiwa

Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Penanggulangan kemiskinan berbasis individu terpilih sebagai pemicu pencapaian peningkatan pendapatan bagi kelompok rumah tangga miskin produktif. Strategi ini ditujukan untuk memberikan kesempatan pada kelompok-kelompok rumah tangga miskin yang ada di antara para anggotanya yang produktif dan mempunyai usaha mikro dan kecil. Sehingga mereka dapat meningkatkan akses mereka kepada permodalan, teknologi dan pasar, sehingga peningkatan pendapatan dapat lebih besar lagi. Strategi ini menyediakan bantuan modal atau kredit mikro kepada kelompok rumah tangga miskin yang berada dalam satu satuan wilayah terkecil seperti RT atau RW.

Selain itu implementasi pembangunan sistem perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan miskin, peningkatan akses pelayanan dasar, pemberdayaan kelompok miskin, pembangunan inklusif, penguatan kelembagaan dan reorientasi kebijakan, menjadi pilar utama strategi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Adapun hasil dari berbagai inovasi program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial tersebut telah menunjukkan sisi manfaat pada masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Indeks Gini

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dan target RPJMD tahun 2023 adalah sebagai berikut :



INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI					TARGET RPJMD
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Gini	0,317	0,288	0,300	0,275	0,260	0,284

Peningkatan PDRB Perkapita serta Pertumbuhan ekonomi yang positif tidak menjamin adanya sebuah pemerataan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu indikator peningkatan pembangunan suatu daerah selain melihat dari faktor pertumbuhan ekonomi perlu dilihat pula tingkat pemerataannya yang dapat dilihat melalui indeks gini. Indeks gini merupakan salah satu ukuran pemerataan ekonomi atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang nilai indeksnya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna).

Indeks gini merupakan salah satu ukuran pemerataan ekonomi atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang nilai indeksnya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Pada Gambar di bawah ini adalah capaian indeks gini di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2018-2022.

Tabel 2.19

Gini Ratio Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Kabupaten/Kota

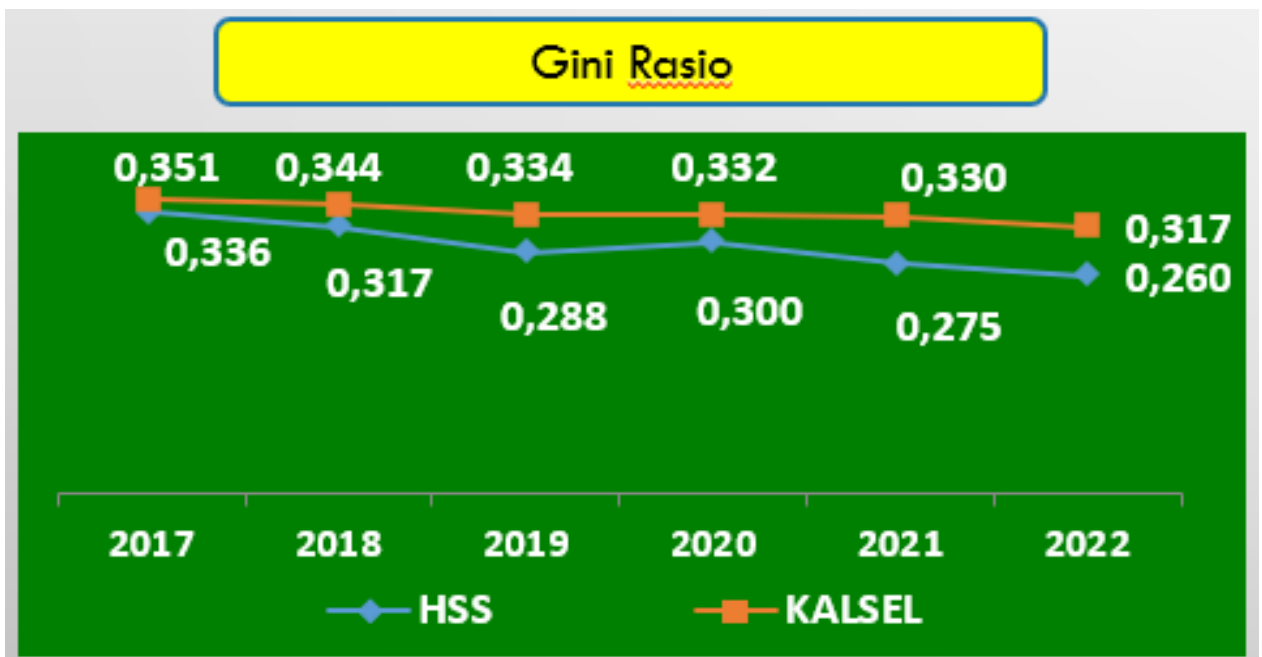
Kabupaten/Kota	Gini Ratio (Indeks Gini)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Tanah Laut	0,234	0,271	0,250	0,232	0,263
Kotabaru	0,337	0,335	0,287	0,306	0,331
Banjarnegara	0,327	0,330	0,322	0,344	0,300
Barito Kuala	0,338	0,285	0,277	0,284	0,289
Tapin	0,281	0,268	0,274	0,289	0,291
Hulu Sungai Selatan	0,317	0,288	0,300	0,275	0,260
Hulu Sungai Tengah	0,320	0,288	0,285	0,331	0,228
Hulu Sungai Utara	0,325	0,327	0,319	0,378	0,301
Tabalong	0,305	0,306	0,346	0,288	0,337
Tanah Bumbu	0,332	0,346	0,300	0,281	0,292



Kabupaten/Kota	Gini Ratio (Indeks Gini)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Balangan	0,310	0,273	0,298	0,277	0,266
Banjarmasin	0,377	0,326	0,342	0,350	0,330
Banjarbaru	0,365	0,357	0,381	0,361	0,341

Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Ratio gini adalah gambaran distribusi pendapatan penduduk. semakin kecil Gini ratio di suatu wilayah, semakin merata distribusi pendapatan penduduk di wilayah tersebut. Ratio Gini Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari tahun 2017 sampai 2020 cenderung tetap di angka 0,3 dan turun menjadi 0,275 tahun 2021 dan 0,260. Angka ini masuk kategori tingkat ketimpangan rendah. Angka ini menggambarkan distribusi pendapatan penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan cukup merata. Angka gini ratio Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih lebih baik apabila dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana grafik dibawah ini.



Sumber data BPS Kab. Hulu Sungai Selatan

Dalam usaha pencapaian sasaran strategis Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah didukung oleh program sebagai berikut :



Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1. Program Pemberdayaan Sosial	Persentase MBR yang Usahanya Meningkatkan	100	90,18	90,18	4.925.289.150	4.792.701.163	97,31
	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang memiliki keterampilan	100	92,43	92,43			
2. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase penerima bantuan beras sejahtera daerah tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah	100	100	100	13.688.146.400	13.264.250.800	96,90
	Persentase penerima bantuan rumah sejahtera pada masyarakat berpenghasilan rendah	100	84,46	84,46			
	Persentase penerima Bantuan Pangan Non Tunai dan PKH tepan sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah	100	98,21	98,21			
3. Program Penanganan Bencana	Persentase Keaktifan Taruna Siaga Bencana Dalam Penanggulangan Bencana	100	100	100	508.120.000	460.786.000	90,68

SASARAN 6 : MENURUNNYA TINGAT PENGANGGURAN TERBUKA

Capaian kinerja Sasaran Strategis 6 pada **Tujuan II : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif yang berdampak terhadap angka kemiskinan** ditunjang oleh Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut :



INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN
Tingkat pengangguran terbuka	1,99	2,29	84,92
Rata-rata			84,92

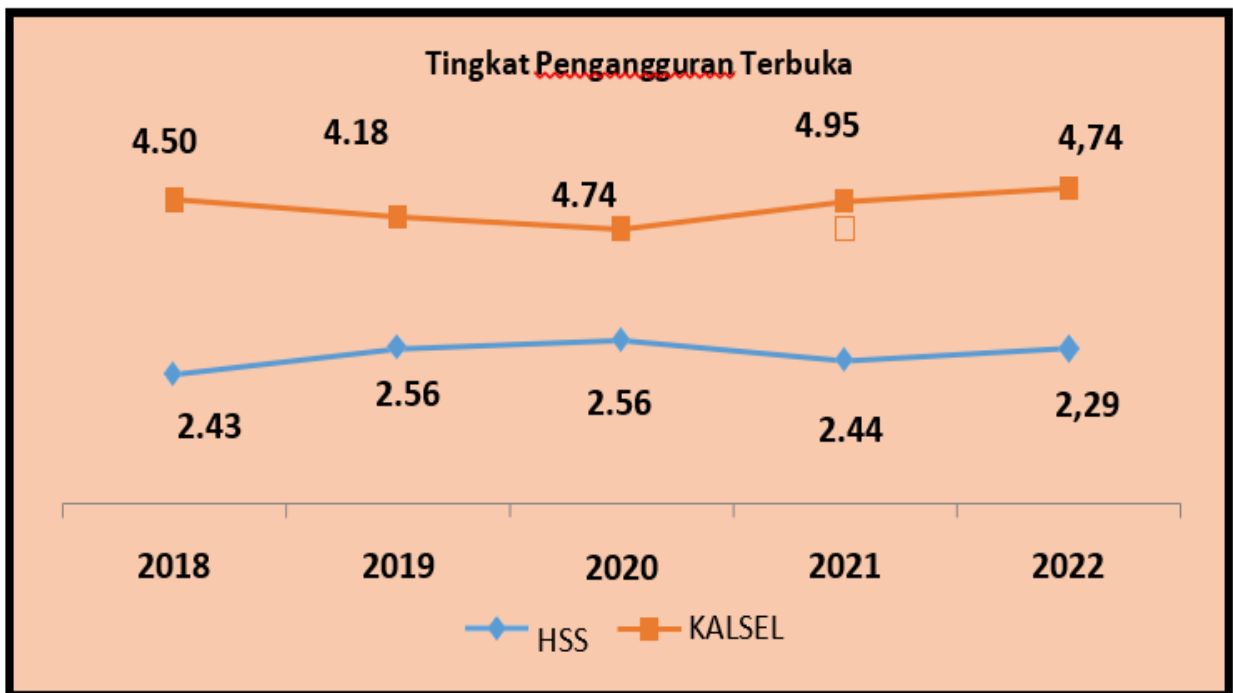
Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja sasaran diatas, dapat diambil rerata kesimpulan bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka adalah Baik atau tercapai 84,92%.

Tingkat Pengangguran Terbuka

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dan target RPJMD tahun 2023 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI					TARGET RPJMD
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tingkat pengangguran terbuka	2,43	2,56	2,24	2,44	2,29	1,86

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dan pembangunan karena meliputi dimensi ekonomi dan sosial yang luas. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) diukur sebagai persentase jumlah penganggur/pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja. Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Selain itu, perkembangannya dapat menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Lebih penting lagi, indikator ini digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian, selain angka kemiskinan. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2022 seperti grafik dibawah ini.



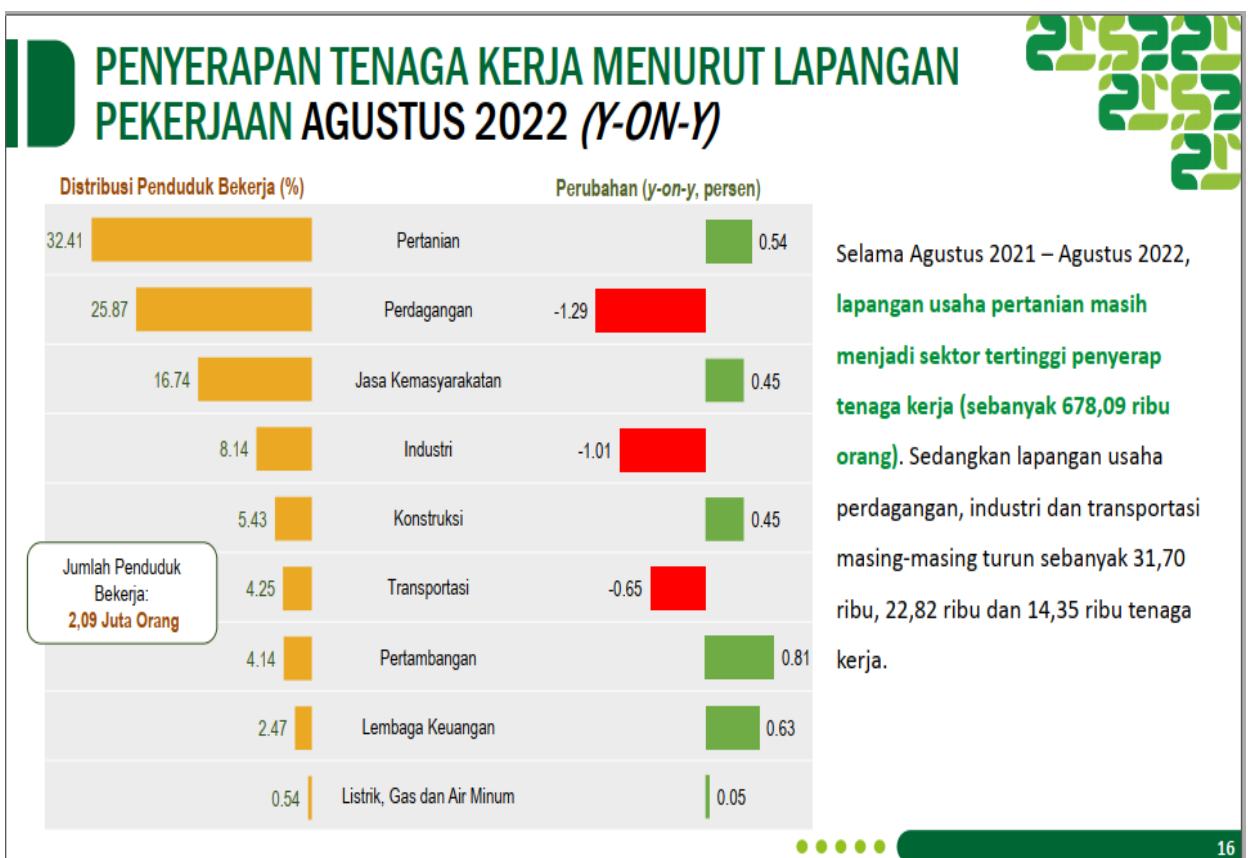
Sumber : BPS Kab. Hulu Sungai Selatan

Berdasarkan table diatas, tinghkat pengangguran Tingkat pengangguran Terbuka Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih lebih kecil apabila dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan. Pengangguraan terbuka (TPT) diukur sebagai persentase jumlah penganggur/pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja. Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Selain itu, perkembangannya dapat menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Lebih penting lagi, indikator ini digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian, selain angka kemiskinan.

Pada tahun 2022 persentase penduduk angkatan kerja sebesar 69,55 persen dengan tingkap pengangguran terbuka (TPT) sebesar 2,29 persen. Sementara itu, penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang bukan angkatan kerja sebagian besar mengurus rumah tangga yaitu 20,13 persen dari 30,45 persen penduduk bukan angkatan kerja. Sektor utama penyerap tenaga kerja di Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah pertanian sebesar



33,48%. Dibandingkan dengan persentase pencari kerja menurut tingkat pendidikan yang terdaftar AK1 sebesar 74,71% dapat disimpulkan generasi milenial di Kabupaten Hulu Sungai Selatan banyak bekerja di sector pertanian (petani milenial). Sedangkan Pada sektor perdagangan termasuk UMKM menyerap angkatan kerja sebesar 25.48%. Angka ini bersumber dari jumlah pelaku UMKM di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 23.000 orang berdasarkan hasil pendataan petugas enumerator UMKM tahun 2022. Kemudian sektor Jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan sebesar 16,45 %.



Beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menyediakan lapangan kerja bagi Angkatan kerja antara lain :

- Pelatihan Kerja dan Bimbingan teknis Usaha Kecil Menengah dan industri kecil menengah dilakukan dengan mengedepankan para wirausaha baru dan industri kecil menengah yang baru berkembang, dan penduduk miskin, terutama penduduk yang masuk dalam kelompok kemiskinan ekstrim



- Penempatan Tenaga Kerja, dengan sasaran Meningkatnya kesempatan kerja. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pelayanan antar kerja di daerah, dengan menempatkan 20 tenaga kerja pada PT.Bina Sarana Sukses (BSS) dan PT Antang Gunung Meratus dan PT Subur Agro Makmur
- Menjaga Hubungan Industrial. yang harmonis

Tabel 2.20

Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota
Di Provinsi Kalimantan Selatan 2018-2022

NO	KAB/KOTA	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tanah Laut	3,42	3,41	3,57	3,52	4,17
2	Kotabaru	4,89	4,94	4,96	5,57	6,70
3	Banjarnegara	2,90	2,89	3,87	3,98	2,72
4	Barito Kuala	2,99	2,51	2,91	3,22	3,63
5	Tapin	4,02	3,65	3,73	4,96	4,15
6	Hulu Sungai Selatan	2,33	2,43	2,24	2,44	2,29
7	Hulu Sungai Tengah	3,63	2,96	3,90	3,76	3,35
8	Hulu Sungai Utara	3,76	3,35	4,49	4,80	4,64
9	Tabalong	3,09	3,30	3,07	3,43	4,46
10	Tanah Bumbu	6,34	6,18	6,95	6,83	6,89
11	Balangan	2,34	2,33	2,46	2,44	3,98
12	Banjarmasin	8,25	7,69	8,32	8,47	6,96
13	Banjarbaru	5,11	4,93	5,54	5,70	5,47

Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Jumlah Pencari Kerja Terdaftar tahun 2022 sebesar 714 pekerja. Pekerja yang terdaftar sebesar 611 telah ditempatkan bekerja. Proporsi terbesar pencari kerja yang terdaftar berpendidikan terakhir SMA/SMK/ Sederajat yaitu sebesar 84,31 persen (602 pekerja) dan yang ditempatkan sebanyak 196 pekerja di tahun 2022.



Dalam pencapaian indikator kinerja sasaran Tingkat pengangguran terbuka didukung oleh program sebagai berikut :

Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja bersertifikat kompetensi	37,40	37,40	100	262.019.700	246.483.060	94,07
2. Program Penempatan Tenaga Kerja	Rasio lowongan (posisi) kerja per X ribu angkatan kerja	37,40	37,40	100	30.235.100	29.084.850	96,20
3. Program Hubungan Industrial	Persentase perselisihan pengusaha-pekerja yang diselesaikan	100	100	100	34.319.750	22.033.000	64,20

SASARAN 7 : MENINGKATNYA LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN

Capaian kinerja Sasaran Strategis 7 pada **Tujuan II : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif yang berdampak terhadap angka kemiskinan** ditunjang oleh Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN
Laju pertumbuhan ekonomi	6,38	4,02	63,01
Laju pertumbuhan ekonomi kategori industri pengolahan	5,56	5,25	94,42
Laju pertumbuhan ekonomi kategori perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	5,72	8,40	146,85
Laju pertumbuhan ekonomi kategori pertanian, kehutanan dan perikanan	4,92	-0,49	-9,96
Rata-rata			73,58

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja sasaran diatas, dapat diambil rerata kesimpulan bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan adalah Cukup atau tercapai 73,58%.



Pada indikator kinerja sasaran Laju pertumbuhan ekonomi dari target 6,38 terealisasi 4,02 yang berarti Sangat Baik atau Tercapai sebesar 105,58%. Sedangkan untuk indikator kinerja sasaran Laju pertumbuhan ekonomi kategori industri pengolahan dari target 5,56 terealisasi 5,25 atau terealisasi 94,42 % yang berarti Sangat Baik indikator kinerja sasaran Laju pertumbuhan ekonomi kategori perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dari target 5,72 terealisasi 8,40 atau terealisasi 146,85 % yang berarti Sangat Baik dan Pada indikator kinerja sasaranv Laju pertumbuhan ekonomi kategori pertanian, kehutanan dan perikanan dari target 4,92 terealisasi -0,49 atau terealisasi -9,96% yang berarti Sangat Kurang

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dan target RPJMD dan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI					TARGET RPJMD
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Laju Pertumbuhan Ekonomi	6,14	5,28	-1,19	4,19	4,02	6,43

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebesar 4,02 persen. Pertumbuhan ekonomi dapat kembali meningkat ditengah pandemi covid-19 yang masih berlanjut.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gambaran mengenai keadaan perekonomian suatu daerah. Demikian halnya perkembangan perekonomian di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ditunjukkan dengan perkembangan PDRBnya. Struktur ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan ditunjukkan dengan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 2022 masih didominasi oleh sector pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor ini mempengaruhi sekitar 20,73 persen nilai PDRB Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sedangkan sector pertambangan dan pengalihan sebesar 19,69 %, sector industry pengolahan 7,74%, sector konstruksi 7,45, sector perdagangan besar 9,17 besar serta sector-sektor lainnya sebesar 35,22%.



PDRB harga konstan atau rill dapat menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun, tabel berikut menunjukkan data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2022.

Tabel. 2.21

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Hulu Sungai selatan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (%), Tahun 2018–2022

Kat	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry & Fishing</i>	4,33	2,62	0,19	-0,01	-0,49
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining & Quarrying</i>	15,44	7,71	-6,20	13,35	6,52
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	4,57	4,36	-3,56	5,93	5,25
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity & Gas</i>	7,08	4,33	4,46	4,52	7,41
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management & Remediation Activities</i>	5,50	6,83	8,18	4,91	4,72
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	4,32	5,93	-3,48	6,14	5,56
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale & Retail Trade; Repair of Motor Vehicles & Motorcycles</i>	5,18	5,09	-2,45	5,40	8,40
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation & Storage</i>	5,43	5,57	-2,61	4,56	5,73
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation & food Service Activities</i>	6,50	8,06	-2,26	4,08	11,90
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information & Communication</i>	6,45	8,29	8,92	7,76	6,64
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial & Insurance Activities</i>	2,65	3,82	1,13	1,61	-1,25
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	4,30	5,79	5,62	3,65	4,97
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	4,22	4,91	-1,51	2,19	6,44
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration & Defence; Compulsory Social Security</i>	3,77	5,49	-2,78	-1,72	0,14
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	5,01	5,33	0,17	0,23	1,51
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	7,13	8,61	9,86	6,73	7,56
R,S,T,U	Jasa lainnya/ <i>Other Service Activities</i>	6,97	7,11	-1,06	3,29	6,95
	Produk Domestik Regional Bruto/ Gross Regional Domestic Product	6,14	5,28	-1,19	4,19	4,02

Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022



PDRB Per Kapita Kabupaten Hulu Sungai Selatan selalu mengalami kenaikan yang relatif signifikan setiap tahunnya. Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Nilai PDRB per kapita Hulu Sungai Selatan atas dasar harga berlaku sejak tahun 2018 hingga 2022 senantiasa mengalami kenaikan. PDRB perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu daerah. Data pada tabel dibawah ini menunjukkan perkembangan PDRB Perkapita Kab/Kota di Kalimantan Selatan pada tahun 2018-2022.

Tabel 2.22

PDRB Perkapita Kabupaten Kota ADHB (ribu rupiah)

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Tanah Laut	39.037	40.773	39.660	41.641	52.678
Kotabaru	67.899	71.138	73.776	78.135	99.693
Banjar	26.842	28.531	29.295	30.739	36.336
Barito Kuala	25.986	27.731	27.827	28.947	30.680
Tapin	42.310	44.550	44.420	47.170	65.614
Hulu Sungai Selatan	26.181	27.970	28.833	30.497	35.955
Hulu Sungai Tengah	24.423	26.218	27.294	28.332	30.213
Hulu Sungai Utara	19.496	21.112	21.953	22.961	24.522
Tabalong	69.055	72.057	70.293	74.951	111.622
Tanah Bumbu	54.239	53.929	61.949	66.056	92.690
Balangan	83.021	84.738	82.540	88.875	145.269
Banjarmasin	43.366	46.979	49.804	52.193	57.676
Banjarbaru	34.170	37.250	37.850	38.650	44.387

Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022



Sedangkan PDRB perkapita Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan atas dasar harga berlaku (ADHB) juga selalu mengalami peningkatan dari Rp. 30.497.000 pada tahun 2021 meningkat menjadi Rp. 35.955.000 pada tahun 2022 atau (eningkat 17,90% dibandingkan.. Kenaikan PDRB perkapita setiap tahunnya juga berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang juga tiap tahunnya meningkat.

Sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi Hulu Sungai Selatan adalah pertanian, perikanan, industry pengolahan, perdagangan dan jasa karena berkontribusi terhadap peningkatan PDRB. Produksi pertanian termasuk peternakan dari tahun ke tahun juga menunjukkan peningkatan. Produksi padi

Pertumbuhan ekonomi tentu sangat dipengaruhi oleh laju inflasi suatu daerah sehingga laju inflasi perlu dikendalikan. Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi inflasi adalah ketersediaan stok ikan. Ikan yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah ikan gabus haruan. Agar ketersediaan stok ikan gabus tetap terjaga maka dilakukan budidaya ikan gabus haruan pada kawasan Kampung Gabus Haruan di Desa Asam Kecamatan Sungai Raya.

Pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang menjadi kawasan unggulan adalah daerah Kecamatan Loksado yang didukung dengan potensi alam yang eksotis. Tahun 2022 jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 293.847 orang dengan pengeluaran Wisatawan (Spending of Money) sebesar Rp 14.705.425.000. Nilai ini jauh meningkat dibanding tahun 2021 yang sebesar 7.204.500.000. Pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid 19 diharapkan berdampak positif terhadap sektor pariwisata di tahun 2022. Lokasi dan even pariwisata dapat diaktifkan kembali.. Potensi yang bagus adalah meningkatnya length of stay (rata-rata lama tinggal) wisatawan dari sebelumnya 1,5 hari di tahun 2021, meningkat menjadi 1,7 hari pada tahun 2022.



Penurunan kunjungan pada wisata alam tahun 2022, dapat diimbangi dengan meningkatnya kunjungan wisata religi. Lokasi wisata religi diantaranya Makam Syekh H. Ahmad (Datu Balimau) Bin Mufti H. Muhammad As'ad di Kecamatan Kalumpang, Tuan Guru Haji Muhammad Thaib alias Haji Sa'duddin (Datu Taniran) Bin Mufti H. Muhammad As'ad di Kecamatan Angkinang, Sayyid Abu Bakar (Habib Lumpangi) di Kecamatan Loksado, dan yang menjadi magnet kunjungan wisata religi terbesar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Tahun 2022 adalah Makam Tuan Guru H Muhammad Riduan Baseri (Guru Kapuh) yang meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2021, dengan rata-rata kunjungan perbulan sebanyak 8.000 peziarah yang berasal dari dalam dan luar provinsi. Sektor pariwisata juga memberi peluang usaha bagi UMKM disekitarnya, pengusaha biro perjalanan, dan lapangan kerja informal lainnya.

Investasi sendiri merupakan akar dari segala upaya demi memulihkan dan menumbuhkan perekonomian di Indonesia, pasca pandemi. Upaya untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dilakukan dengan berbagai cara. Pertama, inventarisasi berbagai potensi investasi yang menjadi keunggulan daerah. Potensi investasi yang menjadi unggulan daerah.

Berikutnya adalah promosi potensi investasi melalui berbagai media. Pembinaan terhadap pengusaha PMA/PMDN yang ada agar tetap berinvestasi dalam wilayah kabupaten Hulu Sungai Selatan serta menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sesuai ketentuan. Meningkatkan pemantauan dan pengawasan terhadap proyek investasi .

Dukungan lain bagi investor adalah dikembangkannya system yang memudahkan pemohon dalam mengajukan izin dan non izin secara online lewat OSS (Online Single Submission) merupakan salah satu elemen kebijakan percepatan pelaksanaan berusaha yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017, selain pembentukan Satgas Pengawasan Berusaha dan Reformasi Regulasi. Pelaksanaan sistem pelayanan terpadu ini diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2018 dan bagi investasi atau kegiatan usaha yang sudah berjalan, selanjutnya dapat menyesuaikan perizinan berusaha melalui Sistem OSS, untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) atau pun perpanjangan



atau perubahan izin usaha dan atau izin komersial

Dengan telah dibangunnya Mall Pelayanan Publik (MPP). Fasilitas ini memberikan kemudahan dan kecepatan pelayanan perizinan. Saat ini dalam MPP telah bergabung 16 instansi dengan total 116 jenis pelayanan.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Industri Pengolahan

INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI					TARGET RPJMD
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Laju pertumbuhan ekonomi kategori industri pengolahan	4,55	4,36	-3,56	5,93	5,25	5,85

Capaian indikator kinerja “Laju pertumbuhan ekonomi kategori industri pengolahan “di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 sebesar 5,25%. Capaian ini sedikit menurun dibanding tahun 2021 sebesar 5,93 atau terjadi perlambatan sebesar 0,68%. Perlambatan ini disebabkan kualitas dan harga beberapa produk local yang belum bisa bersaing dengan produk dari luar daerah. Oleh sebab itu Pemerintah Daerah akan terfusi melakukan pembinaan dan bantuan lanjutan agar kualitas dan pemasaran produk lokal dapat lebih meningkat

Dalam pencapaian indikator kinerja Sasaran Laju pertumbuhan ekonomi kategori industri pengolahan didukung oleh program sebagai berikut

Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase peningkatan bahan baku lokal yang terpakai di industri pengolahan	21,42	33,39	155,88	1.690.212.120	1.342.093.137	79,40
2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase Produk Industri Pengolahan Pangan Yang Bersertifikasi Mutu	21,42	21,42	100	32.475.925	0	0



Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI					TARGET RPJMD
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Laju pertumbuhan ekonomi kategori perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	4,84	5,09	-2,45	5,40	8,40	5,83

Capaian indikator kinerja “Laju pertumbuhan ekonomi kategori perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor “di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 sebesar 8,40%. Capaian ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2021 sebesar 5,40% atau terjadi peningkatan sebesar 3%.

Dalam pencapaian indikator kinerja Sasaran Laju pertumbuhan ekonomi kategori perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor didukung oleh program sebagai berikut :

Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase komoditas barang beredar yang sesuai standar	85,71	85,71	100	29.791.000	20.223.350	67,88
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik	100	100	100	6.090.894.200	5.850.212.546	96,05
	Persentase penerimaan retribusi	90	70	77,78			
3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Koefisien Variasi Harga antar waktu	11	10	90,90	546.629.100	371.964.332	68,05



Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
4. Program Pengembangan Ekspor	Persentase Pedagang yang Menggunakan Aplikasi Berbasis Online	13	13	100	630.925.000	539.683.286	85,54
	Persentase Promosi Dagang melalui Pameran	100	100	100			
5. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Alat UTPP (ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya) yang bertanda tera sah	71	62	87,32	39.165.950	33.395.500	85,27
6. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Kerjasama antar wilayah yang dilaksanakan	2	0	0	15.368.000	9.700.000	63,12

Laju pertumbuhan Ekonomi Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI					TARGET RPJMD
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Laju pertumbuhan ekonomi kategori pertanian, kehutanan dan perikanan	4,33	2,62	0,19	-0,01	-0,49	5,63

Capaian indikator kinerja “Laju pertumbuhan ekonomi kategori pertanian, kehutanan dan perikanan “di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 sebesar -0,49%. Capaian ini mengalami menurun dibanding tahun 2021 sebesar 0,01 atau terjadi perlambatan sebesar 0,38%.

Perlambatan laju pertumbuhan ekonomi kategori pertanian, kehutanan dan perikanan disebabkan penurunan produksi padi. Untuk produksi



Tanaman Pangan, Tahun 2022 produksi padi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar 136.430,17 ton gabah kering giling, dan pada tahun 2021 total produksi 165.450 ton gabah kering giling, mengalami penurunan sebesar 29.019,83 ton gabah kering giling atau perlambatan sebesar 15,97 %. Penurunan produksi padi terutama disebabkan menurunnya atau berkurangnya luas tanam padi seluas 8.579 Ha dibandingkan Tahun 2021 karena lahan lebak tidak bisa tanam karena curah hujan tinggi atau tingkat intensitas hujan yang sangat tinggi sehingga petani tidak bercocok tanam padi. Padahal kalau petani bisa tanam pada lahan lebak tersebut maka akan banyak menyumbangkan produksi padi yaitu sekitar 87.718 ton/ha.

Sedangkan sawah yang beririgasi teknis belum bisa sepenuhnya dapat mengairi sawah karena banyaknya saluran-saluran sekunder yang belum tersambung dengan saluran tersier yang langsung dialirkan ke sawah-sawah petani. Sehingga petani yang seharusnya bisa tanam 2 kali (IP 200) tidak bisa direalisasi, ini hanya bisa tanam 1 kali (IP 100) atau sama dengan sawah tadah hujan. Jadi luas tanam pada lahan irigasi tidak bisa menutupi kekurangan luas tanam pada lahan rawa dengan berkembangnya luas tanam maka akan berdampak pada turunnya produksi.

Tabel. 2.23
Luas Panen, Produksi Dan Produktivitas Padi
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017-2022

No	Tahun	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha/Tahun)
1	2017	53.196	253.637	4,77
2	2018	53.240	268.938	5,05
3	2019	52.182	191.256	3,67
4	2020	37.493	159.073	4,24
5	2021	36.538	162.357	4,44
6	2022	28.868	136.430	4,73

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Hulu Sungai Selatan



Disamping disebabkan menurunnya atau berkurangnya luas tanam, penurunan produksi padi juga disebabkan oleh serangan hama atau Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). Sebagian besar OPT yang menyerang tanaman padi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah hama tungro dan burung. Luas serangan OPT dapat kita lihat pada table berikut ini.

Tabel. 2.24

Luar Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)
Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021-2022

NO	JENIS SERANGAN	TAHUN	
		2021	2022
1	Tungro	5,51	1.425,65
2	Walang Sangit	1,21	7,32
3	Penggerek Batang	3,72	3,67
4	Burung	89,50	307,60
5	Tikus	21,38	3,05

Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Dalam pencapaian indikator kinerja Sasaran Laju pertumbuhan ekonomi kategori pertanian, kehutanan dan perikanan didukung oleh program sebagai berikut :

Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase penyediaan sarana produksi tanaman pangan yang berkualitas	23	17,5	76,09	1.736.905.650	1.644.973.775	94,71
	Persentase penyediaan sarana produksi hortikultura yang berkualitas	22	15,82	71,91			



LPPD Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase luas lahan sawah yang terairi dengan sistem irigasi teknis	63,41	64,50	101,72	9.854.734.250	8.499.500.669	86,25
3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase rasio pakan ternak dengan kebutuhan	100	100	100	336.126.950	318.755.500	94,83
	Persentase produksi ternak yang memenuhi standar ekspor	100	100	100			
4. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase kawasan pertanian yang dapat dilindungi	90	97,50	108,33	415.050.966	375.202.370	90,40
5. Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Kelompok Tani menjadi kelembagaan Ekonomi Petani (KEP)	5	9	180	241.707.400	145.768.750	60,31
6. Program Penyuluhan Pertanian	Persentase sumber daya pertanian yang berkualitas	7	13	185,71	643.379.600	364.942.900	56,72
	Jumlah Petani Mileneal	103	103	100			
7. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	10,04	3,86	38,48	1.336.804.800	893.443.568	66,83
8. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Luasan Budidaya yang Diintervensi	50,40	50,40	100	1.041.963.737	1.006.821.169	96,63
	Persentase Benih Ikan Unggul yang Disediakan	54,22	47,12	86,90			



Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
	Persentase Pengujian dan Pemeriksaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Dilaksanakan	60	60	100			
	Persentase Pembudidaya yang memiliki kompetensi	65	100	153,85			
9. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Persentase Kasus Pelanggaran Illegal Fishing yang ditindaklanjuti	100	100	100	672.664.700	647.551.532	96,27
10. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Peningkatan Produk Hasil Olahan Perikanan	2.715,75	2.249,58	82,83	34.194.183	29.952.000	87,59

SASARAN 8 : MENINGKATNYA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Capaian kinerja Sasaran Strategis 9 pada **Tujuan II : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif yang berdampak terhadap angka kemiskinan** ditunjang oleh Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN
Peningkatan retribusi dan pajak daerah	26 milyar	24,12 milyar	92,76
Rata-rata			92,76

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja sasaran diatas, dapat diambil rerata kesimpulan bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Sangat Baik atau tercapai 92,76%.



Peningkatan retribusi dan pajak daerah

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dan target RPJMD tahun 2023 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI					TARGET RPJMD
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Peningkatan retribusi dan pajak daerah	21,10 Milyar	29,52 milyar	20,50 milyar	20,15 milyar	24,12 milyar	28 milyar

Jumlah realisasi penerimaan semua Retribusi dan Pajak berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

a. Pajak Daerah	Rp.	17.300.630.533,90
b. Retribusi Daerah	Rp.	6.818.208.641,00
JUMLAH	Rp.	24.118.839.174,90

Untuk tahun 2022, realisasi pendapatan Pajak Daerah dapat memenuhi/ melebihi target yang telah direncanakan. Target pendapatan dari Pajak Daerah pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 16.618.459.998 dan terealisasi Rp 17.300.630.533,90 atau tercapai 104,10%

Pencapaian tersebut tentunya adalah hasil upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah. Upaya yang dilakukan antara lain :

1. Sosialisasi pajak daerah, baik secara langsung maupun melalui media.
2. Penerbitan surat himbauan, surat teguran dan surat tagihan terhadap objek pajak.
3. Pembuatan dan pendistribusian sarana promosi pajak. (banner dan leaflet)
4. Koordinasi/rapat yang intens dengan SKPD terkait.
5. Pelaksanaan kegiatan anugerah pajak sebagai salah satu bentuk perhatian Pemerintah Daerah terhadap objek pajak.
6. Pendataan dan pemutakhiran data wajib pajak.

Retribusi Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi daerah diatur melalui Peraturan



Daerah dan pengelolaannya dilaksanakan oleh SKPD pengelola penerimaan. Untuk pencapaian realisasi Retribusi Daerah pada tahun 2022 ini masih belum memenuhi target yang ditetapkan. Target pendapatan dari Retribusi Daerah adalah sebesar Rp. 9.865.558.800,00 dan terealisasi Rp 6.818.208.641,00 atau sebesar 69,11%.. Namun demikian mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021. Dari seluruh capaian retribusi yang ada ada beberapa objek retribusi yang berpengaruh signifikan terhadap tidak tercapainya target RPJMD yaitu :

1. Retribusi Tempat Khusus Parkir, dimana target 1,7 Milyar hanya tercapai sebesar 876 juta
2. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dimana target 1 Milyar hanya tercapai sebesar 368 Juta.
3. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, dimana target 1,8 Milyar hanya tercapai 1,5 Milyar.
4. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan, dimana target 629 Juta hanya tercapai 370 Juta.
5. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila, dimana target 554 Juta hanya tercapai 316 Juta.
6. Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan, dimana target 446 Juta hanya tercapai 334 Juta.

Beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah guna meningkatkan penerimaan pada sektor Retribusi Daerah yakni :

1. Koordinasi yang intens dengan SKPD pengelola Retribusi Daerah.
2. Pendataan objek Retribusi Daerah baru.
3. Revisi terhadap Peraturan Daerah sebagai bentuk tindak lanjut pendataan objek Retribusi Daerah baru.
4. Revisi terhadap tarif Retribusi Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan di masyarakat.

Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Pengelolaan pendapatan daerah bertujuan untuk mengoptimalkan sumber pendapatan daerah untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah yang bertujuan memaksimalkan



penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah harus dilakukan secara cermat dan hati-hati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah tidak hanya dilakukan dalam rangka peningkatan PAD, namun juga harus melihat dampak terhadap kegiatan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Artinya peningkatan PAD tidak boleh berdampak langsung terhadap penurunan pendapatan kelompok masyarakat. Peningkatan kapasitas fiskal daerah juga harus mempertimbangkan tata kelola keuangan daerah, karena peningkatan anggaran yang besar jika tidak dikelola dengan baik justru akan menimbulkan masalah, sehingga arah pengelolaan pendapatan daerah adalah optimalisasi fungsi anggaran yaitu anggaran berbasis kinerja (*Performance Budgeting System*).

Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah masih banyak tergantung pada penerimaan dari dana perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pada era otonomi, daerah diharapkan dapat memacu tingkat kemampuan keuangan daerah yang lebih baik. Pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada optimalisasi sumber pendapatan daerah dengan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. Intensifikasi lebih ditujukan pada sumber pendapatan yang sudah ada namun belum optimal pemungutannya, sedangkan ekstensifikasi lebih ditujukan pada sumber-sumber pendapatan baru yang memungkinkan, yang disesuaikan dengan potensi daerah.

Upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah meliputi :

- a. Melakukan pengawasan, evaluasi dan pembinaan secara rutin terhadap wajib pajak dan wajib retribusi.
- b. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD pengelola pendapatan dalam upaya optimalisasi penerimaan daerah melalui penyesuaian tarif,



- perluasan subyek, obyek pajak dan retribusi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Melaksanakan percepatan proses penyusunan peraturan daerah berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Meningkatkan peran BUMD dalam memberikan kontribusi secara signifikan terhadap penerimaan daerah.
 - e. Peningkatan kualitas Pelayanan publik antara lain peningkatan peran pemerintah daerah dalam bidang perizinan.
 - f. Optimalisasi penerimaan bagi hasil pajak Pusat Dan Provinsi (PPh perorangan, PBB, dan PKB-BBNKB). Serta bagi hasil bukan pajak /semer daya alam (SDA).
 - g. Meningkatkan sistem koordinasi dan informasi penerimaan daerah kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dengan memberikan dukungan data yang cepat, tepat dan akurat sehingga perolehan dana perimbangan yang memadai.
 - h. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) terkait pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

Selain upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah diatas, perlu menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat dalam pungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini diimbangi dengan penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan ditujukan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik yang lebih efektif dan maksimal, serta memperbaiki infrastruktur prasarana dan sarana umum yang dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan daerah khususnya PAD sehingga berbagai penyelenggaran pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja. Kebijakan alokasi belanja sudah mendasarkan pada prioritas program dan kegiatan dengan pengendalian yang lebih baik dalam perencanaan dan pelaksanaannya untuk tercapainya pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien.



Dalam pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) didukung oleh program sebagai berikut :

Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah	100	80,61	80,61	1.235.067.000	986.522.800	79,88
	Persentase jenis Pajak Daerah yang menerapkan elektronifikasi transaksi pendapatan daerah	81,82	100,89	123,31			
	Persentase piutang pajak yang berhasil tertagih	100	99,41	99,41			

SASARAN 9 : MENINGKATNYA INVESTASI PMDN

Capaian kinerja Sasaran Strategis 10 pada **Tujuan II : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif yang berdampak terhadap angka kemiskinan** ditunjang oleh Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN
Persentase peningkatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	6,00	8,36	139,33
Rata-rata			139,33

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja sasaran diatas, dapat diambil rerata kesimpulan bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya investasi PMDN adalah Sangat Baik atau tercapai 139,33%.

Persentase peningkatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dan target RPJMD tahun 2023 adalah sebagai berikut :



INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI					TARGET RPJMD
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase peningkatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	3,00	151,54	8,51	12,43	8,36	7,00

Tahun 2022 persentase peningkatan penanaman modal dalam negeri di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mencapai 8,36%, hal ini tentu saja dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal seperti keterbatasan pengembangan inventarisasi potensi keunggulan daerah, belum optimalnya sosialisasi dan promosi untuk menunjang peningkatan Iklim Investasi, masih kurangnya sarana dan prasarana serta infrastruktur sebagai penguatan investasi di daerah dan belum tersedianya jaminan kepastian penanaman modal di daerah. Capaian kinerja Nilai realisasi untuk tahun 2022 adalah 206.183.242.256,- dari target yang telah ditetapkan 148.200.000.000.

Pada tahun 2021 realisasi nilai investasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebesar 231,06 M rupiah dari target sebesar 204 M rupiah sehingga Nilai Realisasi investasi sampai dengan tahun 2021 adalah sebesar 2.468.940.463.173,-. Sedangkan realisasi investasi tahun 2022 adalah sebesar 206.183.242.256,- sehingga perolehan realisasi investasi sampai dengan tahun 2022 adalah 2.675.123.705.429,-. Apabila dibandingkan dengan tahun 2021 maka nilai investasi tahun 2022 mengalami penurunan. penurunan ini di pengaruhi dari distribusi nilai investasi yang jumlahnya ada delapan (8) sektor usaha yang berkontribusi, tetapi hanya 5 (lima) sektor usaha yang berkontribusi terhadap nilai investasi yakni dari jasa angkutan, Energi/BBM/listrik, perdagangan/property, Kesehatan, dan perkebunan. Sementara 3 (sektor) lainnya yaitu wisata dan industry makanan, konstruksi dan pertambangan tidak terlalu memberikan kontribusi terhadap nilai realisasi investasi. Menurunnya capaian realisasi investasi pada tahun 2022 juga disebabkan beberapa hal diantaranya :

1. Belum tersedianya RDTR (masih berupa Rancangan Perda) sehingga masih menggunakan RTRW untuk kesesuaian ruang (sedangkan RTRWnya pun



masih dilakukan Peninjauan Kembali) yang berkesesuaian dengan RTRW Prov kalsel dan sesuai dengan rekomendasi Peta 1:5000 dari BIG dan persetujuan substansi dari Kementerian ATR/BPN) sehingga saat ini bagi yang ingin berinvestasi harus dengan melakukan survey lokasi terlebih dahulu sehingga memakan waktu yang cukup lama.

2. Adanya perubahan pada system pelaporan LKPM online yang terintegrasi dengan OSS RBA juga merupakan salah satu kendala kendala sehingga para investor masih belum bisa menyampaikan laporan realisasi penanaman modal secara menyeluruh
3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat/ pelaku usaha dalam melaporkan izin usahanya dan investasinya
4. Tertundanya pembahasan tentang perbaikan iklim berusaha berupa Undang-undang No.11/202/tentang cipta karya yang menghasilkan regulasi penanaman modal berupa tersedianya jaminan berusaha.

Dari beberapa faktor pendorong dan hambatan di atas, maka tindak lanjut dan alternative solusi yang dilakukan adalah :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pembinaan, pemantauan dan pengawasan penanaman modal
2. Menyelenggarakan Mal Pelayanan Publik sebagai pelayanan terpadu.
3. Akan mengadakan revisi dan konsultasi dengan Bagian Hukum dan Perundang-undangan untuk pembahasan Rancangan Perda Penanaman Modal
4. Melakukan updating peta pada Ranperda RDTR 5 Kecamatan sehingga bisa direkomendasikan menjadi Perda RTRW
5. Dilakukan percepatan untuk melakukan revisi Peninjauan Kembali Lampiran Perda RTRW yang sesuai dengan rekomendasi Peta 1 : 5000 dari BIG dan sudah mendapat persetujuan substansi dari Kementerian ATR/BPN dan juga berkesesuaian dengan RTRW Provinsi Kalsel
2. Meningkatkan Promosi baik dalam daerah maupun luar wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui *event Indonesian week* maupun kegiatan sejenisnya untuk pengembangan informasi Budaya, Pariwisata dan Peluang Investasi,



Dalam hal pembinaan dan pengawasan, telah dilakukan pembinaan secara continue sehingga apabila ada pelaku usaha yang mengalami kesusahan dalam melaporkan nilai investasinya dapat berkonsultasi dengan petugas yang telah ditunjuk. Demikian juga untuk memberi kemudahan bagi pelaku usaha, saat ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu sedang membuat regulasi yang mengatur tentang penanaman modal serta peraturan pemberian insentif dan kemudahan.

Dalam pencapaian indikator kinerja sasaran Persentase peningkatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) didukung oleh program sebagai berikut :

Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1. Program Pelayanan Penanaman Modal	Cakupan Pemenuhan aspek Pelayanan Publik (Aspek)	6	6	100	1.084.881.836	995.391.546	91,75
	Persentase usaha risiko tinggi yang berizin	100	100	100			
2. Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Sarana Prasarana di kawasan Investasi Siap pakai	100	100	100	326.885.750	325.184.172	99,48
	Persentase kawasan investasi yang memenuhi persyaratan/sesuai peruntukan	100	100	100			
3. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase jumlah pengguna layanan Perizinan dan Non Perizinan telah memenuhi kewajiban pajak	100	100	100	31.894.400	25.750.000	80,74
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pemenuhan pemberian Insentif dan kemudahan berusaha Penanaman Modal	100	100	100	419.973.300	390.574.678	93,00



Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
	Persentase Regulasi Penanaman Modal/ Investasi yang selaras dengan UUCK	100	100	100			

SASARAN 10 : MENINGKATNYA PEMANFAATAN POTENSI PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN BAGI MASYARAKAT

Capaian kinerja Sasaran Strategis 10 pada **Tujuan II : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif yang berdampak terhadap angka kemiskinan** ditunjang oleh Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET 2021	REALISASI 2021	% CAPAIAN
Tingkat Pengeluaran Wisatawan (<i>Spending of money</i>)	Rp.7.873.326.000	Rp.14.705.425.000	186,78
Rata-rata			186,78

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja sasaran diatas, dapat diambil rerata kesimpulan bahwa capaian kinerja Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata dan kebudayaan bagi masyarakat adalah Sangat Baik atau sebesar 186,78%.

Tingkat Pengeluaran Wisatawan (*Spending of money*)

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 dan target RPJMD tahun 2023 adalah sebagai berikut :



INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI					TARGET RPJMD
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tingkat Pengeluaran Wisatawan (<i>Spending of money</i>)	Rp. 3.223.750.000	Rp 4.758.098.000	Rp. 7.337.250.000	Rp. 7.204.500.000	Rp. 14.705.425.000	Rp. 9.073.800.000

Khusus untuk KSPN Loksado sebagai tujuan wisata andalan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dari hasil evaluasi internal menunjukkan jumlah kunjungan dan tingkat pengeluaran wisatawan pada tahun 2022 sebanyak 34.601 wisatawan dengan tingkat rata-rata pengeluaran Rp 250.000, (*spending of money*) berkontribusi sebesar Rp 14.705.425.000), dan meningkat dari tahun 2021 sebesar 19.212 dengan tingkat rata-rata pengeluaran Rp 250.000, (*spending of money*) berkontribusi sebesar Rp. 7.204.500.000). Potensi yang bagus adalah meningkatnya *length of stay* (rata-rata lama tinggal) wisatawan dari sebelumnya 1,5 hari di tahun 2021, meningkat menjadi 1,7 hari pada tahun 2022.

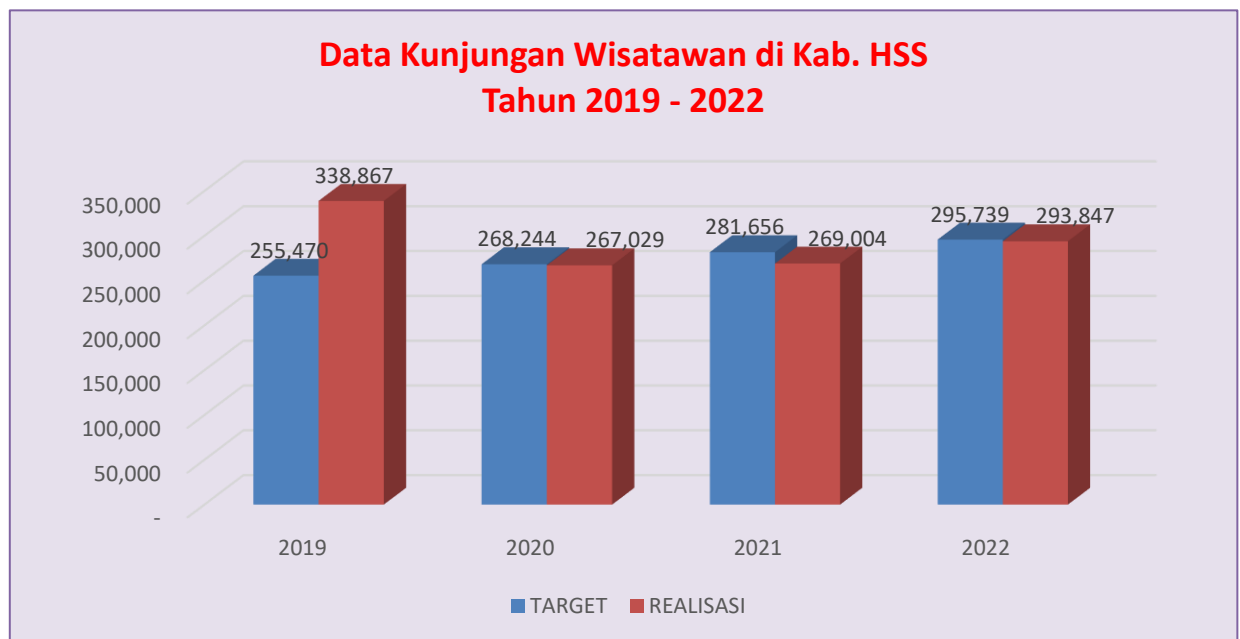
Peningkatan pengeluaran wisatawan (*spending of money*) dapat dicapai dipengaruhi oleh 2 (dua) factor yaitu jumlah kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan.

INDIKATOR KINERJA	KINERJA TAHUN 2022			PERBANDINGAN KINERJA TAHUN 2021		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Jumlah kunjungan wisatawan	295.739 wisatawan	293.847 wisatawan	99,36%	281.656 wisatawan	269.004 wisatawan	95,51%
Lama tinggal wisatawan (<i>Length of Stay</i>)	1,6 hari	1,7 hari	106,25%	1,4 hari	1,3 hari	92,86%

Berdasarkan table diatas, kunjungan wisatawan tahun 2022 memang belum mencapai target. Dari target kunjungan wisatawan tahun 2022 sebesar 295.739 wisatawan terealisasi sebesar 293.847 wisatawan atau 99,36 %.



Namun demikian jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2022 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021. Pada tahun 2021 jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 269.004 wisatawan, meningkat pada tahun 2022 menjadi 293.847 wisatawan yang meliputi 393.234 wisatawan nusantara dan 613 wisatawan asing. Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 9,17%. Data perkembangan kunjungan wisatawan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana terlihat pada grafik dibawah ini.



Sumber : Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kab. Hulu Sungai Selatan

Peningkatan Jumlah kunjungan wisatawan ke Kab. HSS tahun 2022 merupakan dampak dari dapat dilaksanakannya kembali beberapa event pariwisata di KSPN Loksado. Disamping hal tersebut, peningkatan jumlah kunjungan dikontribusi oleh wisata religi, diantaranya ke makam Syekh H. Ahmad (Datu Balimau) Bin Mufti H. Muhammad As'ad di Kecamatan Kalumpang, Tuan Guru Haji Muhammad Thaib alias Haji Sa'duddin (Datu Taniran) Bin Mufti H. Muhammad As'ad di Kecamatan Angkinang, Sayyid Abu Bakar (Habib Lumpangi) di Kecamatan Loksado, dan yang menjadi magnet kunjungan wisata religi terbesar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Tahun 2022 adalah Makam Tuan Guru H. Muhammad Riduan Baseri (Guru Kapuh) yang meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2021, dengan rata-rata kunjungan perbulan sebanyak 8.000 peziarah yang berasal dari dalam dan



luar provinsi. Kontribusi kunjungan wisatawan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan terhadap kunjungan wisatawan Kalimantan Selatan mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada setiap tahun.

Kontribusi kunjungan wisatawan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2022 sebesar 2,20% (293.847 wisatawan) dari total kunjungan 13.364.158 wisatawan di Provinsi Kalsel, sedangkan tahun 2021 kontribusi Kab. HSS terhadap kunjungan wisatawan yaitu 9,47% (269.004 wisatawan) dari total kunjungan 2,919,132 wisatawan di Provinsi Kalimantan Selatan.

TABEL 2.25

KONTRIBUSI JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TERHADAP KUNJUNGAN WISATAWAN DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Tahun	Prov. Kalsel	Kab. HSS	%
2019	14.602.855	338.867	2,94
2020	7.032.290	267.029	3,80
2021	2.915.132	269.004	9,47
2022	13.364.158	293.847	2,20

Sumber : Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kab. Hulu Sungai Selatan

Kendala dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan yaitu :

1. Masih rendahnya SDM pelaku usaha pariwisata dalam hal pemanfaatan teknologi informasi sehingga menghambat pengembangan pelayanan kepariwisataan dan tata kelola destinasi secara digital;
2. Masih belum meratanya aksesibilitas dan infrastruktur penunjang destinasi pariwisata serta terjadinya banjir dan tanah longsor yang mengakibatkan kerusakan dan penurunan kualitas jalan dan kejernihan sungai;



3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat di sekitar destinasi wisata akan penerapan Sapta Pesona dan pelayanan kepariwisataan yang baik terhadap wisatawan yang berkunjung;
4. Pandemi Covid-19 di tahun 2022 yang masih berdampak terhadap minat wisatawan untuk melakukan perjalanan dan kegiatan wisata.

Rencana Tindak Lanjut (Action Plan) untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke depan yaitu :

1. Melaksanakan pelatihan-pelatihan bagi SDM pelaku usaha pariwisata untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam hal pelayanan kepariwisataan, tata kelola destinasi wisata, dan penerapan teknologi informasi;
2. Koordinasi intens dengan stakeholder terkait pembangunan dan peningkatan infrastruktur aksesibilitas pariwisata.
3. Melakukan pendekatan persuasif terhadap masyarakat dan melakukan sosialisasi tentang pentingnya penerapan Sapta Pesona di destinasi wisata;
4. Penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid- 19 di kawasan wisata.

Dalam pencapaian indikator kinerja sasaran Tingkat Pengeluaran Wisatawan (*Spending of money*) didukung oleh program sebagai berikut :

Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase destinasi wisata yang memenuhi sapta pesona	2,74	2,74	100	1.704.849.600	1.546.965.368	90,74
2. Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah promosi dan pemasaran pariwisata melalui media partisipasi event berskala nasional/provinsi (media/event)	2	2	100	949.286.000	804.711.700	84,77
	Persentase event pariwisata tingkat nasional dan tingkat propinsi	40	40	100			



LPPD Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase desa wisata yang mengembangkan ekonomi kreatif	33,33	33,33	100	696.620.000	545.990.000	78,38
4. Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Pengembangan OPK yang Mendukung Pariwisata	90	90	100	1.766.600.000	1.735.890.000	98,26
5. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Amenitas Cagar Budaya yang Berkualitas atau Memenuhi Standar	63	63	100	788.000.000	788.000.000	100,00
6. Program Pengelolaan Permuseuman	Jumlah Museum yang Dikelola	1	1	100	700.000.000	693.667.500	99,10



TUJUAN 3	MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR EKONOMI DAN SOSIAL YANG BERKUALITAS
---------------------	-----------------------------------------------------------------------

Untuk mencapai Tujuan Ketiga yakni **“Meningkatkan infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas**, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah menetapkan 1 (satu) sasaran strategis dengan 6 (enam) indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	% CAPAIAN KINERJA		
3	Meningkatkan infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas	11	Meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas	17	Persentase Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang berkualitas	51,31	64,74	126,17
				18	Persentase kondisi jalan baik dengan kecepatan ≥ 40 Km/jam	65,80	69,58	105,75
				19	Persentase kinerja sistem jaringan irigasi	69,10	70,47	101,99
				20	Persentase kecukupan sarana dan prasarana publik	86,00	85,71	99,67
				21	Persentase kecukupan RTH publik	31,92	31,84	99,75
				22	Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas	74,88	59,88	79,97

SASARAN 11 : MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR EKONOMI DAN SOSIAL YANG BERKUALITAS

Capaian kinerja Sasaran Strategis 12 pada **Tujuan III : Meningkatkan infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas** ditunjang oleh Indikator



Kinerja Sasaran sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN
Persentase Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang berkualitas	51,31	64,74	126,17
Persentase kondisi jalan baik dengan kecepatan ≥ 40 Km/jam	65,80	69,58	105,75
Persentase kinerja sistem jaringan irigasi	69,10	70,47	101,99
Persentase kecukupan sarana dan prasarana publik	86,00	85,71	99,67
Persentase kecukupan RTH publik	31,92	31,84	99,75
Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas	74,88	59,88	79,97
Rata-rata Capaian			102,70

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja sasaran diatas, dapat diambil rerata kesimpulan bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas adalah Sangat Baik atau tercapai 111,10%.

Pada indikator kinerja sasaran Persentase Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang berkualitas dari target 51,31 terealisasi 64,74 yang berarti Sangat Baik atau Tercapai sebesar 126,17%. Pada indikator kinerja sasaran Persentase kondisi jalan baik dengan kecepatan ≥ 40 Km/jam dari target 65,80, terealisasi 69,58 yang berarti Sangat Baik atau Tercapai sebesar 105,75%. Sedangkan Pada indikator kinerja sasaran Persentase kinerja sistem jaringan irigasi dari target 69,10, terealisasi 70,47 yang berarti Sangat Baik atau Tercapai sebesar 101,99%. Pada indikator kinerja sasaran Persentase kecukupan sarana dan prasarana publik dari target 86,00, terealisasi 85,71 yang berarti Sangat Baik atau Tercapai sebesar 99,67%. Pada Pada indikator kinerja sasaran Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas dari target 74,88, terealisasi 59,88 yang berarti Baik atau Tercapai sebesar 79,97%. Pada indikator kinerja sasaran Persentase kecukupan RTH



publik. dari target 31,02 terealisasi 31,84 yang berarti Sangat Baik atau Tercapai sebesar 102,64%.

Persentase kondisi jalan baik dengan kecepatan ≥ 40 km/jam

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 dan target RPJMD tahun 2023 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI					TARGET RPJMD
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase kondisi jalan baik dengan kecepatan ≥ 40 Km/jam	74,50	64,03	66,04	68,37	69,58	67,00

Sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Bina Marga No. 77 Tahun 1990, jaringan jalan dibagi dalam 2 (dua) bagian yaitu :

1. Jalan dengan kondisi yang mantap (stabil) adalah jalan yang selalu dapat diandalkan untuk dilalui kendaraan roda 4 sepanjang tahun, terutama yang kondisinya sudah baik/sedang yang hanya memerlukan pemeliharaan.
2. Jalan dengan kondisi tidak mantap adalah jalan yang tidak dapat diandalkan untuk dilalui kendaraan roda 4 sepanjang tahun, terutama kondisinya rusak/rusak berat yang memerlukan pekerjaan berat (rehabilitasi, perbaikan, konstruksi) termasuk jalan tanah yang saat ini tidak dapat dilewati kendaraan roda 4.

Untuk mengetahui kondisi jalan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan maka pada Tahun 2022 telah dilaksanakan survey kondisi PKRMS (Provincial/Kabupaten Road Management System) pada 325 ruas jalan kabupaten dengan metode SDI (Surface Distress Index). Metode survey SDI adalah skala kinerja jalan yang diperoleh dari hasil pengamatan secara visual terhadap kerusakan jalan yang terjadi dilapangan. Faktor-faktor yang menentukan penentuan besaran SDI adalah kondisi retak pada permukaan jalan dari total ruas, lebar retak rata-rata jumlah lubang per 100 meter serta kedalaman bekas roda/rutting. Hasil survey tersebut dimasukkan kedalam form



SDI yang kemudian dari form tersebut nantinya akan dimasukkan ke form exel RCS aspal/beton atau kerikil/tanah untuk mengetahui kondisi baik, sedang, rusak ringan dan rusak berat. Adapun hasil survey secara ringkas rekapitulasinya disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel. 2.26

Hasil Survey Kondisi Jalan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tahun 2022

No	Kategori	Panjang Jalan	Persentase
1	Baik	435,27 KM	50,65%
2	Sedang	162,69 KM	18,93%
3	Rusak Ringan	127,97 KM	14,89%
4	Rusak Berat	133,44 KM	15,53%
Jumlah		859,36 KM	100%

Sumber : Dinas PUTR Kab. Hulu Sungai Selatan

Dari hasil survey tersebut di atas menunjukkan bahwa kondisi jalan mantap (kategori baik dan sedang) mencapai 597,96 KM. Dengan demikian kondisi jalan mantap jika dibandingkan dengan panjang jalan Kabupaten maka persentasenya sebagai berikut :

Rumus Perhitungan Persentase jalan dalam kondisi mantap :

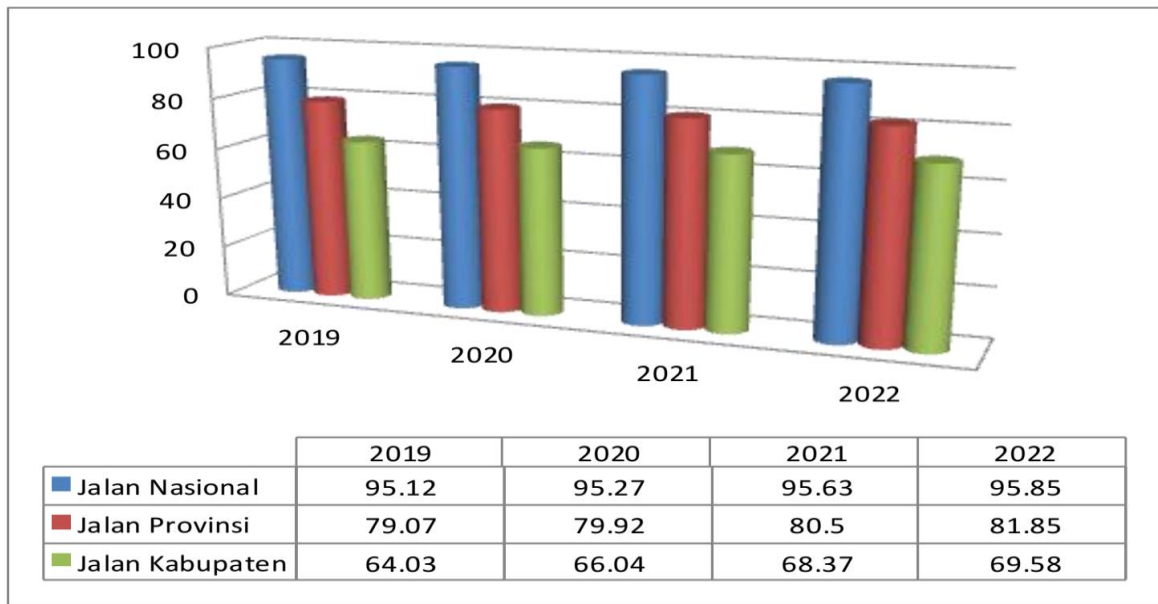
Jumlah panjang jalan kondisi mantap (baik + sedang) dibagi dengan total jumlah panjang jalan kabupaten dikali 100%

$$\frac{595,96}{859,36} \times 100\% = 69,58\%$$

Capaian Indikator Persentase Jalan dalam kondisi baik dan sedang pada tahun 2022 sepanjang 595,96 km dari total 859,36 km panjang jalan kabupaten atau sebesar 69,58%. Hal ini lebih besar dari target SPM sebesar 60% yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.



Perbandingan Perkembangan Kondisi Jalan Mantap pada ruas Jalan Nasional, jalan Provinsi dan Jalan Kab.HSS Th 2019-2022



Sumber : Dinas PUTR Kab. Hulu Sungai Selatan

Dalam pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Persentase kondisi jalan baik dengan kecepatan ≥ 40 km/jam didukung oleh program sebagai berikut :

Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1. Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Konektivitas Jalan Kondisi Mantap	78,67	78,71	100,05	81.238.202.380	51.505.970.062	63,40
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Angka Kejadian Kecelakaan dalam 1 tahun	0	42	-42	2.128.469.392	1.568.601.600	73,70
3. Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Cakupan Pengelolaan Angkutan Sungai dan Danau	85	85	100	582.217.300	520.953.250	89,48

Persentase kinerja sistem jaringan irigasi

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 dan target RPJMD tahun 2023 adalah sebagai berikut :



INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI					TARGET RPJMD
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase kinerja sistem jaringan irigasi	85,00	61,95	65,60	68,49	70,47	71,43

Pada tahun 2022 terdapat 12 Bendung dan 2.941 meter saluran sekunder dan tersier kewenangan kabupaten yang telah dilakukan Rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi, dimana terdapat penambahan 370 hektar luas fungsional jaringan irigasi yang telah mengalami perbaikan, sehingga kondisi bangunan irigasi menjadi lebih baik. Dari sini dapat disimpulkan sebanyak 84 bangunan daerah irigasi permukaan dalam kondisi baik, dan masih terdapat 40 bangunan Daerah irigasi permukaan dengan kondisi bangunan Rusak sedang dan berat dari total jumlah 124 bangunan Daerah irigasi permukaan kewenangan Kab.HSS. Di sisi lain kondisi baik pada jaringan irigasi permukaan telah mencapai 9.384 hektar dari total luas Daerah irigasi permukaan 12.116 hektar. Sedangkan jumlah kondisi jaringan irigasi baik di daerah irigasi rawa 1.790 hektar dari total Luas Daerah irigasi rawa 3.740 hektar.

Untuk menghitung realisasi Kinerja Sistem Jaringan Irigasi setiap tahunnya melaksanakan kegiatan EPAKSI, dimana data yang dihasilkan terkait hasil survei kondisi bangunan irigasi dengan klasifikasi baik, rusak ringan, rusak sedang dan berat. Data tersebut sebagai acuan untuk evaluasi akhir tahun dan merencanakan pekerjaan rehabilitasi/pembangunan jaringan irigasi. Untuk detailnya dapat ditampilkan secara global dan rincian hasil kondisi terakhir di tahun 2022 pada irigasi permukaan dan rawa, sebagai berikut :

Tabel 2.27
Kondisi Jaringan Irigasi Kabupaten Tahun 2022

No.	Jenis	Tingkat Kerusakan (ha)			
		Baik	Ringan	Sedang	Berat
1	Irigasi permukaan	7.947	1.437	1.937	785
2	Irigasi rawa	1.682	108	600	1.350

Sumber : Dinas PUTR Kab. Hulu Sungai Selatan



Persentase kinerja sistem jaringan irigasi merupakan indikator sebagai tolak ukur mengetahui kondisi Infrastruktur irigasi, Sehingga semakin baik kondisi jaringan irigasi maka jumlah Luas fungsional sawah yang terairi makin bertambah dan bangunan irigasi dengan kondisi baik yang menjadi kewenangan Kabupaten makin meningkat, dengan rumus perhitungan :

Jumlah ketersediaan air irigasi (1,2 L perdet/ha) pada setiap musim tanam dibagi jumlah ketersediaan air irigasi seluruh hektar x 100 %

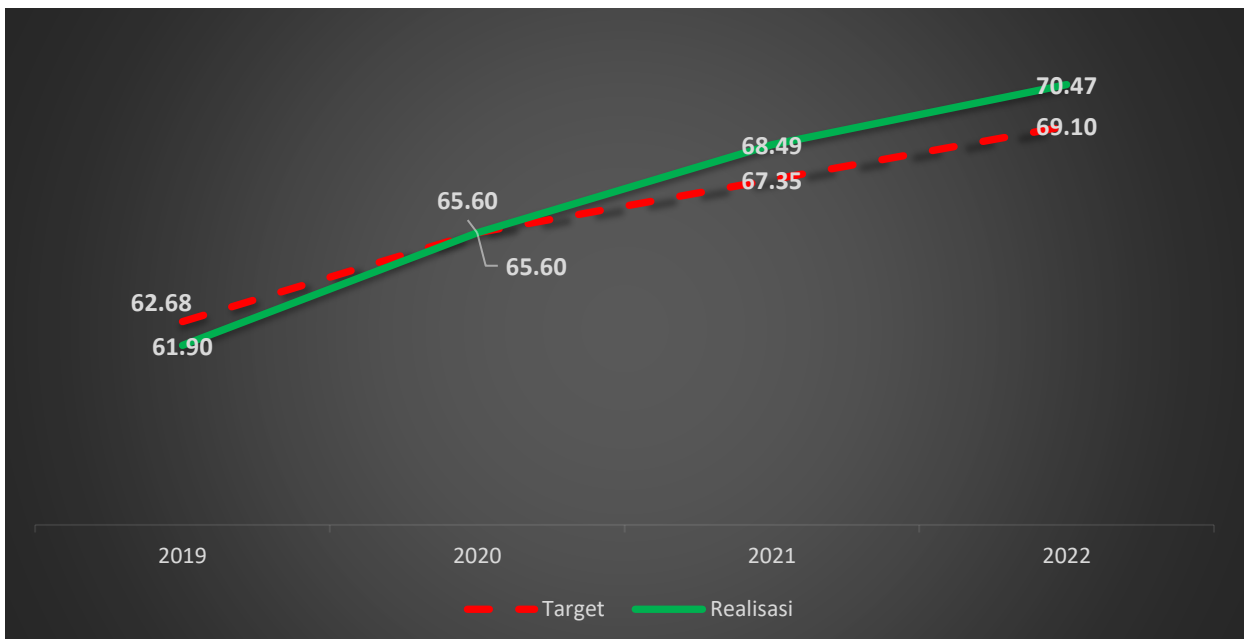
Berdasarkan data hasil survey E-PAKSI Tahun 2022, diketahui :

- Kondisi baik irigasi permukaan = $9.384 \times 1,2 = 11.261$ Ltr/Ha
- Kondisi baik irigasi rawa = $1.790 \times 1,2 = 2.148$ Ltr/H

Jadi Persentase kinerja sistem jaringan irigasi adalah :

$$\frac{13.409}{19.027} \times 100 = 70,47\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka capaian indikator persentase kinerja sistem irigasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2022 teralisasi sebesar 70,47% melebihi target yang ingin dicapai yakni 69,10%..



Sumber : Dinas PUTR Kab. Hulu Sungai Selatan

Dalam pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Persentase kinerja sistem jaringan irigasi didukung oleh program sebagai berikut:



Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Kinerja Sistem Jaringan Irigasi	69,10	70,47	101,99	28.468.965.958	26.898.876.437	94,48

Persentase kecukupan sarana dan prasarana publik

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 dan target RPJMD tahun 2023 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI					TARGET RPJMD
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase kecukupan sarana dan prasarana publik	14,00	23,81	52,38	66,67	85,71	100

a. Bangunan Publik Yang Berfungsi Baik

Untuk memberikan kepuasan pelayanan masyarakat, salah satunya yaitu perlu adanya ketersediaan, sarana dan prasarana publik yang dapat berfungsi dengan baik. Pada tahun 2022 merupakan momen bersejarah bagi Kabupaten Hulu Sungai Selatan, karena menjadi tuan rumah pelaksanaan Porprov Kalimantan Selatan. Untuk itu Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyediakan sarana prasarana/venue cabnag olah raga yang diperlombakan pada pelaksanaan Porprov tersebut Sampai dengan pelaksanaan tahun lalu sudah terbangun 14 bangunan strategis, dan pada tahun 2022 ditargetkan akan dibangun 4 buah bangunan yang cukup strategis khususnya penyiapan venue pelaksanaan Porprov. Kalsel, yaitu

1. Pembangunan lapangan volley in door 2 Desember.
2. Pembangunan lapangan sepak takraw semi in door.
3. Pembangunan gedung futsall di Kecamatan Loksado.
4. Rehabilitasi stadion HM Syafi'i.



Pengukuran persentase Bangunan Publik yang terbangun sebagai berikut:
Jumlah Bangunan Publik yang terbangun dibagi jumlah total bangunan pelayanan publik yang dibutuhkan X 100%

$$\frac{18 \text{ Buah}}{21 \text{ Buah}} \times 100\% = 85,71\%$$

b. Akses Sarana Air Bersih Layak

Jumlah penduduk yang telah memiliki akses air bersih sampai dengan tahun 2021 sebanyak 52.758 KK dan untuk meningkatkan akses air bersih maka pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah melaksanakan rehabilitasi dan pembangunan sarana prasarana air bersih dengan prioritas kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan keluarga yang memiliki balita stunting. Pada wilayah yang telah tersedia jaringan perpipaan yang dikelola oleh PDAM dilaksanakan pemasangan sambungan ke rumah penduduk (SR). Sedangkan pada wilayah yang belum ada jaringan perpipaan dilakukan pembangunan menara air dan sambungan ke rumah penduduk dengan jumlah rumah tangga sasaran sebanyak 1.526 KK. Dengan demikian sampai dengan tahun 2022 jumlah penduduk yang telah memiliki akses air bersih berjumlah 53.284 KK.

Tabel. 2.28
Akses Terhadap Sarana Air Bersih Kabupaten/Kota di Kalsel
Tahun 2022

No	Kabupaten Kota	Realisasi
1	2	3
1	Kabupaten Tanah Laut	100%
2	Kabupaten Banjar	100%
3	Kabupaten Hulu Sungai Utara	97,43%
4	Kabupaten Kotabaru	95,34%
5	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	95,65%
6	Kabupaten Tabalong	86,81%
7	Kabupaten Balangan	84,05
8	Kabupaten Tanah Bumbu	82,65%
9	Kabupaten Tapin	70,14%
10	Kabupaten Batola	66,47%



Pengukuran Rasio rumah tangga yang memiliki akses sarana air bersih layak sebagai berikut: Jumlah KK yang mendapatkan akses air bersih yang layak dibagi jumlah KK se Kab.HSS

$$\frac{53.284 \text{ KK}}{56.296 \text{ KK}} = 0,95 \%$$

c. Akses Sarana Sanitasi Layak

Jumlah Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang bebas BABS sampai dengan tahun 2022 sebanyak 62 Desa, namun lebih banyak Desa yang belum bebas BABS yaitu sebanyak 86 Desa/Kalurahan. Hal ini disebabkan disamping karena keterbatasan sarana BAB juga untuk merubah perilaku masyarakat untuk tidak buang air sembarangan perlu waktu khususnya masyarakat yang tinggal dekat dengan bantaran sungai dimana sampai tahun 2021 jumlah rumah tangga yang memiliki akses sanitasi sebanyak 47.332 KK. Dinas PUTR secara terus menerus melaksanakan kegiatan pembangunan WC masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah baik melalui anggaran APBD maupun DAK yang pada tahun 2022 sebanyak 658 KK, sehingga keseluruhan penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2022 yang memiliki akses sanitasi\ layak sebanyak 48.090 KK. Pengukuran Rasio rumah tangga yang memiliki akses sarana sanitasi Layak sebagai berikut: Jumlah KK yang mendapatkan akses air limbah yang memadai dibagi jumlah KK se Kab.HSS

$$\frac{48.090 \text{ KK}}{56.296 \text{ KK}} = 0,85\%$$

Dalam pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Persentase kecukupan sarana dan prasarana publik didukung oleh program sebagai berikut:

Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Jaringan Drainase Perkotaan Yang Bersih Dan Bebas Genangan	66	76	115,15	1.953.044.000	1.923.757.760	98,50



Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
2. Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Publik Yang Berfungsi Baik	85,71	85,71	100	22.603.506.000	21.219.944.961	93,88
3. Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Tenaga Terampil Konstruksi Yang Bersertifikat	34	34	100	650.593.650	155.253.289	23,86

Persentase Kecukupan RTH Publik

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 dan target RPJMD tahun 2023 adalah sebagai berikut :

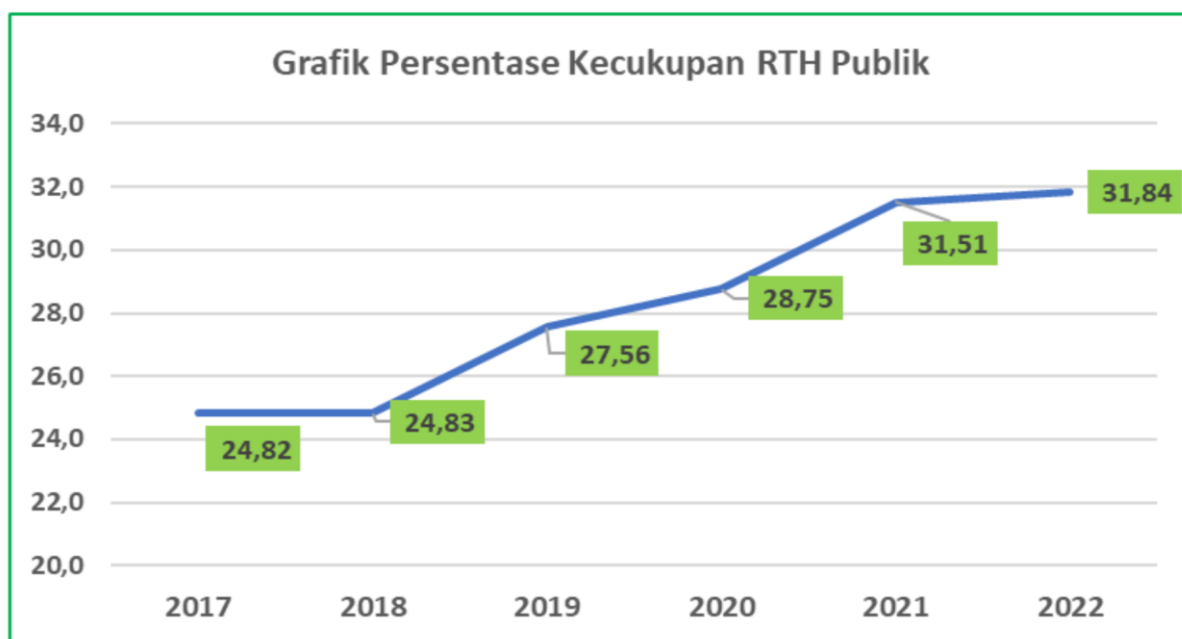
INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI					TARGET RPJMD
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase kecukupan RTH publik	24,83	27,56	28,75	31,51	31,84	34,45

Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat RTHKP adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. RTHKP Publik adalah RTHKP yang penyediaan dan pemeliharannya menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pengukuran Persentase Kecukupan RTH Publik adalah Jumlah luas RTH publik terbangun berbanding dengan luasan RTH publik perkotaan yang dibutuhkan. Luasan RTH Publik perkotaan yang dibutuhkan di kabupaten Hulu Sungai Selatan di tentukan sebesar 30% dari luas perkotaan di kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan mengacu pada Permendagri No.1



Tahun 2007 yang mensyaratkan RTHKP ideal adalah minimal sebesar 20% dari luas kawasan perkotaan. Luas wilayah perkotaan di kabupaten Hulu Sungai Selatan di tentukan berdasarkan akumulasi data luasan wilayah perkotaan yang terdapat pada masingmasing kecamatan dalam kabupaten Hulu Sungai Selatan. Persentase Kecukupan RTH Publik pada tahun 2022 adalah sebesar 31,84% kurang target yang ditetapkan sebesar 31,92% sehingga capaian kinerja Persentase kecukupan RTH Publik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah mencapai 99,75 %



Sumber : Dispera KPLH Kab. Hulu Sungai Selatan

Dalam pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Persentase kecukupan RTH publik didukung oleh program sebagai berikut :

Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Jumlah Kecamatan yang memiliki Rasio Kecukupan luasan RTH kecamatan \geq 0,3	72,73	45,45	62,49	5.303.631.300	4.762.112.750	89,79
	Persentase kesepakatan kerjasama yang	100	100	100			



Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
	Ditindaklanjuti						
	Persentase Luasan RTH publik di wilayah perkotaan	6,48	6,37	98,20			

Presentase Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Berkualitas

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 dan target RPJMD tahun 2023 adalah sebagai berikut

INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI					TARGET RPJMD
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas	40,66	19,23	34,47	52,29	59,88	82,32

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas dipengaruhi oleh

- 1). Persentase Kawasan Permukiman yang Berkualitas adalah kawasan permukiman yang memiliki PSU permukiman yang berfungsi dalam kondisi baik dan memiliki rumah layak huni mencapai >90%. Realisasi capaian adalah sebesar 58.23%.
- 2). Persentase Perumahan yang Berkualitas adalah perumahan yang memiliki PSU perumahan yang berfungsi dalam kondisi baik dan memiliki administrasi pertanahan yang lengkap. Realisasi capaian adalah sebesar 61.54%.

PSU perumahan dan permukiman yang berkualitas adalah memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Kualias permukaan jalan >75% dalam kondisi baik
2. Drainase yang memiliki kemampuan mengalirkan limpasan sesuai standar
3. Cakupan akses air bersih >75%
4. Cakupan pengambilan sampah rumah tangga >85%



5. Dilengkapi dengan septiktank dan closet individual >75%
6. Luasan lahan RTH sesuai standar
7. Memiliki akses sarana umum untuk >75% warga
8. Memiliki jaringan PJU, dan
9. Memiliki fasilitas PSU penunjang lainnya seperti tempat ibadah, fasilitas olahraga, damkar, dsb secara opsional

Demi mencapai Indikator Persentase Kawasan Perumahan dan Permukiman Berkualitas sesuai dengan target yang ditetapkan, telah melakukan beberapa alternatif solusi sebagai berikut :

- Melakukan Optimalisasi Data Kegiatan yang berkaitan dengan Persentase Kawasan Perumahan dan Permukiman Berkualitas di Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menunjang proses perencanaan dan pengambilan kebijakan.
- Menyiapkan Data dukung yang diperlukan untuk menyerap anggaran yang lebih besar baik dari APBD Provinsi, DAK atau APBN sehubungan dengan kegiatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berkaitan dengan Indikator Persentase Kawasan Perumahan dan Permukiman Berkualitas.
- Untuk permasalahan batas tanah dan Penelusuran legalitas lahan di Kawasan perumahan, diambil langkah diadakan rapat penelusuran riwayat lahan bersama dengan Kantor Pertanahan Nasional dan pihak-pihak terkait.
- Untuk Kelengkapan berkas/dokumen serah terima PSU perumahan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup akan secara aktif memberikan pendampingan teknis kepada pengembang dalam rangka pemenuhan kelengkapan berkas / dokumen.

Dalam pencapaian Indikator Kinerja Sasaran perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas didukung oleh program sebagai berikut :



LPPD Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1. Program Pengembangan Perumahan	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	100	100	100	136.219.550	115.567.750	84,84
	Persentase fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	100	100	100			
2. Program Kawasan Permukiman	Presentase Rumah layak Huni	48,78	48,59	99,61	2.069.352.000	2.005.649.000	96,92
	Presentase PSU Permukiman yang berkualitas	49,37	58,23	117,95			
3. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Presentase Rumah layak Huni	48,78	48,59	99,61	2.145.750.000	2.122.566.600	98,92
	Presentase PSU Permukiman yang berkualitas	49,37	58,23	117,95			
4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Presentase PSU Perumahan yang berkualitas	65,38	61,54	94,12	4.138.786.000	4.037.503.923	97,55
5. Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase Perumahan dengan administrasi pertanahan lengkap	65,38	61,54	94,12	88.888.750	73.427.200	82,61



TUJUAN 4	MENINGKATKAN SUMBER DAYA DAERAH DAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM MENJAMIN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
---------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Untuk mencapai Tujuan Keempat yakni **“Meningkatkan sumber daya daerah dan kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan”** Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah menetapkan sasaran dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut;

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	% CAPAIAN KINERJA		
4	Meningkatkan sumber daya daerah dan kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan	13	Meningkatnya kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat	23	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,69	0,73	105,13
		14	Meningkatnya pemberdayaan responsif gender dan perlindungan terhadap anak	24	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,91	90,05	99,05
				25	Persentase desa/ kelurahan layak anak	6,08	6,08	100
		15	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	26	Indeks kualitas lingkungan hidup	71,00	69,23	97,75

SASARAN 13 : MENINGKATNYA KAPASITAS PEMBERDAYAAN KELOMPOK MASYARAKAT

Capaian kinerja Sasaran Strategis 13 pada **Tujuan IV : Meningkatkan sumber daya daerah dan kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan** ditunjang oleh Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET 2021	REALISASI 2021	% CAPAIAN
Indeks Desa Membangun (IDM)	0,69	0,73	105,13
Rata-rata Capaian			105,13



Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja sasaran diatas, dapat diambil rerata kesimpulan bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat adalah Sangat Baik atau Tercapai sebesar 105,13%.

Indeks Desa Membangun (IDM)

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dan target RPJMD tahun 2023 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI					TARGET RPJMD
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Desa Membangun (IDM)	0,62	0,65	0,67	0,70	0,73	0,71

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir capaian rata-rata IDM di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami peningkatan. Pengukuran IDM dilakukan secara berjenjang mulai tingkat Desa dan verifikasi di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan tingkat Nasional. Secara resmi nilai IDM ditetapkan oleh Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah nilai komposit dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi. IDM yang dimaksud rata-rata IDM yang dicapai oleh seluruh Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Cara pengukuran Realisasi Capaian indikator Kinerja Sasaran Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai berikut:



INDIKATOR KINERJA SASARAN	FORMULASI/ PENJELASAN	KET
Indeks Desa Membangun (IDM)	$\text{IDM} = \frac{\sum \text{IDM se Kab.HSS}}{\sum \text{Desa se Kab.HSS}}$ <p>IDM = rata-rata Indeks Desa Membangun Kab.HSS</p>	$\frac{104,46}{144} = 0,73$
	$\sum \text{IDM se Kab.HSS} : \text{Jumlah IDM Desa se Kab.HSS}$ $\sum \text{Desa se Kab.HSS} : \text{Jumlah Desa}$	

Proses pengukuran IDM dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa kemudian diverifikasi di tingkat Kecamatan dan Kabupaten serta provinsi dan nasional. Untuk pengukuran IDM tahun 2022 saat ini telah dilakukan pengukuran mulai tingkat Desa, Kabupaten dan datanya sudah diserahkan ke tingkat Provinsi, dan sedang dalam proses evaluasi oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Nilai IDM menunjukkan tingkat kemajuan dan kemandirian suatu Desa. Klasifikasi status desa dikategorikan dengan ambang batas sebagai berikut :

- 1). Desa Sangat Tertinggal, dengan nilai $\text{IDM} < 0,4907$
- 2). Desa Tertinggal, dengan nilai $0,4907 < \text{IDM} \leq 0,5989$
- 3). Desa Berkembang, dengan nilai $0,5989 < \text{IDM} \leq 0,7072$
- 4). Desa Maju, dengan nilai $0,7072 < \text{IDM} \leq 0,8155$
- 5). Desa Mandiri, dengan nilai $0,7072 < \text{IDM} \leq 0,8155$

Berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Dalam Negeri Nilai IDM dan Status Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan bahwa tingkat perkembangan desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sampai dengan tahun 2022 menurut kategori perkembangannya, sebagai berikut :



Tabel 2.29

Rekapitulasi Tingkat Perkembangan Desa
di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022

NO	KATEGORI DESA	JUMLAH	PERSENTASE
1	Mandiri	8	5,55%
2	Maju	79	54,86%
3	Berkembang	57	39,58%
4	Tertinggal	0	0%
5	Sangat Tertinggal	0	0%
JUMLAH		144	100%

Sumber : Dinas PMD Kab. Hulu Sungai Selatan

Adapun tingkat perkembangan desa dalam beberapa tahun terakhir terlihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.30

Perkembangan Kategori Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tahun 2018-2022

NO	KATEGORI STATUS DESA	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Mandiri	-	-	-	3	8
2	Maju	6	11	20	44	79
3	Berkembang	99	121	122	97	57
4	Tertinggal	39	12	2	0	0
5	Sangat Tertinggal	-	-	-	0	0
JUMLAH		144	144	144	144	144

Sumber : Dinas PMD Kab. Hulu Sungai Selatan

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa perkembangan kategori Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada lima tahun terakhir menunjukkan adanya perkembangan yang cukup baik, yaitu dengan berkurangnya jumlah desa sangat tertinggal dan tertinggal, serta meningkatnya jumlah desa berkembang, maju dan mandiri. IDM merupakan komposit dari nilai indeks



ketahanan sosial (IKS) indeks ketahanan ekonomi (IKE) dan indeks ketahanan ekologi (IKEkolog). Untuk dapat meningkatkan nilai rata-rata IDM Kabupaten Hulu Sungai Selatan maka perlu ditingkatkan nilai semua aspek pada IKS, IKE dan IKEkologi.

Berdasarkan evaluasi pencapaian IDM pada masing-masing komponen yang masih rendah pada aspek ketahanan Ekonomi rata-rata 0,6262 Sedangkan pada aspek ketahanan sosial dan ketahanan ekologi masing-masing 0,7635 dan 0,7866. Adapun faktor yang menjadi penunjang pencapaian IDM, sebagai berikut :

- a. Pemerintahan desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa yang menggunakan IDM sebagai salah satu acuan dalam penyusunan kegiatan dalam APBDes.
- b. Adanya dukungan program lintas sektor pada SKPD terkait seperti penyediaan sarana prasarana pendidikan, kesehatan, pembangunan jalan untuk akses masyarakat ke sarana pendidikan, kesehatan maupun pusat ekonomi masyarakat.

Dalam rangka untuk meningkatkan nilai pada aspek-aspek penyusun nilai IDM diperlukan sinergitas program lintas sektor, antara lain bidang pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan lainnya. Namun Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan sendiri sebagai SKPD utama yang bertanggungjawab dalam pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Indeks Desa Membangun (IDM) didukung oleh program sebagai berikut:

Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1. Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Pengurus BUMDes yang Mengikuti Pelatihan Manajemen Bumdes	21,76	21,76	100	14.375.000	13.250.000	92,17
2. Program Penataan Desa	Persentase desa dengan Tata Wilayah yang sudah ditetapkan	32,64	32,64	100	28.904.950	21.483.500	74,32
3. Program Administrasi	Persentase Kesesuaian RKPDes Terhadap RPJMDes	100	100	100	328.726.600	287.592.450	87,49



LPPD Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
Pemerintahan Desa							
4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Desa Sehat Sejahtera	60,42	60,42	100	716.628.700	623.390.994	86,99
	Persentase Desa Layak Air Bersih Dan Sanitasi	60,42	60,42	100			
5. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase pemuda yang berwirausaha	7,71	7,83	101,56	1.720.817.500	1.503.322.507	87,36
	Presentase Pemuda yang aktif dalam organisasi Kepemudaan dan Sosial	13,29	16,02	120,54			
6. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Presentase cabang olahraga yang memiliki binaan berdasarkan kelompok umur	47	47	100	29.129.071.191	27.450.047.311	94,24
	Presentase cabang olahraga yang menyelenggarakan Event/ kejuaraan di Tingkat Daerah	34	34	100			
	Presentase Masyarakat yang aktif berolahraga secara rutin	60	60	100			
	Presentase Sarana dan Prasarana Olahraga yang memenuhi standar	80	80	100			
7. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Organisasi Kepramukaan Yang Aktif	96,33	96,33	100	400.000.000	400.000.000	100,00



SASARAN 13 : MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN RESPONSIF GENDER DAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK

Capaian kinerja Sasaran Strategis 13 pada **Tujuan IV : Meningkatkan Sumber Daya Daerah dan Kualitas Lingkungan Hidup dalam menjamin Pembangunan Berkelanjutan** ditunjang oleh Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,91	90,05	99,05
Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak	6,08	6,08	100
Rata-rata Capaian			99,53

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja sasaran diatas, dapat diambil rerata kesimpulan bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya pemberdayaan responsif gender dan perlindungan terhadap anak adalah Sangat Baik atau Tercapai sebesar 99,53%.

Pada indikator kinerja sasaran Indeks Pembangunan Gender (IPG) dari target 90,91, terealisasi 90,05, yang berarti Sangat Baik atau sebesar 99,05%. Pada indikator kinerja sasaran Persentase desa/kelurahan layak anak dari target 6,08, terealisasi 6,08, yang berarti Sangat Baik atau Tercapai sebesar 100%.

Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG) dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dan target RPJMD tahun 2023 adalah sebagai berikut :



INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI					TARGET RPJMD
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,10	89,21	89,23	89,65	90,05	91,27

IPG merupakan rasio antara IPM perempuan dan laki-laki. Melalui IPG dapat diukur kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Semakin mendekati 100, maka semakin rendah gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan.

Dengan terpisahnya IPM laki-laki dan IPM perempuan, maka capaian pembangunan masing-masing kelompok gender tersebut dapat diperbandingkan. Pembangunan manusia dalam IPM diukur dari dimensi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Komponen pembentuk IPM yang digunakan adalah angka harapan hidup (mewakili dimensi kesehatan), angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (mewakili dimensi pendidikan), serta sumbangan pendapatan (mewakili dimensi ekonomi) (KPPPA dan BPS, 2021).

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kalimantan Selatan pada tahun 2022 bernilai 89,44 poin. Kesetaraan pembangunan antara laki-laki dan perempuan dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi akan semakin mudah tercapai jika nilai IPG mendekati 100.

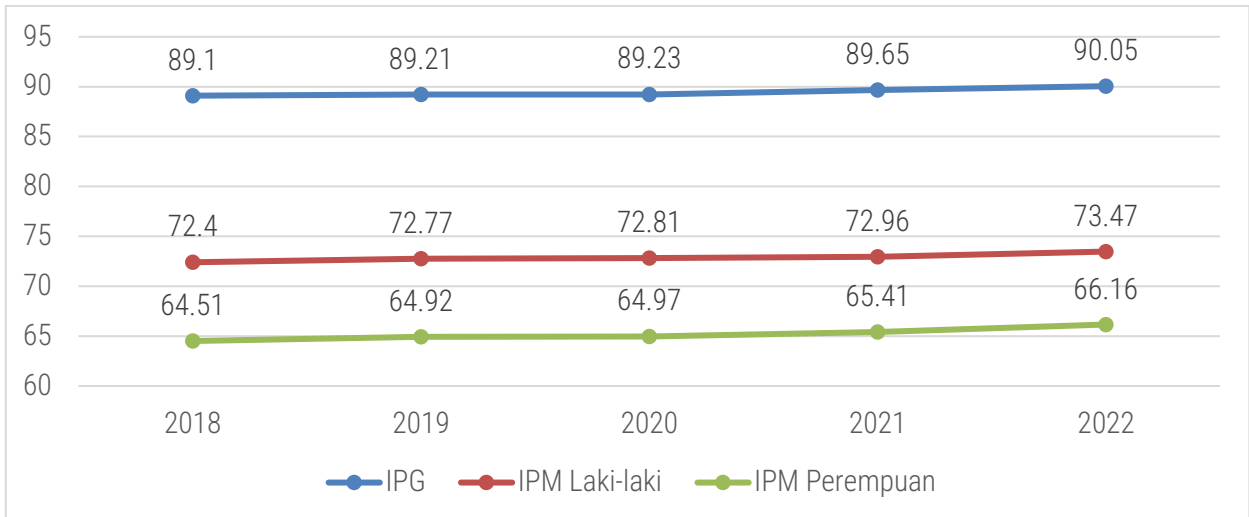
Capaian IPG Kalimantan Selatan mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya juga diikuti dengan tidak berubahnya posisi dari kelima kabupaten /kota yang memiliki capaian IPG di bawah capaian IPG provinsi. Pada Gambar dibawah terlihat bahwa 5 kabupaten yang pencapaian IPG-nya masih di bawah rata-rata pencapaian IPG di tingkat provinsi, yakni Kabupaten Tanah Laut, Tabalong, Tapin, Tanah Bumbu, dan Kota Baru.



Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan

Capaian IPG tertinggi untuk tingkat kabupaten/kota di Kalimantan Selatan pada tahun 2022 adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan IPG sebesar 96,51 poin. Sementara itu, IPG terendah yaitu Kabupaten Tapin dengan IPG sebesar 84,37 poin. IPG Kabupaten Hulu Sungai Selatan berada pada peringkat 7 berada di atas IPG Provinsi dengan capaian sebesar 90,05 poin.

Gambar dibawah menunjukkan perkembangan IPM laki-laki, IPM perempuan, dan IPG Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama periode 2018-2022.



Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan

Berdasarkan Gambar diatas dapat dilihat bahwa IPM laki-laki dan IPM perempuan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sama-sama mengalami peningkatan selama periode 2018–2022. Secara umum kualitas pembangunan perempuan masih tertinggal daripada laki-laki. Hal ini dapat dilihat dari capaian IPM perempuan yang lebih rendah dibanding IPM perempuan selama kurun waktu lima tahun. Sementara jika dilihat dari kecepatannya, selama periode 2018-2022, capaian pembangunan laki-laki memiliki akselerasi yang lebih tinggi. Dengan demikian, diperlukan adanya program-program pemerintah yang berpedoman pada pengarusutamaan gender agar tercapai peningkatan kapabilitas dasar perempuan.

Capaian IPG selama dua tahun terakhir mengalami peningkatan. IPG meningkat dari 89,23 menjadi 89,65 pada 2021. Kemudian mengalami peningkatan lagi sebesar 0,40 menjadi 90,05 pada tahun 2022. Peningkatan IPG dalam kurun dua tahun terakhir disebabkan oleh pembangunan perempuan yang memiliki akselerasi lebih cepat daripada laki-laki.

Peningkatan capaian IPG tahun 2022 patut diapresiasi. Hal ini menunjukkan bahwa program-program pemerintah yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender memberikan hasil yang positif. Namun upaya yang telah dilakukan untuk mencapai kesetaraan gender perlu dimaksimalkan lagi agar ke depannya perempuan dan laki-laki memiliki peran yang sama dalam merealisasikan apa yang menjadi hak-hak dasarnya dan mampu



berkontribusi dalam pembangunan baik dari sisi ekonomi, sosial, dan budaya serta politik.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja sasaran Indeks Pembangunan Gender (IPG) didukung oleh program sebagai berikut :

Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1. Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Perangkat Daerah yang melaporkan data terpilah gender dan anak	94,74	100	105,56	44.004.500	42.464.900	96,50
2. Program Perlindungan Perempuan	Persentase pengaduan perempuan korban kekerasan yang ditindaklanjuti	100	100	100	75.657.750	28.675.250	37,90

Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak

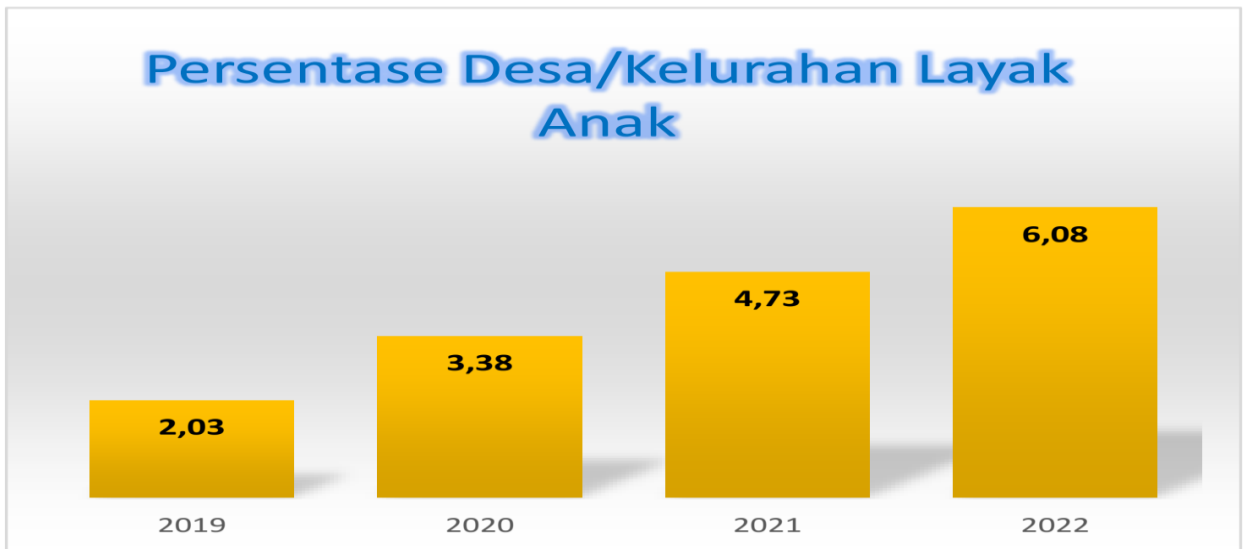
Adapun perbandingan antara realisasi kinerja Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dan target RPJMD tahun 2023 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI					TARGET RPJMD
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak	0,68	2,03	3,38	4,73	6,08	7,43

Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdapat peningkatan dari tahun ke tahun. Dimana pada setiap tahun ada penambahan 2 desa/kelurahan untuk menjadi DEKELA. Sampai dengan tahun 2022 sudah terdapat 9 DEKELA yang terbentuk dan dibina, yaitu kelurahan Kandangan Kota, kelurahan Kandangan Barat, desa Tambak Bitin, desa Gambah Luar, desa Pandulangan, desa Jembatan Merah, desa Baluti, dan pada tahun 2022 ini desa Sungai Raya Selatan dan desa Tambingkar menjadi desa/kelurahan layak anak. Perkembangan Desa/Kelurahan Layak



Anak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana terlihat pada grafik dibawah ini.



Sumber : Dinas PPKBPPPA Kab. Hulu Sungai Selatan

DEKELA merupakan salah satu indikator dalam mewujudkan Kabupaten/ Kota Layak Anak(KLA). Dan pada tahun 2022 Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah meraih kategori Madya untuk Kabupaten/Kota Layak Anak, sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 2.31
Penghargaan Anegerah Parahita Ekapraya (APE) dan
Kabupaten/Kota Layak Anak

DAERAH	APE 2020	KLA 2022
KALIMANTAN SELATAN	Utama	
TANAH LAUT		Pratama
KOTABARU		
BANJAR	Pratama	Madya
BARITO KUALA		Pratama
TAPIN	Madya	Pratama
HULU SUNGAI SELATAN	Pratama	Madya
HULU SUNGAI TENGAH		Pratama
HULU SUNGAI UTARA	Madya	Madya
TABALONG	Madya	Nindya
TANAH BUMBU	Pratama	Madya
BALANGAN	Madya	Madya
KOTA BANJARMASIN	Utama	Nindya
KOTA BANJAR BARU		



Dalam pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Persentase desa/kelurahan layak anak didukung oleh program sebagai berikut :

Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase desa/kelurahan layak anak	6,08	6,08	100	261.542.200	259.307.800	99,15
2. Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase pengaduan anak korban kekerasan yang ditindaklanjuti	100	100	100	420.507.200	285.449.090	67,88

SASARAN 14 : MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Capaian kinerja Sasaran Strategis 14 pada **Tujuan IV : Meningkatkan Sumber Daya Daerah dan Kualitas Lingkungan Hidup dalam menjamin Pembangunan Berkelanjutan** ditunjang oleh Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,00	69,40	97,75
Rata-rata Capaian			97,75

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja sasaran diatas, dapat diambil rerata kesimpulan bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas lingkungan hidup adalah Sangat Baik/Tinggi atau Tercapai sebesar 97,75%. Dengan demikian pada indikator kinerja sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dari target 71,00, terealisasi 69,40, yang berarti juga Sangat Baik atau Tercapai sebesar 97,75%.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 dan target RPJMD tahun 2022 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut :



INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI					TARGET RPJMD
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	54,94	56,23	67,04	67,04	69,40	71,48

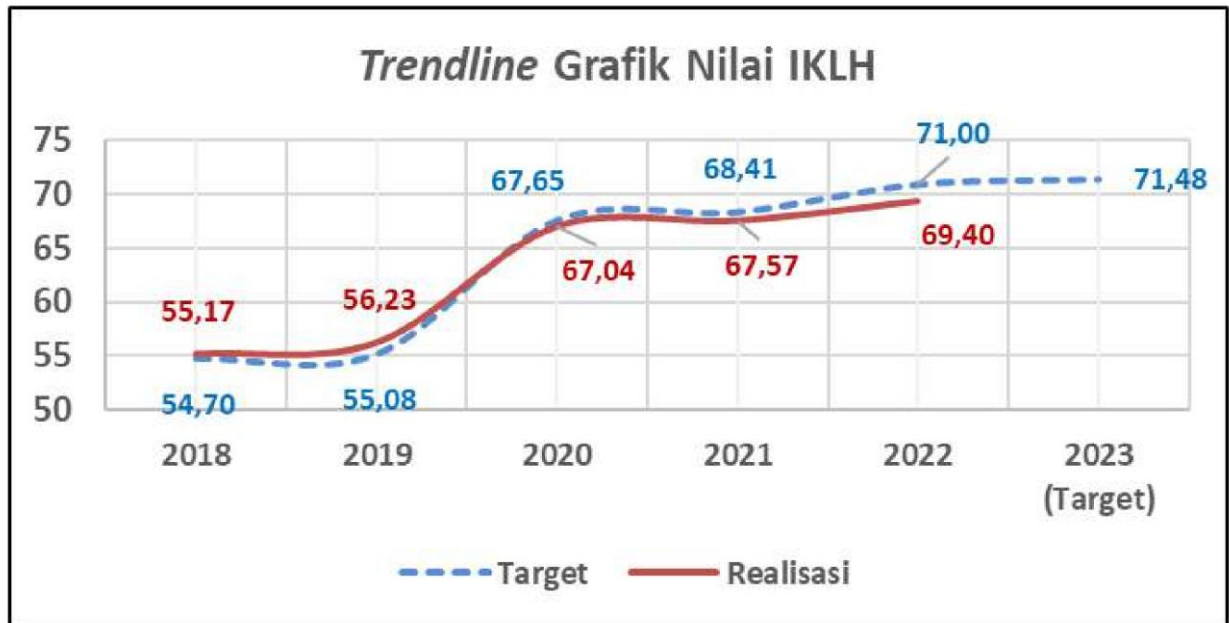
Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan. Pencapaian terhadap ketiga komposit tersebut adalah sebagai berikut :

Data IKLH 2022	Satuan	Hasil	Keterangan
Indeks Kualitas Air (IKA)	Nilai	64,55	
Indeks Kualitas Udara (IKU)	Nilai	90,60	
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Nilai	37,76	
Realisasi Nilai IKLH Kab. HSS	Nilai	69,40	Kategori Sedang
Target Nilai IKLH Kab. HSS	Nilai	71,00	
Capaian Nilai IKLH Kab. HSS	%	97,75	

Sumber : Dispera KPLH Kab. Hulu Sungai Selatan

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai realisasi kinerja dari indikator indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) pada Tahun 2022 adalah sebesar 69,40 yang masih belum mencapai target sebesar 71,00. Meskipun demikian, capaian kinerja indikator indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, masih dalam kategori “Sedang” dengan realisasi capaian nilai IKLH Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2022 sebesar 97,75%.

Data Base Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup beserta komponen penyusunnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdapat tahun 2018 sampai 2022 dan target 2023 sebagai berikut:



Sumber : Dispera KPLH Kab. Hulu Sungai Selatan

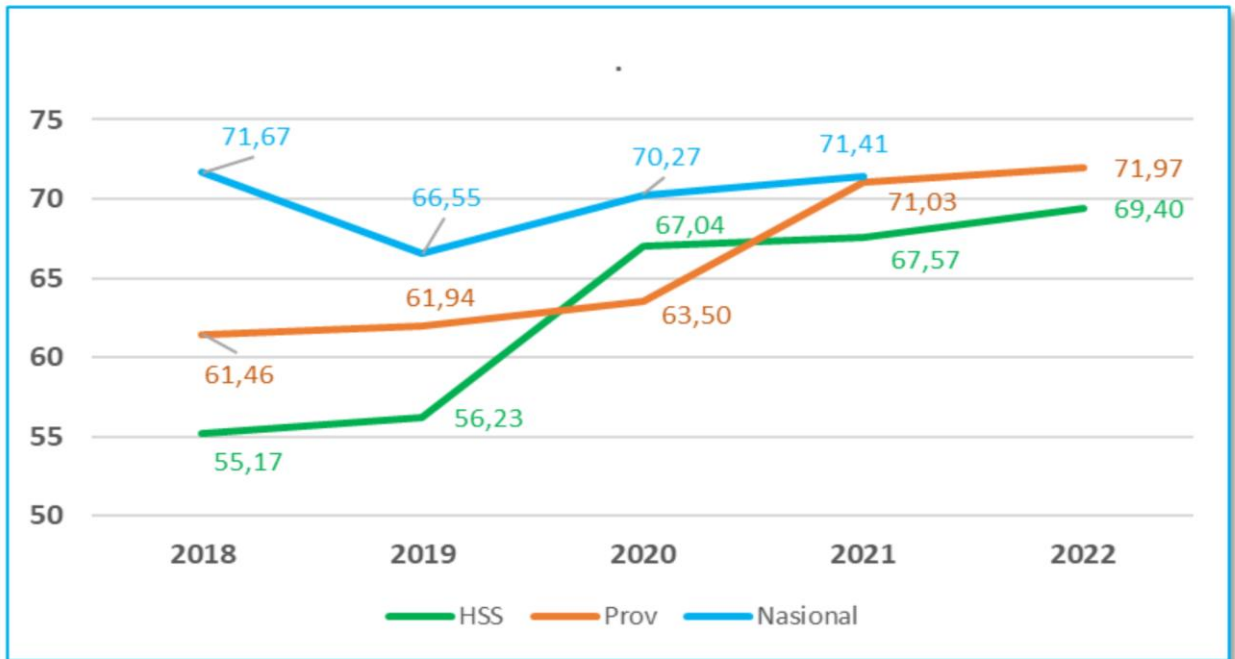
Berfasarkan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023. Terkait dengan target indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada akhir pelaksanaan Renstra tahun 2023 diharapkan dapat mencapai target yang telah ditetapkan, untuk itu diperlukan upaya meningkatkan nilai IKLH terutama melalui pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, meningkatkan tutupan lahan melalui koordinasi kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, serta melakukan peningkatan uji emisi gas buang. Secara umum pada tabel di atas nilai IKLH sebesar 69,40 dimana memiliki selisih 2,08 poin dari target capaian yang ditetapkan pada akhir Renstra 2023 yaitu 71,48 dengan persentase capaian 97,09%. Untuk mencapai target nilai IKLH sesuai renstra 2023 dilakukan dengan meningkatkan konsistensi kegiatan pencapaian program dan kegiatan penunjang yang dilakukan pada tahun 2023

Pada periode tahun-tahun sebelumnya nilai IKLH kabupaten Hulu Sungai Selatan cenderung meningkat, bahkan pada tahun 2020 sudah melampaui nilai IKLH Provinsi Kalimantan Selatan, walaupun masih dibawah nilai IKLH secara Nasional. Namun pada Tahun 2022 terjadi sedikit penurunan dan kembali di bawah IKLH Provinsi Kalimantan Selatan yang mengalami trend peningkatan yang cukup signifikan. Perbandingan capaian nilai IKLH untuk



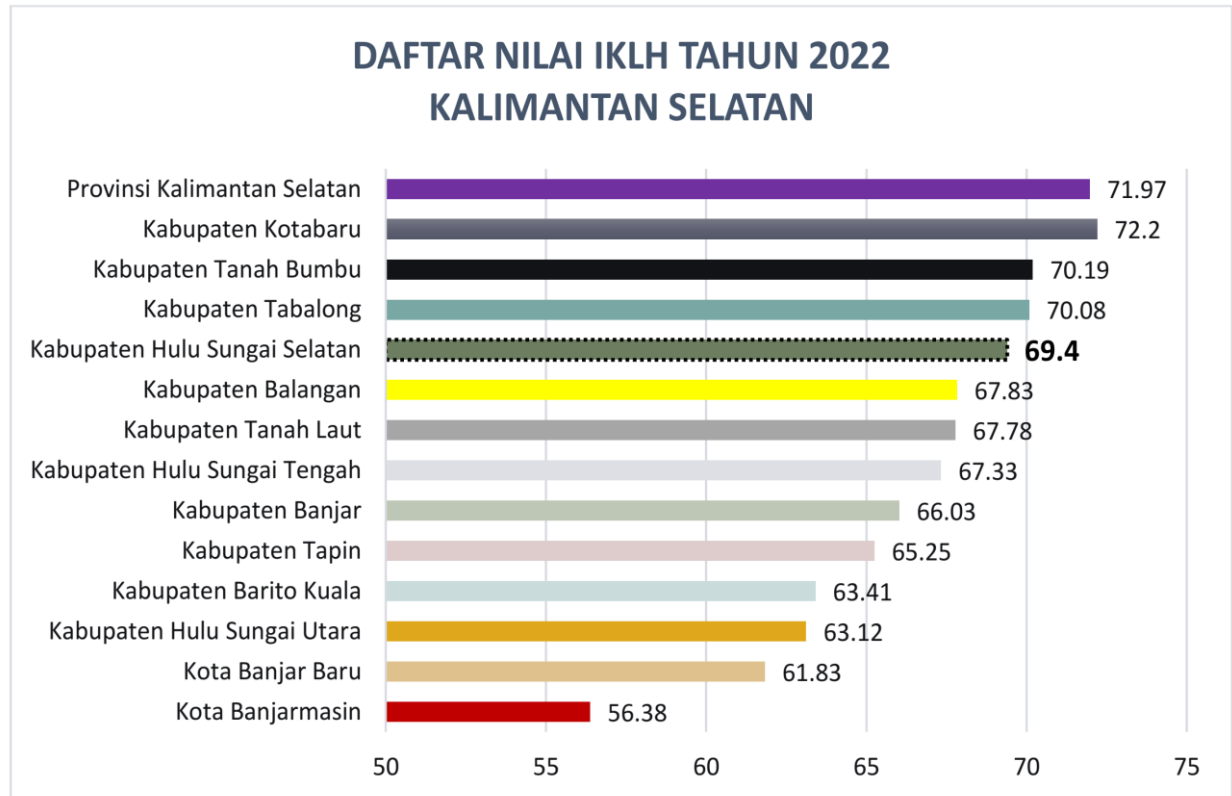
periode Tahun 2018 – 2022 untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional dapat dilihat pada grafik di bawah ini

GRAFIK PERBANDINGAN CAPAIAN IKLH



Sumber : Dispera KPLH Kab. Hulu Sungai Selatan

Capaian nilai IKLH pada tahun 2022 sebesar 69,40 atau lebih rendah dari capaian provinsi dengan gap sebesar 2,57. Sehingga untuk mencapai gap dengan nilai IKLH provinsi diperlukan upaya-upaya yang lebih intensif seperti peningkatan indeks kualitas udara (IKU) dan Indeks Kualita Tutupan Lahan (IKTL). Untuk memastikan meningkatnya nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, pemantauan dan pengawasan serta koordinasi lintas sektor untuk mencapai nilai IKLH sesuai target. Sedangkan untuk nilai IKL sendiri dilakukan pengawasan dan penindakan serta penanaman kembali lahan kosong dan pencegahan karhutla serta berkoordinasi dengandinas kehutanan provinsi dan dinas pertambangan terkait penataan lahan reklamasi



Sumber : Dispera KPLH Kab. Hulu Sungai Selatan

Secara umum nilai IKLH Kabupaten Hulu Sungai Selatan menempati urutan ke empat dari seluruh Kabupaten / Kota se Provinsi Kalimantan Selatan dengan nilai IKLH sebesar 69,40. Tetapi realisasi capaian tersebut masih berada di bawah Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam upaya untuk meningkatkan nilai IKLH Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun berikutnya perlu dilakukan peningkatan nilai IKTL melalui koordinasi revegetasi hutan dan lahan kosong dengan Dinas Kehutanan dan Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Selatan. Faktor utama yang menyebabkan rendahnya nilai IKTL di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berkontribusi menurunkan nilai IKLH adalah banyaknya daerah rawa dan luasnya perkebunan yang dikelola oleh masyarakat (perkebunan karet) maupun yang dikelola oleh pihak swasta (perkebunan sawit), yang luasan perkebunan tersebut dinilai tidak menjadi seratus persen tutupan lahan oleh Kementerian LHK.

Dalam pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup didukung oleh program sebagai berikut:



LPPD Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Nilai kekeruhan(TSS) air sungai minting dan sungai rarahin di bawah batas ambang (mg/l)	50	24,7	150,60	1.042.306.200	959.502.622	92,06
	Nilai Batas Ambang Air Limbah perkebunan Kelapa Sawit, minyak lemak memenuhi nilai baku mutu (mg/l)	25	19	124			
	Persentase industri yang lulus uji Proper	100	100	100			
2. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Rekomendasi yang ditindaklanjuti	100	100	100	32.920.000	2.812.500	8,54
3. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Luasan RTH di wilayah perkotaan	6,48	6,37	98,30	576.764.800	332.384.500	57,63
4. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Luasan RTH di wilayah perkotaan	6,48	6,37	98,30	196.427.000	90.600.000	46,12
5. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Nilai kekeruhan(TSS) air sungai amandit sekitar tambang di bawah batas ambang	50	16,7	166,60	47.430.000	7.242.500	15,27



TUJUAN 5	MENINGKATKAN SUMBER DAYA DAERAH DAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM MENJAMIN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
---------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tujuan Pertama pada Misi : **Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Pelayanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi dalam Bingkai Kehidupan yang Agamis** yakni “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi.” Untuk mencapai tujuan tersebut telah ditetapkan pada 3 (tiga) Sasaran Strategis dan 7 (tujuh) Indikator Sasaran, yang secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN KINERJA		
5	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	16	Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik	27	Indeks Reformasi Birokrasi	8,3 (A)	70,45 (BB)	84,88
				28	Predikat AKIP	A (80,10)	A (81,50)	101,75
				29	Kategori nilai kinerja Unit Pelayanan Publik (UPP)	A (4,51)	A (4,54)	100,67
		17	Meningkatnya kinerja keuangan dan kinerja birokrasi	30	Opini WTP BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	100
				31	Indeks profesionalisme ASN	78,12	59,75	76,48
		18	Meningkatnya penggunaan sistem informasi daerah	32	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan teknologi informasi dengan baik	92,11	92,30	100,21
				33	Persentase pemerintah desa yang menggunakan teknologi informasi dalam pemberian layanan	31,25	31,25	100



Pencapaian tujuan tersebut terdapat pada 4 (empat) Sasaran Strategis secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

SASARAN 15 : Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik

Capaian kinerja Sasaran Strategis 15 ditunjang oleh Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN
Indeks Reformasi Birokrasi	A (83)	BB (70.45)	84,99
Predikat AKIP	A (80,10)	A (81,50)	101,75
Kategori nilai kinerja Unit Pelayanan Publik (UPP)	A (4,51)	A (4,54)	100,67
Rata-rata Capaian			95,80

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja sasaran diatas, dapat diambil rerata kesimpulan bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik adalah Sangat Baik atau Tercapai 95,80%.

Pada indikator kinerja sasaran Indeks Reformasi Birokrasi dari target A (83), terealisasi BB (70,54), yang berarti Baik atau Tercapai sebesar 84,99%. Sedangkan pada indikator kinerja sasaran Predikat AKIP dari target A (80,10), terealisasi A (81,50), yang berarti Sangat Baik atau Tercapai sebesar 101,75% dan Pada indikator kinerja sasaran Kategori nilai kinerja Unit Pelayanan Publik (UPP) dari target A (4,51), terealisasi A (4,54), yang berarti Sangat Baik atau Tercapai sebesar 100,67%.

Indeks Reformasi Birokrasi

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 dan target RPJMD tahun 2022 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut:



INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI					TARGET RPJMD
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Reformasi Birokrasi	B (64.66)	B (65.69)	B (66.22)	B (66.81)	BB (70.45)	A (88)

Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mendorong pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada setiap Organisasi Perangkat Daerah antara lain :

1. Asistensi dan pendampingan kepada Perangkat Daerah untuk penyusunan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi. Penyusunan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi diarahkan dalam upaya penyelesaian permasalahan pengentasan kemiskinan dan penurunan prevalensi stantng di Wilayah Kab. Hulu Sungai Selatan
2. Internalisasi penetapan agen perubahan kepada Perangkat Daerah. Penetapan agen perubahan pada Perangkat Daerah diarahkan kepada bisnis utama Perangkat Daerah. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah dilakukan secara berkala pada setiap Triwulan
3. Identifikasi awal atas pola koordinasi dan rentang kendali antar jabatan dilakukan dengan mengimplementasikan model pohon kinerja berbasis cause effect / Logic Model terhadap struktur organisasi sehingga dapat diketahui kesesuaian struktur organisasi, beban kerja dan core bisnis masing0masing organisasi perangkat daerah.
4. Internalisasi dan asistensi penyusunan peta proses bisnis pada setiap perangkat daerah dengan memperhatikan crosscutting pada pohon kinerja setiap perangkat daerah, serta mendorong Perangkat Daerah untuk melakukan perjanjian kerjasama antara perangkat daerah terhadap target-target kinerja crosscutting pada pohon kinerja.

**Predikat AKIP**

Bila dilakukan perbandingan realisasi kinerja dari tahun ke tahun pada Indikator Kinerja Sasaran Predikat AKIP maka hasilnya adalah sebagai berikut

INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI					TARGET RPJMD
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Predikat AKIP	BB (75,18)	BB (76,23)	BB (77,03)	A (80,02)	A (81,50)	A

Apabila dilihat pada tabel diatas, capaian indikator Predikat Akuntabilitas Kinerja atas akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari tahun 2018 s.d tahun 2022 terus naik, dan pencapaian hasil evaluasi SAKIP tahun 2022 naik 1,48 dibandingkan dengan nilai hasil evaluasi di tahun 2021.

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia sebagai berikut:

Komponen yang Dinilai		Bobot	2022
			Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30	26,10
b.	Pengukuran Kinerja	30	24,90
c.	Pelaporan Kinerja	15	12,16
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,34
Nilai Hasil Evaluasi		100	81,50
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			A (Memuaskan)

Sumber data : KemenPAN RB.

Adapun perbandingan capaian indikator Predikat AKIP Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari tahun 2018 s.d 2022 adalah sebagai berikut :



Tabel. 2.32
Capaian Predikat AKIP Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tahun 2018 s.d 2022

Komponen yang Dinilai		Bobot	2018	2019	2020	2021	2022
			Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai
a	Perencanaan Kinerja	30	24,36	25,44	25,45	25,88	26,10
b	Pengukuran Kinerja	25	18,89	19,96	20,08	21,09	24,90
c	Pelaporan Kinerja	15	10,66	11,49	11,59	11,99	12,16
d	Evaluasi Kinerja	10	6,04	7,14	7,44	8,21	18,34
e	Capaian Kinerja	20	10,08	12,20	12,46	12,85	
Nilai Hasil Evaluasi		100	75,18	76,23	77,03	80,02	81,50
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB (Sangat Baik)	BB (Sangat Baik)	BB (Sangat Baik)	A (Memuaskan)	A (Memuaskan)

Sumber data : KemenPAN RB.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut bahwa perkembangan penerapan SAKIP sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja sektor publik pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2022 menunjukkan perkembangan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, adapun rekomendasi KemenPAN RB yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut:

1. Melanjutkan penyempurnaan penjenjangan kinerja pada seluruh PD dengan memperhatikan kerangka berfikir logis dalam mencapai kinerja, sehingga hubungan antar level jabatan kinerja dapat sepenuhnya terkait antara satu dengan yang lain;



2. Melakukan penghapusan program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memiliki kontribusi signifikan dalam pencapaian kinerja pemerintah daerah dalam rangka *refocusing* program/kegiatan;
3. Melakukan penyempurnaan pada aplikasi e sakip dengan memasukkan rencana aksi sebagai bahan *monitoring* dan evaluasi seluruh PD dalam pengukuran kinerja. Serta Menyusun pedoman dalam pengukuran dan pengumpulan data kinerja;
4. Meningkatkan kualitas laporan kinerja/LPPD dengan menyajikan informasi mengenai analisis strategi dan tindak lanjut yang akan dilakukan dalam menyempurnakan atau meningkatkan kinerja kedepannya. Selain itu, perlu meningkatkan komitmen Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan beserta seluruh PD untuk menyampaikan dokumen laporan Kinerja/LPPD secara tepat waktu dan dipublikasikan pada website Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan; dan
5. Mendorong APIP/Inspektorat untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan meningkatkan kapasitas evaluator dalam melakukan evaluasi internal sehingga memberikan rekomendasi yang signifikan memacu perbaikan akuntabilitas kinerja internal sebagai salah satu dasar dalam pemberian *reward and punishment* kepada PD.

Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tersebut dan sebagai langkah nyata membangun SAKIP Kabupaten Hulu Sungai Selatan maka telah dilakukan berbagai perbaikan antara lain :

1. Melaksanakan Road Show keseluruhan perangkat daerah dengan memperbaiki dan mengimplementasikan model pohon kinerja berbasis *cause effect / Logic Model* dengan memberikan pendampingan terhadap perangkat daerah yang belum menggambarkan orientasi terhadap keberhasilan, setelah itu selesai maka semua cascading perangkat daerah tersebut dilakukan sanding mapping untuk melihat keterkaitan antar level jabatan dan antar program strategis di level pemerintah daerah;
2. Setelah pohon kinerja selesai maka kita transfer ke *cascading / penjenjangan* kinerja semua dokumen perencanaan, pelaporan,



berpedoman terhadap cascading yang sudah dilakukan perbaikan serta melakukan integrasi terhadap sasaran kinerja pegawai (SKP) sehingga ada keterkaitan antara kinerja individu dengan kinerja organisasi sehingga dapat dipastikan kontribusi kinerja individu terhadap pencapaian kinerja organisasi dalam mendorong penguatan budaya kinerja di masing-masing perangkat daerah;

3. Menyandingkan cascading berbasis logical framework tersebut dengan perencanaan yang dibuat oleh perangkat daerah mulai dari tingkatan yang terendah sampai dengan dampak dan kontribusi terhadap hasil dan ada analisis terhadap resiko di masing-masing perangkat daerah yang terdapat pada program dan kegiatan sehingga bisa dilakukan prediktif terhadap resiko baik itu di level yang sifatnya strategis, taktikal, dan operasional. Hal tersebut diharapkan berdampak terhadap perangkat daerah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, dengan struktur dan proses pengendalian telah efektif untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi, serta adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi
4. Memastikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara elektronik dengan menampilkan fitur-fitur berupa hasil analisis yang dapat mendorong perangkat daerah untuk melakukan perbaikan terhadap masalah utama sehingga pemberi mandat dalam hal ini pimpinan daerah bisa melihat secara langsung dan pada kesempatan pertama memberikan instruksi kepada perangkat daerah terhadap pencapaian kinerjanya
5. Menyelaraskan laporan kinerja pemerintah daerah dan perangkat daerah dengan cascading / logical framework dalam bentuk analisis hirarki proses sehingga pemda dan perangkat daerah dapat menyajikan analisis yang mendalam terhadap efektivitas dan efisiensi anggaran dan pencapaian kinerja sebagai bahan untuk menyusun perencanaan kedepannya. Merekomendasikan APIP/Inspektorat untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan meningkatkan kapasitas evaluator dalam melakukan evaluasi internal sehingga memberikan rekomendasi yang signifikan memacu perbaikan



akuntabilitas kinerja internal sebagai salah satu dasar dalam pemberian *reward* and *punishment* kepada PD

Dalam pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Indeks Reformasi Birokrasi dan Predikat AKIP didukung oleh program sebagai berikut:

Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD dengan nilai AKIP minimal BB	100	100	100	672.983.700	490.624.066	72,90
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kecamatan dan kelurahan yang berkinerja baik	100	100	100	1.303.820.200	1.140.774.700	87,49
	LPPD disampaikan tepat waktu	100	100	100			
	LPPD sesuai standar	100	100	100			
3. Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Penurunan temuan bersifat keuangan hasil pemeriksaan inspektorat Kab. HSS	100	100	100	1.177.682.500	1.058.372.500	89,87
	Persentase penurunan temuan eksternal yang menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah	100	100	100			
	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan inspektorat dalam periode tertentu	100	100	100			
	Persentase penyelesaian rekomendasi pihak eksternal yang	100	93,02	93,02			



Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
	ditindaklanjuti dalam periode tertentu						
4. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Penanganan Kasus Pengaduan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan	100	100	100	1.154.339.100	940.542.931	81,48
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat kepuasan pelayanan	100	70	70	18.118.129.547	16.375.498.154	90,38

Kategori nilai kinerja Unit Pelayanan Publik (UPP)

Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran : Kategori nilai kinerja Unit Pelayanan Publik (UPP) bila dilakukan perbandingan realisasi kinerja dari tahun ke tahun maka hasilnya adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI					TARGET RPJMD
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kategori nilai kinerja Unit Pelayanan Publik (UPP)	B	B (3,97)	B (3,97)	A- (4,19)	A (4,54)	A

Berdasarkan Surat Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN RB Nomor B/567/PP.02/2022 Tanggal 22 Desember 2022 Hal Penyampaian Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2022, telah dilakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan terhadap 2 (dua) Perangkat Daerah penyelenggara pelayanan publik yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Aspek dalam Evaluasi Pelayanan Publik meliputi : Kebijakan Pelayanan;



Profesionalisme SDM; Sarana dan Prasarana; Sistem Informasi Pelayanan Publik; Konsultasi dan Pengaduan; Inovasi serta tindak lanjut hasil rekomendasi tahun 2022.

Berikut hasil Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut:

No	Unit Penyelenggara	Nilai Indeks	Kategori
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	4,6	A (Sangat Baik)
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4,47	A- (Sangat Baik)
Nilai Rata-Rata Pemerintah Daerah		4,54	A (Sangat Baik)

Dalam pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kategori nilai kinerja Unit Pelayanan Publik (UPP) didukung oleh program sebagai berikut:

Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD dengan nilai AKIP minimal BB	100	100	100	672.983.700	490.624.066	72,90
2. Program Pelayanan Penanaman Modal	Cakupan Pemenuhan aspek Pelayanan Publik (Aspek)	6	6	100	1.084.881.836	995.391.546	91,75
	Persentase usaha risiko tinggi yang berizin	100	100	100			
3. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase jumlah pengguna layanan Perizinan dan Non Perizinan telah memenuhi kewajiban pajak	100	100	100	31.894.400	25.750.000	80,74



Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pemenuhan pemberian Insentif dan kemudahan berusaha Penanaman Modal	100	100	100	419.973.300	390.574.678	93,00
	Persentase Regulasi Penanaman Modal/ Investasi yang selaras dengan UUCK	100	100	100			
5. Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepala Keluarga yg memiliki KK	100	97	97	226.844.600	222.901.200	98,26
	Persentase Penduduk yang memiliki KTP	100	98	98			
6. Program Pencatatan Sipil	Persentase Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran	100	98	98	133.602.000	132.769.000	99,38
	Persentase Penduduk yang memiliki Akta Kematian	100	100	100			
7. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Indeks Kualitas Pelayanan Publik	4,25	4,47	105,17	139.171.000	112.461.000	80,81
	Predikat Zona Integritas	75	60	80			

SASARAN 16 : MENINGKATNYA KINERJA KEUANGAN DAN KINERJA BIROKRASI

Capaian kinerja Sasaran Strategis 16 pada **Tujuan V : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi** ditunjang oleh Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut :



INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN
Opini WTP BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	100
Indeks Profesionalisme ASN	78,12	59,75	76,48
Rata-rata Capaian			88,24

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja sasaran diatas, dapat diambil rerata kesimpulan bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya kinerja keuangan dan kinerja birokrasi adalah Baik atau tercapai 88,24%.

Pada indikator kinerja sasaran Opini WTP BPK terhadap LKPD dari target WTP, terealisasi WTP atau tercapai 100 % yang berarti Sangat Baik atau Tercapai sebesar 100,67%. Sedangkan pencapaian Indeks profesionalisme ASN pada tahun 2022 belum dapat mencapai target yang diinginkan, dari target 78,12 Indeks profesionalisme ASN dimana realisasi di tahun 2022 hanya sebesar 59,75 atau tercapai 76,48% dengan kategori Baik.

Opini WTP BPK terhadap LKPD

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 dan target RPJMD tahun 2022 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI					TARGET RPJMD
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Opini WTP BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pencapaian indikator Opini Audit Eksternal dari BPK pada tahun 2022 telah tercapai, dari target penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dimana realisasi di tahun 2022 ini Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mendapatkan penilaian dari hasil audit BPK RI dengan kategori Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). BPK R.I telah melakukan audit dan hasilnya disampaikan pada Tanggal 13 Mei 2022 dengan predikat Laporan Keuangan Daerah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).



Apabila dilihat dari tabel diatas, Capaian indikator Opini Audit Eksternal di tahun 2022 mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang mana capaian Tahun 2022 ini adalah dalam mempertahankan opini yang sudah diraih sejak tahun 2014. Capaian opini WTP pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini merupakan yang ke tujuh ditetapkan oleh audit BPK dari seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Keberhasilan ini tak lepas dari faktor pendukung seperti halnya :

- a. Laporan keuangan yang semakin baik dan tepat waktu dari semua SKPD.
- b. Pembinaan dan pengawasan dari inspektorat kabupaten hulu sungai selatan yang lebih optimal, serta
- c. Terlaksananya SPIP (sistem pengendalian internal pemerintah) yang lebih baik.

Pencapaian indikator kinerja sasaran di atas juga tidak terlepas dari dukungan program-program dan kegiatan utama yang dilaksanakan selama tahun 2022 yaitu melalui :

Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Kesesuaian Program dan Kegiatan KUA PPAS terhadap RKPD	100	100	100	206.808.567.119	194.676.889.936	94,13
	Ketepatan Waktu proses Penyusunan dokumen RAPBD sesuai standar yang berlaku	100	100	100			
	Persentase waktu Penyelesaian SP2D yang tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100	100	100			
	Persentase Laporan Keuangan Pemda yang disusun tepat waktu dan isinya sesuai ketentuan yang berlaku	100	100	100			



LPPD Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai standar dan Ketentuan	100	92,67	92,67	1.767.990.550	766.692.360	43,37
3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah	100	80,61	80,61	1.235.067.000	986.522.800	79,88
	Persentase jenis Pajak Daerah yang menerapkan elektronifikasi transaksi pendapatan daerah	81,82	100,89	123,31			
	Persentase piutang pajak yang berhasil tertagih	100	99,41	99,41			
4. Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Penurunan temuan bersifat keuangan hasil pemeriksaan inspektorat Kab. HSS	100	100	100	1.177.682.500	1.058.372.500	89,87
	Persentase penurunan temuan eksternal yang menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah	100	100	100			
	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan inspektorat dalam periode tertentu	100	100	100			
	Persentase penyelesaian rekomendasi pihak eksternal yang ditindaklanjuti dalam periode tertentu	100	93,02	93,02			
5. Program Perumusan	Persentase Penanganan Kasus	100	100	100	1.154.339.100	940.542.931	81,48



Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Pengaduan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan						
6. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase pengendalian program pembangunan daerah	84	100	119,05	549.977.250	440.272.800	80,05
7. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan yang sesuai dengan Target Perencanaan	100	100	100	239.439.800	167.877.606	70,11
8. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	61,83	61,83	100	269.161.500	263.221.900	97,79

Indeks Profesionalisme ASN

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dan target RPJMD tahun 2022 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI					TARGET RPJMD
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Profesionalisme ASN	49,04	54,48	54,98	55,34	59,75	81,33



Indeks Profesionalitas ASN merupakan salah satu cara mengukur profesionalisme ASN. Pengukuran dihitung dari data-data kualifikasi pendidikan, kompetensi, sasaran kerja pegawai (SKP) dan disiplin PNS.

Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Hulu Sungai Selatan menargetkan Indeks Profesionalitas ASN tahun 2022 sebesar 78,12% dengan melaksanakan teknik pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk. III, Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk. IV, Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS Daerah, Pembinaan dan Pengembangan Pola Karier Aparatur dan Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah.

Pencapaian indikator kinerja sasaran di atas juga tidak terlepas dari dukungan program-program dan kegiatan utama yang dilaksanakan selama tahun 2022 yaitu melalui :

Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1. Program Kepegawaian Daerah	Persentase CASN yang diangkat menjadi ASN sesuai formasi jabatan dan unit kerja yang dilamar	100	100	100	2.630.836.150	1.705.252.964	64,82
	Presentase ASN yang menduduki jabatan sesuai dengan kompetensinya	100	100	100			
	Persentase pengisian JPT melalui seleksi terbuka	100	60	60			
	Presentase regulasi pelaksanaan Merit Sistem yang telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku	100	100	100			



LPPD Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
	Persentase pengisian JPT dan Jabatan Administrator dari hasil assesment	8,26	8,26	100			
	Persentase ASN yang nilai SKP-nya berkriteria baik	100	99,83	99,83			
	Persentase SKP yang mendukung kinerja organisasi	100	100	100			
	Persentase ASN yang tidak melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang dan berat	100	99,96	99,96			
2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki Sertifikat Pelatihan Kompetensi Teknis dan Kompetensi Fungsional	67,57	63,32	93,71			
	Persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki Sertifikat Pelatihan Kompetensi Manajerial	91,22	90,84	99,58			
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD dengan nilai AKIP minimal BB	100	100	100	672.983.700	490.624.066	72,90

**SASARAN 17 : MENINGKATNYA PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI DAERAH**

Capaian kinerja Sasaran Strategis 17 pada **Tujuan V : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi** ditunjang oleh 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN
Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan teknologi informasi dengan baik	92,11	92,30	100
Persentase pemerintah desa yang menggunakan teknologi informasi dalam pemberian layanan	31,25	31,25	100
Rata-rata Capaian			100

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja sasaran diatas, dapat diambil rerata kesimpulan bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya penggunaan sistem informasi daerah adalah Sangat Baik atau Tercapai sebesar 100%.

Pencapaian indikator Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan teknologi informasi dengan baik pada tahun 2022 telah tercapai, dari target 92,11% perangkat daerah yang mengimplementasikan teknologi informasi dengan baik dimana terealisasi 92,30% di tahun 2022, atau Tercapai 100%. Pencapaian indikator Persentase pemerintah desa yang menggunakan teknologi informasi dalam pemberian layanan pada tahun 2022 telah tercapai, dari target 31,25% perangkat daerah yang mengimplementasikan teknologi informasi dengan baik dimana terealisasi 31,25% di tahun 2022, atau Tercapai dengan 100%.



Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan teknologi informasi dengan baik

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dan target RPJMD tahun 2023 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI					TARGET RPJMD
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan teknologi informasi dengan baik	7,89	21,05	60,53	65,79	92,30	100

Pencapaian indikator kinerja sasaran di atas juga tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2022 yaitu melalui:

Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1. Program Aplikasi Informatika	Persentase tata kelola pemerintahan berbasis elektronik yang mencapai level 3 (transaksi)	89	89	100	4.472.892.312	4.193.252.260	93,75
	Persentase pelayanan publik berbasis elektronik yang mencapai level 3 (transaksi)	83	83	100			
2. Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase informasi publik Pemerintah Kab.HSS yang terpublikasikan melalui media cetak, media eletronik dan media sosial dengan cepat, akurat dan mudah diakses	100	100	100	4.315.656.160	4.176.392.790	96,77



Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	persentase ketersediaan data sektoral sesuai SDI persentase ketersediaan data sektoral sesuai SDI	100	100	100	93.649.000	85.755.438	91,57

Persentase pemerintah desa yang menggunakan teknologi informasi dalam pemberian layanan

INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI					TARGET RPJMD
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase pemerintah desa yang menggunakan teknologi informasi dalam pemberian layanan	0,60	9,03	15,97	23,61	31,25	38,88

Tuntutan pembangunan modern memaksa pemerintah beradaptasi dengan teknologi informasi. Sehingga pelayanan dengan berbasis teknologi informasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi. Hal ini mampu mengakomodir belum optimalnya pelayanan publik serta paradigma mainstream masyarakat yaitu urusan pelayanan di pemerintah daerah sangat birokratif dan berbelit.

Pengukuran terhadap pemerintah desa yang menggunakan teknologi informasi dalam pemberian layanan dilakukan secara mandiri oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ke Desa-Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Desa merupakan bagian wilayah pemerintahan terkecil di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka wajah dan kualitas pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tercermin dari kualitas pelayanan di Desa selaku lembaga pemerintah pada level paling bawah. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi atas pelayanan pemerintah desa sampai dengan tahun



2022 terdapat 23 Desa dari 144 desa yang ada di wilayah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang menerapkan penggunaan Teknologi Informasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yaitu melalui aplikasi berbasis komputer yaitu :

1. Desa Muning Baru
2. Desa Bamban Utara
3. Desa Bamban
4. Desa Banjarbaru
5. Desa Pihanin Raya
6. Desa Gambah Luar Muka
7. Desa Tibung Raya
8. Desa Kapuh
9. Desa Amawang Kanan
10. Desa Sungai Paring
11. Desa Amawang Kiri
12. Desa Sungai Kupang
13. Desa Telaga Langsung
14. Desa Samuda
15. Desa Pandan Sari
16. Desa Tambangan
17. Desa Murung Raya
18. Desa Paramaian
19. Desa Banua Hanyar
20. Desa Bakarung
21. Desa Baluti
22. Desa Simpur
23. Desa Amawang Kiri Muka
24. Desa Teluk Haur
25. Desa Tawia
26. Desa Pandulangan
27. Desa Pantai Ulin
28. Desa Baruh Jaya



29. Desa Balah Paikat
30. Desa Hamalau
31. Desa Tambak Bitin
32. Desa Hamayung Utara
33. Desa Hakurung
34. Desa Muning Tengah
35. Desa Malutu
36. Desa Batang Kulur Kiri
37. Desa Tumingki
38. Desa Wasah Hulu
39. Desa Balanti
40. Desa Lokbinuang
41. Desa telaga Sili-sili
42. Desa Pandan Sari
43. Desa Pandak Daun
44. Desa Bajayau Tengah
45. Desa Gambah Luar

Cara pengukuran Realisasi Capaian indikator Kinerja Sasaran Persentase pemerintah desa yang menggunakan teknologi informasi dalam pemberian layanan sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA SASARAN	FORMULASI/ PENJELASAN	KET
Persentase pemerintah desa yang menggunakan teknologi informasi dalam pemberian layanan	$\frac{\sum \text{Desa yang menggunakan aplikasi TI}}{\sum \text{Desa Se - Kab. HSS}} \times 100$	$\frac{45 \times 100}{31,25} = 144$

Pemerintah Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang menggunakan Teknologi Informasi dalam Pemberian Pelayanan Tahun 2019-2022 adalah sebagai berikut :



Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022
Jumlah Desa yang menggunakan Teknologi Informasi dalam Pemberian Pelayanan	13	23	34	45
Jlh Desa se Kab.HSS	144	144	144	144
Persentase	9,03%	15,97%	23,61%	31,25%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. HSS

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa perkembangan jumlah desa yang menggunakan IT cukup baik, dengan penambahan sebanyak 11 Desa dari kondisi tahun 2020 dan 11 Desa dari kondisi tahun 2021.

Meskipun Jumlah Desa yang menggunakan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan pada tahun 2022 telah mencapai target yang ditetapkan, namun masih banyak desa yang belum menggunakan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan, hal ini dikarenakan adanya beberapa kondisi yang menyebabkan pencapaiannya lambat, antara lain dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Lemahnya SDM Perangkat Desa dalam penggunaan IT;
- b. Jaringan internet yang belum menjangkau seluruh desa; dan
- c. Keterbatasan sarana prasarana pelayanan.

Adapun upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan penggunaan IT pelayanan di Desa antara lain :

- a. Penyediaan sarana prasarana pelayanan dan jaringan internet yang memadai di Kantor Desa menggunakan anggaran keuangan Desa;
- b. Melakukan kerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam memberikan pembinaan;
- c. Melaksanakan pembinaan terhadap Perangkat Desa dalam pengelolaan pelayanan di desa; dan
- d. Memaksimalkan kegiatan monitoring dan evaluasi ke desa.

Adapun program di Dinas PMD untuk mendukung pencapaian indikator tersebut yaitu melalui Program Pembinaan dan Pelayanan Pemerintahan Desa dengan indikator kinerja program yaitu persentase pemerintah desa/ kelurahan yang berkinerja baik, dengan Kriteria sebagai berikut :



- a. Melaksanakan administrasi Desa dengan tertib;
- b. Memiliki perencanaan keuangan dan pembangunan desa yang baik;
- c. Pelaporan keuangan desa yang akuntabel; dan
- d. Pelaporan Penyelenggaraan pemerintahan desa tepat waktu.

Upaya meningkatkan persentase pemerintah desa yang menggunakan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan disamping melalui pelaksanaan program yang ada pada Dinas PMD juga didukung oleh kegiatan yang dianggarkan pada APBDes, antara lain melalui penyediaan sarana prasarana konektivitas internet.

Secara rinci Pencapaian indikator kinerja sasaran di atas juga tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2022 yaitu melalui :

Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1. Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Kesesuaian RKPDes Terhadap RPJMDes	100	100	100	328.726.600	287.592.450	87,49
2. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Desa Sehat Sejahtera	60,42	60,42	100	716.628.700	623.390.994	86,99
	Persentase Desa Layak Air Bersih Dan Sanitasi	60,42	60,42	100			

**2.3.4. Akuntabilitas Keuangan**

Serapan anggaran dikaitkan dengan capaian kinerja pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2022 sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.33

CAPAIAN KINERJA DAN SERAPAN ANGGARAN TAHUN 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN		% CAPAIAN KINERJA	SERAPAN ANGGARAN (%)
Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar lainnya				
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	97,08	96,13
	2	Harapan lama sekolah	93,30	
	3	Rata-rata lama sekolah	92,30	
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	4	Angka Harapan Hidup	98,52	86,07
Tercukupinya ketersediaan pangan yang beragam dan aman	5	PPH Ketersediaan	100,42	96,02
Meningkatnya pelayanan dasar bagi masyarakat	6	Persentase capaian perangkat daerah dalam menerapkan SPM	134,78	96,98
Rata-rata Capaian Tujuan 1			102,73	93,80
Tujuan 2 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif yang berdampak terhadap angka kemiskinan				



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN		% CAPAIAN KINERJA	SERAPAN ANGGARAN (%)
Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah	7	Tingkat kemiskinan (persentase penduduk miskin)	100,00	94,36
	8	Indeks Gini	113,04	
Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	9	Tingkat pengangguran terbuka	84,92	84,82
Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	10	Laju pertumbuhan ekonomi	63,01	82,44
	11	Laju pertumbuhan ekonomi kategori industri pengolahan	94,42	
	12	Laju pertumbuhan ekonomi kategori perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	146,85	
	13	Laju pertumbuhan ekonomi kategori pertanian, kehutanan dan perikanan	-9,96	
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	14	Peningkatan retribusi dan pajak daerah	91,88	79,88
Meningkatnya investasi PMDN	15	Persentase peningkatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	139,33	88,50
Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata dan kebudayaan bagi masyarakat	16	Tingkat Pengeluaran Wisatawan (Spending of money)	186,78	91,88
Rata-rata Capain Tujuan 2			101,03	86,98



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN		% CAPAIAN KINERJA	SERAPAN ANGGARAN (%)
Tujuan 3 : Meningkatkan infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas				
Meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas	17	Persentase Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang berkualitas	126,17	82,42
	18	Persentase kondisi jalan baik dengan kecepatan ≥ 40 Km/jam	105,75	
	19	Persentase kinerja sistem jaringan irigasi	101,99	
	20	Persentase kecukupan sarana dan prasarana publik	99,67	
	21	Persentase kecukupan RTH publik	99,75	
	22	Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas	79,97	
Rata-rata Capaian Tujuan 3			102,22	82,42
Tujuan 4 : Meningkatkan sumber daya daerah dan kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan				
Meningkatnya kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat	23	Indeks Desa Membangun (IDM)	105,13	91,38
Meningkatnya pemberdayaan responsif gender dan perlindungan terhadap anak	24	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	99,05	75,36
	25	Persentase desa/ kelurahan layak anak	100	



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN		% CAPAIAN KINERJA	SERAPAN ANGGARAN (%)
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	26	Indeks kualitas lingkungan hidup	97,75	52,77
Rata-rata Capaian Tujuan 4			100,37	73,17
Tujuan 5 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi				
Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas pelayanan public	27	Indeks Reformasi Birokrasi	84,88	86,54
	28	Predikat AKIP	101,75	
	29	Kategori nilai kinerja Unit Pelayanan Publik (UPP)	100,67	
Meningkatnya kinerja keuangan dan kinerja birokrasi	30	Opini WTP BPK terhadap LKPD	100	76,61
	31	Indeks profesionalisme ASN	76,48	
Meningkatnya penggunaan sistem informasi daerah	32	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan teknologi informasi dengan baik	100,21	91,31
	33	Persentase pemerintah desa yang menggunakan teknologi informasi dalam pemberian layanan	100	
Rara-rata Capaian Tujuan 5			94,86	84,82



BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi. Disamping itu, sebagai konsekuensi negara kesatuan memang tidak dimungkinkan semua wewenang pemerintah didesentralisasikan dan diotonomkan sekalipun kepada daerah. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada wilayah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi. Gubernur sebagai kepala daerah provinsi berfungsi pula selaku wakil Pemerintah di daerah, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah kabupaten dan kota.

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/ atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan. Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas



pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.

Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada daerah dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas Pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh daerah dan/atau desa akan lebih efisien dan efektif. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi sebagai daerah otonom kepada kabupaten/kota dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas provinsi, antara lain dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta sebagian tugas pemerintahan dalam bidang tertentu lainnya, termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten dan kota. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada desa mencakup sebagian tugas-tugas kabupaten/kota di bidang pemerintahan yang menjadi wewenang kabupaten/kota.

Penyelenggaraan ketiga asas sebagaimana diuraikan tersebut di atas memberikan konsekuensi terhadap pengaturan pendanaan. Semua urusan pemerintahan yang sudah diserahkan menjadi kewenangan pemerintah daerah harus didanai dari APBD, sedangkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah harus didanai dari APBN melalui bagian anggaran kementerian/lembaga. Pengaturan pendanaan kewenangan Pemerintah melalui APBN mencakup pendanaan sebagian urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan kepada gubernur



berdasarkan asas dekonsentrasi, dan sebagian urusan pemerintahan yang akan ditugaskan kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan asas tugas pembantuan serta terdapat Urusan Bersama Pusat dan Daerah yang diselenggarakan bersama oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dananya bersumber dari APBN (Dana Urusan Bersama) dan dari APBD (Dana Daerah Urusan Bersama). Pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan diatur dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 92, Pasal 99, dan Pasal 108 Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sedangkan Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah (lingkup PNPM-MP) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor.168 /PMK.07/2009.

Berdasarkan pola pertanggungjawaban dan pelaporan penyelenggaraan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008, maka yang menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten / Kota hanyalah pelaporan tugas pembantuan dan urusan bersama.

3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota

3.1.1. Target Kinerja

Tahun Anggaran 2022 Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan mendapatkan Dana Tugas Pembantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan dasar pelaksanaan penugasan (TP) Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2022 Satker 018.08.159114 pada Program Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian dengan pagu Rp. 1.075.970.000,- dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:



Tabel 3.1
Target Kinerja Tugas Pembantuan Pusat yang diterima

NO	PEKERJAAN	TARGET	
		JUMLAH	SATUAN
1	RJIT (Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier)	7	unit
2	Irigasi Perpompaan	1	unit

3.1.2. Realisasi

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan serta anggaran Tugas Pembantuan yang diterima dari Kementerian Pertanian Tahun 2022 untuk Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana program dan kegiatan di atas dapat dirincikan pada tabel berikut :



Tabel 3.2
Realisasi Pelaksanaan program dan kegiatan Tugas Pembantuan

No	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kementerian Pertanian	Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2021 Satker 018.08.159114	Program Prasarana dan Sarana Pertanian		Dinas Pertanian Kab. HSS						
			Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian								
			Penerima bantuan parasarana dan sarana :								
			RJIT (Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier)	Kec. Sungai Raya, Kec. Padang Batung Kec. Telaga Langsat		525.000.000	525.000.000	100	7 unit	100	
			Irigasi Perpompaan	Kec. Simpur		880.000.000	880.000.000	100	1 unit	100	



3.2. Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota

3.2.1. Target Kinerja

Tugas Pembantuan yang diterima dari Provinsi Kalimantan Selatan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil dan Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Kawasan Padi. Kabupaten Hulu Sungai Selatan hanya menerima barang dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan untuk dibagikan kepada masyarakat penerima. Target dari penerimaan barang tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Target Kinerja Penerimaan Tugas Pembantuan
dari Provinsi Kalimantan Selatan

NO	PEKERJAAN	TARGET	
		JUMLAH	SATUAN
1	Budidaya Rawa	405	Ha
2	IP 400	40	Ha
3	Pengembangan Padi Inbrida	3.000	Ha
4	Pengembangan Padi Lahan Kering	125	Ha



3.2.2. Realisasi

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan serta anggaran Tugas Pembantuan yang diterima Tahun 2022 untuk Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana program dan kegiatan di atas dapat dirincikan pada tabel berikut :

Tabel 3.4

Realisasi Penerimaan Tugas Pembantuan Dari Provinsi Kalimantan Selatan

No	BIDANG URUSAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Urusan Pertanian dan Tanaman Pangan	Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun Anggaran 2022	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil		Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalsel						
			Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Kawasan Padi								
			Belanja Barang Bantuan Langsung Untuk								



LPPD Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

No	BIDANG URUSAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KET
			Diserahkan Kepada :								
			Budidaya Rawa	Kec. Daha Barat, Daha Utara, Daha Selatan	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provisi Kalimantan Selatan		405 Ha	100	405 Ha	100	1 Ha menerima bantuan 25 kg Benih Padi
			IP 400	Kec. Padang Batung			40 Ha	100	40 Ha	100	
			Padi Inbrida Sawah	Kec. Angkinang, Daha Barat, Telaga Langsat, Padang Batung, Simpung, Kalumpang, Kandangan, Sungai Raya			3.000 Ha	100	3.000 Ha	100	
			Pengembangan Padi Lahan Kering	Kec. Loksado			125 Ha	100	125 Ha	100	



3.3. Permasalahan dan Kendala

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, pada pasal 39 dinyatakan bahwa rumusan pemberian Tugas Pembantuan yang akan ditugaskan ke daerah ditetapkan oleh kementerian dan lembaga di pusat dan dibahas pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). Namun kondisi saat ini menunjukkan pada aspek perencanaan, belum semua Kementerian / Lembaga menyampaikan informasi awal pagu indikatif Tugas Pembantuan, program/kegiatan (DIPA) yang sudah jadi/final, termasuk dalam hal Petunjuk Operasional Keegiatannya (POK), sehingga mengakibatkan seringnya ditemui kesulitan dalam pelaksanaannya dilapangan.

3.4. Saran dan Tindak Lnjut

Proaktif dengan melakukan konsultasi ke eselon I Kementerian / Lembaga dan mempedomani petunjuk teknis pelaksanaan pekerjaan dan pedoman terkait lainnya.



BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Penyelenggaraan pelayanan yang menyangkut masyarakat sebagai pelayanan publik tidak luput dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Pencapaian kinerja pelayanan publik sering kali terkendala akibat adanya variasi dalam penyelenggaraan atau proses pelayanan. Salah satu upaya untuk mengurangi variasi proses tersebut adalah dengan melakukan standarisasi. Salah satu standar pelayanan yang telah disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah adalah Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 pasal 4 ayat (1) bahwa jenis SPM terdiri atas 6 Jenis Pelayanan Dasar (6 SPM) sebagai berikut:

1. Bidang Urusan Pendidikan;
2. Bidang Urusan Kesehatan;
3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum;
4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;



5. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan
6. Bidang Urusan Sosial.

4.1 Bidang Urusan Pendidikan

Bidang Urusan Pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM-nya) oleh Pemerintah. Isi muatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan terdiri dari:

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, Jenis pelayanan dasar urusan Pendidikan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- 1) Pendidikan Anak Usia Dini
- 2) Pendidikan Dasar
- 3) Pendidikan Kesetaraan

4.1.2 Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

Pelayanan SPM Bidang Urusan Pendidikan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 meliputi :

1. Jenis dan Penerima Pelayanan Dasar
2. Mutu Pelayanan Dasar
3. Pemenuhan SPM urusan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah



1.1 Jenis dan Penerima Pelayanan Dasar

a. Pendidikan Anak Usia Dini

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini merupakan peserta didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

b. Pendidikan Dasar, meliputi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah pertama.

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan dasar dan sekolah menengah pertama merupakan peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.

c. Pendidikan Kesetaraan

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan kesetaraan merupakan peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

2.1 Mutu Pelayanan Dasar

Mutu Pelayanan Dasar urusan Pendidikan, meliputi :

- 1). Perlengkapan Dasar Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini, meliputi :

No.	Kualitas Barang dan atau Jasa
1.	Buku gambar
2.	Alat mewarnai
3.	Penyediaan biaya personil Peserta Didik
4.	Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV
5.	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV



2). Perlengkapan Dasar Peserta Didik Sekolah Dasar, meliputi :

No	Kualitas Barang dan atau Jasa
1.	Buku teks pelajaran
2.	Perlengkapan belajar
3.	Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV
4.	Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat
5.	Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan
6.	Penyediaan biaya personil peserta didik
7.	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV
8.	Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C

3). Perlengkapan Dasar Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan, meliputi :

No	Kualitas Barang dan atau Jasa
1.	Modul belajar
2.	Jumlah rombongan belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
3.	Penyediaan biaya personil peserta didik
4.	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV
5.	Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV
6.	Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat
7.	Perlengkapan belajar
8.	PKBM Terakreditasi minimal C

2.2 Pemenuhan SPM Pendidikan oleh Pemerintah Daerah

Sesuai dengan Permendagri 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal menyebutkan bahwa Target dan Indikator Capaian Standar Pelayanan Minimal



(SPM) Bidang Pendidikan telah ditentukan (lihat tabel 2.2.1)
yaitu :

Tabel 2.2.1

Target dan Indikator Capaian SPM
Bidang Urusan Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Mutu Pelayanan	Target Capaian SPM
1	2	3		5
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		7.087
			Buku gambar	7.087
			Alat mewarnai	7.087
			Penyediaan biaya personil Peserta Didik	7.087
			Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	299
			Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	800
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar		23.274
			Buku teks pelajaran	23,274
			Perlengkapan belajar	23,274
			Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	252
			Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga	11



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Mutu Pelayanan	Target Capaian SPM
			Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	
			Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	1,708
			Penyediaan biaya personil peserta didik	23,274
			Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	1,909
			Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C	252
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		4,837
			Modul belajar	4,837
			Jumlah rombongan belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	106
			Penyediaan biaya personil peserta didik	4,837
			Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	247
			Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	15



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Mutu Pelayanan	Target Capaian SPM
			Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	15
			Perlengkapan belajar	4,837
			PKBM Terakreditasi minimal C	15



4.1.3 Realisasi

Realisasi Capaian Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada table berikut:

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3			4
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	TUNTAS MADYA			98,27%
1 .	Pendidikan Dasar Usia Dini				96.57 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	80.00 %
		Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
	Jumlah yang Harus Dilayani :	7,087	7,087	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				16.57 %



		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase capaian mutu 100%
		1	2	3	4
	1 . Buku gambar	7,087	7,087	0	100.00 %
	2 . Alat mewarnai	7,087	7,087	0	100.00 %
	3 . Penyediaan biaya personil Peserta Didik	7,087	7,087	0	100.00 %
	4 . Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	299	164	135	54.85 %
	5 . Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	800	475	325	59.38 %
2 .	Pendidikan Dasar				99.94 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	80.00 %
		Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
	Jumlah yang Harus Dilayani :	23,274	23,274	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				19.94 %



		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	99.72 %
		1	2	3	4
	1 . Buku teks pelajaran	23,274	23,274	0	100.00 %
	2 . Perlengkapan belajar	23,274	23,274	0	100.00 %
	3 . Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	252	252	0	100.00 %
	4 . Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	11	11	0	100.00 %
	5 . Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	1,708	1,708	0	100.00 %
	6 . Penyediaan biaya personil peserta didik	23,274	23,274	0	100.00 %
	7 . Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	1,909	1,874	35	98.17 %



	8 . Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C	252	251	1	99.60 %
3 .	Pendidikan Kesetaraan				98.31 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	80.00 %
		Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
	Jumlah yang Harus Dilayani :	4,837	4,837	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				18.31 %
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	91.56 %
		1	2	3	
	1 . Modul belajar	4,837	4,837	0	100.00 %
	2 . Jumlah rombongan belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	106	106	0	100.00 %
	3 . Penyediaan biaya personil peserta didik	4,837	4,837	0	100.00 %



	4 . Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	247	146	101	59.11 %
	5 . Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	15	13	2	86.67 %
	6 . Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	15	15	0	100.00 %
	7 . Perlengkapan belajar	4,837	4,837	0	100.00 %
	8 . PKBM Terakreditasi minimal C	15	13	2	86.67 %



4.1.4 Alokasi Anggaran

Dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan yang dilakukan setiap tahun ini tidak terlepas dari adanya dukungan sumber daya keuangan khususnya anggaran yang berkaitan langsung dengan pencapaian setiap indikator SPM. Program dan kegiatan yang langsung berkaitan dengan penerapan dan pencapaian seluruh indikator SPM ini terdapat pada program Alokasi Anggaran sebesar **Rp. 36.086.522.925,00** dengan Realisasi Anggaran sebesar **Rp. 30.743.191.784,00** dengan capaian sebesar **85,17%**.

Tabel 4.7
Alokasi Anggaran SPM Bidang Pendidikan

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	2	3	4		6	7	
	KAB. HULU SUNGAI SELATAN				18,946,229,950	17,424,995,935	91.97 %
1	PROGRAM SPM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI				5,105,356,900	4,822,685,590	94.46 %
	1	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD K20220131030517			4,159,200,000	4,159,200,000	100.00 %
		1	Pendataan anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tampung layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun	Peserta didik	0	0	0%
		2	Penyelenggaraan sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali per tahun	Kegiatan	0	0	0%
		3	Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu)	Peserta didik	0	0	0%



			kali dalam 6 (enam) bulan					
		4	Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap desa	Peserta didik	4,159,200,000	4,159,200,000	100.00 %	
		5	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik	0	0	0%	
		6	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik	0	0	0%	
	JUMLAH INDIKATOR					4,159,200,000	4,159,200,000	100.00 %
	2	Kegiatan Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan K20220131030758			946,156,900	663,485,590	70.12 %	
		1	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan	0	0	0%	
		2	Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan	0	0	0%	
		3	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan pendidikan anak usia dini yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan	0	0	0%	
		4	Pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana satuan pendidikan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan	0	0	0%	



		5	Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak	Kegiatan	946,156,900	663,485,590	70.12 %
	JUMLAH INDIKATOR				946,156,900	663,485,590	70.12 %
	3	Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD) K20220131030938			0	0	0.00 %
		1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan	0	0	0%
		2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	0	0	0%
		3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru	0	0	0%
		4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan	0	0	0%
		5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan	0	0	0%
		6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan	0	0	0%
		7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah atau penilik untuk satuan pendidikan anak usia dini		0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0.00 %



	4	Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD) K20220131031456			0	0	0	0.00 %
		1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan	0	0	0	0%
		2	Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	0	0	0	0%
		3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan	0	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0	0.00 %
	JUMLAH PROGRAM				5,105,356,900	4,822,685,590	0	94.46 %
2	PROGRAM SPM PENDIDIKAN DASAR				8,071,728,050	7,075,705,895	0	87.66 %
	5	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B) K20220131031634			333,763,500	333,763,500	0	100.00 %
		1	Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta didik	0	0	0	0%
		2	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta didik	333,763,500	333,763,500	0	100.00 %
		3	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik	0	0	0	0%
		4	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah	Peserta didik	0	0	0	0%



			terdepan, terluar, dan tertinggal				
	JUMLAH INDIKATOR				333,763,500	333,763,500	100.00 %
	6	Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B) K20220131031749			125,075,800	113,417,350	90.68 %
		1	Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	Unit komunitas	99,327,200	96,303,750	96.96 %
		2	Pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan	25,748,600	17,113,600	66.46 %
	JUMLAH INDIKATOR				125,075,800	113,417,350	90.68 %
	7	Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B) K20220131032010			7,593,769,550	6,610,567,895	87.05 %
		1	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan	0	0	0%
		2	Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan	0	0	0%
		3	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan	7,437,417,050	6,466,226,395	86.94 %
		4	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan	Kegiatan	156,352,500	144,341,500	92.32 %



			budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran				
JUMLAH INDIKATOR					7,593,769,550	6,610,567,895	87.05 %
8	Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B) K20220131032146			0	0	0.00 %	
	1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan	0	0	0%	
	2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Guru	0	0	0%	
	3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru	0	0	0%	
	4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan	0	0	0%	
	5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan	0	0	0%	
	6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan	0	0	0%	
	7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan		0	0	0%	



	JUMLAH INDIKATOR			0	0	0.00 %
9	Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B) K20220131032556			19,119,200	17,957,150	93.92 %
	1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan	0	0	0%
	2	Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	0	0	0%
	3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan	19,119,200	17,957,150	93.92 %
	JUMLAH INDIKATOR			19,119,200	17,957,150	93.92 %
	JUMLAH PROGRAM			8,071,728,050	7,075,705,895	87.66 %
3	PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN			5,769,145,000	5,526,604,450	95.80 %
	10	Kegiatan Pemenuhan Layanan Dasar SPM (Kesetaraan) K20220321023938		5,769,145,000	5,526,604,450	95.80 %
	1	Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta didik	2,113,445,000	1,870,904,450	88.52 %
	2	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta didik	3,655,700,000	3,655,700,000	100.00 %
	3	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik	0	0	0%



		4	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik	0	0	0%
JUMLAH INDIKATOR					5,769,145,000	5,526,604,450	95.80 %
11	Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Hasil Belajar Peserta Didik (Kesetaraan) K20220321024011				0	0	0.00 %
		1	Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	Unit komunitas	0	0	0%
		2	Pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan	0	0	0%
JUMLAH INDIKATOR					0	0	0.00 %
12	Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Layanan (Kesetaraan) K20220321024025				0	0	0.00 %
		1	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan	0	0	0%
		2	Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan	0	0	0%
		3	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan	0	0	0%
		4	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan	Kegiatan	0	0	0%



			budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran				
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0.00 %
	13	Pemenuhan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kesetaraan) K20220321024044			0	0	0.00 %
		1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan	0	0	0%
		2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	0	0	0%
		3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru	0	0	0%
		4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan	0	0	0%
		5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan	0	0	0%
		6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan	0	0	0%
		7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan		0	0	0%



	JUMLAH INDIKATOR			0	0	0.00 %
14	Pemenuhan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kesetaraan) K20220321024123			0	0	0.00 %
	1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan	0	0	0%
	2	Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	0	0	0%
	3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR			0	0	0.00 %

Untuk Program Pengelolaan Pendidikan Untuk Seksi Sarana dan Prasarana PUAD, SD, & Pendidikan Kesetaraan seluruhnya sudah hampir mencapai 100% dan fisiknya semua sudah 100% terlaksana. Adapun realisasi yang tidak mencapai 100% dikarenakan memang ada sisa anggaran sisa lelang/tender. Untuk Seksi Minat Bakat SD Sudah terlaksana seluruhnya.

Untuk Seksi Tendik SD ada satu kegiatan yang tidak bisa terlaksana yaitu kegiatan seleksi kepala sekolah dan pengawas sekolah ini karena terbentur dengan aturan baru yang mengharuskan seleksinya melalui guru & kepala sekolah penggerak, sedangkan di kab. HSS belum ada yang memenuhi syarat tersebut,



sedangkan untuk kegiatan BOS SMP kegiatannya sebenarnya sudah terlaksana, namun untuk hasil realisasinya masih belum semua bisa di tampilkan karena menunggu update simda. Dari hasil realisasi keseluruhan itu belum semuanya dapat ditampilkan karena masih ada data yang belum update di simda, sehingga hasil realisasi program pengelolaan pendidikan masih belum memenuhi target.

4.1.5. Dukungan Personil

Peran serta Sumber Daya Manusia (SPM) sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan SPM akan memberikan kontribusi yang besar dalam pencapaian target dari SPM. Berikut ini adalah dukungan personil yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan :

Tabel 4.8

Personil Urusan Pendidikan dan Kebudayaan

Keadaan Pegawai Urusan Pendidikan (Tidak termasuk Guru)										
Struktural					Fungsional			Jumlah		
Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Pelaksana						
-	1	5	-	30	47			83		
Keadaan Pegawai Urusan Pendidikan (Pendidik dan Tenaga Kependidikan)										
No	Wilayah	TK	KB	TPA	SPS	PKBM	SKB	SD	SMP	Total
1	Kec. Kandangan	25	22	4	4	2	7	139	50	349
2	Kec. Daha Selatan	13	9	0	2	0	0	76	26	144
3	Kec. Padang Batung	17	8	0	2	1	0	85	24	137
4	Kec. Daha Utara	17	10	0	1	0	0	53	19	114
5	Kec. Simpur	16	6	1	0	0	0	62	7	105
6	Kec. Angkinang	13	8	0	0	2	0	59	10	101
7	Kec. Sungai Raya	11	7	0	1	0	0	64	16	100
8	Kec. Telaga Langsat	9	7	0	0	1	0	51	13	83
9	Kec. Loksado	4	12	0	0	1	0	20	11	56
10	Kec. Kalumpang	4	6	0	0	0	0	26	5	41
11	Kec. Daha Barat	3	8	0	0	0	0	9	6	31
TOTAL		132	103	5	10	7	7	644	187	1.261



4.1.6. Permasalahan dan Solusi

▪ Permasalahan

1. Belum terkoneksi data anak usia sekolah antara Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama Kab. HSS sehingga data yang ada hanya untuk SD dan SMP, untuk data siswa MI dan MTs menunggu dari Kementerian Agama Kab. HSS.
2. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan (S1).
3. Tidak meratanya penyebaran guru dimana penumpukan guru di perkotaan dan guru di sekolah pinggiran masih banyak yang kurang
4. Masih ada sekolah yang kekurangan guru bidang studi, sebaliknya ada juga sekolah yang kelebihan guru sehingga menyebabkan terhambatnya sertifikasi.
5. Banyaknya guru yang memasuki usia pensiun dan mutasi sehingga menyebabkan kekurangan guru.
6. Kekurangan guru tersebut dapat tertutupi dengan adanya guru tenaga honor akan tetapi kadang kualifikasi guru yang mengisi tersebut tidak sesuai dengan mapel yang diampu.
7. Masih ada sekolah yang belum terakreditasi
8. Faktor penghambat yang menyebabkan angka persentase PAUD yang terakreditasi masih belum memenuhi target adalah karena terbatasnya kouta dari Badan Akreditasi Nasional untuk mengikuti akreditasi lembaga PAUD.
9. Belum tercapainya target persentase partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam pendidikan kesetaraan



adalah belum optimalnya partisipasi masyarakat untuk mengikuti pendidikan kesetaraan.

10. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki PAUD

▪ **Solusi**

1. Harus ada MoU antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kemenag Kab. HSS untuk saling bersinergi masalah data peserta didik.
2. Agar segera menambah SDM yang memiliki kualifikasi dan memberikan surat edaran tentang penerimaan Pendidik PAUD minimal S1 dan melakukan diklat dasar bagi yang belum S1.
3. Perlunya pemetaan guru melalui penyegaran atau roling.
4. Untuk menutupi kekurangan guru di daerah perkotaan diatasi dengan perputaran, pengangkatan guru PPPK dan atau regrouping sekolah yang memungkinkan dari segi jarak, keadaan bangunan sekolah dan jumlah siswa.
5. Harus ada guru pengganti untuk menggantikan guru yang telah pensiun yaitu dengan cara mengusulkan PPPK pada tahun berikutnya.
6. Perlunya pemetaan terhadap guru untuk menutupi kekurangan guru yang ada.
7. Upaya yang dapat dilakukan ke depan untuk memperoleh nilai akreditasi adalah dengan melakukan kegiatan pembinaan kelembagaan dan manajemen PAUD (workshop dan pendampingan)
8. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Bidang PAUD dan PNF dalam mengupayakan kesiapan lembaga dalam proses akreditasi, diantaranya adalah dengan memberikan pembinaan kepada lembaga secara terus-menerus yang



bertujuan untuk mempertahankan bahkan meningkatkan angka persentase PAUD formal yang terakreditasi.

9. Tenaga kependidikan yang kurang dari SMA diminta untuk sekolah Paket kesetaraan (Paket C).
10. Melakukan pembenahan pada segi sarana dan prasarana baik rehabilitasi, pembangunan maupun pengadaan alat peraga.

4.2 Urusan Kesehatan

Bidang Kesehatan merupakan salah satu dari 6 urusan wajib pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan berhak diperoleh setiap warga secara minimal. SPM merupakan kewajiban minimal yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah daerah untuk rakyatnya, maka target SPM harus 100% setiap tahunnya.

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang kesehatan sebagai berikut :

- 1) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
- 2) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
- 3) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
- 4) Pelayanan Kesehatan Balita;
- 5) Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar;
- 6) Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif;
- 7) Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut;
- 8) Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hypertensi;
- 9) Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;



- 10) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat;
- 11) Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB; Dan
- 12) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

4.2.2 Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

1 Jenis dan Penerima Pelayanan Dasar

Tabel 4.9

Jenis Layanan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar	Pernyataan Standar
1	Pelayanan Kesehatan Ibu hamil	Ibu hamil	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar
2	Pelayanan kesehatan ibu Bersalin	Ibu bersalin	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Bayi baru lahir	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
4	Pelayanan kesehatan balita	Balita	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan Dasar	Anak pada usia pendidikan dasar	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendasarkan skrining kesehatan sesuai standar
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Warga Negara Indonesia usia 15 s/d 59 tahun	Setiap Warga Negara Indonesia usia 15 s/d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Warga Negara Indonesia usia 60 tahun ke atas	Setiap Warga Negara Indonesia usia 15 s/d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar



No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar	Pernyataan Standar
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Penderita hipertensi	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Penderita Diabetes Melitus	Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
11	Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis	Orang dengan TB	Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency virus)	Orang beresiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan)	Setiap orang yang beresiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar

2. Mutu Layanan Dasar

Mutu layanan dasar standar pelayanan minimal urusan Kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.10

Mutu Layanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar
1	Pelayanan Kesehatan Ibu hamil	1) Standar Kuantitas : Standar kuantitas adalah Kunjungan 4 kali selama periode kehamilan (K4) ;



No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar
		<p>a. Satu kali pada trimester pertama. b. Satu kali pada trimester kedua. c. Dua kali pada trimester ketiga</p> <p>2) Standar Kualitas yaitu pelayanan antenatal yang memenuhi 10 T, meliputi: Pengukuran berat badan, Pengukuran tekanan darah, Lingkar lengan Atas (LILA), Pengukuran Tinggi Fundus Uteri, Penentuan Presentasi janin dan Denyut Jantung Janin, Pemberian Imunisasi sesuai dengan status Imunisasi, Pemberian Tablet Tambah darah minimal 90 tablet, Tes Laboratorium, Tatalaksanaan/ Penanganan Kasus dan Temu wicara (konseling)</p>
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	<p>Sesuai standar pelayanan persalinan</p> <p>1) Standar persalinan normal adalah Acuan Persalinan Normal (APN) sesuai standar : - Dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan - Tenaga kesehatan penolong minimal 2 orang</p> <p>2) Standar persalinan komplikasi mengacu pada Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di fasilitas pelayanan kesehatan</p>
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	<p>Sesuai standar Pelayanan kesehatan bayi baru lahir</p> <p>- Standar kuantitas adalah kunjungan minimal 3 kali selama periode neonatal :</p> <p>1) Kunjungan Neonatal 1 (KN1) 6 - 48 jam 2) Kunjungan Neonatal 2 (KN2) 3 - 7 hari 3) Kunjungan Neonatal 3 (KN3) 8 - 28 hari.</p> <p>- Standar kualitas :</p> <p>1) Pelayanan Neonatal Esensial saat lahir (0-6 jam) : · Pemotongan dan perawatan tali pusat · Inisiasi Menyusu Dini (IMD) · Injeksi vitamin K1 · Pemberian salep/tetes mata antibiotic · Pemberian imunisasi (injeksi vaksin Hepatitis B0).</p> <p>2) Pelayanan Neonatal Esensial setelah lahir (6 jam - 28 hari) : · Konseling perawatan bayi baru lahir dan ASI Eksklusif · Memeriksa kesehatan dengan menggunakan pendekatan MTBM · Pemberian vitamin K1 bagi yang lahir tidak di fasilitas pelayanan kesehatan atau belum</p> <p>- mendapatkan injeksi vitamin K1.</p>



No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar
		<ul style="list-style-type: none">· Imunisasi Hepatitis B injeksi untuk bayi usia < 24 jam yang lahir tidak ditolong tenaga kesehatan- mendapatkan injeksi vitamin K1.· Penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi
4	Pelayanan kesehatan balita	<p>Sesuai standar pelayanan kesehatan balita</p> <ul style="list-style-type: none">- Pelayanan kesehatan balita sehat adalah pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan- menggunakan buku KIA dan skrining tumbuh kembang <p>a) Pelayanan kesehatan Balita usia 0 -11 bulan meliputi: Penimbangan minimal 8 kali setahun, Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun, Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/tahun, Pemberian kapsul vitamin A pada usia 6-11 bulan 1 kali setahun dan Pemberian imunisasi dasar lengkap.</p> <p>b) Pelayanan kesehatan Balita usia 12-23 bulan meliputi: Penimbangan minimal 8 kali setahun, Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali, Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/tahun, Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun dan Pemberian Imunisasi Lanjutan.</p> <p>c) Pelayanan kesehatan Balita usia 24-59 bulan meliputi: Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan, Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun, Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/ tahun dan Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun</p> <p>d) Edukasi dan Informasi</p> <ul style="list-style-type: none">-Pelayanan kesehatan balita sakit adalah pelayanan balita menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS)
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	<p>Sesuai standar skrining kesehatan usia pendidikan dasar</p> <p>Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sesuai standar meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none">1) Skrining kesehatan.2) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan.



No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar
		Keterangan: Dilakukan pada anak kelas 1 sampai dengan kelas 9 di sekolah minimal satu kali dalam satu tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun diluar sekolah (putus sekolah)
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Sesuai standar skrining kesehatan usia produktif - Pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar meliputi : 1) Edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana. 2) Skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular.
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Sesuai standar skrining kesehatan usia lanjut - Pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar meliputi : 1) Edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. 2) Skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi Pelayanan kesehatan hipertensi adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi: a). Pengukuran tekanan darah minimal 1 kali sebulan di fasilias layanan kesehatan, edukasi Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat serta melakukan rujukan bila di perlukan b). Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan c). Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat d). Melakukan rujukan jika diperlukan
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus -Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar meliputi : 1) Pengukuran gula darah; 2) Edukasi 3) Terapi farmakologi



No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus -Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar meliputi : 1) Pengukuran gula darah; 2) Edukasi 3) Terapi farmakologi
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Sesuai standar pelayanan kesehatan terduga TB -Pelayanan orang terduga TBC sesuai standar bagi orang terduga TBC meliputi : 1) Pemeriksaan klinis 2) Pemeriksaan penunjang 3) Edukasi
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency virus)	-Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar meliputi: 1) Edukasi perilaku berisiko 2) Skrining - Kelompok orang dengan resiko terinfeksi virus HIV yaitu : Ibu hamil, pasien TBC, pasien IMS, Penjaja Seks, LSL, Transgender/Waria, pengguna Napza Suntik dan Warga binanaan Pemasarakatan

3. Target Pencapaian SPM

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68) terdapat 12 (dua belas) jenis layanan dasar. Berikut adalah tabel mengenai SPM dengan jenis layanan dasar.

Tabel 4.11

Target Capaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output
1	2	3



KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		
1 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	3,614
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	
		Jumlah yang harus dilayani
	1 . Vaksin Tetanus Difteri (Td)	385
	2 . Tablet tambah darah	346,32
	3 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil, Test Kehamilan, Pemeriksaan HB, Pemeriksaan Golongan Darah, Pemeriksaan Glukoprotein Urin	3,614
	4 . Kartu ibu/rekam medis ibu	3,614
	5 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	3,614
	6 . Dokter/dokter spesialis kebidanan	21
	7 . Bidan	208
	8 . Perawat	21
	JUMLAH	357,797
2 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	3,412
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	
		Jumlah yang harus dilayani
	1 . Formulir Partograf	3,412
	2 . Kartu ibu (rekam medis)	3,412
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	3,412
	4 . Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	21
	5 . Bidan	208
	6 . Perawat	21
	JUMLAH	10,486
3 .	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	3,407
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	
		Jumlah yang harus dilayani



	1 . Vaksin Hepatitis B0	3,407
	2 . Vitamin K1 injeksi	3,407
	3 . Salep/tetes mata antibiotik	3,407
	4 . Formulir bayi baru lahir	3,407
	5 . Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	10,494
	6 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	3,407
	7 . Dokter/dokter spesialis Anak	21
	8 . Bidan	208
	9 . Perawat	21
	JUMLAH	27,779
4 .	Pelayanan Kesehatan Balita	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Yang Harus Dilayani
		15,726
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	
		Jumlah yang harus dilayani
	1 . Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	15,726
	2 . Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	15,726
	3 . Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	15,726
	4 . Vitamin A Biru	3,148
	5 . Vitamin A Merah	22,552
	6 . Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib, Campak, Rubella	720
	7 . Vaksin imunisasi dasar: HBO, BCG, Polio, IPV, DPT -HB -Hib, Campak, Rubella	3,6
	8 . Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	7,2
	9 . Peralatan Anafilaktik	21
	10 . Bidan	208
	11 . Dokter	21
	12 . Perawat	21
	13 . Ahli Gizi	21
	14 . Guru PAUD	11
	15 . Kader Kesehatan	148
	JUMLAH	84,849
5 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	
		Jumlah Total



	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Yang Harus Dilayani
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	33,568
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	
		Jumlah yang harus dilayani
	1 . Buku raport kesehatanku	33,568
	2 . Buku pemantauan kesehatan	33,568
	3 . Kuesioner skrining kesehatan	33,568
	4 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	395
	5 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	10
	6 . Dokter/Dokter gigi	21
	7 . Bidan	208
	8 . Perawat	63
	9 . Ahli Gizi	21
	10 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	21
	11 . Guru	395
	12 . Kader Kesehatan	441
	JUMLAH	102,279
6 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	145,633
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	
		Jumlah yang harus dilayani
	1 . Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	21
	2 . Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Tensimeter, Glukometer, Tes Strip Gula Darah, Lancet, Kapas Alkohol, KIT IVA Tes	21
	3 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	145,633
	4 . Dokter	21
	5 . Bidan	148
	6 . Perawat	63
	7 . Ahli Gizi	21
	8 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	21



	9 . Tenaga Non Kesehatan Terlatih	148
	JUMLAH	146,097
7 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	32,996
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	
		Jumlah yang harus dilayani
	1 . Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	32,996
	2 . Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	21
	3 . Buku kesehatan lansia	32,996
	4 . Dokter	21
	5 . Bidan	148
	6 . Perawat	21
	7 . Ahli Gizi	21
	8 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	21
	9 . Tenaga Non Kesehatan Terlatih	148
	JUMLAH	66,393
8 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	61,418
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	
		Jumlah yang harus dilayani
	1 . Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	21
	2 . Tensimeter	21
	3 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	61,418
	4 . Dokter	21
	5 . Bidan	148
	6 . Perawat	63
	7 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	21
	JUMLAH	61,713



9 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	4,674
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	
		Jumlah yang harus dilayani
	1 . Glukometer, Strip Tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet	4,674
	2 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	4,674
	3 . Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	21
	4 . Dokter	21
	5 . Bidan	148
	6 . Perawat	63
	7 . Ahli Gizi	21
	8 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	21
	JUMLAH	9,643
10 .	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	577
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	
		Jumlah yang harus dilayani
	1 . Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	21
	2 . Kit berisi 2 Alat Fiksasi	21
	3 . Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	577
	4 . Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	577
	5 . Dokter dan/atau perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan lainnya	21
	JUMLAH	1,217
11 .	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani



	• Jumlah yang Harus Dilayani :	4,104
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	
		Jumlah yang harus dilayani
	1 . Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	4,104
	2 . Reagen Zn TB	21
	3 . Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	4,104
	4 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	4,104
	5 . Catridge tes cepat molekuler	3
	6 . Formulir pencatatan dan pelaporan	21
	7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	21
	8 . Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	21
	9 . Perawat	42
	10 . Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	21
	11 . Penata Rontgen	2
	12 . Tenaga kesehatan masyarakat	21
	13 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai	148
	JUMLAH	12,633
12 .	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	4,355
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	
		Jumlah yang harus dilayani
	1 . Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	4,355
	2 . Tes cepat HIV (RDT) pertama	4,355
	3 . Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	4,355



	4 . Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	4,355
	5 . Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	21
	6 . Perawat	21
	7 . Bidan	21
	8 . Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	21
	9 . Tenaga kesehatan masyarakat	21
	10 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	21
	JUMLAH	17,546

Setiap jenis layanan dasar dalam SPM ini memiliki target 100%, dimana target ini juga merupakan target nasional harus dicapai oleh pemerintah daerah. Hasil capaian dari setiap indikator jenis layanan ini menunjukkan kinerja dari pemerintah daerah.

4.2.3 Realisasi Pencapaian SPM Urusan Kesehatan

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2022 yang mengacu pada Permenkes Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Puskesmas adalah sebagai berikut:

Tabel 4.12
Capaian SPM Bidang Kesehatan di Kab.HSS Tahun 2022

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output	Total Pencapaian
1	2	3	4
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	TUNTAS UTAMA	94.37 %
1 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		91.65 %



	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	71.65 %
	Jumlah yang Harus Dilayani :	3,614	3,237	377	90%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100.00 %
		1	2	3	
	1 . Vaksin Tetanus Difteri (Td)	385	385	0	100.00 %
	2 . Tablet tambah darah	346,32	346,32	0	100.00 %
	3 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil, Test Kehamilan, Pemeriksaan HB, Pemeriksaan Golongan Darah, Pemeriksaan Glukoprotein Urin	3,614	3,614	0	100.00 %
	4 . Kartu ibu/rekam medis ibu	3,614	3,614	0	100.00 %
	5 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	3,614	3,614	0	100.00 %
	6 . Dokter/dokter spesialis kebidanan	21	21	0	100.00 %
	7 . Bidan	208	208	0	100.00 %
	8 . Perawat	21	21	0	100.00 %
	JUMLAH	357,797	357,797	0	800.00 %
2 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				98.76 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	78.76 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	3,412	3,359	53	98%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
		Jumlah yang	Jumlah yang	Jumlah yang	100.00 %



		harus dilayani	terlayani	belum terlayani	
		1	2	3	
	1 . Formulir Partograf	3,412	3,412	0	100.00 %
	2 . Kartu ibu (rekam medis)	3,412	3,412	0	100.00 %
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	3,412	3,412	0	100.00 %
	4 . Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	21	21	0	100.00 %
	5 . Bidan	208	208	0	100.00 %
	6 . Perawat	21	21	0	100.00 %
	JUMLAH	10,486	10,486	0	600.00 %
3 .	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				98.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum Terlayani	78.00 %
		Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani		
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	3,407	3,322	85	98%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100.00 %
		1	2	3	
	1 . Vaksin Hepatitis B0	3,407	3,407	0	100.00 %
	2 . Vitamin K1 injeksi	3,407	3,407	0	100.00 %
	3 . Salep/tetes mata antibiotik	3,407	3,407	0	100.00 %
	4 . Formulir bayi baru lahir	3,407	3,407	0	100.00 %
	5 . Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	10,494	10,494	0	100.00 %
	6 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	3,407	3,407	0	100.00 %
	7 . Dokter/dokter spesialis Anak	21	21	0	100.00 %
	8 . Bidan	208	208	0	100.00 %



	9 . Perawat	21	21	0	100.00 %
	JUMLAH	27,779	27,779	0	900.00 %
4 .	Pelayanan Kesehatan Balita				85.93 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum Terlayani	65.93 %
		Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani		
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	15,726	12,96	2,766	82%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100.00 %
		1	2	3	
	1 . Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	15,726	15,726	0	100.00 %
	2 . Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	15,726	15,726	0	100.00 %
	3 . Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	15,726	15,726	0	100.00 %
	4 . Vitamin A Biru	3,148	3,148	0	100.00 %
	5 . Vitamin A Merah	22,552	22,552	0	100.00 %
	6 . Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib, Campak, Rubella	720	720	0	100.00 %
	7 . Vaksin imunisasi dasar: HBO, BCG, Polio, IPV, DPT -HB -Hib, Campak, Rubella	3,6	3,6	0	100.00 %
	8 . Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	7,2	7,2	0	100.00 %
	9 . Peralatan Anafilaktik	21	21	0	100.00 %
	10 . Bidan	208	208	0	100.00 %
	11 . Dokter	21	21	0	100.00 %
	12 . Perawat	21	21	0	100.00 %
	13 . Ahli Gizi	21	21	0	100.00 %



	14 . Guru PAUD	11	11	0	100.00 %
	15 . Kader Kesehatan	148	148	0	100.00 %
	JUMLAH	84,849	84,849	0	1,500.00 %
5 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar				97.15 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum Terlayani	79.39 %
		Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani		
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	33,568	33,312	256	99%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				17.76 %
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	88.79 %
		1	2	3	
	1 . Buku raport kesehatanku	33,568	11	22,568	32.77 %
	2 . Buku pemantauan kesehatan	33,568	11	22,568	32.77 %
	3 . Kuesioner skrining kesehatan	33,568	33,568	0	100.00 %
	4 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	395	395	0	100.00 %
	5 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	10	10	0	100.00 %
	6 . Dokter/Dokter gigi	21	21	0	100.00 %
	7 . Bidan	208	208	0	100.00 %
	8 . Perawat	63	63	0	100.00 %
	9 . Ahli Gizi	21	21	0	100.00 %
	10 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	21	21	0	100.00 %
	11 . Guru	395	395	0	100.00 %
	12 . Kader Kesehatan	441	441	0	100.00 %
	JUMLAH	102,279	57,143	45,136	1,065.54 %



6 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif				89.96 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum Terlayani	69.96 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani		
		145,633	127,347	18,286	87%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100.00 %
		1	2	3	
	1 . Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	21	21	0	100.00 %
	2 . Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Tensimeter, Glukometer, Tes Strip Gula Darah, Lancet, Kapas Alkohol, KIT IVA Tes	21	21	0	100.00 %
	3 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	145,633	145,633	0	100.00 %
	4 . Dokter	21	21	0	100.00 %
	5 . Bidan	148	148	0	100.00 %
	6 . Perawat	63	63	0	100.00 %
	7 . Ahli Gizi	21	21	0	100.00 %
	8 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	21	21	0	100.00 %
	9 . Tenaga Non Kesehatan Terlatih	148	148	0	100.00 %
	JUMLAH	146,097	146,097	0	900.00 %
7 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut				85.84 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN	Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	65.84 %



	PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	32,996	27,154	5,842	82%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100.00 %
		1	2	3	
	1 . Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	32,996	32,996	0	100.00 %
	2 . Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	21	21	0	100.00 %
	3 . Buku kesehatan lansia	32,996	32,996	0	100.00 %
	4 . Dokter	21	21	0	100.00 %
	5 . Bidan	148	148	0	100.00 %
	6 . Perawat	21	21	0	100.00 %
	7 . Ahli Gizi	21	21	0	100.00 %
	8 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	21	21	0	100.00 %
	9 . Tenaga Non Kesehatan Terlatih	148	148	0	100.00 %
	JUMLAH	66,393	66,393	0	900.00 %
8 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				93.46 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	73.46 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	61,418	56,399	5,019	92%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
		Jumlah yang	Jumlah yang	Jumlah yang	100.00 %



		harus dilayani	terlayani	belum terlayani	
		1	2	3	
	1 . Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	21	21	0	100.00 %
	2 . Tensimeter	21	21	0	100.00 %
	3 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	61,418	61,418	0	100.00 %
	4 . Dokter	21	21	0	100.00 %
	5 . Bidan	148	148	0	100.00 %
	6 . Perawat	63	63	0	100.00 %
	7 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	21	21	0	100.00 %
	JUMLAH	61,713	61,713	0	700.00 %
9 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum Terlayani	80.00 %
		Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani		
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	4,674	4,674	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100.00 %
		1	2	3	
	1 . Glukometer, Strip Tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet	4,674	4,674	0	100.00 %
	2 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	4,674	4,674	0	100.00 %



	3 . Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	21	21	0	100.00 %
	4 . Dokter	21	21	0	100.00 %
	5 . Bidan	148	148	0	100.00 %
	6 . Perawat	63	63	0	100.00 %
	7 . Ahli Gizi	21	21	0	100.00 %
	8 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	21	21	0	100.00 %
	JUMLAH	9,643	9,643	0	800.00 %
10 .	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat				95.69 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum Terlayani	79.31 %
		Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani		
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	577	572	5	99%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				16.38 %
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	81.90 %
		1	2	3	
	1 . Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	21	21	0	100.00 %
	2 . Kit berisi 2 Alat Fiksasi	21	2	19	9.52 %
	3 . Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	577	577	0	100.00 %
	4 . Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	577	577	0	100.00 %
	5 . Dokter dan/atau perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan lainnya	21	21	0	100.00 %



	JUMLAH	1,217	1,198	19	409.52 %
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				99.73 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum Terlayani	79.73 %
		Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani		
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	4,104	4,09	14	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100.00 %
		1	2	3	
	1 . Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	4,104	4,104	0	100.00 %
	2 . Reagen Zn TB	21	21	0	100.00 %
	3 . Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	4,104	4,104	0	100.00 %
	4 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	4,104	4,104	0	100.00 %
	5 . Catridge tes cepat molekuler	3	3	0	100.00 %
	6 . Formulir pencatatan dan pelaporan	21	21	0	100.00 %
	7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	21	21	0	100.00 %
	8 . Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	21	21	0	100.00 %
	9 . Perawat	42	42	0	100.00 %
	10 . Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	21	21	0	100.00 %
	11 . Penata Rontgen	2	2	0	100.00 %



	12 . Tenaga kesehatan masyarakat	21	21	0	100.00 %
	13 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai	148	148	0	100.00 %
	JUMLAH	12,633	12,633	0	1,300.00 %
12 .	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)				96.27 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum Terlayani	76.27 %
		Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani		
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	4,355	4,152	203	95%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100.00 %
		1	2	3	
	1 . Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	4,355	4,355	0	100.00 %
	2 . Tes cepat HIV (RDT) pertama	4,355	4,355	0	100.00 %
	3 . Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Sduit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	4,355	4,355	0	100.00 %
	4 . Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	4,355	4,355	0	100.00 %



5 . Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	21	21	0	100.00 %
6 . Perawat	21	21	0	100.00 %
7 . Bidan	21	21	0	100.00 %
8 . Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	21	21	0	100.00 %
9 . Tenaga kesehatan masyarakat	21	21	0	100.00 %
10 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	21	21	0	100.00 %
JUMLAH	17,546	17,546	0	100.00 %

4.2.5 Alokasi Anggaran

Dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM Bidang kesehatan yang dilakukan setiap tahun ini tidak terlepas dari adanya dukungan sumber daya keuangan khususnya anggaran yang berkaitan langsung dengan pencapaian setiap indikator SPM. Adapun total anggaran yang disediakan untuk pencapaian target-target SPM di tahun 2021 sebesar **Rp. 7.986.743.050,00,-**

Hasil realisasi anggaran untuk pelaksanaan pencapaian terhadap 12 (dua belas) indikator SPM kesehatan dari seluruh kegiatan ditahun 2022 adalah sebesar **Rp. 7.066.795.320,00,-** atau **81.19 %** dari total anggaran **Rp. 7.986.743.050,00,-** dan termasuk kategori pencapaian kinerja baik.

Tabel 4.13

Alokasi Anggaran SPM Bidang Kesehatan Tahun 2022

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	KAB. HULU SUNGAI SELATAN				7,986,743,050	7,066,795,320	88.48 %
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN				7,986,743,050	7,066,795,320	88.48 %



PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota K20220131032750				7,986,743,050	7,066,795,320	88.48 %
	1	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Orang		1,950,947,000	1,616,200,550	82.84 %
	2	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Orang		314,516,100	243,034,400	77.27 %
	3	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang		204,722,100	198,155,200	96.79 %
	4	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Orang		1,949,735,150	1,848,491,000	94.81 %
	5	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang		1,167,124,650	1,079,596,450	92.50 %
	6	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	Orang		985,812,750	845,315,075	85.75 %
	7	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Orang		511,866,100	493,360,350	96.38 %
	8	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Orang		70,855,000	50,865,000	71.79 %
	9	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Orang		459,160,500	379,413,875	82.63 %
	10	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang	Orang		90,829,800	77,825,750	85.68 %



			Dengan Gangguan Jiwa Berat				
		11	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	163,893,900	127,471,300	77.78 %
		12	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang	117,280,000	107,066,370	91.29 %
		13	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Dokumen	0	0	0%
		14	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Dokumen	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				7,986,743,050	7,066,795,320	88.48 %
	JUMLAH PROGRAM				7,986,743,050	7,066,795,320	88.48 %



4.2.4 Dukungan Personil

Peran serta Sumber Daya Manusia (SPM) sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan SPM akan memberikan kontribusi yang besar dalam pencapaian target dari SPM. Berikut ini adalah dukungan personil yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan :

Tabel 4.14

Personil menurut kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan golongan

DATA PEGAWAI								
Kualifikasi Pendidikan								
SD	SLTP	SLTA	D I /D III	D IV	S-1	S-2	S-3	Jumlah
1	4	48	435	57	108	19	-	672
Kualifikasi Pangkat dan Golongan								
Golongan I		Golongan II		Golongan III		Golongan IV		Jumlah
2		138		502		29		671
Struktural					Fungsional		Jumlah	
Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Jumlah				
-	1	4	55	60	613		673	

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

▪ Permasalahan

1. Semua ibu hamil sudah diberikan pelayanan oleh tenaga kesehatan tapi untuk kunjungan sampai ke K4 terkendala karena masih adanya ibu hamil yang mengalami keguguran dan melahirkan di usia 7 bulan/prematur sehingga untuk capaian pelayanan antenatal care sesuai standar tidak mencapai target
2. Masih adanya persalinan dengan bidan kampung di daerah sulit seperti di kecamatan loksado



3. Adanya kematian bayi Usia 0 -28 hari sebanyak 36 bayi dan ada BBLR yang tidak bisa diberikan Hb0 sebanyak 23 orang dikarenakan BB nya di bawah 2000 gr
4. Kegiatan posyandu pada masa pandemi tidak maksimal berjalan sehingga balita tidak datang untuk bertimbang
5. pada masa pandemi ada sebagian sekolah tidak melakukan PTM sehingga ada 0.57% anak sekolah tidak mendapatkan skrining pelayanan Kesehatan
6. Kesadaran Masyarakat untuk melakukan skrining FR PTM masih rendah
7. Partisipasi Masyarakat berkurang untuk datang ke Fasilitas Kesehatan di sebabkan Pandemi Covid-19
8. Kurangnya pengetahuan Masyarakat terkait penyakit Menular dan Tidak Menular.

▪ **Solusi**

1. Melakukan kunjungan rumah untuk pemantauan ibu hamil resti agar tidak terjadi persalinan premature
2. Kemitraan dan komintmen dengan kepala desa pada saat lokmin lintas sektor dan kemitraan dengan Bidan Kampung.
3. Pendampingan /kunjungan rumah pada bayi resti.
4. Melakukan sweeping ke rumah balita yang tidak datang ke posyandu
5. Berkoordinasi dengan pihak sekolah agar bagi peserta didik yang tidak datang untuk melakukan janji temu dengan pihak puskesmas agar dilakukan skrining Kesehatan.
6. Melakukan sosialisasi dan KIE terkait pentingnya pemeriksaan FR PTM di Posbindu



7. Untuk memenuhi target kinerja di tengah pandemi covid-19 ini maka dilakukan kegiatan kunjungan rumah ke rumah untuk memberikan pelayanan
8. Melakukan KIE terkait Penyakit menular dan Tidak Menular.

4.3 Urusan Pekerjaan Umum

Setiap Standar Pelayanan Minimal memiliki standar teknis masing-masing yang sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan / atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Standar teknis tersebut ditetapkan oleh Kementerian terkait dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri dan kementerian/ Lembaga pemerintah non kementerian terkait.

Arah kebijakan pembangunan daerah berpedoman pada Standar pelayanan Minimal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu urusan pemerintahan yang terdapat dalam Permendagri ini adalah ada 6 urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar salah satunya Bidang Urusan Pekerjaan Umum.

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar urusan Pekerjaan Umum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bahwa jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Pekerjaan Umum terdiri atas:

- ☒ Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- ☒ Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik



4.3.2 Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

- a. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari
Target pencapaian SPM Air Minum yang aman adalah melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan.
- b. Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik
Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terkait sektor air limbah domestik adalah :
 - 1) Sasaran penyediaan sanitasi air limbah permukiman adalah meningkatnya kualitas layanan sistem air limbah permukiman.
 - 2) Indikator Kualitas Layanan sistem air limbah antara lain :
 - Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah setempat yang memadai;
 - Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah terpusat.

SPM pengelolaan air limbah permukiman yang memadai adalah jumlah penduduk yang terlayani sistem pengelolaan air limbah baik setempat maupun terpusat pada tahun 2022 sebesar 100%. Namun menjadi catatan penting bahwa target tahun 2022 terkait Sektor Air Limbah domestik adalah universal akses air limbah domestik sebesar 100% yang berarti bahwa seluruh penduduk sudah terlayani oleh sistem pengolahan air limbah domestik baik berupa on site maupun off site sistem.

Target Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2022 adalah sebagai berikut :



Tabel 4.15
Target SPM Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari Hari	Persentase rumah tangga /KK yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum)	100%	Setiap Tahun
2	Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Persentase rumah tangga/KK yang memiliki akses pengolahan air limbah domestik (SPALD) Dasar	100%	Setiap Tahun

4.3.3 Realisasi

a. Penyediaan Kebutuhan Air Minum Sehari-Hari.

Pencapaian SPM Air Minum Tahun Anggaran 2022 dengan indikatornya Persentase rumah tangga /KK yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) adalah 95 %. Capaian ini diperoleh dari jumlah akses air minum Jaringan Perpipaan sebanyak 53.284 KK. Jaringan Perpipaan disini termasuk SPAM Jaringan Perpipaan terlindungi dari PDAM dan SPAM Perdesaan baik berupa Instalasi Sumur Bor Dalam, Instalasi Pengolahan Air Mini dan Penangkap Mata Air (Broncaptering). Sedangkan untuk rumah tangga yang belum terlayani SPAM Jaringan perpipaan masih ada sekitar 3.012 KK. Total rumah tangga yang menjadi target pelayanan pada tahun 2022 adalah sebanyak 56.296 Kepala Keluarga. Selengkapnya pada tabel di bawah ini :



Tabel 4.16
Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Pemenuhan
Kebutuhan Air Minum Sehari-hari Tahun 2022

No	Kecamatan	Target	Realisasi		
		Total	Terlayani JP	Terlayani BJP	Belum Terlayani
		(Unit Rumah)	(Unit Rumah)	(Unit rumah)	(Unit rumah)
1	Angkinang	5225	4315	892	18
2	Daha Barat	1359	900	252	207
3	Daha Selatan	8393	6355	1516	522
4	Daha Utara	5939	3611	1552	776
5	Kalumpang	1969	974	743	252
6	Kandangan	13573	8690	3988	895
7	Loksado	2313	917	1161	235
8	Padang Batung	5883	3263	2327	293
9	Simpur	4134	2886	1049	199
10	Sungai Raya	4793	3073	1611	109
11	Telaga Langsat	2715	1469	679	567
TOTAL		56.296	36.453	15.770	4.073
Persentase Layanan			64,75	28,01	7,23
Capaian SPM			95%		

Keterangan :

JP adalah Jaringan Perpipaan

BJP adalah Bukan Jaringan Perpipaan

b. Penyediaan Pelayanan Air Limbah Domestik

Pencapaian Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk SPM Air Limbah yaitu Penyediaan Akses Air Limbah Domestik Tahun 2022 adalah sebesar 85,42 %. Total rumah tangga yang menjadi target pelayanan pada tahun 2022 adalah sebanyak 56.296 kepala keluarga, dengan asumsi 1 KK sama dengan 4 Jiwa. Sebanyak 47.087 rumah tangga (KK) telah mendapatkan pelayanan air limbah domestik dasar baik berupa cubluk dan atau tangki septik. Sementara itu masih terdapat sekitar 1.564 rumah tangga yang belum memiliki akses air limbah sehingga



terindikasi masih melakukan BABS. Ada juga rumah tangga yang belum memiliki akses air limbah akan tetapi selama itu mereka masih dapat menggunakan sarana air limbah milik keluarga atau tetangga ataupun sarana air limbah umum (WC Umum) maka terhitung telah mendapatkan akses air limbah sharing sebanyak 5.327 kepala keluarga.



Tabel 4.17
Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Penyediaan Pelayanan Air Limbah Domestik Tahun 2022

No	Kecamatan	Target				Realisasi							
		Total	Akses Dasar	Akses Aman SPALD-S	Akses Aman SPALD-T	Tanpa Akses	JSP	JSSP	Sharing	Akses Dasar (JSP + JSSP + Sharing)	Akses Layak (JSP+JSSP)	Akses Aman SPAL-S (JSP)	Akses Aman SPAL-T
		(Unit Rumah)	(Unit Rumah)	(Unit Rumah)	(Unit Rumah)	(Unit Rumah)	(Unit Rumah)	(Unit Rumah)	(Unit Rumah)	(Unit Rumah)	(Unit Rumah)	(Unit Rumah)	(Unit Rumah)
1	Simpur	4134	3786	3754	75	0	3786	323	25	4134	4109	3786	75
2	Sungai Raya	4793	4072	4070	329	51	4307	432	3	4742	4739	4307	329
3	Angkinang	5225	3712	3712	127	189	4263	773	0	5036	5036	4263	127
4	Kalumpang	1969	1013	1013	0	102	1511	356	0	1867	1867	1511	0
5	Kandangan	13573	10645	10638	583	592	12066	854	61	12981	12920	12066	583
6	Padang Batung	5883	4274	4006	75	338	4716	714	115	5545	5430	4716	75
7	Telaga Langsat	2715	1982	1982	0	163	2068	458	26	2552	2526	2068	0
8	Loksado	2313	598	598	0	634	1516	49	114	1679	1565	1516	0
9	Daha Selatan	8393	2276	2116	75	3324	3562	1392	122	5076	4947	3562	75
10	Daha Utara	5939	1869	1869	300	1954	3002	937	46	3985	3939	3002	300
11	Daha Barat	1359	53	53	0	859	449	51	0	500	500	449	0
Total		56296	56296	56296	34280	8206	41246	6339	512	48097	47578	41246	1564
Persentase Layanan										85,44%	84,51%	73,27%	2,78%
Capaian SPM Akses Dasar										85,44%			



Dengan demikian, maka capaian penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2022 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut :

Tabel 4.18
Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3			4
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	TUNTAS UTAMA			90.59 %
1 .	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari				93.82 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	75.72 %
		Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
	Jumlah yang Harus Dilayani :	56,296	53,284	3,012	95%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				18.10 %
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	90.51 %
		1	2	3	
	1 . Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	225,184	213,136	12,048	
	2 . Kualitas air (keruh, berwarna, berasa, berbusa, berbau)	225,184	151,764	73,42	67.40 %
	3 . Jaringan perpipaan	151,764	151,764	0	100.00 %
	4 . Jaringan bukan perpipaan	61,076	61,076	0	100.00 %
	JUMLAH	663,208	577,74	85,468	362.05 %
2 .	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik				87.37 %



PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	68.34 %
	Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
Jumlah yang Harus Dilayani :	56,296	48,09	8,206	85%
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				19.03 %
	Jumlah yang	Jumlah yang	Jumlah yang	95.14 %
	harus dilayani	terlayani	belum terlayani	
	1	2	3	
1 . Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik	225,184	192,36	32,824	85.42 %
2 . Kualitas pelayanan air limbah domestik	56,296	48,09	8,206	85.42 %
3 . Sub-Sistem pengolahan setempat	730	730	0	100.00 %
4 . Sub-sistem pengangkutan	1	1	0	100.00 %
5 . Sub-sistem pengolahan lumpur tinja (IPLT)	1	1	0	100.00 %
6 . Pengolahan lumpur tinja (IPAL)	991	991	0	100.00 %
JUMLAH	283,203	242,173	41,03	570.84 %

4.2.5 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran urusan Pekerjaan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2022 dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal sebagai berikut :



Tabel 4.19
Alokasi Anggaran Urusan Pekerjaan Umum
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	KAB. HULU SUNGAI SELATAN				22,925,940,036	22,837,342,745	99.61 %
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				11,917,191,036	11,863,659,705	99.55 %
	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota K20220131033558			11,917,191,036	11,863,659,705	99.55 %
		1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	Dokumen	0	0	0%
		2	Supervisi pembangunan/peningkatan/pe rluasan/perbaikan SPAM	Dokumen	0	0	0%
		3	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/Detik	0	0	0%
		4	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	SR	11,517,905,464	11,465,923,813	99.55 %



		5	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/Detik	0	0	0%
		6	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan		0	0	0%
		7	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	SR	0	0	0%
		8	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan		0	0	0%
		9	Pembinaan dan pengawasan terhadap tarif Air Minum		0	0	0%
		10	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha untuk kebutuhan sendiri	Badan Usaha	0	0	0%
		11	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat	Kelompok Masyarakat	0	0	0%
		12	Fasilitasi penyiapan kerja sama SPAM	Unit	0	0	0%
		13	Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama SPAM	Unit	0	0	0%
		14	Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM		0	0	0%



LPPD Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

		15	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perkotaan	Unit	0	0	0%	
		16	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perdesaan	Unit	399,285,572	397,735,892	99.61 %	
		17	Pembangunan baru SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Rumah Tangga	0	0	0%	
		18	Peningkatan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan		0	0	0%	
		19	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan		0	0	0%	
		20	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Unit	0	0	0%	
		21	Perbaikan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Unit	0	0	0%	
	JUMLAH INDIKATOR					11,917,191,036	11,863,659,705	99.55 %
	JUMLAH PROGRAM					11,917,191,036	11,863,659,705	99.55 %
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				11,008,749,000	10,973,683,040	99.68 %	



	2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota K20220131034234			11,008,749,000	10,973,683,040	99.68 %
		1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		2	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Dokumen	0	0	0%
		3	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala Kota	Rumah Tangga	0	0	0%
		4	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Rumah Tangga	0	0	0%
		5	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	Rumah Tangga	0	0	0%
		6	Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat	Rumah Tangga	0	0	0%
		7	Pembinaan teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	0	0	0%



		8	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik		0	0	0%
		9	Pengembangan SDM dan kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit	0	0	0%
		10	Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik		448,140,000	426,060,240	95.07 %
		11	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman		0	0	0%
		12	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala permukiman	Orang	10,560,609,000	10,547,622,800	99.88 %
		13	Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Unit	0	0	0%
		14	Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Dokumen	0	0	0%
		15	Pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana IPLT	Rumah Tangga	0	0	0%
		16	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	Rumah Tangga	0	0	0%



LPPD Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

		17	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pe-luasan sarana dan prasarana IPLT	Dokumen	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				11,008,749,000	10,973,683,040	99.68 %
	JUMLAH PROGRAM				11,008,749,000	10,973,683,040	99.68 %



4.3.5 Dukungan Personil

Dukungan Personil Urusan Pekerjaan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Hulu Sungai Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.20
Personil menurut kualifikasi Pendidikan, pangkat dan golongan

No.	Uraian	JUMLAH PEGAWAI/ORANG					PENDIDIKAN					
		GOL IV	GOL III	GOL II	GOL I	NON PNS	SD	SLTP	SLTA	D-3	S-1	S-2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PNS/Struktural Administrasi	3	33	13	-	-	0	1	7	9	26	3
2	PNS/Struktural Administrasi UPT	-	-	-	-	--	-	-	-	-	-	-
3	NON PNS	-	-	-	-	-			24	5	14	-
Jumlah		3	33	13	-	-	0	1	31	14	40	3

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan

Permasalahan Air Minum:

- Kondisi geografis Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang luas dengan kepadatan penduduk masih kecil sehingga membutuhkan investasi besar jaringan perpipaan.
- Topografi pegunungan di kecamatan Loksado dan Padang Batung menyulitkan akses PDAM untuk masuk sehingga diperlukan investasi yang besar untuk memenuhi akses SPAM Jaringan Perpipaan PDAM di lokasi tersebut.
- Biaya bulanan PDAM bagi sebagian masyarakat masih menjadi faktor keengganan memasang Sambungan Rumah (SR) Air Minum meski gratis.



Permasalahan Air Limbah :

1. Topografi rawa pada tiga Kecamatan seperti Daha Utara, Daha Barat, dan Daha Selatan merupakan daerah rawa pasang surut cukup menyulitkan instalasi tangki septik pabrikan. Sementara itu tiga kecamatan ini memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dengan angka BABS (Buang Air Besar Sembarangan) tertinggi dibanding kecamatan lain.
2. *Mindset* dan *culture set* masyarakat yang pada umumnya masih belum bisa terlepas dari sungai sebagai pusat aktifitas rumah tangga seperti untuk keperluan minum, mandi sekaligus buang air.

▪ **Solusi**

1. Konsistensi dan sinergisitas pendanaan kegiatan dari APBD, DAK Sanitasi dan DAK Air Minum dan APBN Pamsimas dan Sanimas tetap menjadi solusi utama.
2. Sinkronisasi penanganan dan penentuan lokus dari berbagai sumber dana tersebut dan kerja sama antara Dinas PUTR, Dinas Kesehatan, Dinas PMD dibawah koordinasi Bappelitbangda merupakan metode yang efektif untuk meningkatkan angka SPM air Minum dan Air Limbah secara signifikan .
3. Pemicuan PHBS bersama Dinkes menjadi faktor penentu SPM air minum dan air limbah, serta dengan pemilihan lokasi dan kebutuhan yang lebih baik.



4.4 Urusan Perumahan Rakyat

Setiap Standar Pelayanan Minimal memiliki standar teknis masing-masing yang sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan / atau jasa, standar jumlah dan kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Sosial dan pentunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Standar teknis tersebut ditetapkan oleh Kementerian terkait dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri dan kementerian/ Lembaga pemerintah non kementerian terkait.

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Peraturan Menteri Pekejaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut :

- Penyediaan rumah dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota
- Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yan terkena relokasi program Pemerintahan Daerag Kabupaten/Kota.

4.4.2 Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya, dan membandingkannya dengan rencana pencapaian SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah). Target Pencapaian SPM Bidang Perumahan sebagai berikut:



Tabel 4.21

Target SPM Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Pencapaian
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap Tahun
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni	100%	Setiap Tahun

4.4.3 Realisasi

Realisasi Capaian SPM Urusan Perumahan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.22

Realisasi Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output	Total Pencapaian
1	2	3	4
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		100.00 %
1 .	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban		20.00 %



	Bencana Kabupaten/Kota				
		Tidak Terjadi Bencana			
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang Belum terlayani	0.00 %
	Jumlah yang Harus Dilayani :	0	0	0	0%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	100.00 %			
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang Belum terlayani	100.00 %
		1	2	3	
	1 . Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	0	0	0	0%
	2 . Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	0	0	0	0%
	3 . Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	0	0	0	0%
	4 . Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.	0	0	0	0%
	JUMLAH	0	0	0	0.00 %
2 .	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	80.00 %
		Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	1	1	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	20.00 %			
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100.00 %
		1	2	3	



1 . Fasilitas penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	1	1	0	100.00 %
2 . Subsidi uang sewa	1	1	0	100.00 %
3 . Penyediaan rumah layak huni	1	1	0	100.00 %
JUMLAH	3	3	0	300.00 %

Rumusan penilaian capaian realisasi sebagaimana indikator yang telah ditetapkan adalah :

- a. Indikator Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni dihitung sebanyak 0 (nol) karena tidak terdapat bencana yang ditetapkan sebagai bencana daerah dan tidak memerlukan relokasi akibat kejadian bencana, sehingga nilai capaian dihitung dengan rumusan jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani sebanyak 0 (nol) dibagi dengan jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani sebanyak 0 (nol), jadi nilainya adalah tak terdefinisikan dan dilaporkan sebagai 100%.
- b. Indikator Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni dihitung sebanyak 3 (tiga) karena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota, sehingga nilai capaian dihitung dengan rumusan jumlah rumah tangga penerima fasilitas penggantian hak atau penguasaan tanah dan atau bangunan ditambah rumah tangga penerima subsidi uang sewa ditambah rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni sebanyak 3 (tiga) dibagi dengan jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah kabupaten/kota yang memenuhi kriteria



pelayanan sebanyak 3 (tiga), jadi nilainya adalah dilaporkan sebagai 100%.

Dalam pelaksanaan kegiatan dan subkegiatan identifikasi perumahan yang berada di lokasi rawan bencana dengan hasil data berupa daftar rumah tangga pada lokasi rawan bencana, diperoleh data rumah tangga pada 5 (lima) desa pada Tahun Anggaran 2021 dan 3 (tiga) desa pada Tahun Anggaran 2022 di Kecamatan Loksado, yang dikategorikan sebagai rumah tangga pada daerah rawan bencana, dengan hasil data sebagai berikut:

1. Desa Loksado	: jumlah 127 unit rumah (2021)
2. Desa Hulubanyu	: jumlah 152 unit rumah (2021)
3. Desa Tumingki	: jumlah 123 unit rumah (2021)
4. Desa Lok Lahung	: jumlah 24 unit rumah (2021)
5. Desa Haratai	: jumlah 91 unit rumah (2021)
6. Desa Ulang	: jumlah 15 unit rumah (2022)
7. Desa Malinau	: jumlah 22 unit rumah (2022)
8. Desa Panggungan	: jumlah 18 unit rumah (2022)
Jumlah terdata	: 572 unit rumah

4.4.5 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari:

- a. APBD;
- b. APBN;
- c. Sumber dana lain yang sah.

Pada tahun anggaran 2022, melalui APBD telah disediakan alokasi anggaran sebesar **Rp. 123.139.800,00,-** pada Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana



atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Subkegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.

Pelaksanaan identifikasi ini mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mana salah satu langkah awal penerapan SPM adalah dengan identifikasi perumahan yang berada di lokasi rawan bencana dengan hasil data berupa daftar rumah tangga pada lokasi rawan bencana.



Tabel 4.23
Realisasi Capaian Program Pengembangan Perumahan

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	KAB. HULU SUNGAI SELATAN				123,139,800	105,225,000	85.45 %
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				123,139,800	105,225,000	85.45 %
	1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota K20220131034637			123,139,800	105,225,000	85.45 %
		1	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	71,299,950	63,695,000	89.33 %
		2	Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen	0	0	0%
		3	Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Dokumen	0	0	0%
		4	Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	Dokumen	0	0	0%



LPPD Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

	5	Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	6	Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	Dokumen	51,839,850	41,530,000	80.11 %
JUMLAH INDIKATOR				123,139,800	105,225,000	85.45 %
2	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota K20220131034753			0	0	0.00 %
	1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	0	0	0%
	2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	3	Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	Ha	0	0	0%
	4	Pembangunan rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	0	0	0%



LPPD Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

		5	Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
		6	Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0.00 %
	JUMLAH PROGRAM				123,139,800	105,225,000	85.45 %



4.4.5 Dukungan Personil

Dukungan Personil Urusan Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Hulu Sungai Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.24
Personil menurut kualifikasi Pendidikan,
Pangkat dan Golongan

DATA PEGAWAI								
Kualifikasi Pendidikan								
SD	SLTP	SLTA	D I /D III	D IV	S-1	S-2	S-3	Jumlah
8	15	35	8	1	16	6	-	89
Kualifikasi Pangkat dan Golongan								
Golongan I		Golongan II		Golongan III		Golongan IV		Jumlah
17		35		34		3		89
Struktural					Fungsional		Jumlah	
Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Jumlah				
-	1	3	-	4	85		89	

4.4.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

▪ Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM bidang perumahan tingkat Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah Pada program Kawasan permukiman dan program perumahan dan Kawasan permukiman kumuh tidak tercapainya target untuk meningkatkan persentase rumah layak huni disebabkan



oleh adanya perubahan program dalam peningkatan kualitas RTLH(BSPD/DAK) pada kementerian.

▪ **Solusi**

Solusi yang direncanakan dan mulai dilaksanakan adalah Mengupayakan tambahan usulan peningkatan RTLH kepada kementerian PUPR dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

4.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pengampu SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Sub Urusan Kebakaran dilaksanakan oleh **Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar**. Sedangkan pengampu SPM Sub Urusan Bencana dilaksanakan oleh **Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)**.

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, bahwa Jenis Pelayanan Dasar Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari 5 (lima) Jenis Pelayanan Dasar, terdiri dari:

1. Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
2. Pelayanan Informasi Rawan Bencana
3. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
4. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
5. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.

Sedangkan untuk juknis ke lima jenis pelayanan tersebut adalah :



- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, yaitu : Pelayanan ketenteraman dan ketertiban Umum.
- Jenis Pelayanan Dasar Sub Urusan Kebakaran mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, Yaitu Pelayanan Penyelamatan dan Evaluasi Korban Kebakaran.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub urusan Bencana Daerah Kabupaten, bahwa Jenis Pelayanan Dasar Sub Urusan Bencana Meliputi :
 1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana
 2. penyusunan kajian risiko bencana Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala kabupaten.
 3. Sosialisasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi rawan bencana
 4. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap bencana
 5. penyusunan rencana penanggulangan bencana;
 6. pembuatan rencana kontinjensi;
 7. pelatihan pencegahan dan mitigasi;
 8. gladi kesiapsiagaan terhadap bencana;
 9. pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana; dan



10. penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
11. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
12. respon cepat kejadian luar biasa penyakit / wabahzoonosis prioritas;
13. respon cepat darurat bencana;
14. aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana;
15. pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana; dan
16. pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.

4.5.2 Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

Target pencapaian SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat pada table berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output
1	2	3
1 .	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	480
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan
	1 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	1
	2 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	1



	3 . Standar operasional prosedur Satpol PP	6
	4 . Standar sarana prasarana Satpol PP	44
	5 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat	78
	6 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	1
KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN		
1 .	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	178,628
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan
	1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	1
	2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	1
	3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	4
	4 . Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	1
	5 . Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana	178,628
2 .	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani



	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	178,628
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan
	1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana	43
	2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)	4
3 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	38
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan
	1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	3
	2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	38
	3 . Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana	38
	4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas	2
	5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	38
1 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	42



PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang /
	Jasa Yang Dibutuhkan
1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi	28
2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	2
3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	32
4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	10

4.5.3 Realisasi

Tabel 4.25
Realisasi Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum
(TRANTIBUM)

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3			4
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM		TUNTAS PARIPURNA			100.00 %
1 .	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)				100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	80.00 %
		Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	480	480	0	100.00 %
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang /	Jumlah Mutu Barang /	Jumlah Mutu Barang /	100.00 %
		Jasa Yang Dibutuhkan	Jasa Yang Tersedia	Jasa Yang Belum Tersedia	



	1 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	1	1	0	100.00 %
	2 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	1	1	0	100.00 %
	3 . Standar operasional prosedur Satpol PP	6	6	0	100.00 %
	4 . Standar sarana prasarana Satpol PP	44	44	0	100.00 %
	5 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat	78	78	0	100.00 %
	6 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	1	1	0	100.00 %
KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN					
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3			-4
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN		TUNTAS PARIPURNA			100.00 %
1 .	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)				100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	80.00 %
		Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	178,628	178,628	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang /	Jumlah Mutu Barang /	Jumlah Mutu Barang /	100.00 %
		Jasa Yang Dibutuhkan	Jasa Yang Tersedia	Jasa Yang Belum Tersedia	
	1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	1	1	0	100.00 %
	2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	1	1	0	100.00 %



	3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	4	4	0	100.00 %
	4 . Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	1	1	0	100.00 %
	5 . Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana	178,628	178,628	0	100.00 %
2 .	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)				100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	80.00 %
		Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	178,628	178,628	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang /	Jumlah Mutu Barang /	Jumlah Mutu Barang /	100.00 %
		Jasa Yang Dibutuhkan	Jasa Yang Tersedia	Jasa Yang Belum Tersedia	
	1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana	43	43	0	100.00 %
	2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)	4	4	0	100.00 %
3 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)				100.00 %
	Ya Terjadi Bencana				
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	80.00 %
		Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	38	38	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang /	Jumlah Mutu Barang /	Jumlah Mutu Barang /	100.00 %
		Jasa Yang Dibutuhkan	Jasa Yang Tersedia	Jasa Yang Belum Tersedia	



	1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	3	3	0	100.00 %
	2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	38	38	0	100.00 %
	3 . Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana	38	38	0	100.00 %
	4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas	2	2	0	100.00 %
	5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	38	38	0	100.00 %
KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR					
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3			-4
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM DAMKAR		TUNTAS PARIPURNA			100.00 %
1 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)				100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	80.00 %
		Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	42	42	0	100.00 %
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang /	Jumlah Mutu Barang /	Jumlah Mutu Barang /	100.00 %
		Jasa Yang Dibutuhkan	Jasa Yang Tersedia	Jasa Yang Belum Tersedia	
	1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi	28	28	0	100.00 %
	2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	2	2	0	100.00 %
	3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	32	32	0	100.00 %
	4 . Kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	10	10	0	100.00 %



4.5.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah.

- Untuk urusan Trantibum pada tahun anggaran 2022, melalui Satpol PP dan Damkar telah disediakan alokasi anggaran sebesar Rp 1,202,903,570 dan dapat direalisasikan sebesar 1,140,427,128 atau 94.81 %
- Untuk urusan Bencana pada tahun anggaran 2022, melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah disediakan alokasi anggaran sebesar Rp 1,173,537,568 dan dapat direalisasikan sebesar 767,528,000 atau 65.40 %



Tabel 4.26
Realisasi Capaian Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
(TRANTIBUM)

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KAB. HULU SUNGAI SELATAN				2,626,195,138	2,110,934,701	80.38 %
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)				1,202,903,570	1,140,427,128	94.81 %
	1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			1,125,074,520	1,099,927,128	97.76 %
		1	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	Kasus	10,000,000	9,960,000	99.60 %



		2	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Kasus	0	0	0%
		3	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		4	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen	0	0	0%
		5	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan	Orang	1,007,060,750	983,047,128	97.62 %



			tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia				
		6	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen	94,400,000	94,400,000	100.00 %
		7	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Unit	13,613,770	12,520,000	91.97 %
		8	Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Dokumen	0	0	0%
		9	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Laporan	0	0	0%
	2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			34,219,500	28,770,000	84.07 %
		1	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan	Laporan	11,742,500	11,400,000	97.08 %



			Peraturan Bupati/Wali Kota					
		2	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	0	0	0%	
		3	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	22,477,000	17,370,000	77.28 %	
	3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota			43,609,550	11,730,000	26.90 %	
		1	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Laporan	43,609,550	11,730,000	26.90 %	
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)				1,173,537,568	767,528,000	65.40 %	
	4	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				17,000,000	17,000,000	100.00 %
		1	Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%	
		2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	Orang	17,000,000	17,000,000	100.00 %	



	5	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			899,960,000	526,920,000	58.55 %
		1	Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		2	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	Orang	33,350,000	33,350,000	100.00 %
		3	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	104,400,000	104,400,000	100.00 %
		4	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Unit	0	0	0%
		5	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Dokumen	0	0	0%
		6	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kawasan	0	0	0%



		7	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota		378,700,000	8,700,000	2.30 %
		8	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	Orang	363,710,000	363,710,000	100.00 %
		9	Penyusunan rencana kontijensi	Dokumen	0	0	0%
		10	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	19,800,000	16,760,000	84.65 %
		11	Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	Dokumen	0	0	0%
		12	Pelatihan keluarga tanggap bencana alam		0	0	0%
	6	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			56,581,000	24,503,000	43.31 %
		1	Respon cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/wabah Zoonosis prioritas	Laporan	0	0	0%
		2	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	18,000,000	17,903,000	99.46 %
		3	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%



		4	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%	
		5	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Laporan	0	0	0%	
		6	Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit	Dokumen	38,581,000	6,600,000	17.11 %	
	7	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				199,996,568	199,105,000	99.55 %
		1	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%	
		2	Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%	
		3	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%	
		4	Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Dokumen	199,996,568	199,105,000	99.55 %	



		5	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Laporan	0	0	0%	
		6	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%	
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)				249,754,000	202,979,573	81.27 %	
	8	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				57,234,200	35,034,573	61.21 %
		1	Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%	
		2	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	30,131,200	14,634,573	48.57 %	
		3	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Laporan	0	0	0%	
		4	Penanganan bahan berbahaya dan beracun	Dokumen	0	0	0%	



			kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota				
		5	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit	0	0	0%
		6	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Dokumen	27,103,000	20,400,000	75.27 %
		7	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	Dokumen	0	0	0%
		8	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Unit	0	0	0%
		9	Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan,	Orang	0	0	0%



			penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran				
		10	Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga	Dokumen	0	0	0%
	9	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran			0	0	0.00 %
		1	Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	Laporan	0	0	0%
		2	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Laporan	0	0	0%
	10	Investigasi Kejadian Kebakaran			0	0	0.00 %
		1	Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Dokumen	0	0	0%
	11	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			192,519,800	167,945,000	87.24 %
		1	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui	Orang	192,519,800	167,945,000	87.24 %



			sosialisasi dan edukasi masyarakat				
		2	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran		0	0	0%
		3	Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana	Dokumen	0	0	0%
	12	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia			0	0	0.00 %
		1	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang penimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia	Laporan	0	0	0%
		2	Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan	Dokumen	0	0	0%



			manusia/penyelamatan dan evakuasi				
		3	Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Unit	0	0	0%
		4	Pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Laporan	0	0	0%



4.5.5 Dukungan Personel

Dukungan Personil Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kab. Hulu Sungai Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.28

Personil Menurut Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Tahun 2022

DATA PEGAWAI								
Kualifikasi Pendidikan								
SD	SLTP	SLTA	D I /D III	D IV	S-1	S-2	S-3	Jumlah
3	3	49	1	-	11	2	-	69
Kualifikasi Pangkat dan Golongan								
Golongan I		Golongan II		Golongan III		Golongan IV		Jumlah
5		38		23		3		69
Struktural					Fungsional Umum	Fungsional Tertentu	Jumlah	
Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Jumlah				

Sedangkan untuk bencana dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan bencana Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 4.44

Personil Badan Penanggulangan Bencana Kab.HSS Tahun 2022

Kualifikasi Pendidikan								
SD	SLTP	SLTA	D I /D III	D IV	S-1	S-2	S-3	Jumlah
-	1	6	3	-	2	1	-	13
Kualifikasi Pangkat dan Golongan								
Golongan I		Golongan II		Golongan III		Golongan IV		Jumlah
-		6		6		1		13
Struktural					Fungsional		Jumlah	
Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Jumlah	Tertentu	Umum		
-	1	1	-	2	6	5	13	



4.6 Bidang Urusan Sosial

Penerapan SPM Bidang Urusan Sosial di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai implementasi kebijakan dan strategi penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI dan dijadikan acuan dalam target pencapaiannya.

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.

SPM Bidang Urusan Sosial merupakan penjabaran dari target yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

SPM Bidang Urusan Sosial di Daerah Kabupaten/Kota mencakup 5 (lima) pelayanan dasar yaitu:

1. Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti:
2. Rehabilitasi sosial dasar Anak Terlantar di luar panti:
3. Rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti:
4. Rehabilitasi sosial dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti:
5. Perlindungan dan Jaminan sosial pada saat dan setelah



tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.

Kriteria penerima pelayanan dasar tersebut di atas, antara lain:

1. Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar dengan kriteria :
 - 1) Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya,
 - 2) Tidak terpelihara,
 - 3) Tidak terawat dan tidak terurus ;
 - 4) Masih ada perorangan, keluarga dan/atau masyarakat yang mengurus;
2. Tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis dengan kriteria :
 - 1) Perseorangan atau kepala keluarga berusia 19 - 60 tahun ;
 - 2) Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya ;
 - 3) Tidak terpelihara, tidak terawat dan tidak terurus
 - 4) Tidak memiliki tempat tinggal tetap;
 - 5) Masih ada perseorangan, keluarga, dan atau masyarakat yang peduli;
 - 6) Rehabilitasi dilakukan terhadap Kepala Keluarga, istri/ suami dan anaknya.
3. Perlindungan dan Jaminan sosial pada saat tanggap darurat per satu kali kejadian bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota dengan kriteria :
 - 1) Jumlah pengungs/penyintas sebanyak 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) orang;
 - 2) Dampak bencana meliputi 1 (satu) daerah kabupaten/kota; dan atau
 - 3) Adanya surat penetapan bencana dari bupati/wali



kota.

Adapun dasar hukum jenis Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial diatur dalam :

- a. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. Lampiran II Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Teknis Pembiayaan Pemenuhan Pelayanan, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana SPM Bidang Sosial di Daerah Kabupaten/Kota.

4.6.2 Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pengumpulan dan pengelolaan data melalui verifikasi dan validasi data PMKS/PPKS dan DTKS;

Data tersebut meliputi data penerima Pelayanan Dasar yang terdiri dari: Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis, serta Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah. Selengkapnya sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 4.45

Data PMKS/PPKS Hasil Validasi dan Verifikasi Tahun 2022

No	Jenis PMKS	Data Eksisting Tahun 2022	Keterangan
1	Disabilitas Terlantar	297	
2	Anak Terlantar	744	
3	Lansia Terlantar	948	
4	Gelandangan dan Pengemis	40	



No	Jenis PMKS	Data Eksisting Tahun 2022	Keterangan
5	Data Korban Bencana	350	

Sumber Data : Dinas Sosial Kab.HSS

Tabel 4.27

Target Capaian SPM Urusan Sosial Tahun 2022

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output
1	2	3
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		
1 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	Jumlah yang Harus Dilayani :	297
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
	1 . Layanan data dan pengaduan	297
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	1
	3 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	1
	4 . Penyediaan permakanan	297
	5 . Penyediaan sandang	7
	6 . Penyediaan alat bantu	77
	7 . Penyediaan perbekalan kesehatan	80
	8 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	29
	9 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas terlantar	297



	10 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	297
	11 . Akses ke layanan pendidikan	74
	12 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	9
	13 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	9
	14 . Layanan rujukan	9
	15 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	1
	JUMLAH	1,485
2 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	744
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	
		Jumlah yang harus dilayani
	1 . Layanan data dan pengaduan	744
	2 . Penyediaan permakanan	20
	3 . Penyediaan sandang	10
	4 . Penyediaan alat bantu	10
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan	744
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	20
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar	20
	8 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	744
	9 . Akses ke layanan pendidikan	744
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	10
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	10
	12 . Layanan rujukan	20



	13 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	1
	14 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	1
	15 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	1
	JUMLAH	3,099
3 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	948
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	
		Jumlah yang harus dilayani
	1 . Layanan data dan pengaduan	948
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	1
	3 . Penyediaan permakanan	948
	4 . Penyediaan sandang	205
	5 . Penyediaan alat bantu	51
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan	5
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	848
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	848
	9 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	948
	10 . Akses ke layanan pendidikan	948



	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	3
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	3
	13 . Layanan rujukan	5
	14 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	1
	15 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	1
	JUMLAH	5,763
4 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	40
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	
		Jumlah yang harus dilayani
	1 . Layanan data dan pengaduan	40
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	1
	3 . Penyediaan permakanan	40
	4 . Penyediaan sandang	40
	5 . Penyediaan alat bantu	40
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan	40
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	70
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas gelandangan dan pengemis terlantar	40



	9 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Dan/Atau Kartu Identitas Anak	110
	10 . Akses ke layanan pendidikan	23
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	40
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	40
	13 . Layanan rujukan	11
	14 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	1
	15 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	1
	JUMLAH	537
5 .	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
		Ya Terjadi Bencana
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	Jumlah yang Harus Dilayani :	350
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	
		Jumlah yang harus dilayani
	1 . Penyediaan permakanan	350
	2 . Penyediaan sandang	350
	3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi	1
	4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan	167
	5 . Pelayanan dukungan Psikososial	350

4.6.3 Realisasi

Realisasi capaian urusan Sosial dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 4.28
Realisasi capaian urusan Sosial

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3			-4
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM				100.00 %
1 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti				100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	80.00 %
		Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	297	297	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100.00 %
		-1	-2	-3	
	1 . Layanan data dan pengaduan	297	297	0	100.00 %
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	1	1	0	100.00 %
	3 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	1	1	0	100.00 %
	4 . Penyediaan permakanan	297	297	0	100.00 %
	5 . Penyediaan sandang	7	7	0	100.00 %
	6 . Penyediaan alat bantu	77	77	0	100.00 %
	7 . Penyediaan perbekalan kesehatan	80	80	0	100.00 %
	8 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	29	29	0	100.00 %
	9 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas terlantar	297	297	0	100.00 %
	10 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	297	297	0	100.00 %
	11 . Akses ke layanan pendidikan	74	74	0	100.00 %
	12 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	9	9	0	100.00 %



	13 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	9	9	0	100.00 %
	14 . Layanan rujukan	9	9	0	100.00 %
	15 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	1	1	0	100.00 %
	JUMLAH	1,485	1,485	0	1,500.00 %
2 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti				100.00 %
		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	80.00 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	744	744	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	
		-1	-2	-3	100.00 %
	1 . Layanan data dan pengaduan	744	744	0	100.00 %
	2 . Penyediaan permakanan	20	20	0	100.00 %
	3 . Penyediaan sandang	10	10	0	100.00 %
	4 . Penyediaan alat bantu	10	10	0	100.00 %
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan	744	744	0	100.00 %
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	20	20	0	100.00 %
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar	20	20	0	100.00 %
	8 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	744	744	0	100.00 %
	9 . Akses ke layanan pendidikan	744	744	0	100.00 %
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	10	10	0	100.00 %
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	10	10	0	100.00 %
	12 . Layanan rujukan	20	20	0	100.00 %
	13 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	1	1	0	100.00 %



	14 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	1	1	0	100.00 %
	15 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	1	1	0	100.00 %
	JUMLAH	3,099	3,099	0	1,500.00 %
3 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti				100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	80.00 %
		Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	948	948	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100.00 %
		-1	-2	-3	
	1 . Layanan data dan pengaduan	948	948	0	100.00 %
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	1	1	0	100.00 %
	3 . Penyediaan permakanan	948	948	0	100.00 %
	4 . Penyediaan sandang	205	205	0	100.00 %
	5 . Penyediaan alat bantu	51	51	0	100.00 %
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan	5	5	0	100.00 %
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	848	848	0	100.00 %
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	848	848	0	100.00 %
	9 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	948	948	0	100.00 %
	10 . Akses ke layanan pendidikan	948	948	0	100.00 %
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	3	3	0	100.00 %



	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	3	3	0	100.00 %
	13 . Layanan rujukan	5	5	0	100.00 %
	14 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	1	1	0	100.00 %
	15 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	1	1	0	100.00 %
	JUMLAH	5,763	5,763	0	1,500.00 %
4 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti				100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	80.00 %
		Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	40	40	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100.00 %
		-1	-2	-3	
	1 . Layanan data dan pengaduan	40	40	0	100.00 %
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	1	1	0	100.00 %
	3 . Penyediaan permakanan	40	40	0	100.00 %
	4 . Penyediaan sandang	40	40	0	100.00 %
	5 . Penyediaan alat bantu	40	40	0	100.00 %
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan	40	40	0	100.00 %
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	70	70	0	100.00 %
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas gelandangan dan pengemis terlantar	40	40	0	100.00 %
	9 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Dan/Atau Kartu Identitas Anak	110	110	0	100.00 %



	10 . Akses ke layanan pendidikan	23	23	0	100.00 %
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	40	40	0	100.00 %
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	40	40	0	100.00 %
	13 . Layanan rujukan	11	11	0	100.00 %
	14 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	1	1	0	100.00 %
	15 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	1	1	0	100.00 %
	JUMLAH	537	537	0	1,500.00 %
5 .	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				100.00 %
		Ya Terjadi Bencana			
		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	80.00 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	350	350	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	
		-1	-2	-3	100.00 %
	1 . Penyediaan permakanan	350	350	0	100.00 %
	2 . Penyediaan sandang	350	350	0	100.00 %
	3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi	1	1	0	100.00 %
	4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan	167	167	0	100.00 %
	5 . Pelayanan dukungan Psikososial	350	350	0	100.00 %



4.6.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran tahun 2022 di Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal urusan Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel. 4.29
Realisasi Anggaran SPM Urusan Sosial Tahun 2022

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				8,115,988,600	0	0.00 %
	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial K20220131040736			8,052,624,600	0	0.00 %
		1	Penyediaan permakanaan	Orang	6,808,666,300	0	54.19 %
		2	Penyediaan sandang	Orang	0	0	0%
		3	Penyediaan alat bantu	Orang	46,600,000	0	0%
		4	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	0	0	0%



LPPD Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

		5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang	108,076,950	0	28.85 %
		6	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Orang	20,584,750	0	9.11 %
		7	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	0	0	0%
		8	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	504,239,650	0	5.95 %
		9	Pemberian layanan data dan pengaduan	Orang	0	0	0%
		10	Pemberian layanan kedaruratan	Orang	0	0	0%
		11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	0	0	0%
		12	Pemberian layanan rujukan	Dokumen	564,456,950	0	16.31 %
	JUMLAH INDIKATOR				8,052,624,600	0	0.00 %



	2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota K20220131040943			63,364,000	0	0.00 %
		1	Penyediaan makanan	Orang	32,000,000	0	97.50 %
		2	Penyediaan sandang	Orang	31,364,000	0	100.00 %
		3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	0	0	0%
		4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	0	0	0%
		5	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				63,364,000	0	0.00 %
	JUMLAH PROGRAM				8,115,988,600	0	0.00 %
KEGIATAN LAINNYA							



PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA							
2							
		1.	Pemberian Layanan Kedaruratan		386,316,900	52,675,000	13.64 %
		2.	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial		0	0	0%
		3.	Pemberian layanan rujukan		24,682,350	5,450,000	22.08 %
		4.	Koordinasi, Sosialisasi, dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		394,856,000	68,100,000	17.25 %



4.6.5 Dukungan Personil

Dukungan Personil Urusan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.55
Personil menurut kualifikasi Pendidikan,
Pangkat dan golongan

DATA PEGAWAI								
Kualifikasi Pendidikan								
SD	SLTP	SLTA	D I /D III	D IV	S-1	S-2	S-3	Jumlah
-	-	11	2	-	12	2	-	27
Kualifikasi Pangkat dan Golongan								
Golongan I		Golongan II		Golongan III		Golongan IV	Jumlah	
-		4		19		4	27	
Struktural					Fungsional		Jumlah	
Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Jumlah				
-	1	4	-	5	22		27	

4.6.6 Permasalahan dan Solusi

▪ Permasalahan

1. Penyediaan Data dilakukan melalui data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosil (PSKS) yang dikumpulkan oleh Tenaga Keejahteraan Sosial Kecamatan belum terdata untuk tahun 2022
2. Perhitungan kebutuhan disesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia dan menyesuaikan persediaan bantuan tanggap darurat bencana yang masih ada pada stock opname. Untuk penyediaan sandang pada tahun 2022 belum diakomodir dengan APBD Kabupaten karena



adanya barang bantuan tanggap darurat dari Kementerian Sosial

3. Perencanaan dan penganggaran dilaksanakan dengan memaksimalkan pagu anggaran daerah yang tersedia tetapi untuk pelaksanaan SPM khususnya dibidang sosial, proses perencanaan dan penganggaran belum optimal dan belum berfokus pada target sasaran SPM dan indikator SPM atau dengan kata lain masih bersifat umum dan tidak terfokus sehingga belum semua kebutuhan untuk pemenuhan SPM dapat dianggarkan. Pada tahun selanjutnya akan kami fokuskan secara khusus perencanaan dan penganggaran terkait SPM melalui matrik perencanaan yang kami buat sehingga KPM dapat terlayani dengan baik dan maksimal. Kesulitan ini adalah dampak dari masa transisi dan penyesuaian terhadap Permendagri 90, kami terus berupaya agar pemetaan dan sinkronisasi kegiatan dapat berjalan optimal sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku.
4. Belum adanya kendaraan khusus roda empat (operasional) untuk layanan Rehabilitasi Sosial Dasar diluar Panti.
5. Untuk tahun anggaran 2022 terjadi kesalahan pemetaan kegiatan khusus terkait penanganan bencana sehingga belum dapat dilakukan entry pada capaian realisasi kegiatan SPM pada aplikasi sesuai dengan indikator SPM yang seharusnya. Namun pelaksanaan SPM bidang Sosial khususnya penanganan bencana tetap terlaksana dengan baik. Untuk indikator SPM yang masih 0% karena tidak adanya penganggaran ataupun perencanaan maka akan



terus kami lakukan evaluasi demi perbaikan layanan SPM khususnya bidang Sosia pada Dinas Sosial. Dan untuk Pagu dan Realisasi Anggaran pada pelaksanaan SPM tahun 2022 belum terpilah spesifik berdasarkan Bidang SPM yang ditangani dan hal ini tentu akan kami perbaiki ditahun-tahun mendatang.

▪ **Solusi**

1. Melakukan perbaikan dengan melakukan pengumpulan data terkait PPKS yang menjadi target layanan SPM pada tahun 2022
2. Perlu dianggarkan untuk pembelian kendaraan Roda empat untuk Rehabilitasi di laur Panti



BAB V

KESIMPULAN

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 ini merupakan manifestasi laporan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai realisasi dari dokumen perencanaan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022. Uraian yang disusun berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara operasional dilaksanakan oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) menurut bidang urusannya masing-masing sehingga LPPD pada hakikatnya merupakan laporan SKPD dalam menjalankan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

LPPD yang disampaikan ini telah menyajikan seluruh pelaksanaan urusan desentralisasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah baik itu urusan wajib pelayanan Dasar (SPM), urusan wajib non pelayanan dasar maupun urusan pilihan, tugas pembantuan, tugas umum pemerintahan serta capaian kinerja makro serta indikator Kinerja Kunci (IKK) *Outcome* dan



Output sebagai capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar dan urusan pilihan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2022, dimana secara umum seluruhnya dapat direalisasikan dengan baik. Namun demikian, masih perlu upaya-upaya yang lebih maksimal untuk dapat menjawab berbagai tantangan yang dihadapi kedepan seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat tentang hak-haknya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.